RPJMD KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2025-2029





SALINAN

BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6944);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli selatan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 289, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Lokasi Kawasan Perkotaan Batang Toru Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 308);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 Nomor 331, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 51);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Dan

BUPATI TAPANULI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepada daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urusan pilihan, dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berpedoman pada RPJP Nasional.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan, serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II
ASAS PENYUSUNAN
Pasal 2

RPJM Daerah disusun berdasarkan asas:

a. keterbukaan;
b. partisipatif;
c. responsif; dan
d. tanggap terhadap perubahan

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

(1) Maksud Penyusunan RPJM Daerah ini adalah untuk menyediakan pedoman resmi bagi Pemerintah Daerah, DPRD, swasta dan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan.
(2) Tujuan Penyusunan RPJM Daerah adalah :
    a. menjadi pedoman resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai APBD dan sumber pembiayaan lainnya yang sah;
    b. menjadi tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan daerah/PD;
    c. memberikan gambaran umum kondisi daerah terkini dalam konstelasi regional dan nasional;

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 4

(1) RPJM Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. BAB I PENDAHULUAN
b. BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH
c. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
d. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
e. BAB V PENUTUP

(2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pda ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Pasal 5

RPJM Daerah ini merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah Kabupaten yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati periode 2025-2029 yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, dan program Perangkat
Daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

Pasal 6

RPJM Daerah menjadi acuan dalam penyusunan Renstra PD dan Renja PD

Pasal 7

Renstra PD menjadi acuan dalam penyusunan Renja PD dengan memperhatikan RPJM Daerah.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

(1) Bupati melalui Kepala Bappeda melakukan Pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan RPJM Daerah yang dituangkan kedalam Renstra PD.
(2) Pemantauan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan suvervisi dan tindaklanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program kegiatan sesuai kebijakan pembangunan daerah.
(3) Bappeda wajib melaporkan hasil pemantauan dan pengendalian pelaksanaan RPJM Daerah kepada Bupati
(4) PD dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappeda dalam penyusunan Renstra PD.

BAB VII

EVALUASI

Pasal 9

Bupati melalui Bappeda melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 10

(1) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh PD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan PD yang terdiri dari :
    a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
    b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi PD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
(2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 312, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 38) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI TAPANULI SELATAN,

ttd;

GUS IRAWAN PASARIBU

diundangkankan di Sipirok
pada tanggal 19 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

ttd;

SOFYAN ADIL, SP, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 332

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG RENCANA PEMABANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2025-2029 :
(2-67 / 2025)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PARLAUNGAN DALIMUNTHE, SH
NIP. 19690721 199803 1 004

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing–masing. Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama, serta menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sedangkan pada Pasal 263 ayat (3) dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Sebagai suatu produk perencanaan, RPJMD tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 52

- DAFTAR ISI -

DAFTAR ISI			**I**
BAB I	**PENDAHULUAN**		**I-1**
	1.1.	Latar Belakang	I-1
	1.2.	Dasar Hukum Penyusunan	I-4
	1.3.	Hubungan Antar Dokumen	I-8
	1.4.	Maksud dan Tujuan	I-14
	1.5.	Sistematika Penulisan	I-15
BAB II	**GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**		**II-1**
	2.1.	Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-2
	2.2	Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	II-88
BAB III	**VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**		**III-1**
	3.1.	Visi dan Misi	III-1
	3.2.	Program Prioritas Pembangunan	III-26
BAB IV	**PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**		**IV-1**
	4.1.	Program Perangkat Daerah	IV-1
	4.2.	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	IV-4
BAB V	**PENUTUP**		
	5.1.	PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL -

Tabel	II.1.	Administrasi Kabupaten Tapanuli Selatan	II-3
Tabel	II.2.	Ketinggian Lahan Kabupaten Tapanuli Selatan Menurut Kecamatan	II-5
Tabel	II.3.	Potensi Sumber Energi Alternatif berdasarkan Desa/Sungai Kabupaten Tapanuli Selatan	II-7
Tabel	II.4.	Potensi Sumber Energi Alternatif menurut Pembangkit Listrik Kabupaten Tapanuli Selatan	II-8
Tabel	II.5.	Luas Daerah Aliran Sungai Kabupaten Tapanuli Selatan	II-9
Tabel	II.6.	Sungai Utama yang Melalui Kabupaten Tapanuli Selatan	II-10
Tabel	II.7.	Kondisi Ketersediaan Debit Air Andalan Berdasarkan Nama Sungai Kabupaten Tapanuli Selatan	II-11
Tabel	II.8.	Kondisi Tutupan Lahan Kabupaten Tapanuli Selatan	II-13
Tabel	II.9.	Potensi Sumber Daya Air Kabupaten Tapanuli Selatan	II-14
Tabel	II.10.	Perkembangan Tingkat Morbiditas Penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan 2020-2024	II-23
Tabel	II.11.	Perkembangan Sarana Kesehatan di Kabupaten Tapanuli Selatan	II-24
Tabel	II.12.	Perkembangan Jumlah Pasangan Usia Subur, Akseptor KB dan Jumlah Klinik KB di Kabupaten Tapanuli Selatan	II-25
Tabel	II.13.	Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Penyusunnya Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2023	II-27
Tabel	II.14.	Perbandingan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Kab/Kota di Kawasan Tapanuli Bagian Selatan	II-28
Tabel	II.15.	Struktur Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024	II-37
Tabel	II.16.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024	II-38
Tabel	II.17.	Pertumbuhan Ekonomi dan Konstribusi Sektor Pertanian Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024	II-39
Tabel	II.18.	Potensi Peternakan Kabupaten Tapanuli Selatan	II-40
Tabel	II.19.	Sentra dan Kawasan Pengembangan Komoditi Perkebunan Kabupaten Tapanuli Selatan	II-41
Tabel	II.20.	Potensi Bahan Galian Logam Kabupaten Tapanuli	II-43

Selatan
Tabel II.21. Perkiraan Potensi Bahan Galian Logam Potensi Bahan Galian C (Batuan) Kabupaten Tapanuli Selatan II-44
Tabel II.22. Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota Tapanuli Bagian Selatan. II-50
Tabel II.23. Persentase Gini Ratio Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota Tapanuli Bagian Selatan II-52
Tabel II.24. Jumlah Penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2045 II-59
Tabel II.25. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2045 II-60
Tabel II.26. Tabel Jumlah Sarana dan Prasarana Sekolah Di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 II-76
Tabel II.27. Rencana Sistem Perkotaan Kabupaten Tapanuli Selatan II-82
Tabel II.28. Rencana Sistem Perkotaan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2037 II-82
Tabel II.29. Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024 II-89
Tabel II.30. Skala Interval Otonomi Fiskal II-126
Tabel II.31. Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, Tahun 2020-2024 II-127
Tabel II.32. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024 II-133
Tabel II.33. Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024 II-136
Tabel II.34. Rata-Rata Pertumbuhan APBD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024 II-138
Tabel II.35. Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 – 2024 II-141
Tabel II.36. Rasio Lancar Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 – 2024 (dalam Jutaan) II-145
Tabel II.37. Rasio Lancar Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 – 2024 (dalam Jutaan) II-146
Tabel II.38. Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 – 2024 (dalam Jutaan) II-147
Tabel II.39. Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 – 2024 (dalam Jutaan) II-148
Tabel II.40. Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020– 2024 (dalam Jutaan) II-149
Tabel II.41. Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan) II-150
Tabel II.42. Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas (dalam Jutaan) II-151
Tabel II.43. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan) II-153

Tabel	II.44.	Nilai Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)	II-154
Tabel	II.45.	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)	II-155
Tabel	II.46.	Kondisi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026-2030	II-160
Tabel	II.47.	Proyeksi Belanja Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026-2030 (dalam jutaan)	II-164
Tabel	II.48.	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026-2030 (dalam jutaan)	II-165
Tabel	II.49.	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah (dalam jutaan)	II-166
Tabel	II.50.	Tabel sarana dan prasaran Pendidikan di kabupaten Tapanuli Selatan	II-192
Tabel	II.51.	Kajian Resiko Bencana Di Tapanuli Selatan	II-193
Tabel	II.52.	Hubungan Misi RPJPD, Permasalahan Pokok dan Permasalahan Pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan	II-195
Tabel	II.53.	Teknik menyimpulkan Isu Strategis Daerah pada Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029	II-240
Tabel	III.1.	Sasaran Utama Kabupaten Tapanuli Selatan 2025-2029	III-4
Tabel	III.2.	Indikator Sasaran Utama Kabupaten Tapanuli Selatan 2025-2029	III-4
Tabel	III.3.	Keterkaitan Misi pada RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029 dengan Misi pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029	III-9
Tabel	III.4.	Keselarasan Kebijakan dan Strategi RTRW Tahun 2017-2037 dengan Misi RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 – 2029	III-12
Tabel	III.5.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029	III-15
Tabel	III.6.	Keterkaitan misi, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tapanuli Selatan	III-29
Tabel	III.7.	Penahapan Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029	III-52
Tabel	III.8.	Keterkaitan arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029 dengan Program Prioritas	III-65
Tabel	III.9.	Keterkaitan Misi dengan Arah kebijakan RPJMD	III-71

Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029
Tabel III.10. Sinkronisasi Kegiatan Prioritas Nasional dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Tapanuli Selatan. III-80
Tabel IV.1. Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2030 IV-2
Tabel IV.2. Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029. IV-3
Tabel IV.3. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029. IV-148
Tabel IV.4. Tabel indikator kinerja Utama Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. IV-149
Tabel IV.5. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. IV-152

- DAFTAR GRAFIK -

Grafik	II.1.	Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan Kabupaten Tapanuli Selatan, Tahun 2024	II-12
Grafik	II.2.	Angka Harapan Hidup Kabupaten Tapanuli Selatan, Tahun 2020-2024	II-22
Grafik	II.3.	Perkembangan Perbandingan antara target dan realisasi IPM pada RPJMD, Tahun 2020-2024	II-27
Grafik	II.4.	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapanuli Selatan, Tahun 2020-2024	II-28
Grafik	II.5.	Rata-rata pertumbuhan indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan kab/kota di kawasan Tapanuli Bagian Selatan	II-29
Grafik	II.6.	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tapanuli Selatan, Tahun 2020-2024	II-30
Grafik	II.7.	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tapanuli Selatan, Tahun 2020-2024	II-32
Grafik	II.8	Angka Kriminalitas Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2023	II-33
Grafik	II.9	Perkembangan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapanuli Selatan Periode Tahun 2020-2024	II-36
Grafik	II.10	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara Dan Nasional Tahun 2020-2024	II-36
Grafik	II.11	Struktur Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024	II-37
Grafik	II.12	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024	II-48
Grafik	II.13	Perkembangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024	II-49
Grafik	II.14	Perkembangan persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten/kota Tapanuli Bagian Selatan	II-51
Grafik	II.15	Perkembangan Gini Rasio di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024	II-52

Grafik	II.16	*Persentase Gini Ratio Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota Tapanuli Bagian Selatan*	II-53
Grafik	II.17	Perkembangan Pendapatan dan Pengeluaran Perkapita Masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024	II-55
Grafik	II.18	Perkembangan Pengeluaran Perkapita dan Garis Kemiskinan Kabupaten Tapanuli Selatan, Tahun 2020-2024	II-56
Grafik	II.19	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024	II-58
Grafik	II.20	Jumlah Penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan, Tahun 2025-2045	II-59
Grafik	II.21	Perkembangan Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap Kabupaten Tapanuli Selatan, Tahun 2020-2024	II-61
Grafik	II.22	Perkembangan Irigasi Dalam Kondisi Baik Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024	II-62
Grafik	II.23	Kondisi Perumahan dan Infrastruktur Penunjangnya Kabupaten Tapanuli Selatan	II-65
Grafik	II.24	Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan gender Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024	II-73
Grafik	II.25	Perkembangan Penanganan Sampah di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024	II-75
Grafik	IV.3	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Tahun 2023	II.174
Grafik	IV.4	Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Tahun 2023	II.175
Grafik	IV.5	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Tahun 2024	II.176
Grafik	IV.6	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Tahun 2024	II.178
Grafik	IV.7	Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Tahun 2023	II.179
Grafik	IV.8	Perkembangan Angka Pengangguran dan Angka Kemiskinan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024	II.182

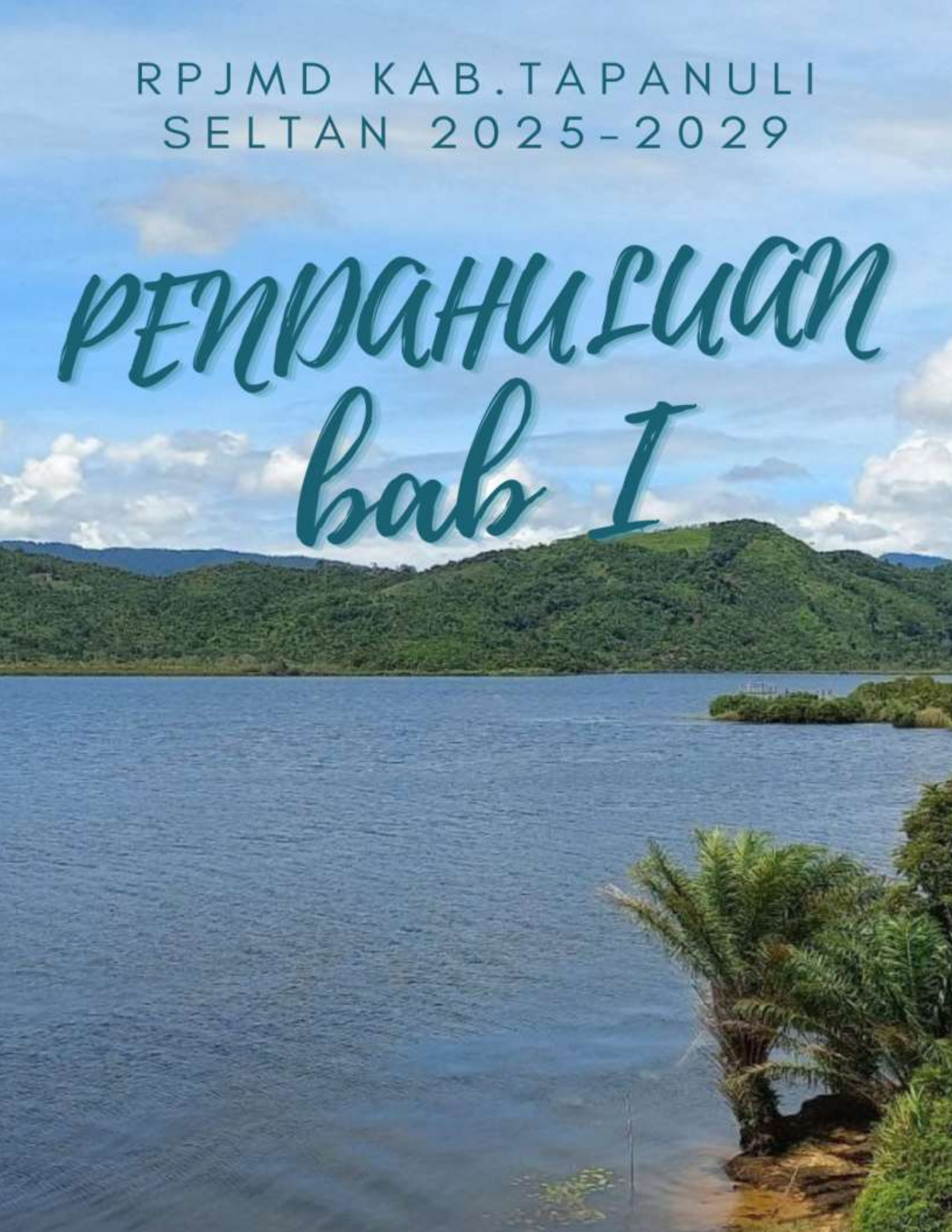
- DAFTAR GAMBAR -

Gambar	I.1.	Hubungan RPJMD Tapanuli Selatan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-10
Gambar	I.2.	Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-11
Gambar	II.1	Perkembangan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024 (dalam juta)	II.128
Gambar	II.2	Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024 (dalam jutaan)	II.130
Gambar	II.3	Keterkaitan Permasalahan Utama dengan Permasalahan Pokok Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029	II.170
Gambar	II.4	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Tahun 2024 (Metode Lama)	II.172
Gambar	II.5	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Tahun 2023 (Metode Baru)	II.173
Gambar	II.6	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Tahun 2023	II.174
Gambar	II.7	Usia Harapan Hidup Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Tahun 2023	II.175
Gambar	II.8	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Tahun 2024	II.176
Gambar	II.9	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Tahun 2024	II.178
Gambar	II.10	Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Tahun 2023	II.179
Gambar	II.11	Angka Pengangguran beberapa Kabupaten/kota tahun 2020-2024	II.181
Gambar	II.12	Perkembangan Angka Pengangguran dan Angka Kemiskinan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024	II.182
Gambar	II.13	Persentase Angkatan Kerja Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023	II.183

Gambar	II.14	Rasio Elektrifikasi Listrik PLN Kabupaten/Kota se Tapanuli Bagian Selatan Utara Tahun 2024	II.185
Gambar	II.15	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sanitasi Layak Kabupaten/Kota se Sumatera Utara Tahun 2023	II.186
Gambar	II.16	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak Kabupaten/Kota se Sumatera Utara Tahun 2023	II.188
Gambar	II.17	Permasalahan Pembangunan Kota Padangsidimpuan	II.211
Gambar	III.1	Hubungan Antar Visi dan Misi Kabupaten Tapanuli Selatan	III.8
Gambar	IV.16	Fokus atau tema pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029	III-44

RPJMD KAB.TAPANULI SELTAN 2025-2029

PENDAHULUAN
bab I



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Tapanuli Selatan berada di wilayah administratif Provinsi Sumatera Utara, Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan berkedudukan di Sipirok. Kabupaten Tapanuli Selatan terletak di antara Kota Medan (ibu kota Provinsi Sumatera Utara) dan Padang (ibukota Sumatera Barat). Pembangunan daerah Tapanuli Selatan telah dilaksanakan selama beberapa periode, berbagai capaian pembangunan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Tapanuli Selatan. Pembangunan yang diselenggarakan disuatu daerah ditujukan untuk membuat kondisi yang lebih baik bagi masyarakat dan wilayahnya. Sehingga pembangunan harus menguntungkan masyarakat dan menguntungkan wilayah sebagai suatu kesatuan lingkungan hidup. Dengan ini artinya, masyarakat dan wilayah sebagai suatu kesatuan lingkungan hidup merupakan konsumen pembangunan.

Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan wilayah sebagai satu kesatuan lingkungan hidup. Hal ini ditandai dengan masyarakat yang terlayani baik, mempunyai aktivitas dan kehidupan yang berlangsung teratur dan sumber daya manusia yang semakin berkualitas disertai lingkungan hidup yang terpelihara dengan baik. Pembangunan daerah adalah suatu proses untuk membawa kehidupan masyarakat yang lebih baik, secara berkesinambungan guna mencapai harapan yang dicita-citakan. Perencanaan memberikan arah dan fokus dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dengan perencanaan yang baik dan tepat akan menjadi pedoman dalam mengatur strategi pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan dan kemajuan daerah.

Pada Tahun 2024 Indonesia kembali melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Pilkada tersebut akan dilaksanakan di 38 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, salah satunya Kabupaten Tapanuli Selatan. Agenda politik ini dilaksanakan sebagai konsekuensi diterapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada pasal 201 ayat 8 disebutkan pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024, menjadi momentum adanya pergantian atau estafet kepemimpinan dalam pembangunan daerah dan Bupati Tapanuli Selatan dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan yaitu H.Gus Irawan Pasaribu, SE.,Ak.,MM.,CA dan H. Jafar Syahbuddin Ritonga.,DBA dilantik pada 20 Februari 2025.

Kabupaten Tapanuli Selatan akan memasuki periode pembangunan tahun 2025-2029. Calon pemimpin daerah yang terpilih diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan terlebih dahulu dirumuskan RPJMD dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik, sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 47 ayat (1) yang mengamanatkan bahwa Penyusunan RPJMD dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik.

Berdasarkan pasal 47 ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Penyusunan RPJMD mencakup:

a. penjabaran visi dan misi Kepala Daerah;
b. perumusan tujuan dan sasaran;
c. perumusan strategi dan arah kebijakan;
d. perumusan program pembangunan Daerah;
e. perumusan program Perangkat Daerah; dan

f. KLHS.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029, perlu diikuti penyusunan Ranwal Renstra Perangkat Daerah. Hal ini perlu dilakukan untuk integrasi dan keselarasan antara dokumen RPJMD dengan Renstra. Dengan menyikapi hal ini lebih awal akan memudahkan penyelarasan terkait data dan informasi, permasalahan dan kebijakan dalam dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Sehingga dokumen perencanaan yang disusun mempunyai harmonisasi yang seirama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Dengan terbitnya Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa untuk menjamin agar pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran, diperlukan perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Suatu perencanaan pembangunan diwujudkan dalam dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk melakukan evaluasi dan analisis pendahuluan atas kinerja pembangunan, kapasitas keuangan daerah, permasalahan pembangunan dan isu strategis sehingga dihasilkan arahan kebijakan pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk RPJMD.Teknokratik RPJMD menjadi salah satu upaya untuk membantu Bappeda dalam menyusun RPJMD, dimana Teknokratik RPJMD disusun pada tahun 2024 yang lalu. Sehingga setelah Bupati dan wakil bupati terpilih maka Dokumen Teknokratik RPJMD tahun 2025-2029 akan disesuaikan dengan berbagai kebijakan visi, misi, tujuan, sasaran hingga program kegiatan pembangunan yang lebih berkualitas dan relevan pada pelaksanaan pembangunan lima tahun mendatang sesuai dengan yang telah dirumuskan oleh Bupati dan wakil bupati terpilih.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025–2029 didasari oleh kebutuhan untuk menjawab berbagai kondisi aktual dan tantangan strategis pembangunan daerah secara komprehensif. Kabupaten Tapanuli Selatan saat ini menghadapi dinamika pembangunan yang kompleks, baik dari aspek sosial, ekonomi, lingkungan hidup, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, hingga daya saing wilayah.

Dari aspek sosial, Kabupaten Tapanuli Selatan masih dihadapkan pada ketimpangan akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, khususnya di wilayah pedalaman dan terpencil. Angka kemiskinan dan pengangguran terbuka masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan, seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang belum merata.

Secara ekonomi, struktur perekonomian daerah masih didominasi oleh sektor primer seperti pertanian dan pertambangan, yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas. Sementara itu, sektor industri pengolahan dan jasa belum berkembang optimal sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tingkat investasi yang masuk juga masih rendah karena keterbatasan infrastruktur dan daya dukung wilayah.

Pada dimensi lingkungan hidup, tekanan terhadap sumber daya alam dan degradasi lingkungan akibat eksploitasi yang tidak terkendali masih menjadi tantangan besar. Perubahan iklim, bencana hidrometeorologi, dan pengelolaan sampah yang belum optimal turut memperburuk kualitas lingkungan dan mengancam keberlanjutan pembangunan.

Di sisi infrastruktur, terdapat kesenjangan antarwilayah dalam hal konektivitas jalan, akses energi, dan jaringan telekomunikasi. Keterbatasan infrastruktur dasar menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan publik dan memperlambat pertumbuhan ekonomi lokal.

Aspek daya saing daerah juga masih perlu ditingkatkan melalui penguatan inovasi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemanfaatan

potensi lokal secara optimal dan berkelanjutan. Kemampuan daerah dalam mengadopsi teknologi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan ekosistem usaha yang kondusif masih belum maksimal.

Dalam hal tata kelola pemerintahan, upaya reformasi birokrasi masih menghadapi tantangan pada aspek integritas, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan publik. Kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pembangunan perlu terus diperkuat agar pembangunan daerah berjalan lebih terarah dan berdampak luas. Sejumlah isu strategis lainnya, seperti urbanisasi, ketimpangan pembangunan antarwilayah, ketahanan pangan dan energi, serta penguatan peran perempuan dan kelompok rentan, turut menjadi perhatian utama dalam perencanaan jangka menengah

RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025–2045. RPJMD ini tidak hanya memuat arah kebijakan pembangunan dan prioritas program daerah, tetapi juga menjadi dasar dan acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis perangkat daerah, rencana kerja tahunan, serta perjanjian kinerja yang sejalan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih.

Dalam penyusunan RPJMD ini, Pemerintah Kabupaten

Tapanuli Selatan juga berkomitmen melakukan pembangunan yang berkelanjutan dengan melakukan pengintegrasian muatan-muatan KLHS RPJMD 2025-2029 untuk Dokumen RPJMD memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam RPJMD 2025-2029 yang mempedomani Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan instrumen yang memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian TPB dalam

penyusunan RPJMD dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025–2029 juga memperhatikan prinsip pembangunan responsif gender, guna memastikan setiap kebijakan dan program mampu menjawab kebutuhan laki-laki dan perempuan secara adil dan proporsional. Dan Sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025–2029 akan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan yang inklusif, partisipatif, berkelanjutan, dan responsif gender. Responsivitas gender menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa pembangunan menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan setara, baik laki-laki maupun perempuan.

Dengan demikian, RPJMD menjadi instrumen penting untuk menyatukan langkah dan komitmen seluruh pemangku kepentingan daerah dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029 disusun atas dasar peraturan perundangan-undangan yang berlaku yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6944);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 180);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli selatan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 289, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Lokasi Kawasan Perkotaan Batang Toru Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 308);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 Nomor 331, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 51);

1.3. Hubungan Antardokumen

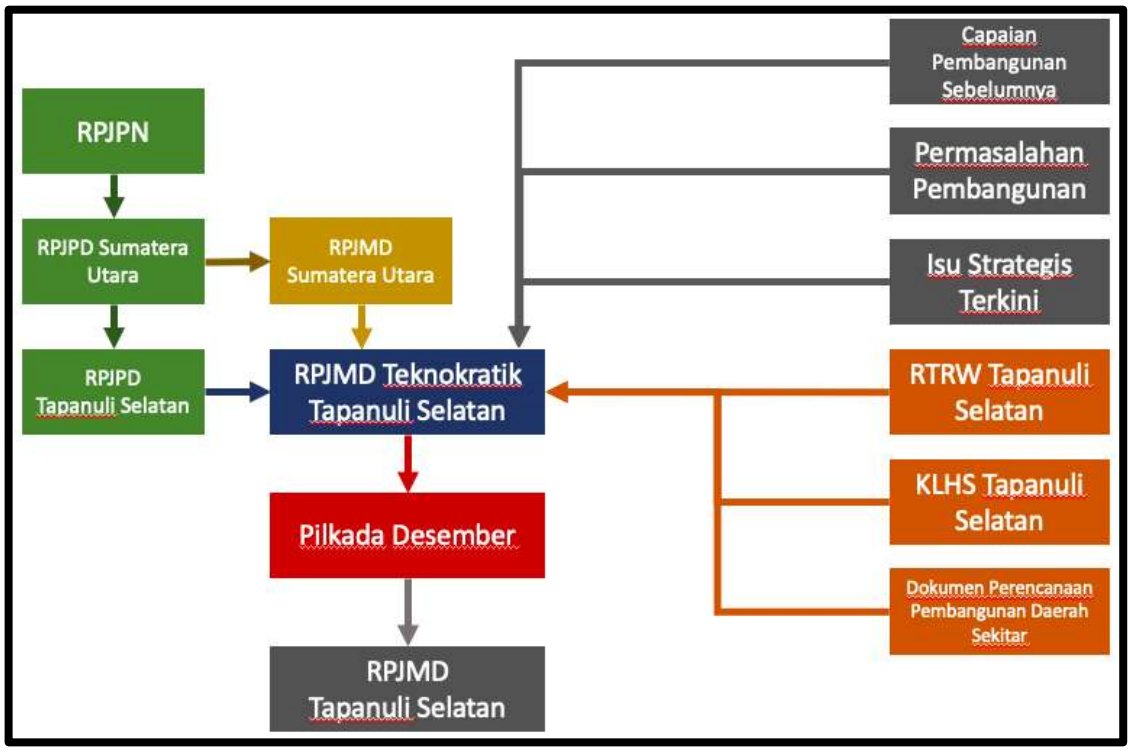
RPJMD ini disesuaikan dengan visi dan misi Bupati terpilih hasil pilkada serentak tahun 2024 untuk periode 2025-2029. Dalam penyusunannya, RPJMD menjadi bagian awal dari penyusunan RPJMD yang harus selalu terintegrasi dengan perencanaan penganggaran daerah. Hal tersebut untuk mengefisiensikan kemampuan pendanaan daerah dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan agar program prioritas yang dipilih dapat optimal dalam mencapai tujuan pembangunan. Dokumen RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029 memiliki hubungan dan tidak terlepas dengan dokumen perencanaan lainnya. Hal ini dikarenakan perencanaan pembangunan akan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan sehingga perlu adanya sinkronisasi kebijakan dengan dokumen perencanaan lain

yang relevan. Adapun hubungan dokumen RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

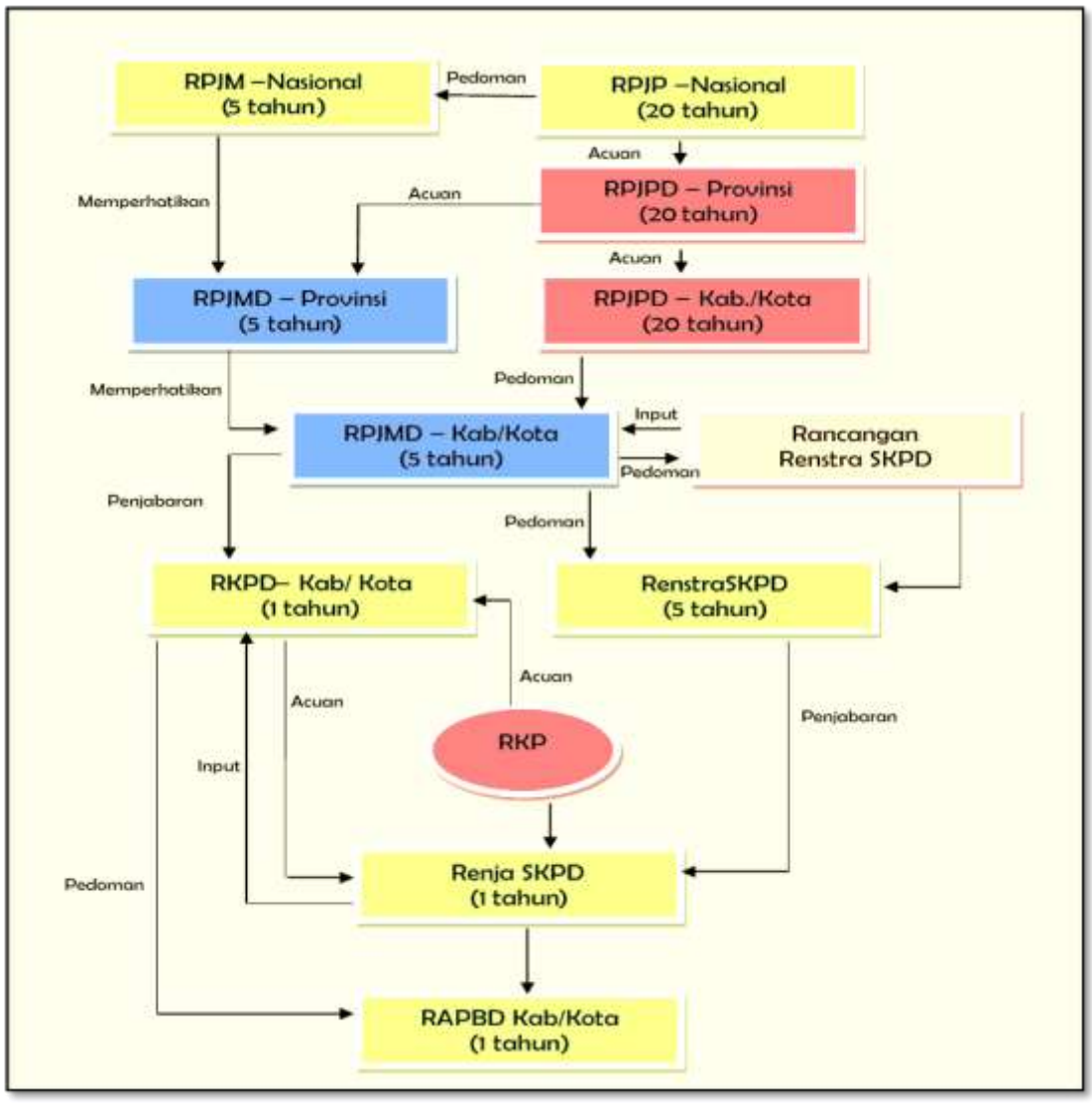
a. Dokumen RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan tahapan dalam Penyusunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Selatan Periode Pembangunan Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, maka rumusan RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki keterkaitan dan integrasi dengan beberapa dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti RPJPD, RTRW, KLHS hingga RPJMD wilayah sekitar.
b. Dokumen RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan implementasi RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan kondisi, kebutuhan serta tantangan yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan.
c. Dokumen RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029 merupakan pedoman umum terhadap penyusunan Renstra OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada periode yang sama.
d. Dokumen RPJMD menjadi dasar gambaran pelaksanaan kegiatan dan tugas serta struktur kelembagaan yang efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan RPJMD.
e. Penjabaran operasional tahunan Dokumen RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan dilakukan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Selatan.
f. Penjabaran dari Renstra OPD adalah Rencana Kerja (Renja) OPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan bagi setiap OPD Kabupaten Tapanuli Selatan.

Jika dilihat secara substantif bagaimana perumusan kebijakan pada dokumen Teknokrat RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan, maka terdapat beberapa hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

Gambar I. 1
Hubungan RPJMD Tapanuli Selatan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Gambar I. 2
Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Dengan melihat gambar di atas dalam rangka untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan wilayah dengan perencanaan pembangunan Pemerintah Pusat sehingga RPJMD menjadi dokumen yang sinergis dan terpadu. Berikut penjabaran keterkaitan antar dokumen perencanaan:

a. Hubungan Antara RPJMD dan RPJPD Kabupaten Tapanuli Selatan

RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2045 tahap Awal (pertama). Untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan tahap pertama ini, berbagai evaluasi RPJPD tahun 2006-2025 dan RPJMD periode sebelumnya dipergunakan untuk menyempurnakan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029.

b. Hubungan Antara RPJMD dengan Renstra OPD Kabupaten Tapanuli Selatan

Renstra OPD merupakan bagian dari RPJMD yang tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya RPJMD merupakan gradasi dari Renstra Perangkat Daerah. Sasaran RPJMD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra Perangkat Daerah selama lima tahun. Implementasi dari RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan dituangkan di dalam Renstra masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya yang secara kelembagaan harus berjalan secara efektif dan efisien.

Bupati Tapanuli Selatan terpilih nantinya bertanggungjawab terhadap pencapaian tujuan RPJMD, sedangkan Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dan akhir masa jabatan. Di sini, keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja *impact* dan *outcome* dalam Renstra Perangkat Daerah, secara langsung dan tidak langsung akan memengaruhi pencapaian visi dan misi serta janji politik Bupati yang telah dijabarkan dalam RPJMD. Secara hierarki, staf/eselon 4 (kepala seksi/kepala subbagian) akan berfokus pada pencapaian *output*, eselon 3 (kepala bidang/kepala bagian) pada *outcome*, eselon 2 (kepala dinas/kepala badan) pada *impact* dan kemudian memberikan benefit pada tingkat kabupaten dalam pencapaian visi dan misi bupati.

c. Hubungan Antara RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RPJMD dilaksanakan dari tahun ke tahun melalui RKPD, sasaran tahunan dan arah kebijakan RPJMD harus dipedomani dalam menentukan prioritas dan sasaran pembangunan tiap tahun dalam RKPD. Program pembangunan daerah yang sejatinya adalah program prioritas Bupati dalam mencapai visi dan misi RPJMD harus terpetakan dengan baik, kapan dilaksanakan secara spesifik dari satu RKPD ke RKPD tahap berikutnya. Perangkat Daerah menyusun program dan kegiatan prioritas tahunan dalam Renja Perangkat Daerah. Dalam rangka sinergi dan sinkronisasi antara RPJMD, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah, setiap tahun diselenggarakan Musrenbang RKPD Kabupaten Tapanuli Selatan yang bertujuan sebagai penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan dengan para pemangku kepentingan dengan Pemerintah Daerah.

d. Hubungan Antara RPJMD dan RTRW Kabupaten Tapanuli Selatan

Implementasi RPJMD didasarkan pada RTRW Kabupaten Tapanuli Selatan, baik dari aspek kebijakan maupun operasionalisasi dan keselarasannya dengan rencana program pembangunan untuk menjamin kelangsungan dan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Dengan kata lain, pendekatan pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang dengan pendekatan pembangunan regional.

Suatu pembangunan yang berdimensi kewilayahan juga memperhatikan pentingnya pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih atau strategis berdasarkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu yang memerhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, strategi dan kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam RPJMD akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RTRW.

e. Hubungan Antara RPJMD dan RPJMN

RPJMD juga harus memedomani RPJMN sekurang-kurangnya untuk sinergitas dan sinkronisasi arsitektur kinerja baik di tingkat *impact* maupun *outcome* pembangunan nasional dan daerah. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPJMD harus memerhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah harus memerhatikan isu-isu dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan.

f. Hubungan Antara RPJMD dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara

RPJMD juga harus memedomani RPJMD Provinsi Sumatera Utara sekurang-kurangnya untuk sinergitas dan sinkronisasi arsitektur kinerja baik di tingkat *impact* maupun *outcome* pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran RPJMD harus memerhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Utara.

Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah harus memerhatikan isu-isu dan strategi pembangunan Provinsi Sumatera Utara untuk sinkronisasi kebijakan.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud dibuatnya RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan 2025-2029 adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi pembangunan daerah selama periode lima tahun, yang sejalan dengan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.

1.4.2. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029 adalah :

1. Menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih ke dalam arah kebijakan pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan secara sistematis, terukur, dan realistis.
2. Menyusun arah pembangunan yang terintegrasi dan sinergis antara pembangunan daerah dengan pembangunan nasional dan provinsi, agar tercapai pembangunan yang harmonis.
3. Menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) masing-masing, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan terarah dan konsisten.
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pembangunan daerah melalui perencanaan yang berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat.
5. Menjamin kesinambungan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, dan permasalahan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029 merujuk pada instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan memuat antara lain :

1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya;
1.4 Maksud dan Tujuan; dan
1.5 Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah memuat :

2.1 Subbab Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.2 Subbab Gambaran Keuangan Daerah
2.3 Subbab Permasalahan dan Isu Strategis

BAB III Visi, Misi, Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah memuat :

3.1 Subbab Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
3.2 Subbab Strategi dan Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah memuat :

4.1 Subbab Program Perangkat Daerah
4.2 Subbab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BAB V Penutup

Bab Ini memuat tentang Kesimpulan penting substansi,Kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian, dan evaluasi terhadap

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapian sasaran pembangunan di Daerah

RPJMD KAB.TAPANULI SELTAN 2025-2029

gambaran umum bab II



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pembangunan daerah terus bergulir dengan dikomandoi oleh kepala daerah yang terus berganti seiring berkembangnya sistem demokrasi di Indonesia. Hal ini tentu saja menjadikan kebijakan-kebijakan di daerah seiring waktu berubah dengan tetap berpedoman pada perencanaan jangka panjang daerah yang telah ditetapkan. Perubahan kebijakan di setiap pergantian tampuk kepemimpinan sudah bukan hal baru dalam pembangunan daerah, meski demikian perubahan kebijakan tidak terlepas dari perwujudan tujuan pembangunan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi.

Sehubungan dengan perumusan kebijakan pada setiap pelaksanaan pembangunan daerah, maka analisis dan kajian terhadap data pembangunan dipandang perlu dilakukan secara berkala untuk menentukan prioritas pembangunan agar kebijakan yang diambil relevan dalam menyelesaikan permasalahan.

Sebagai daerah yang akan melaksanakan periode pembangunan jangka menengah yang baru, Kabupaten Tapanuli Selatan wajib melihat capaian kinerja pembangunan daerah sebelumnya yang merupakan gambaran umum kondisi daerah sebagai pondasi awal dalam menentukan kebijakan-kebijakan strategis yang diambil untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang baru. Dalam rumusan dokumen RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan ini, gambaran umum kondisi daerah lebih ditekankan kepada berbagai permasalahan dan isu strategis yang akan dibangun sehingga memiliki fokus dalam merancang visi, misi dan program pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan. Berikut gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki komposisi penduduk yang seimbang secara gender, namun masih ditemukan ketimpangan dalam akses dan manfaat pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang masih rendah serta akses perempuan terhadap layanan kesehatan ibu dan anak yang belum optimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan responsif gender dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan.

1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan menjelaskan tentang aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum serta aspek daya saing daerah serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan penjabaran sebagai berikut:

1.1. Aspek Geografi dan Demografi

1.1.1. Geografi

Penjabaran kondisi geografis akan memberikan gambaran utuh bagaimana karakteristik wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam kaitannya dengan luas dan batasan wilayah, letak geografis, topografi, hingga penggunaan lahan dalam pembangunan daerah. Selain itu, akan dilihat pula berbagai potensi pengembangan wilayah seperti yang telah diuraikan dalam perencanaan tata ruang wilayah hingga identifikasi wilayah rawan bencana.

A. Letak dan Luas Wilayah

Wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Selatan dengan luas 446.735 Ha yang terdiri dari luas daratan 435.535 Ha dan luas Lautan 11.200 Ha, secara geografis terletak pada 0°58'35" – 2°07'33" LU dan 98°42'50" – 99°34'16"BT. Secara administratif Kabupaten Tapanuli Selatan yang terdiri dari 15 Kecamatan dengan jumlah kelurahan dan desa di lima belas kecamatan tersebut sebanyak 36 Kelurahan dan 212 Desa. Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Utara.

Sebelah Selatan : Kabupaten Mandailing Natal.

Sebelah Timur : Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas utara dan Kabupaten Labuhan Batu Utara

Sebelah Barat : Samudera Indonesia dan Kabupaten Mandailing Natal.

Kondisi daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan letak geografis tersebut selain sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian, letak geografisnya juga sangat prospektif untuk dikembangkan sebagai daerah transit, pariwisata dan perdagangan karena posisi strategisnya berada pada jalur lintas Sumatera dari Medan menuju Sumatera Bagian Barat, Sumatera Bagian Selatan dan Jawa.

Tabel II.1
Administrasi Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)
1	Batang Angkola*	Pintu Padang	17	4	21.136,00
2	Sayurmatinggi	Sayurmatinggi	18	1	29.511,20
3	Angkola Timur	Pargarutan	13	2	23.516,38
4	Angkola Selatan	Simarpinggan	13	4	49.656,83
5	Angkola Barat	Sitinjak	12	2	10.452,31
6	Batang Toru	Batang Toru	19	4	38.004,19
7	Marancar	Marancar	11	1	8.911,41
8	Sipirok	Sipirok	34	6	40.936,52
9	Arse	Arse Nauli	8	2	26.590,28
10	Saipar Dolok Hole	Sipagimbar	12	2	54.057,00
11	Aek Bilah	Biru	12	-	40.484,74
12	Muara Batang Toru	Huta Raja	6	3	30.801,12
13	Angkola Sangkunur	Simatania	8	2	25.476,95
14	Tano TombanganAngkola	Situmba	16	1	21.030,10
15	Angkola Muara Tais	Muara Tais I	13	2	14.970,00
JUMLAH			**212**	**36**	**446.753,00**

**Include Kecamatan Angkola Muaratais (Kecamatan Pemekaran)*

Sumber : Bappeda Kab. Tapanuli Selatan data diolah, Perda No 5 Tahun 2017 tentang RTRW Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2037

1. Topografi

1) Kemiringan Lahan

Berdasarkan kemiringan lahan, Kabupaten Tapanuli Selatan secara umum dibagi dalam 5 (lima) kawasan yaitu:

- Kawasan Gunung dan Perbukitan (sangat curam) adalah kawasan jalur pegunungan Bukit Barisan yang merupakan kawasan hutan lindung dengan kemiringan lebih dari 40% dan berfungsi sebagai kawasan penyangga air bagi sungai-sungai yang mengalir ke hilir.
- Kawasan Bergelombang Hingga Bukit (curam) adalah kawasan yang berfungsi untuk perlindungan dan pengembangan terbatas pada kegiatan budidaya seperti perkebunan dan pertanian. Komoditas yang mungkin dikembangkan di kawasan ini meliputi hortikultura, karet, dan tanaman lahan kering.
- Kawasan Kaki Gunung (agak curam) adalah kawasan yang relatif landai namun lebih didominasi gelombang sebagai akibat pengangkatan batuan yang makro dan masif. Kawasan ini lebih sesuai untuk kegiatan permukiman dan pertanian lahan basah serta peternakan dan perkebunan.
- Kawasan Landai dan Bergelombang, adalah kawasan yang landai dan banyak terdapat bukit yang sudah terkikis untuk kebutuhan pertambangan. Kegiatan yang banyak di kawasan ini adalah permukiman dan pertanian serta industri.
- Kawasan Dataran adalah kawasan yang sangat datar karena letaknya dekat dengan kawasan pesisir. Kegiatan yang sesuai dengan kawasan ini adalah kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan serta pertambangan.

2) Ketinggian Lahan

Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan berada di ketingggian antara 0–1.985 meter dpl. Daerah yang berada pada ketinggian 0 meter umumnya terdapat di daerah pantai barat Tapanuli Selatan,

yaitu di desa Muara Upu, Kecamatan Muara Batang Toru, lokasi yang berada pada ketinggian 1.985 meter dpl terdapat pada Gunung Tampulonanjing di Kecamatan Saipar Dolok Hole.

Tabel II.2
Ketinggian Lahan Kabupaten Tapanuli Selatan Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Ketinggian lahan diatas permukaan laut (meter)
1	Batang Angkola	25 - 1 250
2	Sayurmatinggi	25 - 1 400
3	Angkola Timur	225 - 1 850
4	Angkola Selatan	20 - 1 000
5	Angkola Barat	550 - 1 700
6	Batang Toru	25 – 925
7	Marancar	100 - 1 850
8	Sipirok	300 - 1 825
9	Arse	650 - 1 925,3
10	Saipar Dolok Hole	325 - 1 985
11	Aek Bilah	100 - 1 875
12	Muara Batang Toru	0 – 225
13	Angkola Sangkunur	20 – 800
14	Tano Tombangan Angkola	50 - 1 275
15	Angkola Muara Tais	25 - 1 250

Sumber : Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan

2. Kondisi Geologi

1) Struktur dan Karakteristik

Secara Geologis, wilayah Pesisir Pulau Sumatera Bagian Barat, termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan dilalui patahan aktif Sesar Semangko. Patahan ini diperkirakan bergeser sekitar 11 cm per tahun dan merupakan daerah rawan gempa dan longsor.

Aktivitas struktur geologi ini dimulai pada zaman Miosen (± 16 juta tahun yang lalu), yakni diendapkannya batuan yang dikenal sebagai Formasi Woyla. Pada zaman tersebut menghasilkan struktur geologi yang berarah selatan-utara, yang diikuti oleh permulaan subduksi lempeng India – Australia terhadap lempeng Eurasia pada zaman Yura Akhir. Pada periode Yura Akhir, Kapur diendapkan

satuan Batuan Volkanik, kemudian diatas batuan ini secara tak selaras diendapkan batu gamping (*mudstone & wackestone*).

Pada Akhir Miosen mengalami rotasi searah jarum jam, sehingga mulai pada zaman plio-pleistosen arah struktur geologi berubah menjadi arah baratdaya- timurlaut, aktivitas terus berlanjut sampai kini. Hal ini disebabkan pembentukan letak samudera di Laut Andaman dan tumbukan antara Lempeng Mikro Sunda dan Lempeng India-Australia yang terjadi pada sudut yang kurang tajam. Hal ini menyebabkan kompresi tektonik global dan lahirnya subduksi sepanjang pesisir barat Pulau Sumatera dan pengangkatan Pegunungan Bukit Barisan pada Pleistosen.

Pulau Sumatera termasuk memiliki kondisi tektonik yang sangat kompleks. Proses tektonik di daerah ini berlangsung dari Pra-Tersier hingga Tersier. Sebagai akibatnya, muncul aneka ragam jenis batuan serta mineralisasi di daratan Sumatera ini.

Secara regional aktifitas magmatisme yang terjadi di Sumatera berhubungan erat dengan pembentukan cebakan mineral pada jalur-jalur magmatik, baik yang masih aktif maupun yang telah mati, terutama pada pembentukan dan keterdapatan logam mulia dan logam dasar (base metal). Proses tektonik regional pulau Sumatera dimulai sejak zaman Pra-Tersier. Proses tektonik ini tentu saja berhubungan erat dengan pengangkatan maupun patahan-patahan yang terjadi pada lapisan batuan sehingga banyak batuan berumur Pra-Tersier hingga Kuarter tersingkap di permukaan. Proses tektonik ini juga mengakibatkan terjadinya mineralisasi terutama pada jalur Sesar Besar Sumatera yang terbentuk juga akibat proses tektonik di wilayah ini.

Salah satu petunjuk terhadap tipe mineralisasi yang terbentuk pada suatu daerah adalah kehadiran mineral-mineral bijih tertentu seperti, magnetit, ilmenit, pirhotit, arsenopirit, pirit, kalkopirit, enargit, kovelit, markasit, stibnit, realgar, telurit, argentit, elektrum dan sinabar.

2) Potensi Kandungan

a. Sumber Energi

Potensi energi alternatif di Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain bersumber dari panas bumi terdapat di Dolok Sibualbuali Kecamatan Sipirok dan Marancar yang jika dikembangkan diperkirakan dapat menghasilkan listrik sebesar ± 56 MW. Selain itu terdapat potensi panas bumi lainnya di Kecamatan Arse, SD. Hole, Sayur Matinggi, Batang Angkola, Tantom Angkola dan Kecamatan Angkola Selatan. Potensi Sumber Energi Alternatif Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada berikut:

Tabel II.3
Potensi Sumber Energi Alternatif berdasarkan Desa/Sungai Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Desa/Sungai	Energi Alternatif	Potensi Daya
1	Batang Toru*	PLTA	560 MW
2	Aek Bilah	PLTA	150 MW
3	Aek Balimbing	PLTA	5 MW
4	Batang Gadis	PLTA	100-200 MW
5	Simaronop Julu	PLTMH	27 KW
6	Sungai Pining	PLTMH	25 KW
7	Palang	PLTMH	29 KW
8	Silangkitang	PLTMH	25 KW
9	Aek Urat	PLTMH	25 KW
10	Sihulambu	PLTMH	45 KW
11	Gorahut	PLTMH	15 KW
12	Aek Latong	PLTMH	30 KW
13	Dalihan Natolu	PLTMH	25 KW
14	Sigiring-giring	PLTMH	28 KW
15	Sitabo-tabo	PLTMH	25 KW
16	Batu Horing	PLTMH	15 KW
17	Aek Balimbing	PLTMH	25 KW
18	Simarpinggan	PLTMH	500 KW
19	Parsariran	PLTMH	500 KW
20	Sipirok	PLTPB	
21	Muara Upu	PLTU**	
	Tapanuli Selatan	PLTS***	

Sumber : Dinas Perindustrian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
**) Sedang tahap konstruksi, melalui system picking menghasilkan daya ± 510 MW*
***) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten*
****) Tersebar, tiga unit/desa PLTS terpusat telah dibangun yakni di Desa Pargarutan Kecamatan Sipirok, Tangga Batu Kecamatan Angkola Barat dan Desa Muara Upu Kecamatan Muara Batang Toru*

Selain itu tersedia potensi pembangkit listrik yang bersumber dari tenaga air (hydro power) yang terdapat hampir diseluruh kecamatan dengan total potensi daya listrik yang dapat dihasilkan mencapai ± 706.362 KW. Terdapat 4 lokasi yang potensial dapat dikembangkan menjadi pembangkit listrik skala besar dengan daya listrik yang dihasilkan dapat mencapai ± 605.000 KW, dan 15 lokasi yang dapat dikembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Mini/Microhydro (PLTMH), dengan daya listrik sebesar ± 1.362 KW.

Berdasarkan data Dinas Perindustrian daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, kondisi akhir tahun 2020 jumlah rumah penggunaan listrik Non PLN bersumber dari PLTMH dan PLTS adalah sebesar 2.617 rumah dengan kapasitas sebesar 500 KW, adapun PLTMH dan PLTS yang telah terbangun di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan sampai akhir tahun 2020 adalah sebanyak 21 unit terdiri dari PLTMH 17 unit dan PLTS 4 unit sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.4
Potensi Sumber Energi Alternatif menurut Pembangkit Listrik Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Uraian	Kapasitas (KW)	Jumlah Rumah
1	PLTMH Hutatonga Turunan Kec. SD. Hole	15	120
2	PLTMH Sihulambu Kec. Aek Bilah	35	205
3	PLTMH Aek Urat Kec. Aek Bilah	20	101
4	PLTMH Aek Latong Kec. Aek Bilah	35	126
5	PLTMH Silangkitang Kec. Aek Bilah	20	157
6	PLTMH Ramba Padang Kec. Aek Bilah	10	65
7	PLTMH Dalian Na Tolu Kec. Arse	25	100
8	PLTMH Batu Horing Kec. Batangtoru	20	100
9	PLTS Tepusat Pintu Padang Mandala Sena Kec. SD. Hole	15	62
10	PLTS Tepusat Pargarutan Luat Harangan Kec. Sipirok	20	110
11	PLTS Tepusat Tangga Batu Kec. Angkola Barat	15	97
12	PLTS Tepusat Muara Upu Kec. Muara Batangtoru	30	106

No	Uraian	Kapasitas (KW)	Jumlah Rumah
13	PLTMH Sunge Pining Kec. SD. Hole	25	100
14	PLTMH Huta Baru Kec. Aek Bilah	25	154
15	PLTMH Tapus Nabolak Kec. Aek Bilah	15	67
16	PLTMH Janji Matogu Kec. Angkola Selatan	40	250
17	PLTMH Sitabo-tabo Kec. SD. Hole	20	116
18	PLTMH Silangkitang Tambiski Kec. SD. Hole	50	180
19	PLTMH Gorahut Kec. Aek Bilah	20	166
20	PLTMH Simaronop Julu Kec. Angkola Selatan	25	119
21	PLTMH Aek Sabatang Menek Kec. Angkola Sangkunur	20	116
	JUMLAH	**500**	**2.617**

Sumber : Dinas Perindustrian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

b. Bahan Tambang Mineral Logam dan Bukan Logam

Beberapa komoditi yang menonjol untuk dikembangkan adalah : bahan galian mineral logam, bahan galian mineral bukan logam dan batuan (galian Golongan C), bahan galian minyak dan gas bumi.

3. Hidrologi

1) Daerah Aliran Sungai (DAS)

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruhi aktivitas daratan.

Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dibagi dalam beberapa DAS, yaitu DAS Batangtoru, DAS Batang Gadis, DAS Barumun, DAS Aek Garoga, DAS Kualuh dan DAS Muara Opu.

DAS Batangtoru dan DAS Batang Gadis berbatasan dengan kawasan lindung. Secara lengkap luas DAS yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.5
Luas Daerah Aliran Sungai Kabupaten Tapanuli Selatan

No.	Daerah Aliran Sungai	Luas (ha)
1	Batang Toru	129.581
2	Batang Gadis	157.670
3	Barumun	115.015
4	Aek Garoga	25.745
5	Kualuh	20.252
6	Muara Opu	5.719

Sumber : Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan

2) Sungai, Danau dan Rawa

Di Kabupaten Tapanuli Selatan terdapat 6 (enam) satuan wilayah sungai dan anak sungai yang tergolong besar yang cukup prospektif untuk dapat dijadikan sebagai sumber lahan pertanian, perikanan air tawar maupun objek pariwisata yaitu:

- Sungai Batang Toru di Kabupaten Tapanuli Selatan sepanjang 87,98 Km melintasi Kecamatan Sipirok, Marancar, Batang Toru dan Angkola Sangkunur/Muara Batang Toru bermuara ke Samudera Indonesia dan merupakan ekosistem penting dari Danau Siais serta sedang dalam tahap konstruksi pembangunan PLTA.
- Sungai Aek Bilah di Kabupaten Tapanuli Selatan sepanjang 13,22 Km melintasi Kecamatan Aek Bilah terus menuju Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Labuhan Batu dan berakhir di pantai timur.
- Sungai Batang Angkola di Kabupaten Tapanuli Selatan sepanjang 61,90 Km melintasi Kecamatan Batang Angkola, Kecamatan Sayur Matinggi dan Tano Tombangan Angkola dan bertemu dengan Sungai Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal serta bermuara di Samudera Indonesia.

Selengkapnya data sungai utama yang melalui Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.6
Sungai Utama yang Melalui Kabupaten Tapanuli Selatan

Nama Sungai	Panjang (Km)	Lintasan
Batang Toru	87,98	Kecamatan Sipirok, Marancar, Batang Toru, dan Angkola Sangkunur/Muara Batang Toru bermuara ke Samudera Indonesia
Aek Bilah	13,22	Kec. Aek Bilah
Aek Sihapas	28,00	Kec.Sipirok, Angkola Timur
Sungai Garoga	72,16	Kec. Batang Toru, Muara Batang Toru
Batang Gadis	87,56	Kec. Tantom Angkola, Angkola Muara Tais , Batang Angkola, dan Angkola Selatan
Batang Angkola	61,90	Kecamatan Angkola Muara Tais, Kecamatan Batang Angkola, Kecamatan Sayur Matinggi dan Tano Tombangan Angkola
Batang Pane	10,60	Kecamatan SD.Hole
Batang Salai	45,10	Kecamatan Angkola Barat, Angkola Selatan

Sumber : Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan

Di Kabupaten Tapanuli Selatan juga terdapat danau di beberapa tempat sebagai sumber cadangan air baku, yakni Danau Siais di Kecamatan Angkola Sangkunur dan Danau Marsabut di Kecamatan Sipirok.

3) Debit Air

Ketersediaan debit air untuk Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 218 M³ per detik yang bersumber dari aliran sungai, dipergunakan untuk : Domestik, Non domestik dan Irigasi. Ketersediaan debit air dibagi berdasar Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.7
Kondisi Ketersediaan Debit Air Andalan Berdasarkan Nama Sungai Kabupaten Tapanuli Selatan

No.	Nama Sungai	Debit Air
1	Batang Toru	52 M^3 per detik
2	Aek Bilah	25 M^3 per detik

No.	Nama Sungai	Debit Air
3	Aek Sihapas	8 M^3 per detik
4	Sungai Garoga	5 M^3 per detik
5	Batang Gadis	55 M^3 per detik
6	Batang Angkola	30 M^3 per detik
7	Batang Pane	23 M^3 per detik
8	Batang Ilung	5 M^3 per detik
9	Batang Salai	6 M^3 per detik
10	Aek Simadoras	4 M^3 per detik
11	Aek Siguti	5 M^3 per detik

Sumber : Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan

4. Klimatologi

Curah hujan di Tapanuli Selatan cukup berfluktuasi dengan curah hujan tertinggi berada di bulan Januari dan Desember, sedangkan curah hujan terendah berada di bulan februari, Mei dan Juni.

Grafik II.1
Jumlah Curah Hujan Menurut Bulan
Kabupaten Tapanuli Selatan, Tahun 2024



Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Selatan, Tahun 2025

Suhu udara di Kabupaten Tapanuli Selatan bervariasi antar wilayah sesuai dengan letak ketinggian tempat dari permukaan laut dan tutupan lahan, udara sejuk dijumpai di Kecamatan Marancar, Sipirok dan SD Hole.

Kelembaban udara di Kabupaten Tapanuli Selatan tergolong tinggi karena tingginya curah hujan dan masih luasnya permukaan tanah basah dan tutupan lahan relatif masih baik.

5. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Tapanuli Selatan sangat beragam dalam bentang alam yang juga bervariasi mulai dari dataran rendah sampai pada dataran tinggi dengan kondisi kemiringan lahan dan jenis tanah yang berbeda pula. Berdasarkan analisa data tutupan lahan di Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.8
Kondisi Tutupan Lahan
Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Tutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Hutan Lindung	134.178	30,81
2	Hutan Produksi	45.226	10,39
3	Hutan Produksi Terbatas	83.626	19,20
4	Hutan Suaka Alam	14.897	3,42
5	Hutan Gambut	60	0,60
6	Permukiman	2.650	0,61
7	Pertanian Lahan Kering	86.687	19,91
8	Pertanian Lahan Basah	17.791	4,09
9	Pertambangan	2.824	0,65
10	Perkebunan	31.931	7,33
11	Kawasan Sempadan Sungai Kecil	11.594	2,66
12	Kawasan Sempadan Sungai Besar	3.282	0,18
13	Sempadan Danau	789	0,01
Jumlah		**435.535**	**100,00**

Sumber : Data diolah Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan

Penggunaan lahan terdiri dari permukiman, pertanian lahan kering, pertanian lahan basah, pertambangan dan perkebunan. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan non pertanian, seperti : industri, transportasi tidak terlalu besar mengubah pemanfaatan ruang yang ada. Kegiatan pemanfaatan ruang terkonsentrasi dan berkembang namun tidak meluas tersebar.

Dalam distribusi ruang, wilayah yang pada saat ini masih memiliki kawasan hutan yang juga berfungsi untuk perlindungan daerah bawahannya ataupun fungsi ekologis lainnya, perlu menyiapkan pengendalian terhadap alih fungsi hutan, baik oleh perambahan maupun pemanfaatan untuk usaha ekonomi formal terutama dalam rangka perolehan Pendapatan Asli Daerah. Konflik kepentingan dalam kondisi keterbatasan lahan budidaya perlu diatasi melalui kesepakatan yang mengikat dalam pelestarian kawasan hutan yang berfungsi lindung. Untuk itu, salah satu dasar pengendalian adalah menyesuaikan pengembangan kegiatan pada lahan dengan kemampuan yang memadai.

6. Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki potensi sumber daya alam. Sumber daya alam tersebut merupakan sektor yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Tapanuli Selatan terutama sektor pertanian dan perkebunan. Potensi letak geografis dan keadaan bentang alam Kabupaten Tapanuli Selatan yang cukup beragam juga didukung oleh potensi sumber daya alam yang cukup melimpah, antara lain: sumber daya air, sumber daya kehutanan, sumber daya kelautan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan pariwisata. Potensi dari masing-masing sumber daya alam tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Kawasan Budidaya

1) Sumber Daya Air

Daerah Tapanuli Selatan dapat memanfaatkan potensi sumber daya hidrogeologi air permukaan dan air bawah permukaan sebagai sumber daya ekonomis dan dapat dikembangkan sebagai energi antara lain:

- Air Panas, terdapat di Sipirok.
- Air Terjun dan/atau aliran sungai, hampir terdapat diseluruh Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Tabel II.9
Potensi Sumber Daya Air
Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Sumber Daya Air	Lokasi	Keterangan
1.	Air Panas	Kec.Angkola Barat, Saipar Dolok Hole, Sipirok, Marancar, Sayurmatinggi	Indikasi, Perlu Kajian Pemetaan Lebih Lanjut
2.	Air Tanah (sumur biasa)/Sungai (APU)	Se-Kab.Tapanuli Selatan	
	Air Bawah Tanah (ABT) atau air terjebak dalam gua dan air sumur artesis (pemboran)	Se-Kab.Tapanuli Selatan	Indikasi, Perlu Kajian Pemetaan Lebih Lanjut
3	Air Terjun	Marancar,Aek Bilah, SD.Hole, Angkola Selatan Angkola Sangkunur	
4	Air Laut	Kec.Muara Batang Toru	Indikasi, Perlu Kajian Pemetaan Lebih Lanjut
5	Air Mata Air	Seluruh Daerah Tapanuli Selatan	Indikasi, Perlu Kajian Pemetaan Lebih Lanjut
6	Air Kawah	Kec.Sipirok	Indikasi, Perlu Kajian Pemetaan Lebih Lanjut

Sumber : Bappeda Kabupaten Tapanuli Selatan

2) Kawasan Strategis

Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah penataan ruang yang diprioritaskan dan mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

a) Kawasan Strategis Ekonomi

Kawasan Strategis Ekonomi di Kabupaten Tapanuli Selatan meliputi:

- Kawasan Strategis Danau Siais, Kawasan ini merupakan area danau, sempadan danau, kawasan lindung dan lahan di sekitar danau. Kawasan strategis Danau Siais diarahkan untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata terpadu mengingat potensi yang ada, dapat dikatakan hampir sama dengan potensi yang dimiliki Danau Toba di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara.
- Kawasan Strategis Batang Toru, kawasan ini berada di Kecamatan Batang Toru merupakan kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan perkotaan. Hal ini didasarkan pada potensinya sebagai pusat pertumbuhan Industri. Pengembangan Kawasan Perkotaan Batang Toru dilakukan juga untuk mengurangi tekanan terhadap perluasan pengembangan Kecamatan Sipirok sebagai ibukota kabupaten yang memiliki potensi sebagai menjadi kawasan agropolitan. Pengembangan pusat pertumbuhan industri ini dilakukan dengan memperhatikan kawasan konservasi hutan.
- Kawasan Strategis Agropolitan Sitinjak, kawasan ini berada di Kecamatan Angkola Barat merupakan kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan agropolitan dengan basis ekonomi komoditi tanaman salak, durian dan buah-buahan lainnya.
- Kawasan Strategis Agropolitan Sipirok, kawasan ini berada di Kecamatan Sipirok merupakan kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan agropolitan dengan basis ekonomi sayuran dan buah-buahan pariwisata, serta sebagai kerukunan umat beragama.
- Kawasan Stategis Agromarine Muara Upu, kawasan ini sangat potensial dikembangkan menjadi tujuan wisata. Pantai ini merupakan satu-satunya wilayah laut yang dimiliki kabupaten Tapanuli Selatan, yang terdapat sepanjang ± 18,38 km, yang

terletak di desa Muara Upu, Kecamatan Muara Batang Toru. Selain untuk pengembangan pariwisata di Muara Upu sedang berkembang pembukaan perkebunan.

- Kawasan Strategis Agropolitan Pintu Padang, kawasan ini berada di Kecamatan Batang Angkola merupakan kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan agropolitan dengan basis ekonomi komoditi pertanian lahan basah.

7. Wilayah Rawan Bencana

Menurut Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Sumber data yang digunakan pada proses pemetaan dan perencanaan kawasan rawan bencana ini meliputi dua sumber. Pertama, bersumber dari data yang telah dikumpulkan dan disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Tahun 2015. Data vektor tersebut diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelas, yaitu kelas 1 (0 – 0,33) dengan tingkat bahaya rendah, kelas 2 (0,33 – 0,66) dengan tingkat bahaya sedang, dan kelas 3 (0,66 – 0,99) dengan tingkat bahaya tinggi. Pada penyusunan RTRW, Kabupaten Tapanuli Selatan ini termasuk kategori kelas 3 dengan tingkat bahaya tinggi. Hal ini didasarkan pada prioritas penanganan tanggap darurat dan penanggulangan bencana oleh pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kedua, sumber data dalam penentuan kawasan rawan bencana Kabupaten Tapanuli Selatan adalah dengan menggunakan teknik skoring yang dilakukan juga pada penentuan kawasan lindung. Berdasarkan ketentuan skoring kawasan lindung dan kawasan rawan bencana, skor yang digunakan, yaitu pada kawasan yang memiliki skor > 175. Tujuan dilakukannnya perencanaan dan perlindungan kawasan rawan bencana adalah untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh manusia.

Berdasarkan penyebabnya bencana dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam, bencana akibat ulah manusia, dan bencana kombinasi. Dalam penataan ruang, maka pendekatan dilakukan terhadap jenis bencana yang merupakan fenomena alam. Secara lebih tegas, pembahasan ini akan difokuskan pada tiga jenis bencana alam yaitu: banjir kebakaran dan longsor. Selain jenis bencana tersebut, beberapa pertimbangan penetapan prioritas lokasi penanganan bencana didasarkan pada :

- pertimbangan tingkat kerawanan kawasan terhadap terjadinya bencana alam (berdasarkan, informasi, analisis dan prediksi badan atau instansi yang berwenang);
- pertimbangan terhadap catatan tentang pernah terjadinya bencana alam di lakasi yang bersangkutan;
- pertimbangan terhadap fungsi kawasan; dan
- pertimbangan terhadap keberadaan infrastruktur penting.

Berikut ini ditampilkan tebel resiko bencana Kabupaten Tapanuli Selatan bersumber dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, mulai dari jenis bencana baik itu berupa potensi banjir dengan potensi luas paling tinggi sebesar 32.104 Ha, dengan jumlah penduduk terpapar paling tinggi sebesar 54.733 orang, dan untuk uraian jenis bahaya yang lain dapat dilihat pada table dibawah.

Tabel Kajian Resiko Bencana Kabupaten Tapanuli Selatan

No.	JENIS BAHAYA	PROVINSI	KABUPATEN	BAHAYA					KERENTANAN															KAPASITAS			RISIKO
				LUAS BAHAYA (HA)			TOTAL LUAS	KELAS	POTENSI PENDUDUK TERPAPAR (JIWA)							KELAS	POTENSI KERUGIAN (Juta Rp)							POTENSI KERUSAKAN LINGKUNGAN				KELAS KESIAPSIAGAAN DAERAH	KELAS KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT	KELAS	KELAS RISIKO
				RENDAH	SEDANG	TINGGI			JUMLAH PENDUDUK TERPAPAR PER KELAS BAHAYA			TOTAL JUMLAH PENDUDUK TERPAPAR	KELOMPOK RENTAN				KERUGIAN FISIK PER KELAS BAHAYA		TOTAL KERUGIAN FISIK	KERUGIAN EKONOMI PER KELAS BAHAYA		TOTAL KERUGIAN EKONOMI	TOTAL KERUGIAN	KELAS	KERUSAKAN LINGKUNGAN PER KELAS BAHAYA		TOTAL KERUSAKAN LINGKUNGAN	KELAS				
									RENDAH	SEDANG	TINGGI		PENDUDUK RENTAN	PENDUDUK CACAT	KELOMPOK UMUR RENTAN	RASIO JENIS KELAMIN		SEDANG	TINGGI													
1	BANJIR	SUMATERA UTARA	TAPANULI SELATAN	11,601	21,349	32,104	64,854	TINGGI	9,114	13,328	54,733	77,175	387	5,248	5,622	85	TINGGI	301,853	763,867	1,065,719	125,642	630,484	756,126	1,821,845	TINGGI	1,282	31,999	33,281	TINGGI	0.33	0.33	RENDAH	TINGGI
2	BANJIR BANDANG	SUMATERA UTARA	TAPANULI SELATAN	591	1,940	4,029	6,351	TINGGI	1,627	5,513	9,668	13,808	54	629	686	38	TINGGI	5,008	9,122	14,131	13,693	46,162	59,855	73,986	TINGGI	17,862	70,816	88,678	TINGGI	0.33	0.33	RENDAH	TINGGI
3	CUACA EKSTRIM	SUMATERA UTARA	TAPANULI SELATAN	832	4,673	82,568	88,073	TINGGI	-	1,866	142,267	143,933	749	14,755	15,485	99	TINGGI	13,013	157,621	170,634	30,381	1,386,708	1,417,008	1,587,643	TINGGI	-	-	-	-	0.33	0.33	RENDAH	TINGGI
4	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	SUMATERA UTARA	TAPANULI SELATAN	37	13	500	550	TINGGI	-	-	23	23	1	3	3	111	KEDIHAM	-	2,500	2,500	93	3,850	3,943	6,443	TINGGI	-	6,891	6,891	TINGGI	0.33	0.33	RENDAH	SEDANG
5	LEMPABUMI	SUMATERA UTARA	TAPANULI SELATAN	54,086	109,715	280,762	444,482	TINGGI	3,913	11,471	261,503	276,887	1,309	16,688	29,348	101	TINGGI	145,539	377,226	522,764	444,005	3,862,095	4,306,101	4,828,865	TINGGI	-	-	-	-	0.33	0.33	RENDAH	TINGGI
6	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	SUMATERA UTARA	TAPANULI SELATAN	81,208	346,231	10,808	438,247	TINGGI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,280,386	142,546	2,422,932	2,422,932	TINGGI	228,900	9,104	238,004	TINGGI	0.33	0.08	RENDAH	TINGGI
7	KEKERINGAN	SUMATERA UTARA	TAPANULI SELATAN	-	255,924	188,558	444,482	TINGGI	-	116,348	260,639	376,887	1,309	16,688	29,348	101	TINGGI	-	-	-	2,225,684	2,680,028	3,895,633	3,895,633	TINGGI	154,829	83,207	238,036	TINGGI	0.33	0.33	RENDAH	TINGGI
8	TANAH LONGSOR	SUMATERA UTARA	TAPANULI SELATAN	7,973	232,432	98,654	339,059	TINGGI	10,419	63,979	4,035	78,434	382	3,810	4,737	92	TINGGI	386,226	48,798	434,936	1,276,562	631,639	1,908,181	2,343,097	TINGGI	151,793	85,393	236,886	TINGGI	0.33	0.33	RENDAH	TINGGI
9	TSUNAMI	SUMATERA UTARA	TAPANULI SELATAN	1,528	516	4,944	6,990	TINGGI	80	8	83	171	1	9	9	111	KEDIHAM	1,120	22,180	23,300	450	29,068	19,518	42,818	TINGGI	-	-	-	-	0.33	0.33	RENDAH	RENDAH
				157,575	972,995	782,918	1,810,088	-	25,153	212,404	626,751	864,308	3,992	77,730	85,238	729		852,958	1,381,306	2,233,964	5,386,736	9,402,560	14,789,296	17,023,260	-	556,686	287,110	843,776	-	3	1		

Sumber : Dinas BPBD Kabupaten Tapanuli Selatan

1.1.2. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

1. Daya Dukung

Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025–2029, status daya dukung pangan dan sumber daya air berada pada kategori **surplus** hingga akhir periode perencanaan.

a. Daya Dukung Pangan

Berdasarkan hasil **Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)** yang menjadi bagian integral dari penyusunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025–2029, daya dukung pangan di wilayah ini berada pada kategori **surplus** sepanjang periode perencanaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan wilayah dalam menyediakan pangan secara berkelanjutan jauh melampaui kebutuhan konsumsi penduduk dan sektor terkait.

Hasil proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2029, **ketersediaan pangan** di Kabupaten Tapanuli Selatan diperkirakan mencapai **930.964,25 juta Kkal/tahun**, sedangkan **kebutuhan pangan** hanya sebesar **293.520,83 juta Kkal/tahun**. Dengan demikian, terdapat **surplus** sebesar **637.443,42 juta Kkal/tahun**. Surplus ini mencerminkan kapasitas produksi pangan yang tinggi, sekaligus menjadi indikasi kuat bahwa daerah ini memiliki ketahanan pangan yang baik.

Tabel 1. Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Tapanuli Selatan (Proyeksi 2025–2029)

Tahun	Ketersediaan (Juta Kkal/tahun)	Kebutuhan (Juta Kkal/tahun)	Selisih	Status
2025	971.925,36	251.778,32	720.147,04	Surplus
2026	960.124,63	261.438,10	698.686,52	Surplus
2027	949.927,05	271.594,44	678.332,61	Surplus
2028	940.211,16	282.277,82	657.933,34	Surplus
2029	930.964,25	293.520,83	637.443,42	Surplus
2030	949.583,54	299.391,25	650.192,29	Surplus

Sumber : KLHS RPJMD Tapsel 2025-2029

Struktur ketersediaan pangan di Kabupaten Tapanuli Selatan didominasi oleh:

- Hortikultura buah-buahan: 71% dari total ketersediaan pangan, yang meliputi komoditas seperti durian, mangga, rambutan, salak, dan pisang.
- Tanaman pangan: 25%, dengan komoditas utama padi, jagung, dan ubi kayu.
- Perkebunan: 2%, terutama dari kelapa sawit, kopi, dan karet.
- Sayuran: 2%, mencakup sayuran dataran tinggi dan rendah.
- Peternakan dan perikanan: berkontribusi <1%, namun memiliki potensi untuk dikembangkan.

Surplus pangan yang besar ini tidak hanya menjadi indikator kemampuan produksi, tetapi juga mencerminkan adanya peluang untuk mengembangkan agroindustri dan memperluas pasar distribusi, baik untuk konsumsi lokal maupun ekspor. Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan agar surplus pangan ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan, antara lain:

1. Penguatan sistem logistik pangan untuk meminimalkan kehilangan pascapanen dan menjamin distribusi merata ke seluruh wilayah.
2. Pengembangan teknologi pertanian ramah lingkungan guna mempertahankan produktivitas tanpa merusak sumber daya alam.
3. Diversifikasi komoditas agar ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada beberapa komoditas utama.
4. Peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan.

Dengan mempertahankan kinerja produksi pangan yang tinggi serta mengintegrasikan prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan, Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pusat produksi pangan unggulan di Sumatera Utara, sekaligus berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya tujuan ke-2 yaitu Tanpa Kelaparan (Zero Hunger).

b. Daya Dukung Air

Berdasarkan hasil **Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)** RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025–2029, total ketersediaan air di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan mencapai **371.797.266,01 m³/tahun**. Jumlah ini berasal dari potensi sumber daya air yang tersebar di seluruh kecamatan, baik yang bersumber dari aliran sungai, mata air, maupun tampungan air permukaan.

Analisis proyeksi kebutuhan air dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, kebutuhan air per kapita, serta kebutuhan sektor non-domestik seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan industri. Dengan menggunakan standar kebutuhan air domestik sebesar **60 m³/jiwa/tahun** (sesuai Permen PUPR) dan tambahan faktor 70% untuk sektor non-domestik, diperoleh proyeksi kebutuhan air sebagaimana pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Status Daya Dukung Air Kabupaten Tapanuli Selatan (Proyeksi 2025–2029)

Tahun	Ketersediaan Air (m³/tahun)	Kebutuhan Air (m³/tahun)	Selisih (m³/tahun)	Status
2025	371.797.266,01	33.539.723,40	338.257.542,61	Surplus
2026	371.797.266,01	34.794.593,98	337.002.672,03	Surplus
2027	371.797.266,01	36.093.037,54	335.704.228,47	Surplus
2028	371.797.266,01	37.436.634,47	334.360.631,54	Surplus
2029	371.797.266,01	38.826.075,40	332.971.190,61	Surplus
2030	379.233.211,33	39.602.596,91	339.630.614,42	Surplus

Sumber : KLHS RPJMD Tapsel 2025-2029

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa hingga akhir periode perencanaan tahun 2029, Kabupaten Tapanuli Selatan tetap berada pada kondisi surplus daya dukung air yang sangat signifikan. Surplus ini mencerminkan bahwa ketersediaan air di wilayah ini mampu memenuhi kebutuhan penduduk dan sektor-sektor lainnya secara berkelanjutan.

Surplus yang tinggi ini terutama didukung oleh:

1. Kondisi hidrologi yang baik, dengan keberadaan beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) besar seperti DAS Barumun Bilah, DAS Batang Gadis, dan DAS Batangtoru.
2. Tutupan lahan yang masih relatif terjaga, terutama di wilayah hulu, yang berperan penting dalam menjaga ketersediaan sumber daya air.
3. Distribusi jasa lingkungan penyediaan air yang tinggi–sangat tinggi di beberapa kecamatan, antara lain Kecamatan Saipar Dolok Hole (9,91% atau 43.198,39 ha), Kecamatan Aek Bilah (8,24% atau 35.928,65 ha), dan Kecamatan Arse (5,78% atau 25.181,31 ha).

Dengan kondisi ini, Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki peluang besar untuk mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya air, sekaligus mengantisipasi potensi risiko kekurangan air di masa mendatang akibat perubahan iklim dan peningkatan kebutuhan akibat pertumbuhan penduduk.

c. Distribusi Jasa Penyediaan Pangan Kategori Tinggi–Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil pemetaan dan analisis **Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**, distribusi jasa lingkungan penyediaan pangan di Kabupaten Tapanuli Selatan menunjukkan variasi antar kecamatan, dengan beberapa wilayah memiliki kategori tinggi hingga sangat tinggi. Distribusi ini menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam menyediakan komoditas pangan secara berkelanjutan, yang didukung oleh potensi lahan, kondisi agroklimat, dan aktivitas pertanian masyarakat.

Beberapa kecamatan yang menonjol dalam penyediaan jasa lingkungan pangan kategori tinggi–sangat tinggi antara lain:

1. **Kecamatan Muara Batangtoru**

Kecamatan ini memiliki kontribusi terbesar terhadap jasa penyediaan pangan dengan persentase **4,21%** atau setara **18.361 hektar** dari total wilayah potensial di kabupaten. Luas lahan tersebut sebagian besar dimanfaatkan untuk pengembangan hortikultura, tanaman pangan, dan kebun campuran. Keunggulan wilayah ini didukung oleh kondisi tanah yang subur, ketersediaan air yang memadai dari aliran Sungai Batangtoru, serta aksesibilitas yang relatif baik menuju pasar-pasar utama. Potensi ini menjadikan Muara Batangtoru sebagai salah satu lumbung pangan penting di Tapanuli Selatan.

2. **Kecamatan Angkola Sangkunur**

Menyumbang **2,71%** atau sekitar **11.810,45 hektar** lahan dengan kategori jasa penyediaan pangan tinggi–sangat tinggi. Wilayah ini didominasi oleh pertanian tanaman pangan, terutama padi sawah, jagung, dan ubi kayu, yang didukung oleh ketersediaan lahan basah di daerah sekitar Danau Siais. Selain itu, Angkola Sangkunur memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan daerah karena menjadi salah satu sentra produksi beras lokal.

3. **Kecamatan Sipirok**

Memiliki persentase **2,57%** atau **11.176,92 hektar** lahan berpotensi tinggi–sangat tinggi dalam penyediaan pangan. Kecamatan ini dikenal sebagai penghasil berbagai komoditas hortikultura, terutama sayur-sayuran dataran tinggi, kopi, dan buah-buahan. Kondisi iklim sejuk serta kesuburan tanah vulkanik dari pegunungan sekitar menjadikan Sipirok memiliki keunggulan komparatif dalam produksi pangan berkualitas tinggi.

Secara keseluruhan, tiga kecamatan tersebut menyumbang hampir **9,49%** dari total luas wilayah yang memiliki kategori jasa penyediaan pangan tinggi–sangat tinggi di Kabupaten Tapanuli Selatan. Potensi ini menjadi aset strategis bagi daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan, mendukung sektor pertanian berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan petani.

Pengelolaan potensi ini perlu diarahkan pada:

- **Optimalisasi produktivitas lahan** melalui penerapan teknologi pertanian modern dan ramah lingkungan.
- **Penguatan infrastruktur pertanian**, seperti irigasi, jalan usaha tani, dan fasilitas penyimpanan hasil panen.
- **Pengembangan pasar dan distribusi**, termasuk promosi produk unggulan daerah untuk menjangkau pasar yang lebih luas.
- **Konservasi sumber daya alam**, agar ketersediaan lahan dan kualitas lingkungan tetap terjaga untuk jangka panjang.

Dengan pengelolaan yang tepat, distribusi jasa penyediaan pangan kategori tinggi–sangat tinggi di Kabupaten Tapanuli Selatan akan menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal, sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) khususnya pada aspek ketahanan pangan.

2. Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan indikator penting untuk mengukur kemampuan wilayah dalam menyediakan berbagai jasa ekosistem yang mendukung keberlanjutan pembangunan. Penilaian daya tampung ini mencakup beberapa komponen utama, yaitu jasa pengaturan tata air dan banjir, jasa penyediaan air, serta jasa pengaturan iklim. Ketiga jasa lingkungan ini saling terkait dan berkontribusi besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem, ketersediaan sumber daya, dan perlindungan terhadap bencana alam.

a. Jasa Pengaturan Tata Air dan Banjir (Kategori Tinggi)

Jasa pengaturan tata air dan banjir berperan penting dalam mengendalikan aliran air permukaan, mengurangi risiko banjir, serta menjaga ketersediaan air di musim kemarau. Kecamatan dengan kontribusi tertinggi dalam kategori ini adalah:

- **Kecamatan Saipar Dolok Hole** dengan kontribusi **11,04%** atau **48.092,59 hektar**. Wilayah ini memiliki tutupan lahan yang baik, didukung oleh kondisi topografi yang memungkinkan penyerapan dan penyimpanan air secara optimal.
- **Kecamatan Aek Bilah** dengan kontribusi **8,44%** atau **36.771,01 hektar**, yang didominasi oleh kawasan hutan dan lahan vegetasi rapat, berfungsi sebagai daerah resapan alami.
- **Kecamatan Sipirok** dengan kontribusi **6,69%** atau **29.172,29 hektar**, memiliki kombinasi ekosistem hutan dan pertanian yang mendukung pengaturan tata air.

Secara keseluruhan, ketiga kecamatan ini memberikan kontribusi **26,17%** atau **114.035,89 hektar** dari total luas wilayah kabupaten, menjadikannya sebagai wilayah strategis dalam pengelolaan risiko banjir dan tata kelola air.

b. Jasa Penyediaan Air (Kategori Tinggi–Sangat Tinggi)

Jasa penyediaan air merupakan kemampuan ekosistem untuk menghasilkan dan menyediakan air bersih bagi kebutuhan domestik, pertanian, industri, dan ekosistem alami. Kecamatan yang memiliki kontribusi terbesar adalah:

- **Kecamatan Saipar Dolok Hole**: **9,91%** atau **43.198,39 hektar**, wilayah ini memiliki jaringan sungai dan mata air yang stabil sepanjang tahun.
- **Kecamatan Aek Bilah**: **8,24%** atau **35.928,65 hektar**, yang memanfaatkan potensi sumber air permukaan dan air tanah dengan kualitas yang relatif baik.
- **Kecamatan Arse**: **5,78%** atau **25.181,31 hektar**, didukung oleh kombinasi sumber air dari pegunungan dan sistem aliran air dari daerah tangkapan hujan.

Ketiga kecamatan ini menjadi pusat penyediaan air strategis, yang berperan penting dalam menjamin ketersediaan air bagi masyarakat dan kegiatan ekonomi di Kabupaten Tapanuli Selatan.

c. Jasa Pengaturan Iklim (Kategori Tinggi–Sangat Tinggi)

Pengaturan iklim lokal sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan vegetasi dan ekosistem yang sehat, yang berperan dalam penyerapan karbon, pengendalian suhu, dan kelembaban udara. Kecamatan dengan kontribusi utama adalah:

- **Kecamatan Saipar Dolok Hole**: **9,03%** atau **39.345,94 hektar**, memiliki kawasan hutan yang luas dan ekosistem pegunungan yang berperan sebagai penyeimbang iklim lokal.
- **Kecamatan Angkola Selatan**: **8,78%** atau **38.255,74 hektar**, dengan tutupan vegetasi campuran yang mendukung kestabilan iklim dan kualitas udara.
- **Kecamatan Aek Bilah**: **8,38%** atau **36.512,23 hektar**, memanfaatkan potensi vegetasi alami dalam pengendalian suhu dan kelembaban.

Secara keseluruhan, ketiga kecamatan ini berkontribusi sebesar **26,19%** atau **114.113,91 hektar** dari total luas wilayah kabupaten, yang menjadi benteng ekologis penting dalam mitigasi perubahan iklim.

1.1.3. Demografi

Demografi atau kependudukan mempelajari tentang penduduk terutama yang terkait dengan jumlah, struktur, komposisi dan perkembangan (perubahan) penduduk. Kondisi demografi dalam pembangunan daerah akan memberikan ukuran, struktur, maupun distribusi/persebaran penduduk baik secara series maupun kewilayahan. Analisis aspek demografi ini menjadi penting mengingat subyek sekaligus obyek pembangunan adalah masyarakat atau penduduk, sehingga keterkaitan antara demografi dengan aspek-aspek lain akan menjadi perlu untuk diperhatikan secara seksama.

Jumlah penduduk Tapanuli Selatan mengalami peningkatan di setiap tahunnya hingga mencapai 281.931 jiwa pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 mencapai 300.911 Jiwa sedangkan jumlah penduduk tahun 2021 sebesar 303.685 jiwa dan tahun 2022 sebesar 307,312 jiwa dan tahun 2023

sebesar 312.540 jiwa sedang tahun 2024 sebesar 322.377 jiwa Peningkatan ini tentu saja berasal dari pertumbuhan penduduk alami melalui kelahiran dan pertumbuhan penduduk melalui migrasi, jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2024 lebih banyak dari pada pendudukn perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 101,49 yang artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki, dan dilhat dari kelompok umur persentase penduduk usia 0-14 tahun sebesar 28,87 persen, 15-64 tahun sebesar 65,43 persen dan usia 65 tahun keatas sebesar 5,69 persen yang berarti jumlah penduduk usia Produktif lebih besar dari pada penduduk usia non produktif, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin serta karakteristik geografis yang dapat mempengaruhi aksesibilitas layanan dasar bagi perempuan dan laki-laki. Perencanaan wilayah dan pemanfaatan ruang juga harus mempertimbangkan kebutuhan mobilitas kelompok rentan termasuk perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Kesejahteraan Sosial Budaya

1. Kondisi Sosial Budaya

Kondisi Sosial masyarakat daerah Kabupaten Tapanuli Selatan masih berlandaskan agama dan adat budaya dengan tatanan kehidupan kekerabatan dan kebersamaan yang masih cukup tinggi. Peradaban tersebut telah tumbuh dan berkembang sejak dahulu kala secara baik dan berkesinambungan, akan tetapi dengan perkembangan zaman dan penggunaan Teknologi informasi yang cepat dan tanpa batas, mulai mengalami pergeseran sikap dan perilaku masyarakat pengamalan terhadap adat budaya juga mengalami penurunan terutama kaum remaja yang menjadi generasi penerus daerah, pengamalan adat budaya sudah mulai terkikis dan nilai-nilai religi adat budaya telah menjadi komoditi minoritas dan pengamalannyapun hanya tinggal sebatas upacara ritual belaka.

Nilai-Nilai Luhur adat budaya daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada dasarnya cukup relepan dan sesuai dengan kehidupan demikrasi Pancasila yang menjadi dasar kehidupan bernegara, ini dapat di gambarkan dengan wujud pelaksanaannya seperti budaya gotong royong (marsialap ari), wujud kebersamaan (saanak saboru), musyawarah dan mufakat (dalian na tolu), pola hidup tertib dan keperdulian terhadap lingkungan melalui poda na lima (paias rohamu, paias pamatangmu, paias pakaianmu, paias bagasmu, paias pakaranganmu) masih sangat sesuai dan perlu untuk dikembangkan dan dilestarikan. Disamping itu juga pembangunan kesejahteraan masyarakat secara responsif gender diarahkan untuk menjamin bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, dan perlindungan sosial. Intervensi berbasis gender dibutuhkan untuk menutup kesenjangan kesejahteraan, khususnya pada kelompok perempuan kepala keluarga, perempuan di sektor informal, dan perempuan di pedesaa

2. **Kondisi Kehidupan beragama**

Kondisi Kehidupan beragama di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan bahwa kerukunan antar umat beragama masih terpelihara secara kondusif dan berkesinambungan, sehingga pengamalan ajaran agama dari masing-masing pemeluk agama dapat berjalan dengan baik.

Jumlah penduduk kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2024 sebesar 322.377 Jiwa adalah daerah yang penduduknya mayoritas beragama islam yaitu sebesar 79,90%; 18,79% beragama Kristen protestan; 1,30% beragama Kristen Katolik,0,34% beragama budha dan 0,01 beragama konghucu.

Kondisi jumlah rumah ibadah yang tersebar di 14 kecamatan pada tahun 2023 adalah sebayak 599 buah masjid, gereja protestan sebanyak 130 buah dan 47 buah gereja katolik.

Dengan perkembangan teknologi dan informasi yang cepat dan tanpa batas telah mulai membawa dampak negative terhadap kehidupan beragama terutama generasi muda yang dapat dilihat dari mulai memudarnya rasa penghayatan dan pengamalan ajaran agama secara tertib, baik dan benar.

Berdasarkan kondisi tersebut program pembangunan kedepan, pembangunan kehidupan social budaya dan kehidupan beragama masih perlu mendapatkan pe rhatian dari semua pihak.

3. Kondisi Kesehatan dan IPM

Pembangunan Kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar dari masyarakat, dengan tujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan Kesehatan secara mudah, murah, merata dan pelayanan yang maksimal. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat Kesehatan masyarakat yang baik.

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun kehidupan yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat sehingga capaian positifnya sangat mengindikasikan perkembangan fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah.

Angka harapan hidup Tapanuli Selatan juga mengalami peningkatan di setiap tahunnya hingga mencapai 64,91 tahun pada tahun 2020, tahun 2021 mencapai 65.11 sedangkan tahun 2022 sebesar 71.35, tahun 2023 sebesar 71.61 dan tahun 2024 sebesar 75.18. Hal ini mengindikasikan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dikarenakan berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah. Angka harapan hidup Tapanuli Selatan ini merepresentasikan bahwa bayi yang baru lahir pada tahun 2024 akan memiliki harapan untuk hidup hingga berumur 70-75 tahun.

Grafik II.2
Angka Harapan Hidup
Kabupaten Tapanuli Selatan, Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024

Ada Beberapa Faktor-faktor yang mempenagruhi derajat Kesehatan masyarakat diantaranya adalah kurangnya sarana pelayanan Kesehatan, keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai, rendahnya kesadana masyarakat mengkonsumsi makanan yang bergizi, hidup sehat, tetapi factor terpenting dalam upaya peningkatan Kesehatan terletak pada manusianya sebagai subyek dan sekaligus obyek dari upaya tersebut.

Dalam peningkatan pelayanan Kesehatan tersebut tentunya diperlukan dana dan anggaran yang tidak sedikit. Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan telah menyediakan anggaran Kesehatan sebesar Rp. 274.999.083.883,- yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan pelayanan di daerah, termasuk juga dalam penyediaan peralatan pada Rumah sakit baru Pintu Padang di Kecamatan Batang Angkola.

Untuk menggambarkan Kesehatan masyarakat suatau daerah, ada banyak indikator makro yang dapat digunakan dalam pengukurannya diantaranya adalah angka kematian ibu, Angka kematian bayi (infant Mortality Rate/IMR) angka harapan hidup.

Untuk angka harapan hidup kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Tahun 2024 sebesar 75.18 tahun untuk tahun 2023 adalah sebesar 71,61 tahun sedangkan pada tahun 2022 sebesar 71,35. Jumlah kematian ibu tahun 2024 sebanyak 1; tahun 2023 sebanyak 1 untuk tahun 2022 sebesar 2 sedangkan tahun 2021 sebesar 2 dan Jumlah kematian bayi tahun 2024 sebanyak 2; tahun 2023 sebanyak 2 dan di tahun 2022 sebesar 3,untuk tahun 2021 sebesar 3.

Pada tingkat kesakitan/morbiditas didefinisikan sebagai persentase penduduk yang mempunyai keluhan Kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-harinya dalam senulan yang lalu, tingkat kesakitan ini selain secara umum dapat juga dilihat dari jenis keluhan menurut jenis penyakit.

Berdasarkan data 3 tahun terakhir tingkat Angka Kesakitan di daerah menunjukkan pola yang naik turun pada tahun 2021 sebayak 5.42% penduduk mengalami keluhan Kesehatan, Pada tahun 2022 menjadi 13.38% penduduk mengalami keluhan Kesehatan, pada tahun 2023 sebanyak 7.21% dan 2024 sebesar 6,10% penduduk mengalami keluhan Kesehatan, pada tahun 2019 sebanyak 29.492 penduduk mengalami keluhan Kesehatan, pada tahun 2020 sebanyak 69.147 penduduk mengalami keluhan Kesehatan dan pada tahun 2021 sebanyak 57.562 penduduk mengalami keluhan Kesehatan, pada tahun 2022 sebanyak 53.458 penduduk mengalami keluhan Kesehatan . Jika dilihat dari jenis kelamin dapat dikatakan tidak ada perbedaan yang signifikan, hal ini terlihat dari persentase Wanita yang mengalami keluhan Kesehatan sebesar 53,43% dan pria sebesar 46,57% Pada tahun 2021 dan tahun 2022 wanita sebesar 48,85% dan Pria sebesar 44,02%.

Tabel II.10
Perkembangan tingkat Morbiditas Penduduk Tapsel,
Tahun 2020-2024

Uraian	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
Angka Kesakitan	**4,43**	**5,42**	**13,38**	**7,21**	**6,10**

Kondisi dan perkembangan kesehatan di Kabupaten Tapanuli Selatan dalam periode 2025-2029 perlu ditinjau dari perkembangan sarana kesehatan yang tersedia dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Mengingat luasnya sarana kesehatan yang perlu dianalisis maka untuk menghindarkan kerumitan maka sarana kesehatan yang dianalisis dibagi atas kelompok yaitu: ketersediaan unit pelayanan pada tahun 2024 rumah sakit 3 unit, (Puskesmas sebanyak 17 unit, Puskesmas Pembantu sebanyak 56 unit,Poskesdes sebanyak 16 unit, Polindes 30, Posyandu sebanyak 535 unit), ketersediaan dokter pada tahun 2024 sebanyak 97 dokter (Dokter Umum sebanyak 65 orang, Dokter Gigi sebanyak 7 orang, Dokter Spesialis sebanyak 25 orang) dan ketersediaan tenaga keperawatan pada tahun 2024 (bidan sebanyak 925 orang, perawat sebanyak 280 orang, dan 31 tenaga kefarmasian). Selanjutnya, dalam analisis dibedakan wilayah pedesaan dan perkotaan untuk mengetahui seberapa besar kesenjangan pelayanan kesehatan antar desa dan kota. Dengan demikian, rencana pembangunan kesehatan akan dapat lebih diarahkan kepada pemerataan.

Tabel II-11

Perkembangan Sarana Kesehatan di Kabupaten Tapanuli Selatan

NO	Sarana Kesehatan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Puskesmas	16	16	16	17	17
2	Puskesmas Pembantu	55	55	55	55	56
3	Balai Pengobatan	10	10	9	11	11
4	Posyandu	535	535	535	535	535
5	Tempat Tidur Rumah Sakit	120	100	102	162	162

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025

4. Keluarga Berencana

Perkembangan keluarga berencana dalam periode 2020-2024 terlihat cukup mengembirakan seperti terlihat pada Tabel dibawah. tingkat pertumbuhan jumlah pasangan usia subur dalam periode 2020-2024 yaitu rata-rata -5.86 % per tahun. Penurunan jumlah pasangan usia subur ini membuat jumlah akseptor baru juga mengalami pertumbuhan yang naik turun yaitu rata-rata 10,57 % per tahun pada periode 2020-2024. Peningkatan jumlah akseptor KB tidak terlepas dari peningkatan jumlah sarana pelayanan keluarga berencana seperti klinik KB, tenaga perawat dan lain.lain. Data BPS menunjukkan bahwa dalam Tahun 2024 jumlah klinik KB turun menjadi sebanyak 18 Klinik KB

Tabel II.12

Perkembangan Jumlah Pasangan Usia Subur, Akseptor KB dan Jumlah Klinik KB di Kabupaten Tapanuli Selatan

NO	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024	Persentase Pertumbuhan
1	PASANGAN USIA SUBUR	46.920	36.651	37.265	37.366	36.847	-5,86
2	AKSEPTOR BARU	8.626	7.960	5.930	10.504	12.894	10,57
3	JUMLAH KLINIK KB	71	71	18	18	18	-29,04

Sumber : BPS Sumatera Utara

5. Stunting

Stunting merupakan program nasional yang harus di dukung oleh pemerintah daerah, intervensi dari pemerintah daerah diperlukan dalam penurunan prevalensi pencegahan stunting, Oleh sebab itu, sangat diperlukan suatu penelitian yang dapat menyajikan fakta secara komprehensif mengenai program pencegahan stunting di Indonesia, agar bermanfaat bagi pemerintah dalam pembuatan kebijakan mengenai program pencegahan stunting yang lebih tepat dan efi sien. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi program pencegahan stunting di Indonesia. Pemberian makan tambahan, pembangunan jamban, pembangunan sarana air bersih masih perlu dilakukan untuk penurunan

stunting di daerah, Persentase prevalansi stunting tapanuli Selatan tahun 2022 sebesar 39,4% merupakan yang paling besar seSumatera Utara dan di tahun 2023 mencapai angka prevalesnis 15.6%; kemudian di tahun 2024 angka prevalesnis sebesar 6.60% Angka ini turun 9,30% dari prevalensi stunting pada tahun 2023 , namun harapannya di periode berikutnya prevalensi stunting dapat lebih diturunkan lagi di Daerah Tapanuli Selatan.

6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

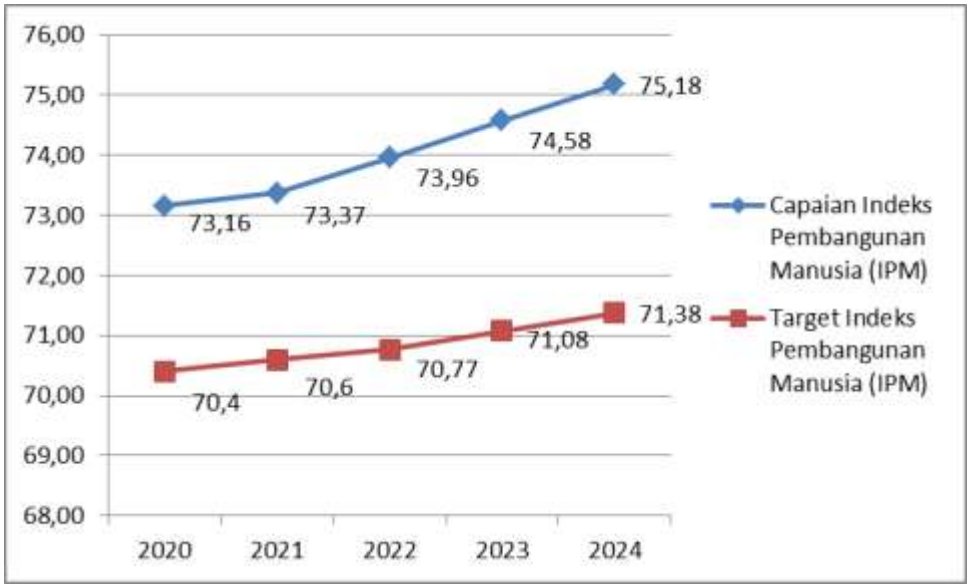
Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat) dan horisontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah akan tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang untuk hidup sehat, berpendidikan dan berketerampilan serta mampu mencukupi kebutuhan, baik primer, sekunder, maupun tersier. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia, salah satunya dilakukan dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tapanuli Selatan mengalami peningkatan di setiap tahunnya dimana tahun 2020 sebesar 73.16; tahun 2021 sebesar 73.37; pada tahun 2022 telah mencapai angka 73,96; tahun 2023 sebesar 74.58 angka dan di tahun 2024 sebesar 75.18 meningkat 0.6 atau 0.8% dari tahun 2023, capaian Ipm Tapanuli Selatan ini telah tergolong pada kategori tinggi.

Capaian ini tentu saja merupakan rapor positif terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Tapanuli Selatan baik dari sisi pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat. Jika dilihat dari perkembangan IPM di Provinsi Sumatera Utara IPM Kabupaten Tapanuli Selatan masih dibawah angka IPM Provinsi Sumatera Utara yang sudah mencapai angka 75,76% pada tahun 2024. Peningkatan ini secara umum disebabkan adanya peningkatan dari seluruh komponen penyusun IPM sebagaimana terlihat pada tabel berikut. Perbandingan antara target

dan realisasi IPM pada RPJMD 2020-2024 dapat kita lihat pada tabel dan grafik berikut :

Garfik Perbandingan antara target dan realisasi IPM pada RPJMD 2020-2024



Sumberdata : BPS tapanuli Selatan tahun 2025

Untuk melihat capaian komponen indikator yang ada di indeks pembangunan manusia pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel II.13
Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Penyusunnya
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2023

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	9,28	9.29	9.34	9.51	9.56

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Harapan Usia Lama Sekolah	Tahun	13,24	13.35	13.37	13.58	13.72
Angka Harapan Hidup	Tahun	64,91	65.11	71.35	71.61	75.18
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Ribu Rp/Kapita /Tahun	11.236	11.304	11.727	11.829	11.939

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024

Grafik II.3
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Tapanuli Selatan, Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024

Capaian angka IPM Kabupaten Tapanuli Selatan dibandingkan dengan Provinsi dan Kab/Kota yang ada di daerah Provinsi Sumatera Utara Khususnya sekawasan Tapanuli bagian selatan di Pantai Barat Sumatera Utara dapat dilihat dari Tabel dan Grafik berikut :

Tabel II. 14
Perbandingan data indeks pembangunan manusia(IPM) Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan kab/kota di kawasan Tapanuli Bagian Selatan

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MENURUT KABUPATEN/KOTA TAPANULI BAGIAN SELATAN						
NAMA DAERAH	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	Rata-Rata Pertumbuhan (IPM) (%)
1	2	3	4	5	6	7
Sumatera Utara	73.62	73.84	74.51	75.13	75.76	0.72
Mandailing Natal	70.89	71.31	72.17	72.65	73.44	0.89
Tapanuli Selatan	70.12	70.45	73.96	74.58	75.18	1.76
Tapanuli Tengah	71.1	71.48	72.18	72.77	73.34	0.78
Tapanuli Utara	75.77	76.06	76.43	76.86	77.48	0.56
Padang Lawas Utara	71.69	71.96	72.77	73.45	74.11	0.83
Padang Lawas	70.08	70.48	71.41	72.16	73.10	1.06
Sibolga	75.56	75.87	76.69	77.07	77.52	0.64
Padangsidimpuan	76.93	77.19	77.73	78.1	78.61	0.54

Grafik II.4

Rata-rata pertumbuhan indeks pembangunan manusia(IPM) Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan kab/kota di kawasan Tapanuli Bagian Selatan



7.Pendidikan

Pendidikan dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia dari segi ilmu pengetahuan. Indikator pendidikan yang menjadi unsur pembentuk IPM yakni harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, yang dijabarkan sebagai berikut.

- Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

  Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Adapun cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun penduduk sudah menyelesaikan jenjang pendidikan.

  Rata-rata lama sekolah masyarakat di Tapanuli Selatan mengalami peningkatan di setiap tahunnya hingga mencapai 9.51

tahun pada tahun 2023 dan tahun 2024 mencapai 9.56 tahun. Angka ini merepresentasikan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan selama masa sekolah selama 9,56 tahun atau telah bersekolah hingga SMA kelas X. Meskipun rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan, namun masih memerlukan perjuangan panjang untuk mampu memberikan pendidikan 12 tahun bagi masyarakat.

Grafik II.5
Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Tapanuli Selatan, Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024

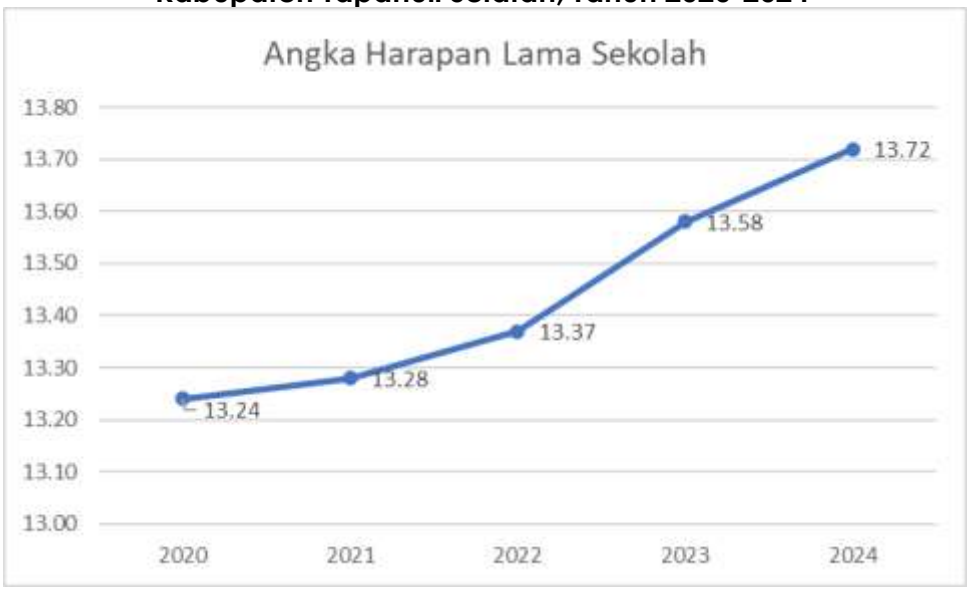
- Harapan Lama Sekolah (HLS)

  Selain Rata-rata Lama Sekolah (RLS), indikator lain yang memperlihatkan kualitas pendidikan suatu wilayah adalah harapan lama sekolah. Indikator Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang menggantikan indikator sebelumnya yaitu Indikator Angka Melek Huruf yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-

rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh).

Terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2023 dan 2024 terhadap indikator harapan lama sekolah. Harapan lama sekolah di Tapanuli Selatan meningkat dari tahun 2023 sebesar 13.58 menjadi 13,72 tahun pada tahun 2024. Angka ini merepresentasikan bahwa penduduk yang berusia 7 tahun memiliki harapan untuk bersekolah hingga 13,72 tahun lamanya atau mampu bersekolah hingga perguruan tinggi.

Grafik II.6
Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Tapanuli Selatan, Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024

8. Kondisi Angka Kriminalitas

Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan daerah yang tergolong aman dan kondusif untuk dapat berinvestasi dimana Angka Kriminalitas tergolong rendah dimana pada tahun 2017 sebesar 9,71 dan mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 3,02 . Namun angka ini secara keseluruhan masih dalam batas toleransi dan tidak menggangu tumbuhnya investasi didaerah. Namun Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan tetap berupaya agar angka kriminalitas tidak terus meningkat

khususnya kasus narkoba yang menunjukkan peningkatan yang cukup mengkhawatirkan pada akhir-akhir ini.

Grafik II.7
Angka Kriminalitas
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2023



Sumber : Satpol PP Tapanuli Selatan Tahun 2024 (data Diolah)

9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Kinerja pembangunan pada urusan pemberdayaan masyarakat, dapat dilihat dari keterlibatan lembaga masyarakat dan masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah tidak mampu menangani sendiri tanpa dukungan dan peran serta semua pihak yaitu swasta, pelaku usaha, perguruan tinggi, LSM dan masyarakat. Dari berbagai upaya yang telah dilakukan, terlihat capaian positif di tahun 2024 dimana persentase desa berstatus Kategori Mandiri sebanyak 9 desa, Jumlah Desa Kategori Maju sebanyak 72 Desa, Jumlah Desa Kategori Berkembang sebanyak : 130 Desa, Jumlah Desa Kategori Tertinggal sebanyak : O Desa, Jumlah Desa Kategori Sangat Tertingal : 0 Desa.

B. Kesejahteraan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ini akan menjabarkan hasil pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan utamanya terkait bidang

perekonomian daerah. Fokus ini akan mengkaji lebih dalam berbagai indikator-indikator perekonomian baik makro maupun mikro yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan esensi dari pergerakan roda perekonomian (pembangunan perekonomian) Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier. Oleh karena itu, penting adanya melihat berbagai indikator perekonomian pada tujuan pembangunan tersebut demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

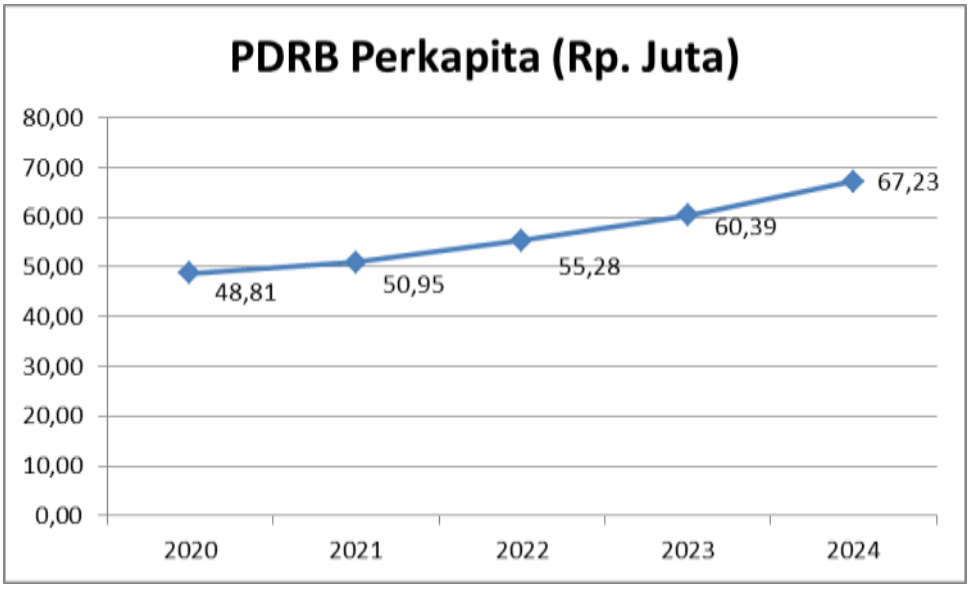
Indikator-indikator utama yang akan digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, hingga pendapatan regional. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan provinsi hingga nasional.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto sebagai salah satu indikator ekonomi memuat berbagai instrumen ekonomi yang di dalamnya memuat kondisi makro ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi, *income* per kapita dan instrumen ekonomi lainnya dalam suatu daerah. PDRB merupakan jumlah nilai tambah bruto yang timbul akibat adanya berbagai kegiatan ekonomi atau proses produksi yang tercipta di suatu daerah atau region dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi dimiliki daerah tersebut atau tidak.

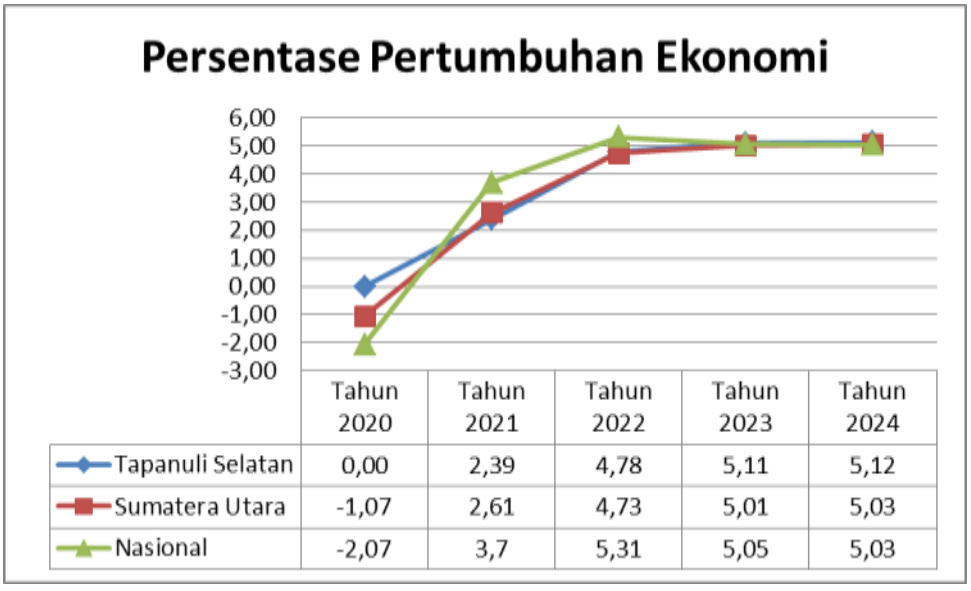
PDRB Tapanuli Selatan terus mengalami peningkatan di setiap tahun selama periode tahun 2020-2024 baik berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan dan untuk tahun 2020 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi secara tajam sehingga hanya tumbuh 0,39% akibat pandemi Covid-19 sementara pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara justru mengalami kontraksi menjadi **minus 1,07%** dan pertumbuhan ekonomi secara nasional **minus 2,07%.** Untuk tahun 2021 PDRB Tapanuli Selatan berdasarkan harga konstan naik sebesar 3,24% dan untuk Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 4,78%. Dan tahun 2023 sebesar 5,11% dan meningkat lagi di tahun 2024 menjadi 5,12% Sektor pertanian masih mendominasi kontribusi terhadap total PDRB.

Grafik II.8
Perkembangan Pertumbuhan PDRB
Kabupaten Tapanuli Selatan Periode Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025

Grafik II.9
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapanuli Selatan,
Provinsi Sumatera Utara Dan Nasional Tahun 2020-2024



	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Tapanuli Selatan	0,00	2,39	4,78	5,11	5,12
Sumatera Utara	-1,07	2,61	4,73	5,01	5,03
Nasional	-2,07	3,7	5,31	5,05	5,03

Sumber : BPS Tapanuli Selatan, BPS Provinsi Sumatera Utara dan BPS Pusattahun 2025

Tabel II.15
Struktur Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024

Sektor	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	40,04	40,87	42,54	43,13	43.54
B	Pertambangan dan Penggalian	15,92	15,04	14,13	13,54	14.28
C	Industri Pengolahan	6,36	6,57	6,67	6,41	6.25
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0.05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08
F	Konstruksi	11,52	11,67	11,63	11,61	10.81
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,18	11,38	11,18	11,21	11.00
H	Transportasi dan Pergudangan	1,57	1,57	1,57	1,71	1.74
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,39	1,32	1,29	1,39	1.41
J	Informasi dan Komunikasi	0,54	0,56	0,57	0,58	0.54
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,83	0,86	0,87	0,87	0.81
L	Real Estate	2,12	2,06	1,96	1,91	1.82
M,N	Jasa Perusahaan	0,06	0,05	0,05	0,05	0.05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,75	6,36	5,94	5,98	6.17
P	Jasa Pendidikan	6,71	0,70	0,66	0,66	0.65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,84	0,80	0,76	0,76	0.76
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,04	0,04	0,04	0,04	0.04
PDRB		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100.00**

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024

Secara umum, terjadi pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2019 dengan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,23 persen dan di tahun 2023 sebesar 5.11 persen serta tahun 2024 sebesar 5.12 persen. Capaian pertumbuhan ekonomi ini sebagian besar didukung oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang merupakan kontributor terbesar dalam struktur ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi sektoral sebesar 5,20 persen. Meski demikian, terdapat pertumbuhan ekonomi yang naik secara signifikan yaitu pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terjadi penambahan sebesar 1.65, secara keseluruhan sektor dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel II.16
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kategori Lapangan Usaha
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024

Kategori	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,96	3,75	6,90	5,09	5.20
B	Pertambangan dan Penggalian	-5,91	1,24	0,06	-1,07	2.57
C	Industri Pengolahan	-4,35	3,61	4,38	5,93	5.40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,74	7,68	6,33	6,18	3.74
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,38	7,61	6,53	6,86	3.79
F	Konstruksi	-2,47	4,40	0,66	7,03	3.01
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-1,48	4,62	5,99	7,38	7.27
H	Transportasi dan Pergudangan	-3,05	2,32	8,84	12,97	9.57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-2,24	0,17	7,42	8,98	10.63
J	Informasi dan Komunikasi	7,14	7,25	7,96	7,97	7.95
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,24	5,89	5,02	5,60	3.21
L	Real Estate	3,88	0,45	3,05	4,76	4.83
M,N	Jasa Perusahaan	-2,71	-0,05	2,96	6,72	5.44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,40	-0,41	2,28	4,52	5.37
P	Jasa Pendidikan	4,20	3,95	4,56	7,87	6.84
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,64	-0,39	2,94	6,23	8.32
R,S,T,U	Jasa Lainnya	-1,90	3,17	5,26	8,21	6.69
PDRB		**0,39**	**3,24**	**4,78**	**5,11**	**5.12**

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024

1. Kondisi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Sektor pertanian menjadi sektor dominan pada struktur perekonomian Tapanuli Selatan. Hal ini menjadikan sektor ini perlu ditingkatkan agar mampu menjadi penyeimbang dalam perkembangan perekonomian daerah, khususnya selama Pandemi COVID-19 ini berlangsung sebagai sektor unggulan dikarenakan sektor pertanian memiliki daya tahan yang tinggi dan telah teruji dalam menghadapi krisis termasuk menghadapi dampak pandemi Covid-19 yang telah lalu.

Pada kenyataannya kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB mengalami penurunan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2020 sebesar 40,04 persen terus meningkat hingga 43,54 persen pada tahun 2024. Penurunan kontribusi tersebut bukan disebabkan penurunan produksi akan tetapi lebih disebabkan pertumbuhan sektor-sektor lain lebih tinggi dibandingkan

pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sehingga menyebabkan dominasi sektor pertanian semakin menurun.

Perkembangan pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.17
Pertumbuhan Ekonomi dan Kontibusi Sektor Pertanian
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	3,96	3,75	6,90	5,09	5,20
2	Struktur Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	40,04	40,87	42,54	43,13	43,54

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025

2. Kondisi Sumber Daya Perikanan dan Kelautan

a. Sub sektor perikanan juga pada saat ini sedang mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Selama ini sub sektor perikanan di Kabupaten Tapanuli Selatan masih didominasi oleh budidaya ikan air tawar sedangkan usaha penangkapan ikan di laut masih sangat kecil. Kondisi ini disebabkan karena usaha penangkapan ikan di laut terkesan dilupakan dan masih menggunakan cara tradisional sehingga hasilnya juga tidak signifikan padahal potensi yang terkandung sangat besar.

b. Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki potensi sumber daya perikanan yang luas yaitu potensi sumber daya perikanan air tawar dan potensi sumber daya perikanan laut. Potensi sumber daya perikanan air tawar terdiri dari Kolam Air Tenang (KAT), Kolam Air Deras, sawah (mina padi) dan Perairan Umum (PU) yaitu Danau, Sungai, Rawa, Waduk/Cekdam serta genangan air lainnya. Potensi ini tersebar disemua kecamatan sedang potensi sumber daya perikanan laut hanya terdapat diwilayah pantai Barat Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu Kecamatan Muara Batang Toru tepatnya di Desa Muara Upu.

a. Pembuatan kampung Budi Daya perikanan di Sibulele

Dalam meningkatkan produksi perikanan di Daerah Tapanuli Selatan perlu di ciptakan perkampungan perikanan yang di rencanakan di daerah Sibulele kecamatan Batang angkola karena melihat potensi daerahnya yang cukup mendukung dalam pembentukan kampung Budi daya perikanan tersebut.

3. Kondisi Sumber Daya Peternakan

Sumber daya peternakan di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah merupakan peternakan rakyat yang berkembang di sentra permukiman meliputi ternak besar, ternak kecil unggas dan hewan peliharaan. Adapun potensi pengembangan peternakan di Kabupaten Tapanuli Selatan terlihat pada tabel berikut:

Tabel II.18
Potensi Peternakan
Kabupaten Tapanuli Selatan

No.	Komoditi Peternakan	Kawasan Sentra Peternakan	Kawasan Pengembangan Peternakan (Kecamatan)
I.	**TERNAK BESAR**		
1.	Sapi	Batang Toru Angkola Sangkunur Muara Batang Toru Batang Angkola Marancar, Angkola Barat, Angkola Timur	Tantom Angkola Angkola Selatan
2.	Kerbau	Sipirok Arse Angkola Selatan	Aek Bilah Saipar Dolok Hole Angkola Selatan
3.	Kuda	Angkola Barat, Sipirok, SD.Hole	
II.	**TERNAK KECIL**		
4.	Kambing	Sipirok Aek Bilah Angkola Sangkunur Saipar Dolok Hole, Marancar	Batang Angkola Sayur Matinggi Tantom Angkola
5.	Domba	Sipirok	Saipar Dolok Hole

No.	Komoditi Peternakan	Kawasan Sentra Peternakan	Kawasan Pengembangan Peternakan (Kecamatan)
III.	**UNGGAS**		
6.	Ayam Buras	Batang Angkola Sayur Matinggi Angkola Timur Tantom Angkola	Angkola Barat
7.	Ayam Ras	Batang Angkola, Angkola Timur dan Angkola Selatan	Sayur Matinggi
IV.	**HEWAN PELIHARAAN**		
8.	Kelinci	-	Batang Angkola

Sumber : Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

4. Kondisi Sumber Daya Perkebunan

Adapun sentra dan kawasan pengembangan komoditi perkebunan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.19
Sentra dan Kawasan Pengembangan Komoditi Perkebunan
Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Komoditi Perkebunan	Kawasan Sentra Perkebunan (Kecamatan)	Kawasan Pengembangan Perkebunan (Kecamatan)
1	Karet	Seluruh Daerah Tapanuli Selatan	Tantom Angkola, Angkola Selatan, Aek Bilah
2	Kelapa Sawit	Batang Toru, Angkola Selatan, Angkola Sangkunur, Muara Batang Toru, Sayurmatinggi	Muara Batang Toru
3	Kakao	Marancar, Batang Angkola, Sayur Matinggi, Tantom Angkola, Angkola Timur, Angkola Muara Tais	Angkola Selatan
4	Aren	Angkola Timur, Saipar Dolok Hole, Aek Bilah, Sipirok, Arse,Marancar	Tantom Angkola, (Konservasi), Saipar Dolok Hole
5	Kopi	Sipirok, Saipar Dolok Hole, Arse,Marancar,Angkola Timur	Saipar Dolok Hole, Angkola Timur, (Peremajaan)
6	Tembakau	Saipar Dolok Hole	Sipirok, Saipar Dolok Hole, Arse

Sumber : Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

5. Kondisi Sumber Daya Kehutanan

Memperhatikan luas dan kondisi kawasan hutan Kabupaten Tapanuli Selatan, mempunyai topografi datar bergelombang dan berbukit dengan ketinggian dari permukaan laut 0–1.985 Mdpl, maka perlu dipertahankan kelestariannya demi kelangsungan hidup dan kesinambungan masyarakat dalam berusaha dan tidak kalah pentingnya peranan fungsi hutan Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap daerah tetangga kearah hilir seperti Kabupaten Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah dan Labuhan Batu.

Berdasarkan kondisi tersebut sebenarnya hasil hutan di Kabupaten Tapanuli Selatan bisa jauh lebih besar dari saat ini. Namun kebijakan pengelolaan subsektor kehutanan ini hendaknya jangan sampai merusak kelestarian hutan sehingga merusak sumber air yang pada akhirnya akan berpengaruh buruk pada sektor pertanian umumnya.

6. Kondisi Koperasi dan UMKM

Jumlah koperasi di Tapanuli Selatan non KUD sampai dengan tahun 2022 sebanyak 271 buah, yang berarti meningkat dibanding tahun 2021 yang tercatat hanya sebesar 268 buah. Jumlah anggota koperasi pada tahun 2022 sebanyak 14.346 anggota meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 14.331 anggota. Jumlah UMKM berdasarkan perbitan ijin usaha di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 sebanyak 258 UMKM dan di tahun 2022 meningkat sebesar 164 UMKM, Banyaknya tenaga kerja yang terserap disektor UMKM memperlihatkan bahwa sektor UMKM sangat berpotensi dalam penciptaan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengatasi kemiskinan. Pembangunan koperasi dan UKM dilakukan melalui kegiatan promosi dan misi dagang dalam dan ke luar negeri, yang ternyata berdampak sangat signifikan terhadap pengembangan koperasi dan UKM di Kabupaten

Tapanuli Selatan. Kegiatan promosi dan misi dagang tersebut telah memacu koperasi dan UKM untuk meningkatkan kualitas produknya sehingga mampu bersaing di pasar nasional dan bahkan global. Permasalahan mendasar yang terjadi adalah masih lemahnya akses UMKM terhadap pembiayaan untuk peningkatan modal usaha, khususnya akses pada perbankan/lembaga keuangan, selain itu masih terkendala di bidang pemasaran dan kualitas sumberdaya pengelola koperasi, dimana mayoritas SDM karyawan dan pengurus koperasi di Kabupaten Tapanuli Selatan berpendidikan SMA dan hanya sebagian kecil berpendidikan Sarjana (S1)

7. Kondisi Sumber Daya Perindustrian dan Pertambangan

Kabupaten Tapanuli Selatan termasuk daerah yang kaya sumber daya Mineral, Batubara, Panas bumi dan Hidrogeologi serta sumber-sumber energi yang dapat diperbaharui, baik berupa tambang logam maupun non logam. Potensi kekayaan sumber daya mineral bahan tambang ini masih memerlukan pengembangan dan kajian yang lebih lanjut dalam upaya menarik investor serta memperkenalkan kekayaan alam Tapanuli Selatan dan menjadikan Tapanuli Selatan menjadi daerah yang pantas diperhitungkan.

Jenis bahan tambang terutama galian C banyak tersebar di berbagai kecamatan dan potensi ini diperkaya dengan emas. Bahan Galian C yang telah banyak dimanfaatkan adalah tanah urug, batu gamping, dolomit, pasir dan batu sungai. Dalam bidang ketenagalistrikan, khususnya listrik, minyak dan gas di Kabupaten Tapanuli Selatan dipasok oleh PT. PLN dan PT. Pertamina.

Tabel II.20
Potensi Bahan Galian Logam
Kabupaten Tapanuli Selatan

Potensi	Luas (Ha)	Lokasi (Kecamatan)
Emas (Au), Timbal (Pb) dan Seng (Zn)	1.692,96	Batang Toru, Angkola Selatan (Dolok Adian Koteng) dan Sipirok
Emas (Au) - Timbal (Pb) dan Perak (Ag)	2.606,36	Batang Toru, Batang Angkola dan Tano Tombangan Angkola (Aek

Potensi	Luas (Ha)	Lokasi (Kecamatan)
		Pawan)
Seng (Zn)	271,08	Arse dan Sipirok
Timbal (Pb) dan Tembaga (Cu)	562,42	SD. Hole dan Batang Angkola
Timbal (Pb)		Angkola Selatan, Angkola Barat dan Marancar

Sumber : Dinas Perindustrian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Tabel II.21
Perkiraan Potensi Bahan Galian Logam Potensi Bahan Galian C (Batuan) Kabupaten Tapanuli Selatan

Potensi	Luas (Ha)	Lokasi (Kecamatan)
Andesit	3.613	Angkola Barat, Angkola Selatan, Batang, Toru, Sipirok, SD. Hole dan Marancar
Batu Pasir	2.171	Batang Angkola, Batang Toru, Angkola Selatan dan Arse
Batu sungai	100,60	Angkola Barat, Batang Toru, Angkola Selatan, Batang Angkola
Bentonit	824,73	Sipirok, SD. Hole
Granit	2.513,23	Sayur Matinggi, Batang Angkola, Angkola Sangkunur
Batu Apung	976,40	Angkola Timur, Marancar
Marmer / Gamping	3.645,96	Sayur Matinggi, SD. Hole dan Aek Bilah, Tano Tombangan Angkola
Pasir Kuarsa	1.277,89	Sipirok, SD. Hole
Pasir Sungai	482,45	Angkola Barat, Sayur Matinggi dan Muara Batang Toru, Angkola Sangkunur
Zeolit	544,76	Marancar dan Sipirok
Onix	-	Sayur Matinggi
Batu Kapur (dolomite)	-	Angkola timur

Sumber : Dinas Perindustrian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Potensi Batubara : Endapan batubara terdapat di beberapa tempat seperti Kecamatan Sayur Matinggi, Batang Angkola, Angkola Timur, Angkola Selatan dan Sipirok akan tetapi masih memerlukan penelitian.

Potensi panas bumi terdapat di Dolok Sibual-buali, Kecamatan Sipirok jika dikembangkan diperkirakan akan menghasilkan **±** 110 Megawatt (MW).

Potensi Bahan Galian Logam :

- Emas yang berasosiasi dengan Timbal dan Seng, terdapat penyebaran di Kecamatan Batang Toru, Sipirok, Angkola Selatan dan Batang Angkola dengan luas penyebaran diperkirakan ± 1.692, 96 Ha.
- Emas yang berasoasiasi dengan Galena dan Perak, terdapat penyebaran di Kecamatan Batang Toru, Batang Angkola dan Sayur Matinggi dengan luas penyebaran diperkirakan ± 2.606,36 Ha.
- Seng terdapat di Kecamatan Arse dan Sipirok dengan penyebaran diperkirakan ± 271,08 Ha.
- Timbal dan Tembaga terdapat di Kecamatan Saipar Dolok Hole dan Batang Angkola dengan penyebaran ± 562, 42 Ha.
- Timbal /Timah hitam terdapat di Kecamatan Angkola Barat, Angkola Selatan dan Marancar, perkiraan luas penyebaran masih memerlukan pemetaan yang lebih detail lagi.

Potensi Batuan :

- Andesit, terdapat dikecamatan Angkola Barat, Angkola Selatan, Batang Toru, Marancar, Saipar Dolok Hole dan Sipirok dengan perkiraan luas penyebaran ± 3.613 Ha.
- Batu apung, terdapat di Kecamatan Angkola Barat dengan perkiraan luas penyebaran ± 976,4 Ha.
- Batu pasir, terdapat di Kecamatan Arse, Angkola Selatan, Batang Angkola dan
- Batang Toru, dengan perkiraan luas penyebaran ± 2.171 Ha.
- Batu Sungai, terdapat di Kecamatan Angkola Selatan, Batang Angkola, Angkola Muara Tais dan Batang Toru dengan perkiraan luas penyebaran ± 100,6 Ha.
- Bentonit, terdapat di Kecamatan Sipirok dan Saipar Dolok Hole dengan perkiraan luas penyebaran ± 9120 Ha.
- Granit, terdapat di Kecamatan Batang Toru, Batang Angkola dan Sayur Matinggi dengan perkiraan luas penyebaran ± 7.191,23 Ha.

- Gamping/Marmer, terdapat di Kecamatan Aek Bilah, Saipar Dolok Hole, Sayur Matinggi dengan perkiraan luas penyebaran ± 7123, 96 Ha.
- Kaolin di Kec.Saipar Dolok Hole dengan perkiraan luas penyebaran ± 217 Ha.
- Pasir Kuarsa, dengan perkiraan luas penyebaran ± 2.592 Ha.
- Sirtu, terdapat di Kecamatan Batang Angkola, Sayur Matinggi, Angkola Selatan dan Angkola Barat dengan perkiraan luas penyebaran ± 502,45 Ha.
- Tufa Riolit, terdapat di Kecamatan Angkola Timur, Saipar Dolok Holedengan perkiraan luas penyebaran ± 276 Ha.
- Zeolit, terdapat di Kecamatan Marancar dan Sipirok dengan perkiraan luas penyebaran ± 656,86 Ha.
- Onixz, Belerang dan Batu Mulia, masih memerlukan penelitian secara detail.
- Dolomit, masih memerlukan penelitian secara detail.

Data potensi batuan tersebut di atas masih memerlukan penelitian lebih lanjut.

8. Penanaman Modal

Aktivitas penanaman modal atau investasi memperlihatkan peran yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak/efek pengganda (*mulitiplier effect*) yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian. Aktivitas investasi pada berbagai sektor memungkinan perekonomian menghasilkan output yang banyak, pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor. Penanaman modal di Kabupaten Tapanuli Selatan dalam kurun waktu 2016 hingga 2018 terus menunjukkan perkembangan, jika dilihat dari jumlah unit usahanya. Sedangkan jika dilihat dari nilai investasinya cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Jumlah penamanan modal

(PMDN/PMA) di Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sampai dengan tahun 2018 ada 13 investor dengan daya serap tenaga kerja 3.814 orang.

Salah satu upaya dalam menarik investor adalah dengan meningkatkan pelayanan perijinan. Sejak tahun 2016, lama proses perijinan di Tapanuli Selatan telah dioptimalkan menjadi 3 (tiga) hari, sehingga upaya ini diharapkan mampu meningkatkan investasi yang dikembangkan di Tapanuli Selatan.

b. Tingkat Kemiskinan

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah yaitu ketika pemerintah mampu menanggulangi masalah kemiskinan sebagai perwujudan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Namun, poin utama dalam mengentaskan kemiskinan, tidak hanya cukup dengan menurunkan jumlah masyarakat miskin tetapi juga perlu menuntaskan sumber utama penyebab kemiskinan.

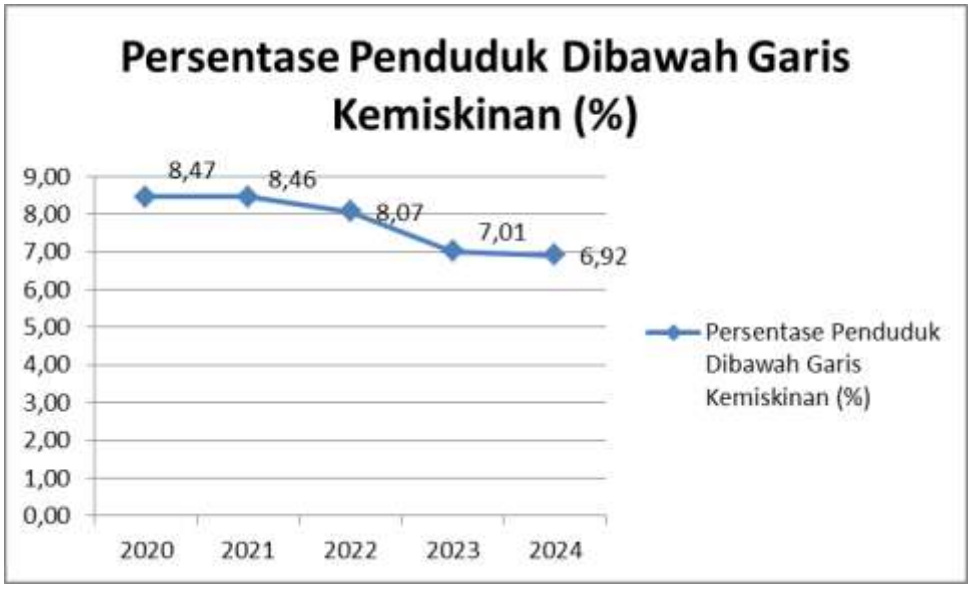
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, angka kemiskinan di Tapanuli Selatan mencapai pada titik terendah pada tahun 2020. Capaian positif ini merupakan hasil dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh elemen pelaksana pembangunan baik pemerintah, swasta dan masyarakat. Meskipun begitu, perlu dilihat kembali bagaimana kemiskinan dari segi pemerataannya agar tidak terjadi ketimpangan kesejahteraan masyarakat.

Angka kemiskinan masyarakat Tapanuli Selatan Pada Tahun 2016 sebesar 11,15%, menurun menjadi 8,47% pada Tahun 2020. Bila dibandingkan dengan target pada RPJMD 2016-2021 (target tahun 2021 sebesar 9,17%) akan tetapi pada tahun 2020 saja target tersebut telah terlampaui. Saat ini Kabupaten Tapanuli Selatan berada pada posisi 12 terendah dari 33 Kab/Kota di Provinsis Sumatera Utara. Bila di bandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara pada masa pandemi Covid-19 dimana angka kemiskinan mengalami kenaikan sampai 0,39% sehingga menjadi 9,14% maka capaian Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 8,47% sudah lebih baik. Namun demikian perlu untuk diantisipasi dampak pandemi

Covid-19 yang muncul pada akhir tahun 2019 dan masih berlanjut pada tahun 2020 dimana baik secara nasional maupun global dampak Pandemi Covid-19 tersebut berpengaruh buruk terhadap kesehatan, kesejahteraan maupun sosial masyarakat. Dampak yang dapat dilihat secara nasional adalah meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, untuk tahun 2021 sampai dengan 2023 sudah mengalami perkembangan yang positif.

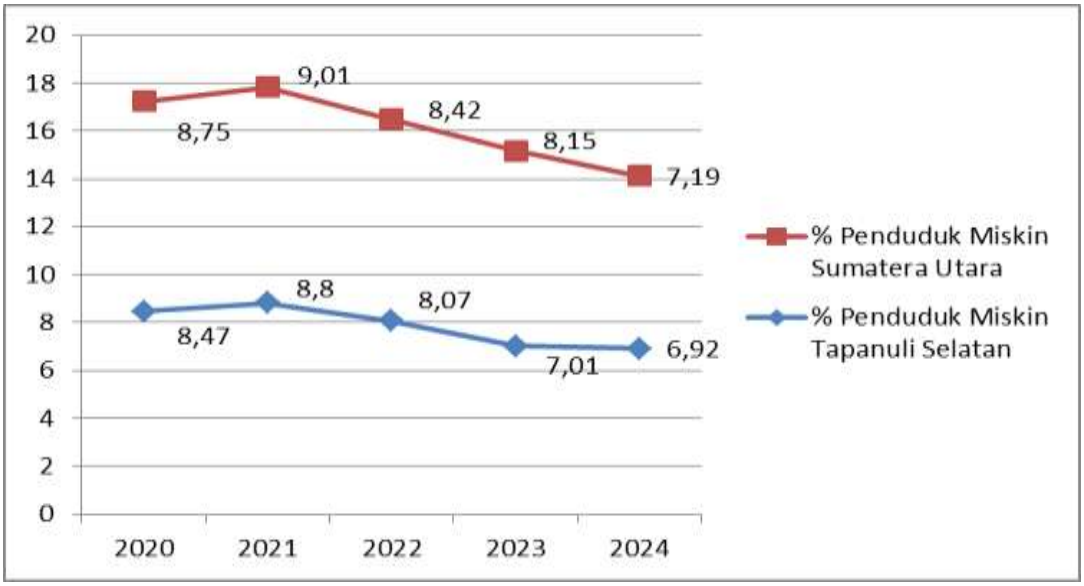
Angka kemiskinan Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2021 sebesar 8.46% ; tahun 2022 sebesar 8.07% ; tahun 2023 sebesar 7.01 dan tahun 2024 sebesar 6.92%.

Grafik II.10
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025

Grafik II.11
Perkembangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa Pemerintah Daerah berhasil menurunkan angka kemiskinan setiap tahun. dimana angka kemiskinan Kabupaten Tapanuli Selatan masih selalu dibawah dari Provinsi Sumatera Utara, maka selama empat tahun terakhir kepemimpinan Bupati Tapanuli Selatan angka kemiskinan tersebut dapat ditekan menjadi satu digit karena menurun secara signifikan.

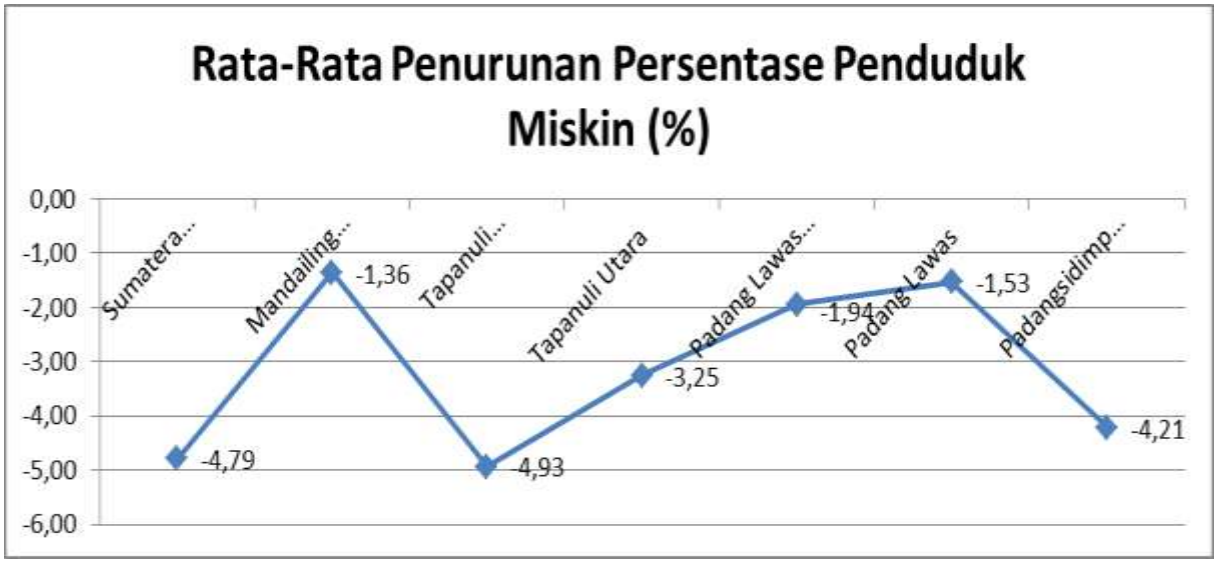
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Kab/Kota Kawasan Tapanuli Bagian Selatan di Pantai Barat Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel II.22
Persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten/kota Tapanuli Bagian Selatan

NAMA DAERAH	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	Rata-Rata Penurunan Persentase Penduduk Miskin (%)
Sumatera Utara	8,75	9,01	8,42	8,15	7,19	-4,79
Mandailing Natal	9,18	9,49	8,92	8,86	8,69	-1,36
Tapanuli Selatan	8,47	8,8	8,07	7,01	6,92	-4,93
Tapanuli Utara	9,37	9,72	8,93	8,54	8,21	-3,25
Padang Lawas Utara	9,70	9,92	8,94	8,79	8,97	-1,94
Padang Lawas	8,37	8,69	8,05	7,89	7,87	-1,53
Padangsidimpuan	7,40	7,53	6,89	6,85	6,23	-4,21

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025

Grafik II.12
Perkembangan persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten/kota Tapanuli Bagian Selatan

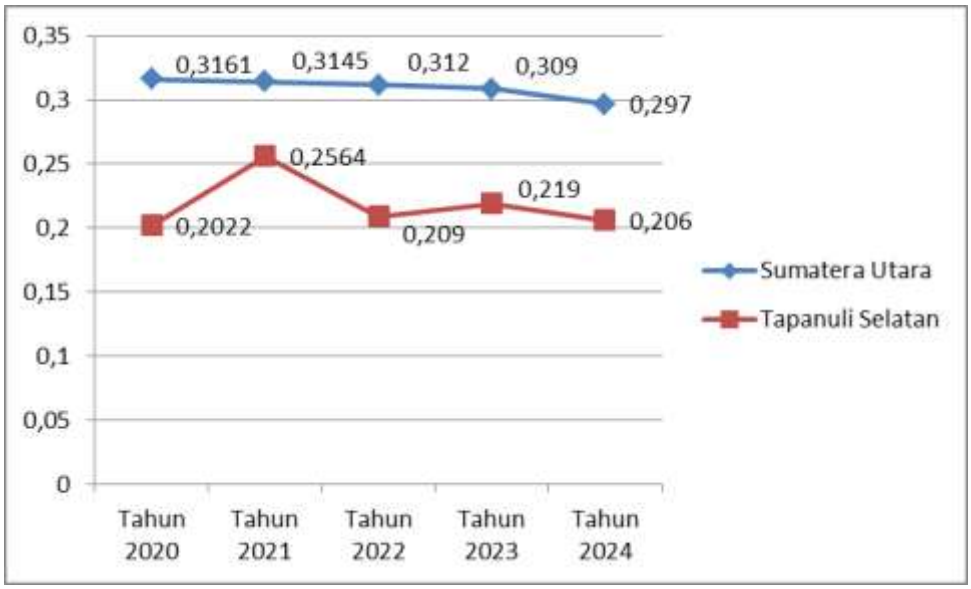


b. Indeks Gini

Pertumbuhan ekonomi maupun penurunan angka kemiskinan yang dicapai tersebut secara umum dapat dinikmati masyarakat Tapanuli Selatan secara luas yang berarti disamping pertumbuhan, pemerataan ekonomi dan pendapatan masyarakat juga sangat mendapatkan perhatian. Hal ini bisa dilihat dari index Gini Ratio

Kabupaten Tapanuli Selatan selama periode tahun 2020 s/d 2024 rata-rata sebesar 0,20 Nilai tersebut menunjukkan bahwa indeks Gini Rasio Kabupaten Tapanuli Selatan selalu dibawah 0,3 yang artinya ketimpangan pendapatan masyarakat secara agregat tergolong dalam kategori ketimpangan rendah. Bahkan kalau dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara, Gini Ratio Kabupaten Tapanuli Selatan masih selalu lebih baik sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik II.13
Perkembangan Gini Rasio di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Selatan dan BPS Provinsi Sumatera Utara tahun 2025

Bila dibandingkan dengan Capaian Persentase Gini Ratio Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten /Kota Tapanuli Bagian Selatan di Kawasan Pantai Barat Sumatera Utara dapat dilihat Pada Tabel dan Grafik dibawah ini :

Tabel II.23
Persentase Gini Ratio Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota Tapanuli Bagian Selatan

PERSENTASE GINI RATIO PROVINSI SUMATERA UTARA DAN KABUPATEN/KOTA TAPANULI BAGIAN SELATAN						
NAMA DAERAH	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	Rata-Rata Pertumbuhan Gini Ratio (%)
Sumatera Utara	0,3161	0,3145	0,312	0,309	0,297	-1,55

Mandailing Natal	0,2478	0,2403	0,244	0,249	0,25	0,22
Tapanuli Selatan	0,2022	0,2564	0,209	0,219	0,206	0,47
Tapanuli Tengah	0,335	0,2917	0,233	0,241	0,234	-8,58
Tapanuli Utara	0,2867	0,2766	0,242	0,262	0,242	-4,15
Padang Lawas Utara	0,2283	0,2547	0,245	0,241	0,223	-0,59
Padang Lawas	0,2653	0,2525	0,227	0,225	0,224	-4,14
Sibolga	0,291	0,2764	0,346	0,246	0,313	1,84
Padangsidimpuan	0,3538	0,3101	0,275	0,267	0,296	-4,36

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Selatan dan BPS Provinsi Sumatera Utara tahun 2025

Grafik II.14
Persentase Gini Ratio Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota Tapanuli Bagian Selatan



Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Selatan dan BPS Provinsi Sumatera Utara tahun 2025

1.3. Aspek Daya Saing Daerah

1.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

A. PDRB per Kapita

PDRB merupakan suatu gambaran perekonomian makro suatu wilayah yang identik dengan peningkatan pembangunan perekonomian. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat berdasarkan PDRB per kapita, yaitu gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk secara makro, sehingga

untuk analisis lebih lanjut diperlukan analisis ketimpangan pendapatan. Meskipun ukuran ini memiliki kelemahan karena perlakuan yang dibagi rata tersebut, namun dapat memberikan gambaran awal perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro.

PDRB per kapita Tapanuli Selatan mengalami peningkatan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir dengan capaian tertinggi berada pada tahun 2024 (Rp.67,23 juta per kapita). Kenaikan ini cukup signifikan dimana jika dibandingkan tahun 2020, maka terdapat kenaikan hampir 18,42 juta rupiah dalam kurun waktu 5 tahun. Angka ini merupakan capaian positif pemerintah dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan kehidupannya.

Perkembangan pendapatan perkapita sejalan dengan pengeluaran perkapita setiap tahun. Pola pengeluaran masyarakat masih tergolong positif karena jumlah pendapatan selalu lebih besar dibanding jumlah pengeluaran setiap tahun selama periode 2020 s/d 2024.

Grafik II.15
Perkembangan Pendapatan dan Pengeluaran Perkapita Masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024

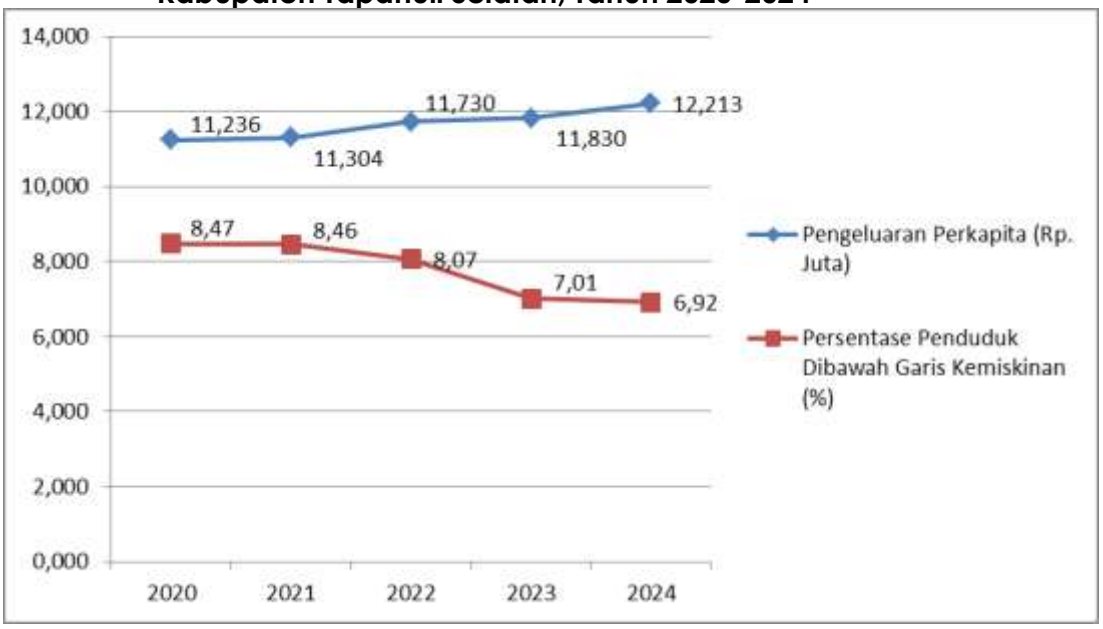


	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB Perkapita (Rp. Juta)	48,81	50,95	55,28	60,39	67,23
Pengeluaran Perkapita (Rp. Juta)	11,236	11,304	11,730	11,830	12,213

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025

Sejalan dengan perkembangan pendapatan perkapita dan pengeluaran perkapita, garis kemiskinan juga mengalami perkembangan dari tahun ketahun mengikuti perkembangan perekonomian. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Untuk dapat menurunkan angka kemiskinan, peningkatan pengeluaran perkapita penduduk seharusnya melebihi peningkatan garis kemiskinan. Pengeluaran perkapita masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2020 s/d 2024 menunjukkan tren yang selalu meningkat kecuali pada tahun 2020 justru mengalami penurunan akibat adanya pandemi Covid-19. Akan tetapi penurunan tersebut belum sampai mengakibatkan peningkatan angka kemiskinan masyarakat Tapanuli Selatan, justru yang terjadi adalah penurunan kemiskinan pada tahun 2020 sehingga menjadi sebesar 8,47% atau menurun sebesar 0,13%.tahun 2021 angka kemiskinan Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 8,80% mengalami peningkatan dari tahun 2020 dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 8,07%, 2023 sebesar 7.01%, tahun 2024 sebesar 6,92% ini di akibatkan telah normal Kembali aktivitas ekonomi Masyarakat akibat pandemic Covid-19.

Grafik II.16
Perkembangan Pengeluaran Perkapita dan Garis Kemiskinan
Kabupaten Tapanuli Selatan, Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025

2.4.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

1. **Indeks Pendidikan**
2. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Peningkatan daya saing daerah tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur dan investasi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia laki-laki dan perempuan. Pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, pelatihan vokasi berbasis gender, serta peningkatan peran perempuan dalam ekonomi lokal menjadi bagian penting dalam strategi peningkatan daya saing daerah.

Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Salah satu indikator yang cukup relevan dalam melihat

pembangunan ketenagakerjaan adalah dengan melihat angka pengangguran di suatu wilayah.

Sampai dengan tahun 2019 angka pengangguran di Tapanuli Selatan terus mengalami penurunan dimana pada tahun 2016 sebesar 5,91% dan pada tahun 2019 menurun menjadi 4,17%. Munculnya Pandemi Covid-19 juga memberikan pengaruh negatif bagi ketenagakerjaan di daerah. Pelaku-pelaku usaha yang melakukan efisiensi terhadap karyawan, pembatasan-pembatasan terhadap mobilitas masyarakat, adanya PHK terhadap tenaga kerja daerah khususnya yang bekerja di perkotaan memksanya kembali ke daerah sebagai pengangguran menyebabkan angka pengangguran pada tahun 2021 justru meningkat menjadi 4,42%, Namun demikian, peningkatan angka pengagguran tersebut tidak terlalu signifikan karena target yang telah ditetapkan pada RPJMD Tahun 2016-2021 sebesar 4,55% masih dapat terlampaui, untuk tahun 2022 capaian angka pengangguran terbuka sebesar 3,65%; tahun 2023 sebesar 3,49% dan tahun 2024 sebesar 3.41. Pembangunan sektor ketenagakerjaan kedepannya memerlukan perhatian khusus agar tidak terjadi lonjakan pengangguran, hal ini tentunya merupakan tantangan tersendiri bagi Kabupaten Tapanuli Selatan untuk peningkatan daya serap tenaga kerja.

Menurut Direktorat Pengembangan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah tertinggal adalah wilayah yang relatif kurang berkembang dibandingkan dengan wilayah lain dalam skala nasional berdasarkan kondisi dan fungsi intern dan intra spasial baik pada aspek alam, manusia dan sarana pendukungnya.

Kawasan tertinggal umumnya tidak hanya merupakan permasalahan di daerah akan tetapi telah menjadi masalah nasional yang perlu mendapat perhatian semua pihak. Karena disamping Kawasan tertinggal tersebut merupakan kantong-kantong kemiskinan masyarakat, tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam suatu Kawasan tertinggal juga terkandung potensi-potensi sumber daya alam yang belum pernah tersentuh yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan yang produktif bagi masyarakat setempat, Kawasan tertinggal pada suatu daerah tidak

selamanya sama dengan daerah lain, karena disamping faktor-faktor terjadinya Kawasan tertinggal teresebut juga dipengaruhi letak geografis, topgrafi, topologi, dan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan social masyarakat setempat.

Kawasan tertinggal di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai permasalahan yang cukup rumit dan kompleks kareana disamping ketersediaan fasilitas umum yang belum optimal,juga akses komunikasi dan transportasi yang masih belum merata serta dipengaruhi oleh keberadaan masayarakayt yang tersebar di berbagai pelosok Kabupaten Tapanuli Selatan.

Grafik II.17
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024

2.5Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.5.1 Proyeksi Kependudukan

Jumlah penduduk Tapanuli Selatan berdasarkan hasil sensus penduduk (SP) 2020 diperkirakan sebesar 300.911 jiwa. Berdasarkan

BPS tapsel tahun 2024 jumlah penduduk tahun 2023 sebesar 312.540 jiwa, sedangkan Proyeksi Penduduk Sumatera Utara pada tahun 2045, menurut hasil proyeksi Sensus Penduduk 2025, berjumlah 320.330 jiwa. Sedangkan Proyeksi Jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2045 sebesar 378.612 jiwa. dan Peningkatan ini tentu saja berasal dari pertumbuhan penduduk alami melalui kelahiran dan pertumbuhan penduduk melalui migrasi dan mortalitasnya. Perkembangan jumlah penduduk di daerah Tapanuli Selatan dapat dilihat dari Garfik dibawah ini.

Grafik II.19
Jumlah Penduduk Kabupaten Tapanuli Selatan,
Tahun 2025-2045



3.

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022

Tabel II.25
Jumlah Penduduk
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2045

Tahun	2025	2030	2035	2040	2045
Laki-Laki	161,441	170,717	178,712	185,671	191,642
Perempuan	158,889	167,328	174,711	181,253	186,970
Total	320,330	338,045	353,423	366,924	378,612

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022

Jika dilihat dari jumlah jenis kelamin proyeksi penduduk Tapanuli Selatan lebih banyak berjenis kelamin Laki-laki dibandingkan dengan Perempuan.

Tabel II.26
Jumlah Penduduk menurut Kelompok umur
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2045

Kelompok Umur	2020	2025	2030	2035	2040	2045
0-4	30,169	30,921	30,689	30,675	30,630	30,482
5-9	30,501	29,905	30,607	30,331	30,317	30,273
10-14	30,766	30,427	29,784	30,456	30,175	30,160
15-19	28,555	30,549	30,190	29,515	30,199	29,922
20-24	28,162	27,913	29,822	29,435	28,755	29,465
25-29	25,676	27,301	26,996	28,772	28,387	27,714
30-34	23,274	24,889	26,373	26,011	27,704	27,336
35-39	19,472	22,620	24,130	25,521	25,170	26,809
40-44	17,526	19,059	22,098	23,539	24,902	24,574
45-49	15,678	17,155	18,636	21,590	22,997	24,347
50-54	14,010	15,256	16,686	18,117	20,999	22,381
55-59	12,589	13,430	14,633	16,003	17,402	20,187
60-64	9,980	11,768	12,570	13,714	15,025	16,367
65-69	6,855	8,951	10,585	11,336	12,418	13,635
70-74	3,689	5,735	7,522	8,940	9,633	10,613
75+	3,243	4,451	6,724	9,468	12,211	14,347
Jumlah	**300,145**	**320,330**	**338,045**	**353,423**	**366,924**	**378,612**

Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2022

2.6.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

1. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Sarana infrastruktur dan aksesibilitas merupakan kebutuhan yang penting untuk mendukung segala aktivitas masyarakat. Dengan terpenuhinya infrastruktur dan akses wilayah maka percepatan pembangunan terutama pelayanan terhadap masyarakat akan lebih efektif dan efisien dilaksanakan. Kondisi infrastruktur pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan relatif belum optimal disediakan.

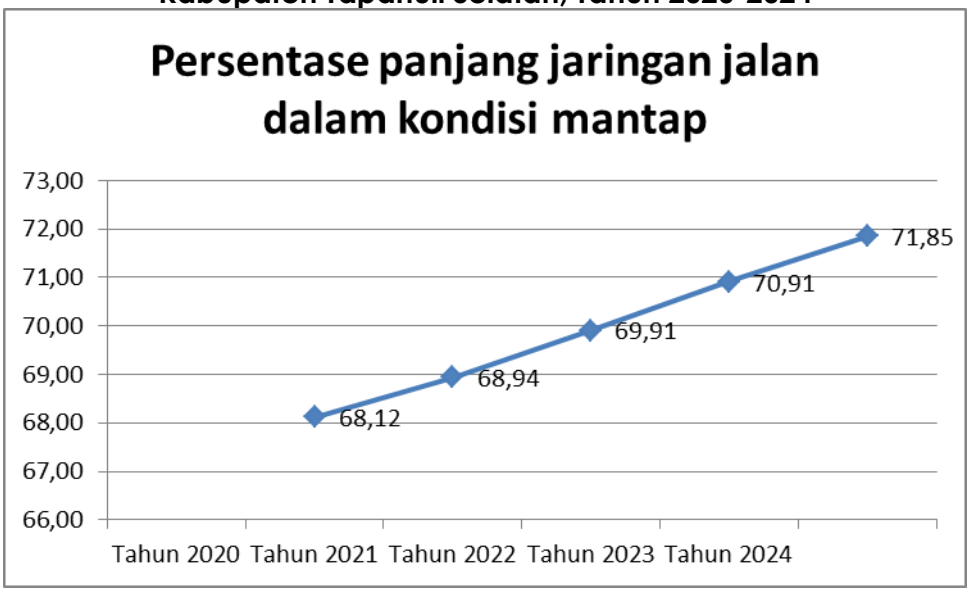
Kualitas infrastruktur khususnya kondisi jalan yang merupakan sarana vital dalam meningkatkan kualitas konektivitas wilayah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dimana kondisi jalan mantap sebesar 68,95% pada tahun 2021 telah mencapai 69,91% pada tahun 2022. Capaian ini telah melampaui target yang ditetapkan pada RPJMD tahun 2021-2026 yaitu sebesar 69,76% pada tahun 2022. Kondisi tersebut tetap memerlukan peningkatan karena masih terdapat 10,07% jalan dalam kondisi rusak dan 20,02% jalan dalam kondisi rusak berat.

Kondisi Irigasi Kabupaten Tapanuli Selatan juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2020 irigasi dalam kondisi baik masih sebesar 64,83% dan pada tahun 2024 telah mencapai 67,10%. Namun demikian kondisi ini masih perlu ditingkatkan lagi karena sangat berkaitan dengan keberhasilan sektor pertanian yang merupakan lapangan usaha terbesar dan penyumbang utama struktur PDRB Kabupaten Tapanuli Selatan, Kebutuhan Ruas Jalan dalam Kondisi Baik di **Tahun 2045 adalah sebesar 1.195,65 Km**.

Pembangunan Keciptakaryaan juga tergolong berhasil khususnya sarana dan prasarana perkantoran ditandai dengan pemindahan perkantoran Pemerintah daerah dari kota Padangsidimpuan ke Sipirok. Sampai dengan tahun 2024 Pembangunan kantor Pemerintahan di Sipirok telah terbangun 30 unit dari 30 OPD atau 100%.

Perkembangan sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik II.20
Perkembangan Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap
Kabupaten Tapanuli Selatan, Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Tapanuli Selatan 2025

Grafik II.21
Perkembangan Irigasi Dalam Kondisi Baik
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Tapanuli Selatan 2025

2. Perumahan dan Pemukiman

Salah satu infrastruktur dasar yang penting untuk dirasakan seluruh masyarakat Tapanuli Selatan adalah pemenuhan rumah layak huni. Rumah merupakan salah satu sarana tempat tinggal masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa perumahan rakyat dan pemukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Dalam penyelenggaraan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan terdapat permasalahan masih banyaknya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni beserta infrastruktur penunjangnya.

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah rumah secara total. Perkembangan rumah layak huni di Kabupaten Tapanuli Selatan relatif masih rendah. Pada tahun 2024 rumah layak huni di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebesar 80,61 persen sedangkan pada tahun 2022 sebesar 80,43%. Capaian ini sudah cukup meningkat dibanding Tahun 2020 sebesar 80,36 persen, kedepan peningkatan ini diharapkan lebih optimal lagi untuk peningkatan standard hidup layak bagi masyarakat Tapanuli Selatan.

Adapun perhitungan **kebutuhan lahan perumahan untuk Kabupaten Tapanuli Selatan adalah untuk jangka 20 tahun diperkirakan sekitar 2.008,23 hektare**. Sebagai dasar perhitungan untuk perencanaan perumahan di Kabupaten Tapanuli Selatan, adalah sebagai berikut ; luas kavling perumahan dibagi berdasarkan proporsi 1 : 2 : 3 dengan luas masing- masing 500 m² : 300 m² : 150 m² untuk kavling rumah besar, sedang dan kecil. Diasumsikan setiap keluarga menempati satu rumah dengan rata-rata jumlah anggota keluarga 5 jiwa/KK. Berdasarkan hasil analisis dapat diperkirakan kebutuhan lahan bagi perumahan sampai akhir tahun perencanaan yaitu berjumlah 2.008, 23 Ha yang terdiri dari 583 Ha Kavling rumah kecil (38.869 unit), 777 Ha Kavling rumah sedang (25.913 unit), serta 648 Ha kavling rumah besar (12.956 unit). Fasilitas perumahan tersebut menyebar diseluruh Kecamatan dengan

memanfaatkan kawasan budidaya permukiman yang ada. Kawasan peruntukan permukiman memiliki fungsi antara lain:

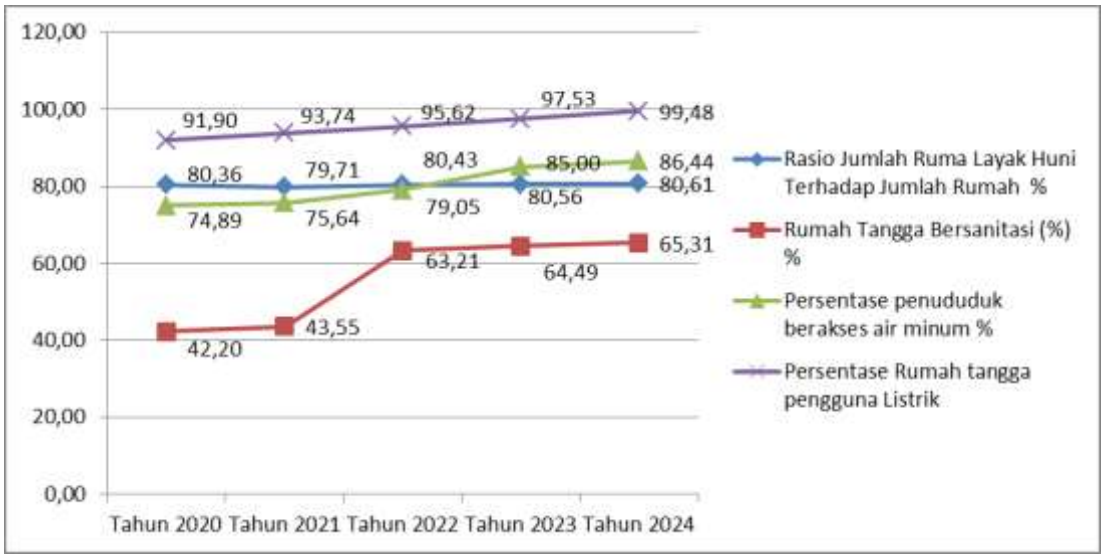
i. Sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan masyarakat sekaligus menciptakan interaksi sosial;

ii. Sebagai kumpulan tempat hunian dan tempat berteduh keluarga serta sarana bagi pembinaan keluarga.

Persentase jumlah rumah tinggal bersanitasi mengalami peningkatan di setiap tahunnya hingga mencapai 65,31% pada tahun 2024 dimana pada tahun 2020 masih 42,20%. Pembangunan sanitasi tetap merupakan salah satu prioritas daerah karena masalah sanitasi sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat serta untuk mendukung target nasional yaitu 90% sanitasi layak akhir Tahun 2029.

Ketersediaan akses air minum yang terjangkau bagi masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di Bidang Perumahan dan Permukiman. Persentase penduduk yang dapat mengakses air minum/bersih di Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2020 baru mencapai 74,89% dan tahun 2024 telah mencapai 86,44%. Ketersediaan sektor air minum juga tetap menjadi prioritas terutama untuk mendukung target nasional yaitu 100% yaitu air minum layak Tahun 2029 serta untuk peningkatan standard hidup layak bagi masyarakat Tapanuli Selatan.**Kebutuhan air Minum Layak (baik) untuk Tahun** 2045 adalah sebesar 85% atau SPAM Regional Mebidang direncanakan akan melayani kebutuhan air minum untuk 80.000 Sambungan Rumah (SR) atau setara 400.000 jiwa

Grafik II.22
Kondisi Perumahan dan Infrastruktur Penunjangnya
Kabupaten Tapanuli Selatan



Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025

3. Pariwisata

Kabupaten Tapanuli Selatan telah menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah tahun 2019-2025 dimana kepariwisataan Tapanuli Selatan memiliki visi "Terwujudnya Destinasi Pariwisata Tapanuli Selatan yang Berwawasan Lingkungan dan Lestari". Untuk mewujudkan tercapainya visi tersebut, maka dilakukan pembangunan dan pengembangan sebagai berikut:

b. destinasi dan daya tarik wisata yang didukung dengan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk menjamin aksesibilitas dan konektifitas pada semua DPK (Destinasi Pariwisata Kabupaten) dan KSPK (Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten) untuk meningkatkan kesejateraan masyarakat dan pendapatan asli daerah;
c. pemasaran destinasi dan daya tarik pariwisata melalui pelibatan dan kerjasama dengan pemangku kepentingan kepariwisataan kabupaten, provinsi dan nasional dengan menjadikan kebudayaan Tapanuli Selatan sebagai karakteristik kepariwisataan kabupaten;

d. industri pariwisata dengan dukungan sumber daya manusia kepariwisataan yang berwawasan, mandiri, terampil, berjiwa kewirausahaan, perduli pada nilai agama, budaya dan lingkugan serta kearifan masyarakat setempat; dan
e. kelembagaan kepariwisataan daerah yang modern dan profesional yang didukung oleh sarana dan prasarana berbasis teknologi dan sumber daya manusia yang handal, yang mampu mengemban pembangunan dan pengembangan destinasi, industri dan pemasaran pariwisata pada tingkat daerah, nasional dan mancanegara.

Pembangunan kepariwisataan tentu saja ditujukan kepada hampir seluruh kawasan pariwisata yang tersebar di seluruh Tapanuli Selatan. Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki objek–objek wisata yang cukup potensial untuk dikembangkan dengan harapan menambah pendapatan Masyarakat dari sektor pariwisata sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Objek-objek wisata tersebut sebagai berikut:

a) Danau Siais

Danau Siais terletak di Kelurahan Rianiate Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan ± 88 Km dari Pasar Sipirok melalui Batang Toru dan ± 70 Km melalui Simarpinggan Kecamatan Angkola Selatan. Transportasi menuju Danau Siais dapat dilewati dengan kenderaan roda dua dan roda empat. Danau ini memiliki luas 998 Ha, dengan dikelilingi Daerah Hutan Hujan Tropis yang luasnya ± 1.500 Ha yang kaya dengan Flora dan Fauna yang cukup beragam.

b) Ikan Keramat

Ikan Keramat ini berada disungai kecil yang mengalir di Kelurahan Rianiate Kecamatan Angkola Sangkunur. Jenis Ikannya cukup beragam meskipun sebenarnya di Dominasi Ikan Jurung (merah) dengan populasi sekitar 1000 ekor dengan rata – rata berat 1 kg – 2 kg/ekor ikan.

c) Pantai Muara Upu

Pantai Muara Upu terletak di Desa Muara Upu Kecamatan Muara Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan ±100 Km dari Sipirok, merupakan satu–satunya pantai yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan dengan panjang 18,38 Km dan vegetasi cemara angin. pantai yang indah, original dan memiliki pasir putih yang menambah keindahan Pantai. Pantai Muara Upu tempat bertelur penyu belimbing yang merupakan satwa langka dan dilindungi.

d) Pemandian Aek Sijornih

Pemandian ini terletak di Desa Aek Libung Kecamatan Sayur Matinggi, 60 Km dari Sipirok. Aek Sijornih berarti Air yang sangat Jernih yang merupakan salah satu objek wisata yang sangat banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal.

e) Pemandian Aek Milas Sosopan

Salah satu pemandian yang ramai dikunjungi orang di Kecamatan Sipirok adalah Pemandian Air Panas Sosopan, yang terletak di Desa Parandolok Mardomu ± 2,5 Km dari Pasar Sipirok. Tempat ini sangat ramai dikunjungi orang pada hari libur dan hari besar karena air nya bisa menyembuhkan berbagai penyakit terutama kulit.

f) Pemandian Alam Parsariran

Pemandian Alam yang sangat alami ini berjarak ± 55 Km dari Pasar Sipirok dengan waktu tempuh ±1,5 jam dan dapat dilewati dengan kenderaan Roda dua dan roda empat. Tempat pemandian yang memiliki air bersih dan jernih ini sangat sering dikunjungi wisatawan lokal pada setiap hari libur karena pemandangannya indah dan alami yang dikelilingi oleh pepohonan.

g) Air Terjun Aek Simatutung

Air Terjun Aek Simatutung terletak di Kawasan Danau Siais ± 112 Km dari Pasar Sipirok atau ± 9 Km dari Danau Siais. Dapat ditempuh menggunakan Kenderaan Roda duadan roda empat dengan waktu tempuh ±3 Jam. Air terjun yang indah ini dikelilingi oleh Hutan Hujan Tropis yang sangat alami.

h) Air Terjun Silima-lima

Air Terjun Silima-Lima ini terletak di Desa Simaninggir, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Secara geografis tempat ini dibentengi oleh dua gunung, yakni Gunung Sibual-Buali dan Gunung Lubuk Raya, Hingga kini banyak wisatawan yang berkunjung menyapa keindahan Silima-Lima baik dari pecinta alam dari kampus, atau dari wisatawan luar daerah, dan bila libur tiba tempat ini akan dipadati pengunjung, Pasti Anda tidak akan menyesal bila sudah berjumpa langsung dengan air terjun Silima-Lima. Akan ketagihan untuk datang kembali ke tempat ini.

i) Aek Milas Aek Nabara

Air Panas Aek Nabara merupakan salah satu objek wisata yang menjanjikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Air Panas Aek Nabara berada di desa Aek Nabara Kecamatan Marancar. Disamping menikmati panorama pedesaan dan sekaligus mandi air panas dan mandi uap belerang ke Aek Nabara yang diyakini dapat menyehatkan badan.

j) Tor Simago-mago

Lokasi Wisata Tor (bukit) Simago-mago berada di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, daerah lokasi wisata ini sudah banyak dikunjungi oleh para wisatawan dan pencinta alam dari luar daerah, pada saat hari-hari libur tempar wisata ini akan dipadati pengunjung.

k) Kawasan Aek Sabaon

Wiasata Aek Sabaon berada di desa Aek Sabaon Kecamatan Marancar merupakan tempat destinasi wisata yang sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan bahkan sering terjadi kebanjiran pengunjung. Di tempat ini ada bangunan permanen yang hampir keseluruhannya terbuat dari kaca, tepatnya di lantai 2. Kalau kata orang, seperti di luar negeri. Bangunan ini semakin terlihat menawan lantaran berhadapan dengan danau buatan. Pemandangannya juga kece, apalagi di pagi hari ketika kabut turun. Kerennya lagi, tidak jauh dari Aek Sabaon ada juga Sibio-bio

Adventure Park sehingga kamu bisa mengunjungi 2 tempat sekaligus. Di sekeliling danau yang dihuni ikan warna-warni ini juga ada beberapa rumah-rumah kecil khas Tapanuli Selatan. Ya, sejak dahulu sebagian wilayah di Tapsel memang identik dengan rumah ijuk. Sejauh mata melihat, tampak pula hutan hijau dan masih lebat. Seperti diketahui, Aek Sabaon berada di sekitar kawasan kaki Gunung Lubuk Raya. Sangking kecenya, banyak calon suami-istri yang mengambil photo shot di Aek Sabaon untuk keperluan pra-wedding

l) Mesjid Raya di Kecamatan Sipirok

Mesjid Raya Sri Alam Dunia Sipirok Mashalih, merupakan Mesjid Peninggalan Era Perang Paderi pada Syawal 1233 H atau sekitar Tahun 1816 M yang terletak di Kecamatan Sipirok, merupakan Daerah sejuk yang sangat Plural dan menjadi Pintu Masuk dua agama ketanah Batak yaitu Islam dan Kristen, lambang itu adalah Mesjid Raya Sri Alam Dunia Mashalih Sipirok yang dibangun berdampingan nyaris satu dinding dengan Gereja HKBP Sipirok tepat dipersimpangan jantung Kota Sipirok, Lambang kerukunan beragam paling menonjol di dunia.

m) Danau Marsabut

Danau Marsabut terletak di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Danau ini terletak di dataran tinggi yang mempunyai hawa yang sangat sejuk dan konon ceritanya danau ini dulunya hanya beberapa petak sawah yang dimiliki oleh warga setempat dan ada seorang pemilik sawah tersebut yang baru menikah, ketika dia sedang menjemur padinya terbersit dibenaknya bagaimanakah kira-kira paras wajahnya ketika memakai bulang (Pakaian adat Pernikahan di Tapanuli Selatan) berhubung tidak adanya cermin dimasa itu, maka ia memakaikan Bulang itu kepada seekor kucing maka murkalah alam dan turunlah hujan yang sangat deras di wilayah tersebut yang tidak berhenti-henti tujuh hari tujuh malam menenggelamkan sawah berikut isinya maka terbentuklah Danau Marsabut tersebut.

n) Batu Nanggar Jati

Batu Nanggar Jati merupakan salah satu objek wisata yang berupa batu yang menyerupai bukit yang terletak di desa Huta Padang Kecamatan Arse yang diyakini telah ada dari Zaman dahulu kala. Keberadaan Batu Nanggar Jati berhubungan dengan hikayat dalam masyarakat yaitu kisah Datuk Tongku Aji Malim Leman dengan Tapi Mombang Suro seorang bidadari dari kayangan. Pada saat Datuk Tongku Aji Malim Leman melanggar janji maka sang bidadari Tapi Mombang Suro kembali kekayangan melalui Batu Nanggar Jati tersebut. Waktu tempuh menuju objek tersebut lebih kurang setengah jam dari Pasar Sipirok dengan menggunakan kenderaan roda dua atau roda empat.

o) Spot Paralayang di Puncak Sarogodung di Kecamatan Sipirok

Sipirok memiliki potensi baru dibidang olahraga paralayang, potensi ini dipastikan, setelah diujicoba di Tor Sarogodung, Dusun Garoga, Desa Sarogodung, Kecamatan Sipirok oleh Atlet PON Papua 2021 Paraglider singel asal Payakumbuh, Sumbar Sukmandi Bruce, Fikri Siregar asal medan dan Paraglider Raja Doli Siregar asal Padangsidimpuan, didukung juga dengan kondisi angin bersifat dynamic lift dan termal lift yang cukup baik sehingga mampu mengangkat parasut lebih tinggi lagi ke angkasa hingga mencapai 1.800 diatas permukaan laut, sehingga berpotensi menjadi destinasi olahraga paralayang kedepan.

p) Gereja Kristen Protestan Angkola Parau Sorat (GKPA)

Gereja Kristen Protestan Angkola (GKPA) yang terletak di Desa Parau Sorat Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Gereja tertua di Tapanuli Selatan yang didirikan oleh Dr. I.L. Nomensen seorang Missionaris asal Jerman Eropa Timur pada sekitar Tahun 1858 dan mengalami pemugaran pada Tahun 1968 dan sampai saat ini, masih dipergunakan oleh masyarakat setempat, konon Dr.I.L Nomensen pernah berdomisili di daerah ini dan sampai saat ini masih memiliki beberapa petak sawah yang diberikan oleh

Raja setempat. Waktu tempuh ± 30 menit dari Kota Sipirok dengan kenderaan roda dua dan roda empat.

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki optimalisasi dalam pencapaiannya karena dengan memanfaatkan sumber daya yang minim mampu memberikan sumbangsih pembangunan yang cukup signifikan. Pariwisata menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah dalam pengembangannya. Namun dengan berbagai kendala, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan masih belum optimal dalam memperoleh hasil dari kepariwisataan daerah.

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Tapanuli Selatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Potensi kepariwisataan yang terus digali dan dikembangkan diantaranya wisata alam dan budaya daerah menjadikan para wisatawan terus berdatangan untuk menikmati keindahan wisata Tapanuli Selatan. Pada Tahun 2020 Jumlah kunjungan wisatawan ke wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan mencapai 77.747 wisatawan dimana pada tahun 2017 masih sekitar 38.628 wisatawan dan tahun 2018 sebanyak 40.404 wisatawan. Peningkatan ini diperoleh melalui pengembangan beberapa destinasi wisata yang dibangun pada beberapa tahun terakhir seperti air terjun silima-lima, aek milas aek nabara, kawasan aek sabaon, tor simago-mago, air terjun simatutung. Kedepan diharapkan sektor Pariwisata ini dapat menjadi salah satu primadona penyumbang PDRB Kabupaten Tapanuli Selatan, untuk itu diperlukan optimalisasi pengelolaan kepariwisataan daerah disamping pengembangan destinasi wisata baru.

4. Ilmu Pengetahuan, Informasi dan Telekomunikasi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) selama ini telah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Hal ini didukung dengan ketersediaan telekomunikasi dan informatika yang mudah diakses oleh masyarakat. Pada tahun 2020 telah terbangun 36 unit SIMDA/website dan meningkat menjadi 38 unit pada tahun 2021. Bertambahnya unit-unit SIMDA/website sangat membantu

masyarakat dalam mengakses informasi. Sumber Daya Manusia (SDM) bidang teknologi informasi di jajaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2021 meningkat menjadi 936 ASN. Jumlah ini, belum mencerminkan kebutuhan yang sesungguhnya termasuk penyediaan e-goverment bagi birokrasi pemerintahan. Penelitian dan pengembangan merupakan salah satu pendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai penelitian sudah dilaksanakan, baik oleh pemerintah daerah, perguruan tinggi, maupun institusi lainnya. Kelemahan dalam penelitian yang dilaksanakan oleh berbagai elemen masyarakat adalah belum diintegrasikan dalam satu jaringan penelitian yang efektif, sehingga masih banyak terjadi duplikasi dari kegiatan penelitian yang serupa. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya pemborosan sumber daya dan hasilnya kurang memiliki nilai implementatif atau sulit menjadi dasar operasional dan belum sepenuhnya mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat. Hasil temuan teknologi tepat guna bagi masyarakat sangat bermanfaat dalam membantu kehidupan perekonomian, terutama bagi masyarakat pedesaan yang bergerak di bidang industri yang bahan bakunya menggunakan bahan lokal. Berbagai temuan teknologi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, ke depan tetap diupayakan peningkatan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas dalam temuan teknologi tepat guna yang dapat diterapkan di masyarakat.

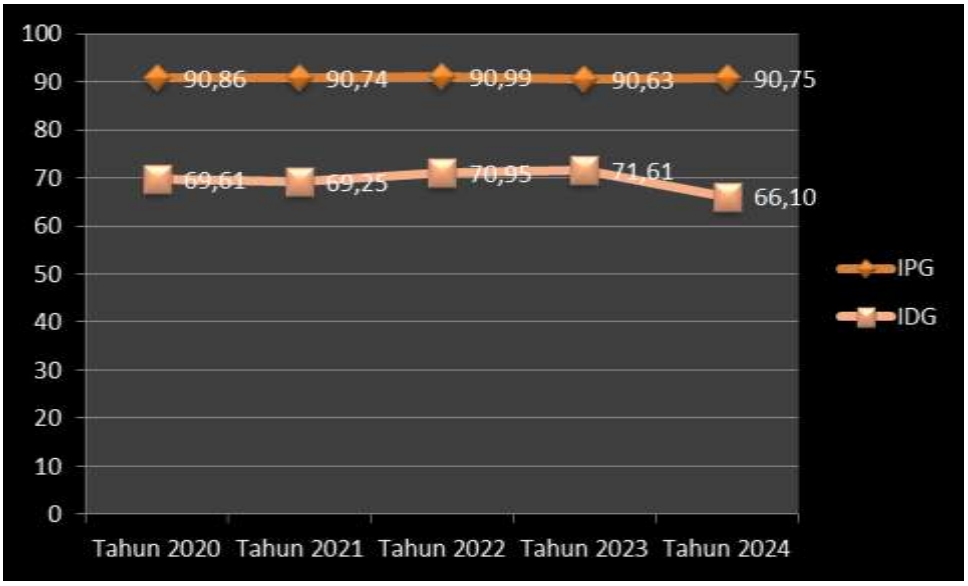
5. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan dan anak masih menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender dapat terjadi apabila porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Pencapaian pemberdayaan

perempuan ini diupayakan agar partisipasi perempuan dalam pembangunan meningkat dan mampu mengakselerasi perwujudan visi pembangunan daerah.

Terlihat bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tapanuli Selatan 5 tahun terakhir mengalami naik dan turun mulai dari tahun 2020 sebesar 90,86 dan pada tahun 2021 turun sebesar 90,74 namun mengalami penaikan pada tahun 2022 sebesar 90,99, dan turun lagi tahun 2023 sebesar 90,63 kemudian naik lagi di tahun 2024 sebesar 90,75 . Sedangkan pada Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) hampir sama dengan IPG mengalami naik dan turun pada tahun 2020 mencapai 69.61 kemudian tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 69.25 kemudian naik kembali pada tahun 2022 mencapai 70,95 dan naik di tahun 2023 sebesar 71,61 kemudian turun lagi di tahun 2024 sebesar 66,10.

Grafik II.23
Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan gender
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024



Sumber : BPS RI, Tahun 2025

Isu penting pada aspek ini yaitu mengenai penguatan ketangguhan keluarga dan masyarakat dalam pembangunan, perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, kemudian isu tentang kemandirian dan kemampuan dalam pengambilan keputusan,

peningkatan partisipasi anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia di berbagai bidang pembangunan, serta pengarusutamaan gender dan inklusi sosial yang efektif dan berkelanjutan dalam pembangunan. Seluruh kinerja dari penanganan isu tersebut dapat bermuara pada ketercapaian target dari indeks pembangunan kualitas keluarga dan indeks ketimpangan gender. Ketiga, mengenai aspek lingkungan hidup berkualitas. Isu yang diangkat pada aspek ini antara lain mengenai tata ruang berbasis ekologis, pengelolaan sampah terpadu, dan kurikulum pendidikan kebencanaan Keempat, aspek tentang berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan.Kebutuhan darana dan prasarana dalam peningkatan keseteraan gender di kabupaten tapanuli selatan harapannya dapat tercapai di tahun 2045 antara laian :

1. tersedianya adanya ruang Laktasi di Setpa perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli selatan
2. Tersedianya Ruang Bermain anak di Opd dan Tempat Umum
3. Toilet Terpiash Laki-laki dan Perempuan telah terbangun di setiap tempat umum di daerah
4. Tersedianya Parkir Untuk Ibu Hamil di Pasar-Pasar Kecamatan
5. Tersedianya sistem informasi layanan pada front office, fasilitas poliklinik dan obat serta penyediaan kursi roda dan payung di pintu masuk ruang tunggu.

6. Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup

Pemenuhan kebutuhan Air Baku dan Air Minum tersebut melalui kegiatan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 122 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan SPAM terdiri dari SPAM Jaringan Perpipaan (SPAM JP) yang dikelola PDAM/Pengembang/Kelompok Masyarakat ataupun SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP) yang dikelola oleh masyarakat dengan memanfaatkan terutama sumber air tanah (sumur).**Kebutuhan air Baku untuk daerah kabupaten Tapanuli Selatan Tahun** 2025 di proyeksikan sebesar 502.26 (liter/detik) dan di tahun 2045 diproyeksikan sebesar 640.57 (liter/detik).

Persentase penanganan sampah di Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2020 baru mencapai 74,04,45 persen menurun menjadi 74,00,50% Tahun 2021 dan 71,00% pada tahun 2024. Capaian ini dapat diperoleh antara lain melalui pembangunan TPA 1 unit di Kecamatan Sipirok, TPST 1 unit di Kecamatan Batang Toru, bank Sampah 1 Unit dan Pusat daur Ulang 1 Unit di Kecamatan Angkola Muara Tais. Dari kondisi tersebut, prioritas utama penanganan sampah adalah optimalisasi pengelolaan sarana dan prasarana yang telah terbangun. Dan kebuuhan terhadap TPA diharapkan agar terbangun di setiap kecamatan di tahun 2045.

Gambaran Penangan sampah di Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik II.24
Perkembangan Penanganan Sampah
di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024



Sumber data; Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tapsel

Penanganan Pencemaran status mutu air yang dilaksanakan adalah pemantauan kualitas air sungai pada sungai-sungai yang berada sekitar aktivitas penduduk atau kegiatan usaha lainnya, pada tahun 2020 tingkat pemantauan yang dilaksanakan sebesar 92,85 persen, tahun 2021

sebesar 92,85 persen dan di tahun 2022 sebesar 93,00 persen sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 sudah mencapai 100%.

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal di Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap 5 (lima) perusahaan besar dapat terlaksana setiap tahunnya. Penegakan Hukum Lingkungan adalah perbandingan jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan dibanding dengan jumlah kasus lingkungan yang ada. Sampai dengan Tahun 2020 kasus lingkungan yang ada di daerah dapat tertangani dan terselesaiakan dengan baik, kondisi ini tentunya perlu terus dipertahankan.

Kawasan hutan Batangtoru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara sejak dulu sudah dikenal memiliki kekayaan keragaman hayati (biodiversity), terdapat 67 spesies mamalia (dari 21 famili), 287 spesies burung, 110 spesies herpetofauna, dari beberapa sumber yang dihimpun, kekayaan keanekaragaman flora juga beragam yaitu sekitar 688 spesies tumguhan dari 137 famili, beberapa spesies satwa liar yang menjadi kekayaan keanekaragaman hayati dikawasan hutan batangtoru merupakan spesies yang dilindungi sesuai PP nomo 7 Tahun 1999.

7. Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan

Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Proyeksi kebutuhan pendidikan dilakukan dengan berpedoman Permendikburistek No. 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Perhitungan dilakukan dengan membagi prediksi jumlah penduduk usia sekolah di masing-masing satuan pendidikan yang dibagi dengan standar jumlah siswa per rombongan belajar dan jumlah rombongan belajar per satuan pendidikan.

Tabel Jumlah Sarana dan Prasarana Sekolah Di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023

NO	Nama Kecamatan	Jumlah desa	Jumlah Sekolah		Jumlah Guru		
			SD	SMP	PNS	P3K	THL
1	Angkola Barat	12	20	2	119	17	15

NO	Nama Kecamatan	Jumlah desa	Jumlah Sekolah		Jumlah Guru		
			SD	SMP	PNS	P3K	THL
2	Angkola Selatan	13	21	4	113	52	13
3	Angkola Timur	13	19	5	166	31	8
4	Arse	8	12	2	54	23	2
5	Aek Bilah	12	14	2	32	23	7
6	Batang Angkola	23	20	3	140	17	1
7	Batang Toru	19	26	3	113	45	7
8	Marancar	11	13	2	57	30	4
9	Muara Batangtoru	6	11	2	36	29	2
10	Saipar Dolok Hole	12	29	4	79	61	17
11	Sayurmatinggi	18	19	1	95	28	6
12	Sipirok	34	46	9	196	71	1
13	Angkola Sangkunur	8	11	5	49	50	9
14	Tantom Angkola	16	17	3	83	37	2
15	Angkola Muaratais	15	10	3	67	10	4
TOTAL		**220**	**288**	**50**	**1399**	**524**	**98**

Terdapat 157 pendidikan taman kanak-kanak tahun 2023 di Tapanuli Selatan dengan jumlah murid 6.491 dan guru sebanyak 459 orang, diproyeksikan kebutuhan akan sekolah taman kanak-kanak di tahun 2045 bertambah sebanyak 250 sekolah mengingat luas dan jumlah penduduk di Tapanuli Selatan,

Sekolah Dasar/MI

Perhitungan jumlah fasilitas SD/MI di Kabupaten Tapanuli Selatan hingga tahun 2045 didasarkan pada, asumsi:

▪ Prediksi jumlah penduduk di usia sekolah SD/MI (7-12 tahun) terhadap jumlah total penduduk proyeksi, yaitu: 9.44% (2025) dan 7.95% (2045)

▪ Standar jumlah siswa per rombongan belajar di tingkat SD/MI ialah sebanyak 16 siswa

▪ Standar jumlah rombongan belajar per satuan pengelolaan pendidikan ialah sebanyak 18 rombongan belajar. Berdasarkan hasil proyeksi dapat dilihat bahwa ketersediaan jumlah SD/MI di Tapanuli Selatan telah melampaui kebutuhan jumlah sekolah bahkan hingga tahun 2030. Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki jumlah SD/MI yang melebihi kebutuhan hingga tahun 2045. Namun masih diharapkan tahun 2045 kebutuhan SD/MI bertambah 2 atau 3 SD/MI unggulan.

Sekolah Menengah Pertama/MTs

Perhitungan jumlah fasilitas SMP/MTs di Kabupaten Tapanuli Selatan hingga tahun 2045 didasarkan pada, asumsi:

- Prediksi jumlah penduduk di usia sekolah SMP/MTs (13-15 tahun) terhadap jumlah total penduduk proyeksi, yaitu: 6,35% (2025); 5,91% (2030); 5,66% (2035); 5,48% (2040); dan 5,29% (2045)
- Standar jumlah siswa per rombongan belajar di tingkat SMP/MTs ialah sebanyak 24 siswa
- Standar jumlah rombongan belajar per satuan pengelolaan pendidikan ialah sebanyak 12 rombongan belajar.

Berdasarkan hasil proyeksi dapat dilihat bahwa ketersediaan jumlah SMP/MTs di Tapanuli Selatan telah melampaui kebutuhan jumlah sekolah bahkan hingga tahun 2045, namun hampir sama dengan SD/MI, tingkat SMP/MTS di butuhkan juga adanya Sekolah unggulan 2 atau 3 pada tahun 2045.

Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan

Proyeksi kebutuhan kesehatan dilakukan dengan berpedoman pada SNI 03-1722-2004. Perhitungan dilakukan dengan membagi proyeksi jumlah penduduk secara total per kabupaten/kota dengan standar jumlah penduduk pendukung di setiap jenis sarana. Perhitungan kebutuhan dilakukan hanya untuk sarana puskesmas dan puskesmas pembantu Puskesmas/Balai Pengobatan, jumlah Puskesmas Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 16 Puskesmas dengan 55 Puskesmas pembantu) kebutuhan Puskesmas Pembantu tahun 2045 menjadi 70 unit agar dapat merata di setiap kecamatan.dengan sarana dan prasarana yang lengkap.

1.4. Aspek Pelayanan Umum

Indeks Pelayanan Publik menunjukkan kinerja pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah yang dinilai melalui 6 aspek, yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan.

Indeks pelayanan publik Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2023 memiliki nilai 3.00 dan meningkat dari tahun 2021.

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pelayanan Publik	n.a	2.83	3.00	3.52	2,54

Pelayanan publik harus dirancang dan dilaksanakan secara responsif gender, termasuk dalam penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, dan perlindungan sosial. Pengumpulan data terpilah gender menjadi dasar untuk penyusunan standar pelayanan minimal yang adil dan inklusif, sehingga dalam dokumen RPJMD ini akan menyiapkan arah kebijakan yang dapat mendukung pelayanan publik yang responsive gender.

2.1 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

2.1.1. Pengembangan Pusat Kegiatan Berdasarkan Rencana Struktur Ruang RTRW Kab. Tapanuli Selatan Tahun 2017-2037

Rencana sistem perkotaan di Kabupaten Tapanuli Selatan meliputi pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang merupakan simpul pelayanan sosial ekonomi masyarakat di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, yang terdiri atas:

a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang berada di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
b. Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) yang berada di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;

Pusat-pusat lain di dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu:

- Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa; dan
- Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) ditetapkan sesuai dengan ketentuan sistem perkotaan nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Sedangkan penentuan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditentukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2011-2031.

6. **Pusat Kegiatan Lokal (PKL)**

Pada dasarnya Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan usulan pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, setelah dikonsultasikan dengan Menteri Pekerjaan Umum.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/atau
b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Berdasarkan kriteria diatas serta memperhatikan perkembangan kawasan perkotaan di Kabupaten Tapanuli Selatan yang mempunyai potensi perkembangan yang cukup pesat serta memperhatikan arahan struktur ruang provinsi sebagaimana tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2011-2031, maka kawasan perkotaan di Kabupaten Tapanuli Selatan yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah **Sipirok,**

Batang Toru, sedangkan **Pintu Padang** diusulkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp).

Sipirok awalnya adalah merupakan ibukota kecamatan, namun setelah adanya pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan maka Sipirok ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan. Dengan statusnya sebagai Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan maka fungsi dan peranan dari Sipirok juga akan semakin besar, sehingga fungsi utama yang akan dikembangkan pada kawasan perkotaan Sipirok adalah :

- pusat pemerintahan kabupaten;
- pusat perdagangan dan jasa;
- industri pengolahan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
- pusat permukiman;
- pusat pelayanan pendidikan, kesehatan dan pariwisata.

7. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Penetapan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Tapanuli Selatan ditetapkan berdasarkan pertimbangan potensi yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan, kemudahan aksesisibiltas dan dukungan sarana dan prasarana yang ada. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah menunjukkan ciri-ciri perkotaan adalah Ibukota kecamatan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

8. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya

alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan kecamatan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Pusat Pelayanan Lingkungan yang ditetapkan adalah desa-desa diluar PKL dan PPK yang ditentukan berdasarkan fungsi dan potensi masing-masing desa. Desa-desa yang mempunyai potensi besar untuk berkembang dan telah mempunyai sarana dan prasarana lingkungan yang memadai dan dapat melayani beberapa desa disekitarnya akan ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Pada desa-desa tersebut saat ini telah tumbuh kegiatan perekonomian desa yang dapat melayani desa-desa sekitarnya sehingga potensial untuk dikembangkan menjadi Pusat Pelayanan Lingkungan sekaligus sebagai sub pusat pelayanan kawasan, agar terjadinya pemerataan pada setiap kecamatan. Untuk lebih jelasnya, Rencana Struktur Ruang Wilayah untuk Kabupaten Tapanuli Selatan ditunjukkan oleh **Tabel II. 27 dan II. 28**

Tabel 2.27
Rencana Sistem Perkotaan Kabupaten Tapanuli Selatan

PKL	PPK	PPL
Sipirok	Pargarutan	Arse Sipagimbar Biru
Batang Toru	Sitinjak Simarpinggan Hutaraja	Marancar Sangkunur
Pintu Padang	Sayurmatinggi	Situmba

Sumber : Hasil Rencana, 2017

Tabel II. 28
Rencana Sistem Perkotaan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 – 2037

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Ibu Kota Kecamatan	Hirarki/ Fungsi	Potensi Pengembangan Kecamatan
1	Sipirok	31.142	Sipirok	PKL	- Perdagangan dan Jasa - Industri - Transportasi - Pariwisata - Pertambangan - Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah - Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering - Perkantoran - Pemerintahan kabupaten/ kecamatan - Pusat pelayanan kesehatan
2	Batang Toru	31.639	Batang Toru	PKL	- Pertambangan - Pertanian Tanaman Pangan - Perkebunan - Industri - Transportasi
3	Batang Angkola	33.547	Pintu Padang	PKLp	- Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah - Perkebunan - Perikanan - Perdagangan dan Jasa - Industri - Permukiman - Transportasi
4	Angkola Timur	19.183	Pargarutan	PPK	- Pertanian Tanaman Pangan - Industri - Perkebunan
5	Angkola Selatan	28.011	Simarpinggan	PPK	- Industri - Pariwisata - Perkebunan - Pertanian Tanaman Pangan
6	Angkola Barat	24.915	Sitinjak	PPK	- Pertanian Tanaman Pangan - Industri - Perkebunan
7	Sayurmatinggi	24.300	Sayurmatinggi	PPK	- Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering - Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah - Perkebunan
8	Marancar	9.535	Marancar	PPL	- Perkebunan - Pertanian Tanaman Pangan
9	Arse	8.012	Arse Nauli	PPL	- Perkebunan - Pertanian Tanaman Pangan
10	Saipar Dolok Hole	12.919	Sipagimbar	PPL	- Perkebunan - Pertanian Tanaman Pangan
11	Aek Bilah	6.501	Biru	PPL	- Perkebunan - Pertanian Tanaman Pangan
12	Muara Batang Toru	11.755	Hutaraja	PPK	- Pariwisata - Perkebunan - Pertambangan - Industri - Agromarine
13	Angkola Sangkunur	14.683	Simataniari	PPL	- Perkebunan - Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah - Pertanian Tanaman Pangan
14	Tano Tombangan	18.685	Situmba TT	PPL	- Perkebunan - Pertanian Tanaman Pangan

2.7.2. Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Struktur Ruang RTRW Kab. Tapanuli Selatan Tahun 2017-2037

Salah satu terminologi baru yang dimuat dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah kawasan strategis. Secara umum, Kawasan ini merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- **KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

A. Kawasan Strategis dari Sudut Pandang Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten bahwa kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan kriteria sebagai berikut :

a) Tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
b) Kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora, dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
c) Kawasan yang memberikan perlindungan kesimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;

d) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;

e) Kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup

f) Kawasan rawan bencana alam; atau

g) Kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan

Berdasarkan kriteria tersebut, maka penetapan kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Lindung Sempadan Danau Siais

Kawasan ini merupakan area danau, sempadan danau, kawasan lindung dan lahan di sekitar danau. Kawasan strategis Danau Siais diarahkan untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata terpadu mengingat potensi yang ada, dapat dikatakan hampir sama dengan potensi yang dimiliki Danau Toba di Kabupaten Toba Samosir-Provinsi Sumatera Utara.

2. Kawasan Hutan Lindung Batang Toru

Kawasan hutan lindung di Kecamatan Batang Toru saat ini telah ditetapkan sebagai salah satu kawasan lindung yang memiliki nilai kepentingan yang sangat tinggi bukan hanya bagi pemerintah kabupaten, tetapi juga bagi pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 579 Tahun 2014 tentang Kawasan Hutan Sumatera Utara. Banyaknya kegiatan konversi lahan menjadi kegiatan perkebunan kelapa sawit, sedemikian rupa sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan dan perlindungan terhadap ekosistem yang ada di Hutan Lindung Batang Toru melalui penetapan kawasan strategis ini.

B. Kawasan Strategis Ekonomi

Berdasarkan Undang – Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri PU No. 16 / PRT / M / 2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten bahwa kawasan strategis ekonomi adalah kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten yang merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki :

a. Potensi ekonomi cepat tumbuh;
b. Sektor unggulan yang dapat menggerakan pertumbuhan ekonomi;
c. Potensi ekspor;
d. Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
e. Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
f. Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan;
g. Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam mewujudkan ketahanan energi;
h. Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten.

Kawasan Strategis Ekonomi di Kabupaten Tapanuli Selatan meliputi:

1. Kawasan Wisata Danau Siais

Pengembangan paket wisata Danau Siais diharapkan mampu menjadi magnet kegiatan pariwisata yang unggul di Kabupaten Tapanuli Selatan dan mampu memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi kas daerah. Pengembangan kegiatan pariwisata ini juga diproyeksikan dapat menjadi pusat pertumbuhan kegiatan baru bagi masyarakat sekitar untuk memasarkan hasil produksi lokal sehingga kegiatan ekonomi mikro tumbuh dengan baik dan progresif.

2. Kawasan Strategis Perkotaan Batang Toru, Sipirok, dan Batang Angkola

Kawasan strategis Batang Toru di Kecamatan Batang Toru merupakan kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan perkotaan. Hal ini

didasarkan pada potensinya sebagai pusat pertumbuhan Industri.

Pengembangan Kawasan Perkotaan Batang Toru dilakukan juga untuk mengurangi tekanan terhadap perluasan pengembangan Kecamatan Sipirok sebagai ibukota kabupaten yang memiliki potensi sebagai menjadi kawasan agropolitan. Pengembangan pusat pertumbuhan industri ini dilakukan dengan memperhatikan kawasan konservasi hutan.

Pengembangan kawasan perkotaan baru di Kecamatan Batang Angkola tumbuh sebagai akibat arah pergerakan dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Munculnya beberapa fasilitas skala kabupaten dan aksesibilitas yang mendukung memunculkan magnet aktivitas baru bagi masyarakat. Diharapkan dengan tumbuhnya kawasan perkotaan baru di Kecamatan Batang Angkola ini dapat memecah padatnya aktivitas di Kecamatan Batang Toru yang juga merupakan kawasan lindung serta kawasan perkotaan di Kecamatan Sipirok yang juga merupakan area pengembangan Agropolitan di dataran tinggi.

3. Kawasan Strategis Agropolitan Sitinjak

Kawasan Agropolitan Sitinjak di Kecamatan Angkola Barat merupakan kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan agropolitan dengan basis ekonomi komoditi tanaman salak, durian dan buah-buahan lainnya, namun cakupan kawasan ini meliputi Kecamatan Marancar dan sebagian Angkola Timur.

4. Kawasan Strategis Agropolitan Sipirok

Kawasan Agropolitan Sipirok di Kecamatan Sipirok merupakan kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan agropolitan dengan basis ekonomi sayuran dan buah-buahan, komoditi pertanian lahan basah dan pariwisata.

5. Kawasan Stategis Agromarine (Minapolitan) Muara Upu.

Kawasan ini sangat potensial dikembangkan menjadi tujuan wisata. Pantai ini merupakan satu-satunya wilayah laut yang dimiliki kabupaten Tapanuli Selatan,

yang terdapat sepanjang ± 18,38 km, yang terletak di desa Muara Upu, Kecamatan Muara Batang Toru. Selain untuk pengembangan pariwisata di Muara Upu sedang berkembang pembukaan perkebunan. Konsep ini mengutamakan pengembangan kawasan berbasis pada potensi pengembangan wilayah pesisir dan kelautan.

6. Kawasan Strategis Agropolitan Pintu Padang

Kawasan Agropolitan Pintu Padang di Kecamatan Batang Angkola merupakan kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan agropolitan dengan basis ekonomi komoditi pertanian lahan basah.

2.2. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Capaian indikator kinerja pembangunan daerah merupakan rekapitulasi dari seluruh capaian pembangunan bidang urusan pembangunan yang menjadi tolak ukur secara rinci setiap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Pencapaian ini tentu saja menjadi salah satu poin penting bagi perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang selanjutnya akan terjabarkan dalam program dan kegiatan pembangunan di setiap perangkat daerah.

Berikut indikator pembangunan daerah yang merupakan gambaran pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan hasil capaian kinerja pembangunan dalam 4 tahun terakhir berdasarkan aspek pembangunan daerah.

Tabel II.20
Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2020)	Realisasi			
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2021-2024							
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	POINT	73.16	73.37	73,96	74,58	75,18
2	Persentase pertumbuhan ekonomi	%	0,39	2,39	4,78	5,11	5,12
3	Indeks Infrastruktur	%	51,03	51,63	53,38	53,91	59,75
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	-	CC	CC	CC	CC
5	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban tertangani	%	85,64	85,64	100,00	100,00	100,00
Indikator Sasaran Pembangunan							
1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,28	9,30	9,34	9,51	9,56

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2020)	Realisasi			
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
	2	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,24	13,28	13,37	13,58	13,72
	3	Indeks Kerukunan Umat Beragama	%	65,00	67,00	69,32	70,00	71,40
	4	Umur Harapan Hidup	%	64,91	65,11	71,35	71,61	75,18
	5	Persentase Peningkatan sistem aplikasi informatika	%	68,89	73,33	89,55	89,55	35,82
	6	Nilai Tukar Petani	Nilai	101,95	101,95	121,73	128,16	146,97
	7	Pendapatan Perkapita	Rp. Juta	48,66	53,53	55,28	60,39	67,23
	8	Indeks Gini Rasio	Nilai	0,20	<0,3	0,2090	0,2190	0,2060
	9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	point	85,64	70,76	77,58	77,68	77,71
	10	Persentase Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan (%)	%	8,47	8,46	8,07	7,01	6,92
	11	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	%	317,99	49,77	89,53	-5,04	-3,50

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2020)	Realisasi			
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
	12	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	%	68,12	68,94	69,91	70,91	71,85
	13	Ketaatan terhadap RTRW	%	85,00	85,00	100,00	100,00	100,00
	14	Pertumbuhan PDRB Sektor Konstruksi	%	11,52	11,67	11,63	11,61	10,81
	15	Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh Insfrastrutur Pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	17,84	18,02	18,02	17,94	17,14
	16	Persentase Lingkungan yang Tertata	%	23,95	24,07	27,78	31,21	31,43
	17	Persentase pelayanan publik berbasis teknologi informasi	%	99,00	100,00	27,27	29,85	29,85
	18	Jumlah Desa Maju	Desa	7,00	14,00	50,00	100,00	81,00
	19	Indeks Kepuasaan Masyarakat	Kategori	B	B	B	B	B
	20	Indeks Demokrasi	Point	60,00	63,00	79,53	80,34	81,95
	21	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	22	LAKIP	Nilai	CC	CC	CC	CC	CC
	23	LPPD (skor)	Skor	3.2225	2.53	2,9786	27982,00	Lagi Proses
	24	Maturitas SPIP	Level	3,5480	3,5800	3,064	3,083	3,000

NO	INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2020)	Realisasi			
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
25	SPBE	Level	2,80	2,80	2,87	2,69	3,14
26	Kapabilitas APIP	Level	3,00	3,00	1,460	3,00	3,00
27	Persentase Tingkat Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
28	Persentase Cadangan Pangan	%	10,00	2,53	6,76	9,36	11,76
29	Rasio Jumlah Ruma Layak Huni Terhadap Jumlah Rumah	%	80,36	79,71	80,43	80,56	80,61
30	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)	%	74,89	75,63	75,78	85,00	86,69
31	Rumah Tangga Bersanitasi (%)	%	42,20	43,55	63,21	64,49	65,31
32	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	%	80,00	82,00	100,00	100,00	100,00
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1	Peningkatan PDRB/Kapita	%	-1,62	1,02	4,56	3,36	1,11
2	Pertumbuhan PDRB Sektor Transportasi dan Pergudangan (%)	%	-3,05	2,32	8,84	12,97	9,57
3	Persentase pertumbuhan ekonomi	%	0,39	2,39	4,78	5,11	5,12
4	Peningkatan PDRB dari Sub Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	8,24	1,32	1,29	1,39	1,41
5	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	%	3,96	3,75	6,90	5,09	5,20

NO	INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2020)	Realisasi			
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Pertumbuhan PDRB Sektor Pengadaan Listrik dan Gas	%	6,74	7,68	6,33	6,18	3,74
7	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri dan Pengolahan	%	-4,35	3,61	4,38	5,93	5,40
8	Pertumbuhan PDRB Sektor Konstruksi	%	-2,47	4,40	0,66	7,03	3,01
9	Indeks Gini Rasio		0,20	<0,3	0,209	0,219	0,206
10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	73.16	73.37	73,96	74,58	75,18
11	Persentase Pengangguran Terbuka	%	4,42	4,38	3,65	3,49	3,41
12	Persentase Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan (%)	%	8,47	8,46	8,07	7,01	6,92
13	Angka Rata-Rata Lama Sekolah {Tahun}	Tahun	9,28	9,28	9,34	9,51	9,56
14	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,24	13,24	13,37	13,58	13,72
15	Jumlah pencari kerja yang dilatih dan bekerja	Orang	176,00	80,00	176,00	144,00	100,00
16	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	17,78	17,81	16,93	18,02	22,07
17	Tingkat Produktfitas Tenaga Kerja	%	66,63	69,22	70,24	68,33	64,69
18	Persentase Area Perubahan Reformasi Birokrasi (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	90,86	91,59	90,99	90,63	90,75
20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	point	85,64	70,76	77,58	77,68	77,71
21	Jumlah Group Kesenian	Group	16,00	0,00	10,00	10,00	11,00
22	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	50,00	7,00	10,00	10,00	11,00

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2020)	Realisasi			
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
23		Jumlah Atlit Berprestasi (Orang) tingkat provinsi dan nasional	Orang	2,00	53,00	46,00	37,00	32,00
24		Jumlah kegiatan Kepramukaan	Kegiatan	8,00	10,00	10,00	10,00	11,00
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1		Persentase Cadangan Pangan	%	10,00	2,53	6,76	9,36	11,76
2		Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	%	79,80	80,00	81,30	84,60	83,00
3		Pengajuan Registrasi dan Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (keamanan pangan)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
4		Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban tertangani	%	91,35	100,00	100,00	100,00	100,00
ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1	01	Dinas Pendidikan Daerah						
1	01	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	01	APK PAUD	%	66,50	66,50	71,55	67,63	68,03
1	01	Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
1	01	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57
1	01	Persentase Kelulusan SD/MI	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	01	Persentase Kelulusan SMP/MTs	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	01	APK SD/MI	%	103,91	103,91	112,50	99,17	111,80

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2020)	Realisasi			
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
1	01	APK SMP/MTs	%	106,00	106,00	96,12	39,13	85,36
1	01	APM SD/MI	%	99,17	99,17	99,38	99,02	98,89
1	01	APM SMP/MTs	%	89,80	89,80	81,30	78,78	82,23
1	01	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,28	9,28	9,34	9,51	9,56
1	01	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,24	13,24	13,37	13,58	13,72
1	01	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dan Dasar dan Menengah yang berpatisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	%	0,69	0,69	5,74	6,51	40,89
1	**02**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						
1	**02**	**Dinas Kesehatan Daerah**						
1	02	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	02	Umur Harapan Hidup	%	64,91	65,11	71,35	71,61	75,18
1	02	Persentase Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	93,59	94,37	95,28	95,77	96,93
1	02	Persentase Ibu bersalin mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	%	95,16	95,63	95,67	95,95	96,31
1	02	Persentase Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	93,67	94,26	94,31	94,76	94,92

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2020)	Realisasi			
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
1	02	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	%	91,98	92,69	93,04	94,72	94,86
1	02	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	41,50	55,94	65,07	88,00	90,13
1	02	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	81,00	87,93	91,78	92,12	93,55
1	02	Prevalensi Balita Stunting	%	22,39	30,80	39,40	15,60	6,60
1	02	Persentase pelayanan pada Usia 15-59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	69,98	70,01	78,70	96,80	83,18
1	02	Persentase Penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	02	Persentase Penderita DM yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	91,60	90,01	99,50	100,00	100,00
1	02	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai Standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	02	Persentase orang terduga TBC mendapatkan Pelayanan TBC sesuai standar	%	52,80	100,00	100,00	100,00	100,00

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2020)	Realisasi			
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
1	02	Persentase orang dengan Resiko Terinfeksi HIV mendapatkan Pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	02	Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit Yang terakreditasi	%	100,00	100,00	100,00	84,21	100,00
1	02	Rasio Rumah Sakit persatuan Penduduk	/1000 penduduk	0,03	0,03	0.03	0,04	0,06
1	02	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang memiliki Izin	Orang	345,00	350,00	400,00	450,00	60,00
1	02	Persentase Tenaga Kesehatan Sesuai Kompetensi	%	45,00	45,00	63,00	50,00	60,00
1	02	Persentase Fasyankes dengan penggunaan obat sesuai FORNAS	%	40,00	50,00	55,00	60,00	65,00
1	02	Persentase Kecamatan yang menerapkan kebijakan Germas	%	30,00	55,00	81,87	89,65	90,05
1	02	Persentase Penduduk Miskin Mendapatkan Jaminan Kesehatan	%	58,70	62,00	81,85	79,49	96,20
1	**03**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						
1	**03**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah**						
1	03	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	95,72

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2020)	Realisasi			
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
1	03	Luas Daerah Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	64,83	65,60	66,59	68,40	67,10
1	03	Rasio Jaringan Irigasi	%	62,13	62,44	62,13	64,71	61,15
1	03	Persentase penududuk berakses air minum	%	74,89	75,64	79,05	85,00	86,44
1	03	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	0,31	0,31	0,49	4,00	5,25
1	03	Persentase keandalan bangunan gedung pemerintah	%	83,33	93,33	94,84	95,02	94,58
1	03	Persentase Lingkungan yang Tertata	%	23,95	24,07	24,57	25,57	25,75
1	03	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi baik	%	54,12	55,04	56,47	57,64	59,67
1	03	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	%	68,12	68,94	69,91	70,91	71,85
1	03	Persentase jembatan dengan kondisi baik	%	73,20	74,52	76,95	77,82	77,75
1	03	Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	%	3,23	3,23			2,42
1	03	Pertumbuhan PDRB Sektor Konstruksi	%	-2,47	4,40	0,66	7,03	3,01
1	03	Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	50,00	50,00	75,00		60,95
1	03	Persentase Pemanfaatan dan kesesuaian Tata Ruang	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	03	Ketaatan terhadap RTRW	%	85,00	85,00	100,00	100,00	92,50

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2020)	Realisasi			
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
1	03	Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh Insfrastrutur Pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	17,84	18,02	16,57	17,94	17,23
1	03	Rasio Luar Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh Insfrastruktur Pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	%	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025
1	**04**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						
1	**04**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah**						
1	04	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	04	Rasio Jumlah Ruma Layak Huni Terhadap Jumlah Rumah	%	80,36	79,71	80,43	80,56	80,61
1	04	Penyedian dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	unit	20,00	0,00	1,00	5,00	9,00
1	04	Fasilitasi Penyedian dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi masyarakat terkena Relokasi Program Pemerintah	unit	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2020)	Realisasi			
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
1	04	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh (%)	%	12.55	8.89	6.69	4.60	3.11
1	04	Berkurangnya Jumlah Unit RLTH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	0,20	0,20	0,19	3,27	0,30
1	04	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 ha di Kab/Kota yang ditangani	%	10,79	0,14	0,25	31,24	16,25
1	04	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)	%	74,89	75,63	75,78	85,00	86,69
1	04	Rumah Tangga Bersanitasi (%)	%	42,20	43,55	63,21	64,49	65,31
1	04	Cakupan Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Desa/Kel	45,00	50,08	51,16	51,16	51,16
1	**05**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						
1	**05**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**						
1	05	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	05	Rasio peningkatan kemampuan masyarakat tentang kebencanaan (kajian rawan kebencanaan)	%	80,00	**85,00**	**85,00**	**85,00**	**85,00**
1	05	Persentase pelayanan penanganan darurat bencana terhadap kejadian bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2020)	Realisasi			
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
1	05	Persentase pemenuhan kebutuhan dan penanganan infrastruktur pasca bencana	%	30,00	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**
1	05	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	orang	120,00	160,00	160,00	480,00	1,590
1	05	Persentase petugas yang aktif dalam penanggulangan bencana	%	100,00	85,00	85,00	85,00	90,00
1	**05**	**Satuan Polisi Pamong Praja**						
1	05	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	05	Penegakan Perda	%	66,67	75,00	21,05	76,19	100,00
1	05	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban tertangani	%	85,64	85,64	100,00	100,00	100,00
1	05	Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk		4,97	3,52	2,95	5,50	5,46
1	05	Rasio Linmas per 10.000 penduduk		23,98	24,22	21,41	38,75	38,46
1	05	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP	%	23,33	25,56	53,33	56,67	13,89
1	05	Jumlah Kejadian Demonstran	kali	11,00	19,00	22,00	16,00	36,00
1	05	Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten	%	0,00	0,00	1,84	1,05	1,13
1	**06**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						
1	**06**	**Dinas Sosial Daerah**						
1	06	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan	%	100,00	100,00	95,61	91,27	

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2020)	Realisasi			
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
		Kemasyarakatan (%)						
1	06	Persentase Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	100,00	41,00	98.14	99.70	99.70
1	06	Persentase Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan/pengemis diluar panti	%	100,00	75.68	64.83	86.69	86.69
1	06	Persentase Penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	(%)	100,00	78.96	93.72	97.97	97.97
1	06	Cakupan Penanganan Bencana di bidang sosial	(%)	100,00	0,00	96.16	93.04	93.04
1	06	Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	(%)	100,00	0,00	96.16	93.04	93.05
1	06	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	(%)	100,00	0,00	96.79	97.83	97.83
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
2	07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2020)	Realisasi			
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
2	**07**	**Dinas Ketenagakerjaan Daerah**						
2	07	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	95,44	100,00	100,00	100,00	100,00
2	07	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana Tenaga kerja Daerah (RTKD)	%	32,14	30,77	33,33	29,63	32,14
2	07	Jumlah pencari kerja yang dilatih dan bekerja	Orang	176,00	80,00	176,00	144,00	100,00
2	07	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	17,78	17,81	16,93	18,02	22,07
2	07	Tingkat Produktfitas Tenaga Kerja	%	66,63	69,22	70,24	68,02	64,69
2	07	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	%	37,33	51,01	59,36	70,20	86,91
2	07	Persentase Pengangguran Terbuka	%	4,42	4,00	3,65	3,49	3,41
2	07	Angka sengketa pengusaha-pekerja	%	13,58	16,87	6,17	7,53	9,78
2	07	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	13,41	30,77	33,33	29,63	32,14
2	07	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	13,41	12,50	7,41	10,75	8,69
2	**08**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2020)	Realisasi			
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
2	**08**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah**						
2	08	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	08	Persentase kelompok perempuan mandiri	%	0,00	20,00	14,28	14,28	28,57
2	08	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD	%	43,47	45,00	12,00	3,20	1,60
2	08	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	%	80,00	82,00	100,00	100,00	100,00
2	08	Rasio Kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	%	0,03	0,04	0,025	0,016	0,009
2	08	Persentase penyelesaian pengaduan dan tindak kekerasan dan traficking	%	80,00	82,00	100,00	100,00	100,00
2	08	Tingkat capaian Kota Layak Anak	%	70,00	70,00	74,00	75,00	75,00
2	08	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	**09**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						
2	**09**	**Dinas Ketahanan Pangan Daerah**						
2	09	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan	%	97,87	100,00	100,00	94,85	100,00

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2020)	Realisasi			
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
		Kemasyarakatan (%)						
2	09	Persentase Cadangan Pangan	%	10,00	2,53	6,76	9,36	11,76
2	09	Persentase penanganan desa Rawan Pangan	%	17,50	15,15	4,00	20,00	27,27
2	09	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	%	79,80	80,00	81,30	84,60	83,00
		Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	%	59,01	82,95	85,91	85,94	86,09
2	09	Pengajuan Registrasi dan Sertifikasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (keamanan pangan)	%	0,00	55,00	0,00	0,00	12,50
2	**10**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						
1	**04**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah**						
2	10	Mengukur Persentase Pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	1,00	1,00	1,23	0,011	0,61
2	10	Mengukur Persentase Penetapan tanah yang untuk Pembangunan Fasilitasi	%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10	Mengukur Persentase Lokasi Pembangunan dalam rangka	%	100,00	1,00	1,23	0,00	18,69
2	10	Mengukur Persentase Tanah obyek landform (TCL) yang siap	%	7,00	0,00	0,00	0,00	79,98

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2020)	Realisasi			
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
2	10	Mengukur Persentase Ketersediaan tanah untuk Masyarakat	%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**11**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						
2	**11**	**Dinas Lingkungan Hidup Daerah**						
2	11	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	11	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan lingkungan hidup	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	85,64	70,76	77,58	77,68	77,71
2	11	Luas Lahan Kritis/DAS di Luar Kawasan Hutan yang direhabilitasi	Ha	0,00	0,00	2,50	5,00	5,70
2	11	Luas RTH yang terpelihara	Ha	10,00	21,00	21,00	21,00	21,00
2	11	Jumlah Industri dan usaha kecil yang dilakukan pembinaan pengelolaan limbah B3		5 usaha; 5 puskesmas; 1 klinik	8 usaha; 5 puskesmas; 1 klinik	8 Usaha; 5 Puskesmas; 1 Klinik	10 Usaha; 5 Puskesmas; 1 Klinik	12 Usaha; 5 Puskesmas; 1 Klinik
2	11	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH	Usaha	9,00	45,00	110 Usaha	120,00	140,00

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2020)	Realisasi			
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
2	11	Persentase Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan /atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	11	Jumlah Masyarakat yang mendapat pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Sekolah;desa	17 Sekolah	21 Sekolah;1 Desa	25 Sekolah; 2 Desa	29 Sekolah;3 Desa	29 Sekolah;4 Desa
2	11	Persentase sampah tertangani	%	74,04	74,00	73,00	72,00	71,00
2	11	Persentase Pengurangan Sampah	%	22,00	24,00	26,00	27,00	28,00
2	**12**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						
2	**12**	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah**						
2	12	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	12	Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	99,00	99.94	99.00	97.01	96.88
2	12	Cakupan penerbitan kartu keluarga, cakupan penerbitan kartu tanda penduduk (ktp) cakupan penerbitan akta kelahiran	%	99,58	99.98	99.58	97.01	96.88

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2020)	Realisasi			
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
2	12	Penggunaan Data Konsolidasi Bersih (DKB) untuk pelayanan	%	100.00	100.00	100.00	100,00	100,00
2	12	Persentase Hasil Kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan	%	94,60	97.07	83.14	89.84	90.18
2	**13**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						
2	**13**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah**						
2	13	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	13	Jumlah Desa Maju	Desa	7,00	14,00	50,00	100,00	81,00
2	13	Jumlah Desa Berkembang	Desa	146,00	154,00	89,11	67,92	130,00
2	13	Jumlah Desa Tertinggal	Desa	47,00	33,00	118,17	153,04	0,00
2	13	Jumlah Desa Sangat Tertinggal	Desa	11,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2	13	Jumlah Badan Usaha Milik Desa Aktif	Kelompok	70,00	80,00	20,00	20,00	26,00
2	13	Jumlah Kelompok Binaan Lembaga (LPMD) Aktif	Lembaga	212,00	212,00	100,00	100,00	212,00
2	13	Jumlah PKK aktif		228,00	228,00	16,00	16,00	228,00
7	**01**	**Kecamatan**						
2	13	Persentase Desa berstatus Berkembang	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	13	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Lembaga	8,00	8,00	8,00	8,00	15,00

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2020)	Realisasi			
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
2	13	Jumlah Desa yang sudah menata Aset Desa sesuai Pedoman	desa	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
2	13	Jumlah desa yang sudah menyusun RKPDes dan APBDes sesuai pedoman dan tepat waktu	desa	12,00	212,00	212,00	212,00	212,00
2	13	Persentase Badan Usaha Milik Desa Aktif	%	75,00	80,00	85,00	85,00	24,00
2	**14**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						
2	**14**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah**						
2	14	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	14	Laju pertumbuhan penduduk	%	0,45	0,31	0,49	1,07	1,43
2	14	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2,57	2,56	2,55	2,53	2,42
2	14	Persentase peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR mandiri	%	29,95	30,76	11,48	14,10	15,50
2	14	Persentase Peserta KB Aktif /MKJP	%	32,94	33,58	19,23	22,37	53,40
2	14	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)	%	11,65	11,50	30,67	12,61	8,91
2	14	jumlah keluarga sejahtera yang mendapat bantuan	Kelompok	5,00	5,00	5,00	5,00	6,00

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2020)	Realisasi			
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
2	**15**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						
2	**15**	**Dinas Perhubungan Daerah**						
2	15	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	15	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	%	19,93	13,00	13,00	34,00	13,00
2	15	Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	%	8,00	37,50	37,50	6,06	15.71
2	15	Pertumbuhan PDRB Sektor Transportasi dan Pergudangan	%	-3,05	2,32	8,84	12,97	9,57
2	15	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	%	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
2	15	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	%	0,03	0,093	0,093	0,103	0,103
2	**16**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						
2	**16**	**Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah**						
2	16	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	100,00	85,00	100,00	100,00
2	16	Persentase informasi publik yang terpublikasi dengan baik	%	70,00	70,20	21,50	95,00	95,50

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2020)	Realisasi			
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
2	16	Pertumbuhan PDRB Sektor Informasi dan Komunikasi	%	7,14	7,25	7,96	7,97	7,95
2	16	Persentase Peningkatan sistem aplikasi informatika	%	68,89	73,33	89,55	89,55	35,82
2	16	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan Program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	38,01	38,21	86,00	74,30	96,50
2	16	Tersedianya Acuan Penyusunan SPBE	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	16	Persentase pelayanan publik berbasis teknologi informasi	%	99,00	100,00	27,27	29,85	29,85
2	**17**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI. USAHA KECIL. DAN MENENGAH**						
3	**30**	**Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah**						
2	17	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	80,00	128,00	132,00	149,00	144,00
2	17	Jumlah Koperasi	unit	278,00	283,00	288,00	309,00	326,00
2	17	Persentase Koperasi aktif	%	67,62	68,90	69,44	71,52	73,01
2	17	Persentase UKM terhadap UMKM	%	65,00	75,00	80,00	85,00	90,00
2	17	Persentase koperasi aktif	%	100,00	68,90	69,44	71,52	73,01
2	17	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Usaha	300,00	400,00	300,00	600,00	120,00
2	17	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha	%	317,81	20,66	29,24	30,49	30,73

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2020)	Realisasi			
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
		Mikro						
2	17	jumlah UMKM yang mendapat bantuan	buah	150,00	141,00	400,00	565,00	645,00
2	17	jumlah UMKM naik Kelas	Unit	1430,00	157,00	164,00	122,00	76,00
2	17	Persentase Pertumbuhan Usaha mikro yang menggunakan Digital marketing	%	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00
2	**18**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						
2	**18**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah**						
2	18	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	18	jumlah buku direktori perusahaan	Buku	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	18	Jumlah Promosi investasi melalui media cetak dan elektronik	event	2,00	2,00	4,00	3,00	1,00
2	18	Persentase Perizinan yang yang dikeluarkan DPMPTSP	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	18	Nilai Investasi PMA/PMDN	(Rp. Milyar)	1886,81	1912,14	7463,60	7087,34	6.839,33
2	18	Jumlah PMA/PMDN	Perusahaan	13,00	18,00	19,00	18,00	11,00
2	18	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	%	317,99	49,77	89,53	-5,04	-3,50

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2020)	Realisasi			
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
2	**19**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						
3	**26**	**Dinas Pariwisata Daerah**						
2	19	Jumlah pemuda pelopor	orang	2,00	2,00	5,00	5,00	2,00
2	19	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	1,62	1,62	0,90	0,92	1,07
2	19	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi Sosial	%	22,17	22,10	10,03	10,20	7,06
2	19	Jumlah Atlit Berprestasi (Orang) tingkat provinsi dan nasional	Orang	2,00	53,00	46,00	37,00	32,00
2	19	Jumlah kegiatan Kepramukaan	Kegiatan	8,00	10,00	10,00	10,00	11,00
7	**01**	**Kecamatan**						
2	19	Jumlah Atlit Berprestasi (Orang) tingkat provinsi dan nasional	Event	0,00	1,00	3,00	3,00	3,00
2	**20**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						
2	**16**	**Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah**						
2	20	Persentase data informasi dan statistik daerah yang tersusun dengan baik	%	90,00	95,00	90,00	90,00	90,00
2	20	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	%	90,00	100,00	80,00	80,00	80,00

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2020)	Realisasi			
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
2	**21**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						
2	**16**	**Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah**						
2	21	Persentase pengamanan informasi daerah yang terselenggara dengan baik	%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**22**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						
1	**01**	**Dinas Pendidikan Daerah**						
2	22	Jumlah Group Kesenian	Group	16,00	0,00	10,00	10,00	11,00
2	22	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	50,00	7,00	10,00	10,00	11,00
		Budaya lokal yang dikembangkan menjadi daya tarik wisatawan	Budaya	0,00	2,00	2,00	3,00	3,00
2	**23**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						
2	**23**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah**						
2	23	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	23	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun	orang	68408,00	71808,00	137.015,00	156.007,00	290.570,00
2	23	Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	53,84	55,84	58,04	59,01	69,01
2	23	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	78,44	78,44	78,84	89,84	89,89
2	**24**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2020)	Realisasi			
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
2	**23**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah**						
2	24	Indeks tata kelola arsip	%	56,56	80,00	90,68	79,58	80,58
2	24	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan Pertanggungjawaban Nasional) Pasal 40 dan pasal 59 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	%	33,00	34,00	73,00	72,98	75,05
2	24	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik & kesejahteraan rakyat.	Nilai	179,80	213,00	2194,00	3204,00	3728,00
3		**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						
3	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						
3	**25**	**Dinas Perikanan Daerah**						
3	25	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	25	Produksi Perikanan Laut	Ton	195,23	171,36	181,44	181,57	208,81
		Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	76,51	81,82	100,00	100,00	69,23
3	25	Produksi Budidaya Perikanan Darat	Ton	7669,70	6681,31	7513,03	7539,59	7931,10

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2020)	Realisasi			
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
		Cakupan Pembinaan Kelompok Budidaya Perikanan Darat	%	76,51	63,83	61,70	61,70	79,36
3	25	Komsumsi Ikan perkapita (kg/Kapita/Tahun)	%	37,48	40,93	44,66	44,05	48,04
3	**26**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						
3	**26**	**Dinas Pariwisata Daerah**						
3	26	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	26	Kunjungan Wisata	orang	77747	160038	522683	422740	484922
		Persentase Peningkatan Perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	-4,27	-1,89	24,24	13,46	2,04
3	26	Jumlah Promosi Pariwisata melalui media cetak dan elektronik	Event	3,00	4,00	3,00	4,00	4,00
3	26	Tingkat Hunian Akomodasi	%	34,34	27,55	20,68	15,52	16,61
3	26	Jumlah Objek Wisata yang dikembangkan (Objek)	objek	8,00	4,00	20,00	0,00	4,00
3	26	Jumlah Kemitraan yang dijalin dalam pengembangan kepariwisataan (Jumlah)	Kemitraan	4,00	18,00	20,00	0,00	19,00
3	26	Peningkatan PDRB dari Sub Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	%	1,39	1,32	1,29	1,39	1,41
3	26	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	%	1,39	4,50	4,74	4,34	5,19

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2020)	Realisasi			
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
3	**27**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						
3	**27**	**Dinas Pertanian Daerah**						
3	27	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	27	Peningkatan produksi padi, jagung, kedelai dan ubi kayu	Ton	248.783,10	260414,40	254990,36	258643,17	256171,46
3	27	Jumlah produksi hasil holtikultura produk unggulan	Ton	165.188,96	220237,83	302026,85	364784,15	376203,05
3	27	Jumlah produksi hasil perkebunan produk unggulan	Ton	175.745,50	206458,47	192469,76	196232,18	195799,39
3	27	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	%	3,96	3,75	6,90	5,09	5,20
3	27	Ketersediaan pangan (beras)	Ton	113.223,62	133619,00	128480,42	130209,98	130241,41
3	27	Peningkatan produksi padi, jagung, kedelai dan ubi kayu	Ton	248.783,10	260414,40	254990,36	258643,17	256171,46
3	27	Jumlah Produksi Hasil Hortikultura Unggulan	Ton	165.188,96	220237,83	302026,85	364784,15	376203,05
3	27	Jumlah Produksi Hasil Perkebunan Unggulan	Kw/Ha	175.745,50	206458,47	192469,76	196232,18	195799,39
3	27	Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun	Kw/Ha	513,21	535,14	541,50	538,30	540,90

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2020)	Realisasi			
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
3	**27**	**Jumlah Populasi Ternak (Ekor), Produksi Daging (Ton) dan Produksi Telur (Kg)**						
3	27	Jumlah Populasi Ternak	Ekor	257.029,00	268362,00	269670,00	279014,00	288732,00
3	27	Produksi Daging	Kg	345.883,00	308991,00	312049,00	334912,00	342255,00
3	27	Produksi Telur	Kg	46.020,00	43607,00	44983,00	48125,00	96696,00
3	27	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan	%	-17,31	-1,76	-11,02	-4,70	-3,58
3	27	Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun	Kw/Ha	513,21	535,14	536,14	538,30	228,70
3	27	Jumalah Kelompok tani yang aktif	Kelompok Tani	1415,00	1427,00	1429,00	1461,00	1497,00
3	27	Jumlah kelompok tani yang telah menerapkan agribisnis terpadu	Kelompok Tani	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00
3	**28**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						
2	**11**	**Dinas Lingkungan Hidup Daerah**						
3	28	Terpeliharanya Keaneka ragaman hayati dan ekosistemnya	%	70,00	70,00	70,00	75,00	75,00
3	**29**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						
3	**31**	**Dinas Perindustrian Daerah**						

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2020)	Realisasi			
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
3	29	Rasio ketersediaan daya listrik	%	87,00	88,00	100,00	100,00	100,00
3	29	Pertumbuhan PDRB Sektor Pengadaan Listrik dan Gas	%	6,74	7,68	6,33	6,18	3,74
3	**30**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						
3	**30**	**Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah**						
3	30	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	30	Persentase Pasar rakyat yang memiliki (SPSM)	%	100,00	0,00	0,00	64,30	26,70
3	30	Persentase Pasar dalam kondisi baik	%	50,00	69,60	73,90	73,90	73,90
3	30	Jumlah Pelaku Usaha dipasar rakyat yang telah dibina	Pedagang	150,00	150,00	150,00	300,00	200,00
3	30	Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan pokok antar waktu		n.a	3,03	3,03	8,33	3,03
3	30	Pelaku Usaha yang mendapat fasilitas pengembangan produk ekspor	Pelaku Usaha	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00
3	30	Persentase Pelaku Usaha yang memiliki alat ukur UTTP yang standarisasi	%	49,25	81,36	105,79	109,99	100,71
3	30	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh fasilitasi peningkatan kualitas dan pemasaran Produk dalam negeri	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2020)	Realisasi			
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
3	**31**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						
3	**31**	**Dinas Perindustrian Daerah**						
3	31	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	31	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri dan Pengolahan	%	-4,35	3,61	4,38	5,93	5,40
		Jumlah Industri Kecil	iK	80,00	84,00	76,00	76,00	76,00
		Pertumbuhan Industri	%	2,43	4,80	6,67	6,41	4.20
3	31	Jumlah industri kab/kota yang masih aktif	Unit	1258,00	1318,00	1258,00	1258,00	1263,00
3	31	Persentase Pencapaian sasaran pembangunan Industri termasuk turunan Indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	0,00	0,00	71,00	76,00	67.00
3	31	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	31	Persentase Jumlah hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait.	%	0,00	0,00	52,40	70,40	70,54

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2020)	Realisasi			
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
3	31	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten/Kota	%	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3	31	Tersedianya Informasi secara lengkap dan terkini	%	0,00	0,00	20,00	30,00	30,00
3	**32**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						
2	**07**	**Dinas Ketenagakerjaan Daerah**						
3	32	Jumlah dokumen perencanaan kawasan transmigrasi	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4		**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						
4	**01**	**SEKRETARIAT DAERAH**						
1	04	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah**						
2	10	Persentase Penyelesaian Konflik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	**01**	**Sekretariat Daerah Kabupaten**						
4	01	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	01	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	-	CC	C	CC	B

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2020)	Realisasi			
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
4	01	Nilai/predikat AKIP	Kategori	CC	B	CC	CC	CC
4	01	Indeks Kepuasaan Masyarakat	Kategori	B	B	B	B	B
4	01	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	%	93,84	95,00	95,00	95,00	95,00
4	01	Persentase produk hukum dan informasi hukum daerah yang berkualitas	%	99,40	99,70	99,57	99,57	99,77
4	01	Predikat Kabupaten Peduli HAM	Kategori	A	A	A	A	A
4	01	Peringkat LPPD	Skor	3.2225	2.53	2,9786	27982,00	Lagi Proses
4	01	Tersedianya Dokumen Pengkajian Kelayakan dan Verifikasi Pemberian Hibah/Bantuan Sosial	Dokumen	78,00	159,00	174,00	148,00	67,00
4	01	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasional Aparatur selama 12 bulan	%	92,00	92,00	95,43	96,00	97,23
4	01	Persentase Kualitas Dokumen Perencanaan dan Kinerja Sekretariat Daerah	%	90,00	90,00	92,25	95,00	95,45
4	01	Persentase Kebijakan Pemerintah Daerah Yang terpublikasi	%	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	01	Persentase peningkatan kinerja kedinasan KDH/WKDH	%	92,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	01	Persentase Tertib Pengelolaan Barang/Aset Daerah Di lIngkungan Sekretariat Daerah	%	93,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	01	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Terhadap KDH/WKDH	%	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2020)	Realisasi			
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
4	01	Persentase Proses Pengadaan Barang dan Jasa Yang Efesien	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	01	Persentase Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan per OPD	%	90,00	92,00	94,57	95,00	96,12
4	01	Persentase Kecamatan yang Mendapatkan Pendistribusian LPG 3 KG, dan Pupuk Bersubsidi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	01	Persentase Peningkatan efektifitas dan kualitas Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	%	60,00	65,00	72,30	75,00	76,00
4	01	Indeks Kerukunan Umat Beragama	%	65,00	80,00	80,00	80,00	80,00
4	**02**	**SEKRETARIAT DPRD**						
4	**02**	**Sekretariat DPRD Kabupaten**						
4	02	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	02	Persentase Raperda yan disahkan menjadi Perda tepat waktu (%)	%	100,00	95,00	87,00	93,00	88,00
4	02	Jumlah Aspirasi masyarakat yang ditampung dan ditindak lanjuti kepada DPRD (Buah)	buah	175,00	140,00	145,00	180,00	190,00
5		**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						
5	**01**	**PERENCANAAN**						
5	**01**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**						

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2020)	Realisasi			
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
5	01	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	01	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen Perencanaan	%	94,00	94,25	97,27	88,24	90,76
5	01	Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Ditetapkan Dengan PERDA	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5	01	Dokumen Perencanaan:RPJMD Yang Ditetapkan Dengan PERDA	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5	01	Dokumen Perencanaan RKPD Yang Ditetapkan Dengan Perkada	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5	01	Penjabaran Program RPJMD Kedalam RKPD	%	94,00	94,25	97,27	98,25	98,26
5	**02**	**KEUANGAN**						
5	**02**	**Badan Pengelola Keuangan. Pendapatan dan Aset Daerah**						
5	02	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	02	Rasio Dokumen Penganggaran yang tepat waktu terhadap dokumen penganggaran	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	02	Rasio realisasi belanja daerah terhadap perencanaan belanja daerah	%	94,43	93,91	86,71	94,04	91,68

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2020)	Realisasi			
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
5	02	Rasio Realisasi ADD (Alokasi Dana Desa) Terhadap Terget Alokasi	%	86,85	98,74	99,77	99,72	99,80
5	02	Penyampaian Laporan keuangan pemerintah daerah tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	02	Rasio realisasi pemenuhan barang daerah terhadap kebutuhan barang daerah	%	97,89	96,53	75,59	96,22	91,14
5	02	Rasio Realisasi PAD Terhadap Terget PAD	%	98,91	97,87	99,14	104,40	99,03
5	02	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	**03**	**KEPEGAWAIAN**						
5	**03**	**Badan Kepegawaian Daerah**						
5	03	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	86,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	03	Indeks Kualitas aparatur sipil negara	%	76,83	96,03	81,15	73,85	88,32
5	**04**	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						
5	**03**	**Badan Kepegawaian Daerah**						
5	04	Persentase Aparatur PNS yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan Eselon (%)	%	65.36	66,00	48,50	67,00	19,00

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2020)	Realisasi			
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
5	04	Persentase Aparatur PNS yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai dengan Eselon (%)	%	65,36	12,58	34,86	42,16	64,04
5	**05**	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						
5	**01**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**						
5	05	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholders (%)	%	70,00	54,06	55,00	56,00	75,00
6		**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						
6	**01**	**INSPEKTORAT DAERAH**						
6	**01**	**Inspektorat Daerah**						
6	01	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	90,00	92,00	100,00	100,00	100,00
6	01	Nilai Maturitas SPIP	Level	3,5480	3,5800	3,064	3,083	3,000
6	01	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti	%	87,00	98,00	90,68	92,60	100,00
6	01	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti	%	90,00	91,00	89,94	92,25	94,34

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2020)	Realisasi			
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
6	01	Persentase perangkat Daerah yang mendapat Nilai Evaluasi Minimal BB	%	55,00	C	CC	CC	CC
6	01	Nilai Kapabilitas APIP	Level	3,00	3,00	1,460	3,00	3,00
6	01	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat pendampingan	OPD	30,00	33,00	30,00	45,00	45,00
7		**UNSUR KEWILAYAHAN**						
7	**01**	**KECAMATAN**						
7	**01**	**Kecamatan Batang Angkola**						
7	01	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	01	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
7	01	Persentase pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dapat diberdayakan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	01	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan di kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	01	Persentase laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tepat waktu	desa	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
8		**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						
8	**01**	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						
8	**01**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah**						

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2020)	Realisasi			
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1		2	3	4	5	6	7	8
8	01	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	01	Cakupan Pembinaan LSM ormas dan FKDM	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	01	Persentase pemanfaatan hak pilih (Pemilukada Kab/Kota)	%	78,95	0,00	0,00	0,00	73,70
8	01	Persentase Tingkat Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	01	Persentase Penyelesaian Konflik	%	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	01	Indeks Demokrasi	Point	60,00	63,00	79,53	80,34	81,95

2.3 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan fungsi pemerintahan termasuk kegiatan pembangunan. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dapat terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah berkaitan erat dengan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dengan ruang lingkup meliputi kebijakan keuangan daerah pada pengelolaan pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah dan pengelolaan pembiayaan daerah sehingga dapat membiayai strategi pembangunan melalui program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Ruang lingkup keuangan daerah dapat dijabarkan secara lebih terperinci sebagai berikut:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;

6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, struktur APBD Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri atas dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Dalam melakukan tahapan perencanaan pengelolaan keuangan daerah, haruslah memperhatikan kinerja keuangan masa lalu. Kinerja keuangan masa lalu di analisis sekurang kurangnya 5 (lima) tahun ke belakang, akan diketahui rata-rata pertumbuhan yang dijadikan sebagai acuan analisis proyeksi kemampuan keuangan kedepan.

Analisis terhadap kinerja keuangan masa lalu mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah. Adapun analisis kinerja APBD masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan.

Sebagai tahap awal dalam menganalisis kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu perlu diketahui kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kesinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai DOFD menunjukkan semakin kuat kemandirian pembiayaan pembangunan. Adapun klasifikasi DOFD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1
Skala interval Otonomi Fiskal

No	Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
1	0,00-10,00	Sangat Kurang
2	10,01-20,00	Kurang
3	20,01-30,00	Sedang
4	30,01-40,00	Cukup
5	40,01-50,00	Baik
6	>50	Sangat Baik

Sumber: Litbang Mendagri, 1991; Wulandari, 2001

Kondisi kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan DOFD dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) mengalami naik turun. Ditahun 2020, DOFD Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar 10,13% kemudian turun ditahun 2021 menjadi 8,86% dan kemudian meningkat ditahun 2022 mencapai 8,92% dan di tahun 2023 terus mengalami peningkatan menjadi 10.23% dan di tahun 2024 turun menjadi 9,57%. Jika dilihat berdasarkan klasifikasinya, rata-rata nilai DOFD Kabupaten Tapanuli Selatan yang sebesar 9,53% masih masuk kategori **sangat kurang** karena nilai DOF nya antara 0,00% - 10,00%. Meskipun rata-ratanya masuk kategori sangat kurang, namun kinerja beberapa tahun terakhir layak untuk diapresiasi. Agar tingkat kemandirian fiskalnya bisa mencapai kategori sedang sebagaimana capaian tahun 2019, maka maka Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan masih perlu menggali sumber-sumber keuangan daerahnya dengan cara yang lebih kreatif dan inovatif sehingga penerimaannya tidak tergantung kepada pemerintah pusat maupun provinsi. Adapaun perkembangan DOFD Kabupaten Tapanuli Selatan periode tahun 2020-2024, dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel III.2
Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan, Tahun 2020-2024

NO	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Persentase
1	2020	132.021.266.043	1.303.251.895.291	10,13
2	2021	134.093.420.731	1.513.778.045.889	8,86
3	2022	139.005.528.720	1.558.655.321.233	8,92
4	2023	162.812.997.010	1.591.199.747.186	10,23
5	2024	145.798.376.908	1.523.988.887.142	9,57
	Rata-Rata	713.731.589.412	7.490.873.896.740	9,53

Sumber: *BPKAD Kabupaten Tapanuli Selatan, 2025 (diolah)*

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja keuangan merupakan prospek atau masa depan, pertumbuhan, dan potensi perkembangan yang baik bagi suatu daerah. Kinerja keuangan diperlukan informasinya untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang dikendalikan untuk memprediksi kapasitas hasil dari sumber daya yang tersedia. Kinerja keuangan daerah diukur dari kinerja pelaksanaan APBD. Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kinerja pelaksanaan APBD tahun 2020-2024 dapat menunjukkan kualitas pengelolaan keuangan daerah terutama dalam hal tingkat realisasi/penyerapan APBD tiap tahunnya. Idealnya semakin tinggi tingkat realisasi/penyerapan APBD tiap tahunnya harus berbanding lurus dengan peningkatan capaian kinerja pembangunan daerah.

Perkembangan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mengalami tren fluktuatif cenderung meningkat dimana pendapatan daerah pada tahun 2020 sebesar Rp. 1,30 Triliun menjadi Rp. 1,52 Triliun pada tahun 2024. Kenaikan pendapatan ini tidak berdampak pada peningkatan kemampuan belanja daerah dari Rp. 1,35 Triiun pada tahun 2020 menjadi Rp. 1.57 Triliun ditahun 2024 . Adapun pembiayaan (netto) daerah juga mempunyai tren naik dan turun akibat dinamika SiLPA yang cenderung naik dan turun dan tidak sebanding dengan peningkatan penyertaan modal yang relative kecil. Selanjutnya akan diuraikan perkembangan APBD secara keseluruhan.

Gambar III. 1
Perkembangan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024 (dalam juta)



Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Selatan, 2025 (diolah)

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dengan terbitnya PP No. 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ada sedikit perubahan strukur pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari:

(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

(2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa); dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagis Hasil dan Bantuan Keuangan);

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya.

Secara umum kebijakan pendapatan daerah bertujuan untuk meningkatkan penerimaan dari sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan kemandirian fiscal daerah. Oleh karena itu kebijakan pendapatan daerah harus mampu mencipatakan akselerasi peningkatan pendapatan daerah baik melalui intensifikasi maupun kestensifikasi.

Pendapatan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) mengalami tren fluktuatif dengan rata-rata peningkatan sebesar 3,99% pertahun dari Rp. 1,30 triliun ditahun 2020 menjadi Rp 1,52 triliun ditahun 2024.

Gambar III. 2
Perkembangan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024 (dalam jutaan)



Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Selatan , 2025 (diolah)

Jika dilihat lebih dalam, semua komponen pendapatan asli daerah mengalami naik turun. Sehingga PAD juga mengalami naik dan turun pertahunnya dari Rp. 132,02 miliar ditahun 2020 menjadi Rp. 134,09 miliar ditahun 2021 dan terus naik ditahun 2024 sebesar Rp. 145.80 miliar. Begitu pula dengan Lain-lain pendapatan yang sah yang menurun dari tahun 2020 sebesar Rp. 245.140 miliar menjadi Rp. 34,02 milyar ditahun 2024. Adapun pertumbuhan dari pendapatan transfer mencapai 9,76% pertahun dari Rp. 926.09 miliar ditahun 2020 naik menjadi Rp 1.344 triliun pada tahun 2024 akibat dana transfer pemerintah pusat tiap tahunnya mengalami kenaikan.

Semua komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami naik turun. Pertumbuhan pajak Daerah mengalami pertumb uhan negative dengan rata - rata pertumbuhan -1,16% per tahun, pendapatan retribusi daerah mengalami naik turun tiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,38% pertahun, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,61% dan Lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar -20,58% per tahun.

Jika dilihat lebih rinci maka sumber utama PAD pajak berasal dari pajak penerangan jalan, sumber utama PAD retribusi berasal dari retribusi jasa usaha, sumber utama PAD hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari bagian laba atas suatu penyertaan modal pada BUMD, dan sumber utama PAD lain-lain pendapatan yang sah berasal dari pendaatan BLUD.

Sumber pendapatan daerah lainnya ialah berasal dari pendapatan transfer baik transfer pemerintah pusat maupun transfer antar-daerah. Transfer pemerintah pusat terdiri dari dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana kesitimewaan, dan dana desa. Dari sumber pendapatan transfer, pertumbuhan dana Transfer Pemerintah Pusat sebesar 9,76% per tahun.

Pendapatan transfer pemerintah pusat berasal dari dana perimbangan terdiri atas dana transfer umum (DBH dan DAU) dan dana transfer khusus (DAK). Untuk DBH bersumber dari pajak dan penerimaan sumber daya alam. Sumber pajak berasal dari pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan, pajak penghasilan dan cukai hasil tembakau. Untuk DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana transfer khusus (DAK) bersumber dari APBN yang dialokasikan pada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kontribusi terbesar pendapatan transfer pemerintah pusat berasal dari berasal dari dana Alokasi Khusus yang mengalami pertumbuhan sebesar 11,56% pertahunnya. Sedangkan penurunan terbesar yaitu di dana Penyesuaian DID sebesar -23,69% pertahun.

Untuk pendapatan transfer antar daerah, tren mengalami naik dan turun sehingga jika dipersentasekan pertumbuhannya sebesar 3,59% Dimana pendapatan bagi hasil pajak di tahun 2020 sebesar Rp.40.98 milyar dan di tahun 2024 menjadi Rp. 37.84 milyar.

Dari komponen Lain-Lain pendapatan yang sah terdapat pendapatan hibah yang diterima dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berturut-turun dengan nilai sebesar Rp 245.14 miliar, Rp 70.82 miliar, Rp 64.35 miliar, dan Rp 68.19 miliar dan 34.02 miliar atau rata-rata tumbuh -38.96 % pertahun. Secara lebih rinci rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.3
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024

Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
PENDAPATAN						
PENDPATAN ASLI DAERAH	**132,010,127,162**	**134,093,420,731**	**139,005,528,720**	**162.812.997.010,00**	**145.798.376.907,50**	**2,51**
Pajak Daerah	34,140,922,623	34,343,113,055	38,642,058,051	41.655.157.324,00	32.585.822.440,00	**-1,16**
Retribusi Daerah	9,450,976,825	13,620,750,535	6,949,470,251	9.736.715.709,00	13.041.873.607,00	**8,38**
Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	68,932,130,308	66,106,522,000	70,131,120,754	97.140.286.636,00	92.418.105.741,50	**7,61**
Lain-lain PAD yang Sah	19,486,097,406	20,023,035,141	23,282,879,664	14.280.837.341,00	7.752.575.119,00	**-20,58**
PENDAPATAN TRANSFER	**926,091,632,204**	**1,308,861,528,415**	**1,355,301,717,610**	**1.371.391.908.714,00**	**1.344.170.222.696,00**	**9,76**
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT (DANA PERIMBANGAN)	**833,089,565,305**	**1,077,819,349,793**	**1,117,825,134,718**	**1.150.467.540.319,00**	**1.112.635.742.733,00**	**7,50**
Dana Bagi Hasil Pajak	28,642,080,810	319,797,487,212	345,809,139,478	108.588.627.344,00	205.592.710.960,00	**63,68**
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	44,781,606,021			156.982.819.328,00	-	**-100,00**
Dana Alokasi Umum	604,693,533,000	595,549,093,000	592,284,983,000	11.780.293.000,00	-	
Dana Alokasi Khsusus	154,972,345,474	63,149,755,564	50,496,436,240	620.902.480.653,00	667.005.701.148,00	**2,48**
Dana Desa	0			252.213.319.994,00	240.037.330.625,00	**11,56**
		99,323,014,017	129,234,576,000	-		
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	**52,025,950,000**	**180,377,049,875**	**171,523,914,400**	**170.151.269.000,00**	**184.356.146.000,00**	**37,20**
Dana Otonomi Khusus	0					
Dana Penyesuaian / DID	52,025,950,000	11,057,750,000	11,384,193,000	5.780.754.000,00	17.640.829.000,00	**-23,69**
Dana Desa		169,319,299,875	160,139,721,400	**164.370.515.000,00**	**166.715.317.000,00**	
TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI	**40,976,116,899**	**50,665,128,747**	**65,952,668,492**	50.773.099.395,00	47.178.333.963,00	**3,59**
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	40,976,116,899	50,665,128,747	50,379,461,492	48.302.849.395,00	37.840.293.357,00	**-1,97**
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya / Bantuan Keuangan	0	-	15,573,207,000	2.470.250.000,00	9.338.040.606,00	
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	**245,140,638,774**	**70,823,096,743**	**64,348,074,902**	68.187.725.987,00	34.020.287.538,00	**-38,96**
Hibah	74,951,261,149	23,945,388,743	64,259,018,902	56.905.785.462,00	20.614.903.782,00	**-27,58**
Dana Desa	169,383,617,000	-	0	-		**-100,00**
Bonus Produksi Panas Bumi	805,760,625	46,877,708,000	89,056,000	11.281.940.525,00	13.405.383.756,00	**-100,00**
Pendapatan Lainnya	0	0	0	0	0	
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**1,303,242,398,140**	**1,513,778,045,889**	**1,558,655,321,233**	**1.602.392.631.711,00**	**1.523.988.887.141,50**	**3,99**

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Selatan, 2025 (diolah)

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib. urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu belanja dareah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan sesuai amanat Pasal 50 ayat (2) jika daerah tidak memenuhi alokasi belanja sesuai kewenangannya maka dapat ditunda dan/atau dipotong dana transfer umum dari pemerintah pusat.

Sebagaimana dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 bahwa Belanja terdiri atas belana operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan Pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah desa.

Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir tahun 2020-2024 realisasi belanja daerah mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan mencapai 4.08% pertahun dari Rp. 1,350 triliun ditahun 2020 naik menjadi Rp. 1,565 triliun ditahun 2024. Kenaikan belanja tersebut seirama dengan kenaikan pendapatan daerah pada kurun waktu yang sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Jika dilihat lebih rinci, Belanja Operasi pada kurun waktu tersebut mengalami peningkatan dengan rata-rata mencapai 7.15% pertahun dari Rp. 801,74 miliar ditahun 2020 menjadi Rp. 1.056 Triliun ditahun 2024. Kontribusi penyumbang terbesar kenaikan belanja operasi berasal dari naiknya belanja barang dan jasa dengan rata-

rata mencapai 13,36% pertahun dari Rp 262,68 miliar ditahun 2020 menjadi Rp 433,78 miliar ditahun 2024. Belanja. Sedangkan Belanja bantuan sosial mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -25.70%. Adapun belanja bunga dan belanja bantuan sosial dari tahun 2020 sebesar Rp. 10.908 turun ditahun 2024 sebesar Rp.3,324 miliar.

Belanja Modal secara agregat mengalami penurunan dengan rata-rata peningkatan sebesar -5,27% pertahun dari Rp. 315,94 miliar (2020) menjadi Rp. 254,39 miliar (2024). Hampir semua komponen belanja modal mengalami penurunan kecuali belanja Aset tetap lainnya mengalami peningkatan di tahun 2020 Rp. 6,07 miliar menjadi Rp. 11,37 miliar ditahun 2024, belanja Gedung dan bangunan yang rata-rata turun -10,78% pertahun. Keseluruhan realisasi belanja daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.4
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024

Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
BELANJA	**1,350,731,462,450**	**1,297,150,101,430**	**1,451,160,729,449**	**1.820.445.431.440,00**	**1.565.388.680.694,00**	**3,76**
Belanja Operasi	1.117.747.985.203,	1.297.150.101.430	1.451.160.729.449	1.451.160.729.449	1.451.160.729.449	**6.74**
Belanja Pegawai	466,803,580,015	456,080,730,668	458,029,464,394	463.558.412.122,00	540.732.515.384,00	**3,74**
Belanja Barang dan Jasa	262,680,835,550	306,366,070,169	395,314,560,061	478.142.800.975,00	433.781.701.684,00	**13,36**
Belanja Bunga	0	0	0			
Belanja Subsidi	0	0	0			
Belanja Hibah	61,342,112,916	27,970,702,265	35,241,486,231	112.033.398.738,00	78.988.803.728,00	**6,53**
Belanja Bantuan Sosial	10,908,829,290	2,450,767,374	6,262,590,300	4.838.118.000,00	3.324.900.000,00	**(25,70)**
BELANJA MODAL	**315,936,844,132**	**236,974,942,898**	**305,811,799,625**	**501.355.234.080,00**	**254.389.793.572,00**	**(5,27)**
Belanja Tanah	0	0	220,688,000	-	-	
Belanja Peralatan dan Mesin	62,834,130,511	26,051,904,911	51,462,944,269	102.427.680.887,00	61.393.375.303,00	**(0,58)**
Belanja Gedung dan Bangunan	72,742,527,070	72,675,889,055	95,795,565,371	90.289.296.150,00	46.096.644.221,00	**(10,78)**
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	174,151,479,051	132,062,686,732	153,312,397,651	300.249.882.118,00	135.532.641.948,00	**(6,08)**
Belanja Aset Tetap Lainnya	6,067,452,500	6,184,462,200	5,020,204,334	8.388.374.925,00	11.367.132.100,00	**16,99**
Belanja Aset Lainnya	141,255,000	0	0	-		**(100,00)**
BELANJA TIDAK TERDUGA	**75,783,300**	**22,610,843,206**	**0**	**800.000.000,00**	**551.000.000,00**	**64,21**
Belanja Tidak Terduga	75,783,300	22,610,843,206	0	800.000.000,00	551.000.000,00	**64,21**
JUMLAH BELANJA DAERAH	**1,117,747,985,203**	**1,052,454,056,580**	**1,200,659,900,611**	**1.560.727.963.915,00**	**1.311.768.714.368,00**	**4,08**
TRANSFER						
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	66,750,000	126,950,000	4,434,753,072	4.839.656.041,00	55.000.000,00	**(4,73)**
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	232,916,727,247	244,569,094,850	246,066,075,766	254.877.811.484,00	253.564.966.326,00	**2,15**
JUMLAH TRANSFER	**232,983,477,247**	**244,696,044,850**	**250,500,828,838**	**259.717.467.525,00**	**253.619.966.326,00**	**2,14**
JUMLAH BELANJA dan TRANSFER	**1,350,731,462,450**	**1,297,150,101,430**	**1,451,160,729,449**	**1.820.445.431.440,00**	**1.565.388.680.694,00**	**3,76**

Sumber: *BPKAD Kabupaten Tapanuli Selatan, 2025 (diolah)*

3. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dengan kata lain pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Secara umum penerimaan pembiayaan terdiri dari SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembiayaan cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah, pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam lima tahun terakhir dari tahun 2020-2024 perkembangan pembiayaan (netto) daerah Kabupaten Tapanuli Selatan trennya berflustuasi namun relatif naik. Surplus pembiayaan tersebut lebih disebabkan karena realtif naiknya penerimaan dari SiLPA sementara pengeluaran untuk penyertaan modal justru fluktuatif yang sempat meningkat di tahun 2021 dan tahun 2022 kemudian turun kembali tahun 2023 dan 2024. Adapun rata rata kenaikan penerimaan pembiayaan sebesar 2,79% pertahun. Berlawanan dengan pengeluaran pembiayaan mengalami fluktuatif, ditahun 2020 sebesar Rp. 18 miliar dan turun ditahun 2023 sebesar Rp. 9,65 miliar dan kembali turun di tahun 2024 sebesar Rp.0 di dengan rata rata penurunan signifikan sebesar -100,00%.

Secara lebih rinci, perkembangan Pembiayaan Daerah secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel rata-rata pertumbuhan APBD Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2020-2024 sebagaimana Tabel berikut.

Tabel III.5
Rata-Rata Pertumbuhan APBD
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024

Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
PEMBIAYAAN						
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	105,492,187,601	**40,003,123,291**	**247,635,992,401**	**345,483,646,184**	**117.783.908.455**	**2,79**
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	18,000,000,000	**8,995,075,349**	**9,646,938,000**	**9,646,938,000**		**-100**
PEMBIAYAAN NETTO	**87,492,187,601**	**31,008,047,942**	**237,989,054,401**	**335,836,708,184**	**117.783.908.455**	**7,72**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**40,003,123,291**	**247,635,992,401**	**345,483,646,184**	**116,735,122,693**	**76.384.114.903**	**17,55**

Sumber: *BPKAD Kabupaten Tapanuli Selatan, 2025 (diolah)*

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti Kepala daerah dan Kepala Bagian Keuangan serta Kepala dinas), pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

1) Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya.

Secara agregat nilai aset Kabupaten Tapanuli Selatan dari tahun 2020-2024 relatif mengalami kenaikan dengan rata-rata mencapai 6.52% pertahun. Tercatat Jumlah aset Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2020 senilai Rp. 2,595 triliun terus meningkat yang akhirnya pada tahun 2024 naik menjadi Rp. 3,342 triliun.

Jika dilihat lebih rinci, maka terlihat bahwa keseluruhan jenis aset mengalami peningkatan. Aset lancar mengalami peningkatan sebesar 25,97% pertahun dan aset tetap juga mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 6.24% pertahun. Sedangkan investasi jangka panjang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,82%, dari tahun 2020 sebesar Rp 213,56 Miliar menjadi Rp 248.11 Miliar ditahun 2024. Adapun aset lainnya mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 5.96 % pertahun.

2) Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi

tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jenis kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten Tapanuli Selatan hanya berupa kewajiban jangka pendek. Nilai kewajiban jangka pendek tersebut sangat fluktuatif dengan rata-rata tren peningkatan sebesar 62,11% pertahun dari Rp. 2,872 Miliar ditahun 2020 menjadi Rp. 19.839 miliar ditahun 2024. sempat turun di tahun 2021 menjadi Rp 2,472 miliar dan tahun 2022 sebesar Rp. 2.344 miliar.

3) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam Dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Semakin besar nilai ekuitas dana maka akan semakin bagus juga kondisi keuangan suatu daerah. Ekuitas dana terbagi menjadi tiga kategori yakni ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Kategori dana tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya.

Nilai ekuitas dana Kabupaten Tapanuli Selatan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6.39%. Pada tahun 2020 sebesar Rp 2,592 Triliun menjadi Rp 3,322 Triliun tahun 2024. Melihat nilai ekuitas dana dalam Neraca Kabupaten Tapanuli Selatan menunjukkan bahwa kondisi keuangan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam keadaan bagus. Secara keseluruhan Neraca Kabupaten Tapanuli Selatan disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel III.1
Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 – 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
1	**ASET**						
	ASET LANCAR	**49.905.163.531,69**	**280.989.453.384,90**	**376.047.391.081,43**	**150.691.989.105,77**	**125.678.925.819,63**	**25,97**
	Kas di Kas Daerah	3.769.227.558.362,00	24.612.923.088.062,00	344.896.195.751,35	115.367.416.117,35	73.551.695.176,85	**(62,62)**
	Kas di Bendahara Pengeluaran						
	Kas di Bendahara Penerimaan						
	Kas BOS	488.327.046,00	427.277.230,00	124.559.653,00	58.700.264,00	17.324.020,00	**(56,60)**
	Kas JKN dan BOK	1.822.520.661,00	1.079.484.290,00	462.890.780,00	2.357.792.074,00	2.784.975.706,00	**11,18**
	Kas Lainnya						
	Piutang Pajak	5.447.468.819,40	5.540.214.526,40	5.672.137.646,30	6.268.290.594,30	6.262.702.734,30	**3,55**
	Piutang Retribusi	105.200.000,00	46.800.000,00	46.800.000,00	444.352.750,00	477.302.750,00	**45,95**
	Piutang Lainnya	258.880.701,00	258.880.701,00	12.786.301.484,94	20.396.276.232,00	38.152.968.102,00	**248,42**
	Penyisihan Piutang	- 4.224.475.007,27	- 4.665.911.273,39	- 4.754.052.915,12	- 5.025.946.380,57	- 5.703.197.819,34	**7,79**
	Persediaan	8.314.965.727,94	32.173.477.030,27	16.812.558.680,96	10.825.107.454,69	21.000.000,00	**(77,58)**
	Investasi Jangka Pendek						
			-				
22	**Jumlah Aset Lancar**	**49.905.163.531,69**	**280.989.453.384,90**	**376.047.391.081,43**	**150.691.989.105,77**	**125.678.925.819,63**	**25,97**
23	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**213.563.624.163,66**	**224.641.899.277,21**	**245.995.843.976,84**	**267.444.339.140,84**	**248.105.478.434,84**	**3,82**
24	Investasi Non Permanen						
18	Investasi Non Permanen Lainnya						
31	**Jumlah Investasi Non Permanen**						
32	Investasi Permanen	213.563.624.163,66	224.641.899.277,21	245.995.843.976,84	267.444.339.140,84	248.105.478.434,84	**3,82**
33	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	213.563.624.163,66	224.641.899.277,21	245.995.843.976,84	267.444.339.140,84	248.105.478.434,84	**3,82**
35	**Jumlah Investasi Permanen**	**213.563.624.163,66**	**224.641.899.277,21**	**245.995.843.976,84**	**267.444.339.140,84**	**248.105.478.434,84**	**3,82**
36	**Jumlah Investasi Jangka Panjang**	**213.563.624.163,66**	**224.641.899.277,21**	**245.995.843.976,84**	**267.444.339.140,84**	**248.105.478.434,84**	**3,82**
37	**ASET TETAP**	**2.143.803.019.204,50**	**2.216.354.263.170,22**	**2.356.492.327.586,75**	**2.682.609.154.945,16**	**2.730.755.091.192,22**	**6,24**
38	Tanah	172.615.871.273,56	162.108.161.089,75	162.239.354.089,75	159.880.758.089,75	159.159.188.639,75	**(2,01)**
39	Peralatan dan Mesin	432.167.720.975,40	451.627.430.690,40	496.769.309.550,00	576.491.481.147,60	630.154.344.567,60	**9,89**
40	Gedung dan Bangunan	918.721.290.150,12	995.320.381.508,45	1.079.998.888.686,11	1.187.100.528.816,38	1.234.177.931.825,38	**7,66**
41	Jalan Irigasi dan Jaringan	2.058.719.412.595,25	2.191.364.022.060,25	2.354.729.984.632,32	2.676.876.841.976,29	2.810.170.407.161,29	**8,09**
42	Aset Tetap Lainnya	85.402.522.042,00	91.483.527.442,00	96.516.378.976,00	104.570.706.901,00	116.033.539.001,00	**7,96**
43	Konstruksi dalam Pengerjaan	1.018.952.204,00	2.788.612.016,00	12.102.847.540,28	2.220.264.704,00	1.425.135.704,00	**8,75**
44	Akumulasi	-	-	-	-	-	**9,85**

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
	Penyusutan	1.524.842.750.035,83	1.678.337.871.636,63	1.845.864.435.887,71	2.024.531.416.689,86	2.220.365.455.706,80	
45	**Jumlah Aset Tetap**	**2.143.803.019.204,50**	**2.216.354.263.170,22**	**2.356.492.327.586,75**	**2.682.609.164.945,16**	**2.730.755.091.192,22**	**6,24**
46	**DANA CADANGAN**						
47	Dana Cadangan						
48	**Jumlah Dana Cadangan**						
49	**ASET LAINNYA**	**188.070.166.810,45**	**194.376.407.774,45**	**322.610.827.592,84**	**273.027.702.170,89**	**237.053.874.315,85**	**5,96**
34	Tagihan Penjualan Angsuran						
35	Tuntutan Ganti Rugi	20.461.734.186,00	20.461.734.186,00	20.461.734.186,00	20.461.734.186,00	20.461.734.186,00	-
36	Kemitraan dengan Pihak Ketiga						
37	Aset Tak Berwujud	1.993.816.200,00	2.219.159.599,00	2.219.159.599,00	2.420.069.599,00	2.420.069.599,00	**4,96**
38	Akumulasi Amortisasi	- 1.500.548.390,00	- 1.708.426.530,00	- 1.837.188.270,00	- 1.965.950.010,00	- 2.065.398.000,00	**8,31**
	Aset Lain-Lain	167.115.164.814,45	173.403.940.519,45	301.767.122.077,84	252.111.848.395,89	216.237.468.530,85	**6,65**
	Uang Jaminan Sewa Rusunawa						
57	**Jumlah Aset Lainnya**	**188.070.166.810,45**	**194.376.407.774,45**	**322.610.827.592,84**	**273.027.702.170,89**	**237.053.874.315,85**	**5,96**
58	**JUMLAH ASET**	**2.595.341.973.710,30**	**2.916.362.023.606,78**	**3.301.146.390.237,86**	**3.373.773.195.362,66**	**3.341.593.369.762,54**	**6,52**
59	**KEWAJIBAN**	**2.872.316.731,00**	**2.471.646.920,54**	**2.344.280.075,43**	**5.506.114.216,37**	**19.839.228.953,09**	**62,11**
60	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**2.872.316.731,00**	**2.471.646.920,54**	**2.344.280.075,43**	**5.506.114.216,37**	**19.839.228.953,09**	**62,11**
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga						
	Utang Bunga						
	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang						
	Pendapatan Diterima Dimuka	48.092.455,00	90.233.771,54	52.344.879,43	147.502.686,37	70.813.229,09	**10,16**
	Utang Belanja	2.824.224.276,00	2.381.413.149,00	2.291.935.196,00	5.358.611.530,00	19.768.415.724,00	**62,66**
	Utang Transfer						
	Utang Jangka Pendek Lainnya						
	Utang Lainnya (BLUD)						
71	**Jumlah Kewajiban Jangka Pendek**	**2.872.316.731,00**	**2.471.646.920,54**	**2.344.280.075,43**	**5.506.114.216,37**	**19.839.228.953,09**	**62,11**
72	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**						
73	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat						
74	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya						
75	Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank						
76	Utang Dalam						

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan
	Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank						
77	Utang Dalam Negeri - Obligasi						
78	Utang Jangka Panjang Lainnya						
79	**Jumlah Kewajiban Jangka Panjang**						
80	**JUMLAH KEWAJIBAN**						
81	**EKUITAS**						
82	**EKUITAS**	**2.592.469.656.979,30**	**2.913.890.376.686,24**	**3.298.802.110.162,43**	**3.368.267.081.146,29**	**3.321.754.140.809,45**	**6,39**
83	Equitas	2.592.469.656.979,30	2.913.890.376.686,24	3.298.802.110.162,43	3.368.267.081.146,29	3.321.754.140.809,45	**6,39**
	Sisa Kas BLUD						
84	Sisa Kas JKN						
85	**JUMLAH EKUITAS**	**2.592.469.656.979,30**	**2.913.890.376.686,24**	**3.298.802.110.162,43**	**3.368.267.081.146,29**	**3.321.754.140.809,45**	**6,39**
86	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS**	**2.595.341.973.710,30**	**2.916.362.023.606,78**	**3.301.146.390.237,86**	**3.373.773.195.362,66**	**3.341.593.369.762,54**	**6,52**

Sumber: *BPKAD Kabupaten Tapanuli Selatan, 2025 (diolah)*

4) Rasio Keuangan

Untuk menganalisis kondisi keuangan Kabupaten Tapanuli Selatan periode tahun 2020-2024 digunakanlah beberapa analisis rasio keuangan. Rasio keuangan Pemerintah Daerah diukur dengan menggunakan analisis terhadap rasio likuiditas, solavabilitas dan aktivitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu Pemerintah Daerah. Jika pemerintah daerah mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut likuid, sedangkan jika pemerintah daerah tidak mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut ilikuid.

Dalam rasio ini akan diketahui sejauh mana aktiva lancar pemerintah daerah dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar maka artinya semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam menutupi kewajiban utang lancarnya. Tingginya Rasio lancar dapat menunjukkan adanya uang kas berlebih yang bisa berarti dua hal yaitu besarnya keuntungan yang telah diperoleh atau akibat tidak digunakannya keuangan pemerintah daerah secara efektif untuk berinvestasi.

Dalam kurun waktu tahun 2020-2024 rasio lancar Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai tren yang berfluktuasi namun relatif meningkat. Rasio lancar Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan ditahun 2020 sebesar 17.37%. Artinya Kabupaten Tapanuli Selatan ditahun 2020 mempunyai kemampuan menutup hutang jangka pendeknya sebesar 17.37% dari total kewajban jangka pendeknya. Tahun 2021, rasio lancarnya naik sebesar 113,69%, dan kemudian naik kembali ditahun 2022 sebesar 160.41%, di tahun 2023 sebesar 27,37%. Sedangkan ditahun 2024 turun menjadi 6,33% Berikut ini terlihat fluktuatifnya rasio lancar Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020.

Tabel III.2
Rasio Lancar Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 – 2024 (dalam Jutaan)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
ASET LANCAR	49.905,16	280.989,45	376.047,39	150.691,99	125.678,93
KEWAJIBAN LANCAR	2.872,32	2.471,65	2.344,28	5.506,11	19.839,23
RASIO LANCAR	17,37	113,69	160,41	27,37	6,33

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Selatan, 2025 (diolah)

2. Rasio Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi seluruh utang dengan memakai semua aset. Dengan kata lain aset menjadi penjamin utang yang menjadi konsep dasar akuntansinya. Solvabilitas pemerintah daerah penting untuk diketahui supaya tahu kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi atau membayar semua pinjaman melalui jumlah aktiva yang dimiliki yang memengaruhi jenis-jenis laporan keuangan. Atau secara singkat bisa dimaknai kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi.

a) *Total Debt to Equity Ratio* (Rasio Hutang terhadap Ekuitas)

Kesehatan pengelolaan keuangan pemda bisa diukur dari perspektif keuangan internal. Salah satunya dengan pengukuran rasio utang terhadap modal atau dengan istilah yang lebih dikenal sebagai *debt to equity ratio*. *Debt to Equity Ratio* (rasio utang terhadap modal) atau yang bisa disingkat DER adalah rasio hutang terhadap ekuitas. Bisa juga disebut dengan rasio hutang modal. Pengertian dari Debt to Equity Ratio (DER) adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas yang menunjukkan kemampuan modal sendiri dari entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Ekuitas dan jumlah hutang yang digunakan untuk operasional perusahaan harus berada dalam jumlah yang proporsional.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap ekuitas Kabupaten Tapanuli Selatan dari tahun 2020-2024 berfluktuatif. Nilai rasio terendah terjadi ditahun 2021 dan 2022 yaitu sebesar 0,08%, dan 0.07% dan yang tertinggi terjadi ditahun 2024 yang sebesar 0,60%. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah kewajiban kurun waktu 2020-2024 tidak pernah lebih dari 0,60% dari total kekayaan sendiri yang telah dikurangi dengan kewajiban yang ada (aset bersih). Sehingga

dapat dikatakan bahwa nilai modal/kekayaan bersih daerah Kabupaten Tapanuli Selatan cukup untuk menjamin pembayaran hutang yang ada.

Tabel III.3
Rasio Lancar Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 – 2024 (dalam Jutaan)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
KEWAJIBAN	2.872,32	2.471,65	2.344,28	5.506,11	19.839,23
EKUITAS	2.592.469,66	2.913.890,38	3.298.802,11	3.368.267,08	3.321.754,14
TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO	0,11%	0,08%	0,07%	0,16%	0,60%

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Selatan, 2025 (diolah)

b) *Total Debt to Total Asset Ratio* (Rasio Hutang terhadap Total Aktiva)

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang (baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang) dengan jumlah seluruh aktiva (aset). Secara akuntansi rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang.

Pada dasarnya rasio ini tidak berbeda dengan rasio sebelumnya (Rasio Hutang terhadap Ekuitas). Bedanya rasio ini yang menjadi perbandingan total hutang ialah nilai total aset tanpa dikurangi kewajiban yang ada. Oleh karena itu rasionya akan sedikit lebih kecil meskipun sering tidak signifikan.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap total aktiva (total aset) Kabupaten Tapanuli Selatan dari tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif hingga ditahun 2024 mencapai angka 0,59%. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah total kewajiban kurun waktu 2020-2024 tidak pernah lebih dari 0,59% dari total aset yang ada yang terjadi di tahun 2024. Artinya secara keseluruhan nilai total aset daerah nilainya jauh lebih besar daripada jumlah hutang yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Tabel III.4
Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 – 2024 (dalam Jutaan)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
KEWAJIBAN	2.872,32	2.471,65	2.344,28	5.506,11	19.839,23
AKTIVA	2.595.341,97	2.916.362,02	3.301.146,39	3.373.773,20	3.341.593,37
TOTAL DEBT TO ASSET RATIO	0,11%	0,08%	0,07%	0,16%	0,59%

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Selatan, 2025 (diolah)

3. Rasio Aktivitas

Secara akuntansi rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen dalam menggunakan sumber daya ekonomis untuk menghasilkan penjualan yang menguntungkan.

a) Perputaran aktiva tetap *(fixed assets turn over)*

Adalah rasio antara penjualan dengan aktiva tetap yang mengukur efisiensi penggunaan aktiva tetap atau perputaran aktiva tetap. Rasio ini menunjukkan bagaimana perusahaan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menggunakan aktiva tetapnya seperti tanah, gedung, jalan, kendaraan, mesin-mesin, perlengkapan kantor dll. untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Semakin besar rasionya maka semakin baik pula manajemen sumberdaya ekonomis tersebut dalam memperoleh keuntungan.

Rasio perputaran aktiva tetap Kabupaten Tapanuli Selatan dalam kurun waktu 2020-2024 bersifat fluktuatif. Adapun rasio ditahun 2020 mencapai 6.16%, turun menjadi 6,05% ditahun 2021, dan turun lagi menjadi 5,90% pada tahun 2022, kemudian di tahun 2023 naik kembali menjadi 6.07% kemudian turun lagi di tahun 2024 menjadi 5.34%. Jika dilihat nominalnya maka, dari total pendayagunakan sumberdaya aset tetap ditahun 2020 yang senilai Rp. 2,144 Triliun Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan hanya mendapatkan keuntungan sebesar Rp 132,02 miliar. Sedangkan ditahun 2024 dengan mendayagunakan sumberdaya aset tetap senilai Rp 2.731 triliun, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mendapatkan kenaikan keuntungan pendapatan sebesar Rp. 145, 80 miliar. Perkembangan rasio tersebut dapat menggambarkan

adanya pningkatan kinerja pengelolaan daerah dalam hal mendayagunakan aset yang ada untuk meningkatkan penerimaan PAD.

Tabel III.10
Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 – 2024
(dalam Jutaan)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PAD	132.021,27	134.093,42	139.005,53	162.813	145.798
AKTIVA TETAP (Aset Tetap)	2.143.803,02	2.216.354,26	2.356.492,33	2.682.609,16	2.730.755,09
TRASIO PERPUTARAN AKTIVA TETAP	6,16%	6,05%	5,90%	6,07%	5,34%

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Selatan, 2025 (diolah)

b) Perputaran total aktiva (*total assets turn over*)

Hampir mirip dengan perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva juga digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan total aset daerah untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain semakin tinggi rasionya semakin efisien pemerintah daerah dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan PAD. Sebaliknya Rasio Perputaran Aset yang rendah menandakan kurang efisiennya manajemen dalam menggunakan asetnya dan kemungkinan besar adanya masalah manajemen ataupun produksinya.

Rasio perputaran total aktiva Kabupaten Tapanuli Selatan dalam kurun waktu 2020-2024 trenya mengalami menurun. Rasio ditahun 2020 mencapai 5,09% dan menjadi 4.36% ditahun 2024. Secara keseluruhan dari tahun 2020-2024 kinerjanya terbilang cukup bagus namun efektifitasnya masih perlu ditingkatkan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai kewajiban dan harus meningkatkan sisi produksi daerah dalam hal ini meningkatkan pengelolaan sumber-sumber potensial yang dapat menghasilkan PAD. Oleh karena itu masih perlu dioptimalkan potensi-potensi penerimaan PAD daerah kedepannya.

Tabel III.11
Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun 2020– 2024 (dalam Jutaan)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
PAD	132.021,27	134.093,42	139.005,53	162.813,00	145.798,38
TOTAL AKTIVA (Jumlah Aset)	2.595.341,97	2.916.362,02	3.301.146,39	3.373.773,20	3.341.593,37
RASIO PERPUTARAN TOTAL AKTIVA	5,09%	4,60%	4,21%	4,83%	4,36%

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Selatan, 2025 (diolah)

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan penggunaan anggaran dan baik untuk belanja maupun pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan 2020-2024 tergambar pada dua aspek penting yaitu proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan. Fokus analisis dilakukan pada orientasi alokasi belanja daerah dan pembiayaan daerah pada kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan. Oleh karena itu berbagai belanja aparatur perlu ditekan seefisien mungkin agar dapat meningkatkan belanja publik.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran menguraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan realisasi belanja. Oleh karena itu Analisis proporsi penggunaan anggaran dilakukan melalui analisis sebagai berikut:

a. Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;
b. Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Belanja pemenuhan aparatur terdiri dari belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan dan belanja pegawai lainnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama terdiri dari seluruh biaya yang harus dikeluarkan baik itu berupa belanja maupun pengeluaran pembiayaan yang wajib untuk dibayarkan.

Porporsi belanja pemenuhan untuk pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung menurun dengan rata-rata rasio sebesar 37,86% pertahun. Rasio Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur ditahun 2020 sebesar 41,10% dari total pengeluaran daerah dan rasionya naik hingga mencapai 42,97% pada tahun 2021, kemudian pada tahun 2024 turun menjadi 40.92%. Penurunan belanja pemenuhan kebutuhan aparatur menunjukkan semakin meningkatnya kualitas dan proporsi belanja publik.

Rincian proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.12
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)

No.	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (%)
1	2020	466.803,58	1.135.747,99	41,10%
2	2021	456.080,73	1.061.449,13	42,97%
3	2022	458.029,46	1.210.306,84	37,84%
4	2023	463.558,41	1.570.374,90	29,52%
5	2024	540.732,52	1.321.415,65	40,92%
Rata-Rata		**2.385.204,70**	**6.299.294,51**	**37.86%**

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Selatan, 2025 (diolah)

Untuk menghitung kemampuan belanja daerah, maka diperlukan analisis terhadap pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama. Pada dasarnya analisis terhadap realisasi pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama bertujuan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari dan ditunda sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran pemerintah daerah seperti: gaji dan tunjangan pegawai serta

anggota dewan, bunga, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dibayarkan. Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

Realisasi pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat selama tahun 2020-2024 cenderung naik dengan rata-rata kenaikan sebesar 5,83% pertahun dari Rp. 1.053 triliun ditahun 2020 menjadi Rp. 1,321 triliun ditahun 2024. kenaikan ini sangat dipengaruhi oleh kenaikan belanja operasi dan belanja transfer bantuan keuangan. Dari sisi komponen belanja operasi, belanja tidak terduga naik cukup signifikan mencapai 64,21% pertahun dari Rp. 75,78 miliar ditahun 2020 menjadi Rp. 551,00 miliar ditahun 2024. Sedangkan pada komponen belanja transfer, belanja transfer bantuan keuangan meningkat 2.14% pertahun dari Rp. 232,98 miliar ditahun 2020 menjadi Rp. 253,62 miliar ditahun 2024. Jika melihat tren belanja pegawai yang naik 3,74% pertahun disebabkan karena penerimaan P3K yang cukup banyak di Pemerintah Kabupaten Tapanulis Selatan dalam periode tersebut. Secara keseluruhan perkembangan pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel III.13
Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas (dalam Jutaan)

	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	**BELANJA OPERASI**	**801.735,36**	**792.868,27**	**894.848,10**	**1.058.572,73**	**1.056.827,92**	**7,15**
1.1	Belanja Pegawai	466.803,58	456.080,73	458.029,46	463.558,41	540.732,52	**3,74**
1.2	Belanja Barang dan Jasa	262.680,84	306.366,07	395.314,56	478.142,80	433.781,70	**13,36**
1.3	Belanja Bunga	-	-	-			
1.4	Belanja Subsidi	-	-	-			
1.5	Belanja Hibah	61.342,11	27.970,70	35.241,49	112.033,40	78.988,80	**6,53**
1.6	Belanja Bantuan Sosial	10.908,83	2.450,77	6.262,59	4.838,12	3.324,90	**(25,70)**
2	**TRANSFER**	**232.983,48**	**244.696,04**	**250.500,83**	**259.717,47**	**253.619,97**	**2,14**
2.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	66,75	126,95	4.434,75	4.839,66	55,00	**(4,73)**
2.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	232.916,73	244.569,09	246.066,08	254.877,81	253.564,97	**2,15**
	JUMLAH TRANSFER	**232.983,48**	**244.696,04**	**250.500,83**	**259.717,47**	**253.619,97**	**2,14**
3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**75,78**	**22.610,84**	**-**	**800,00**	**551,00**	**64,21**
4	Belanja Tidak Terduga	75,78	22.610,84	-	800,00	551,00	**64,21**

	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
4.1.	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**18.000,00**	**8.995,08**	**9.646,94**	**9.646,94**	**9.646,94**	**(14,44)**
4.2	penyertaan modal daerah;	18.000,00	**8.995,08**	**9.646,94**	**9.646,94**	**9.646,94**	**(14,44)**
5	**Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas**	**1.052.794,62**	**1.069.170,23**	**1.154.995,87**	**1.328.737,14**	**1.320.645,83**	**5,83**

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Selatan, 2025 (diolah)

3.2.1. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan menguraikan sekurang-kurangnya mengenai besaran nilai penerimaan pembiayaan dan pengeluaraan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran daerah. Defisit riil anggaran terjadi jika pendapatan yang ada tidak sebanding dengan nilai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang ada pata tahun yang sama. Oleh karena itu besaran defisit riil anggaran daerah juga harus memperhatikan besaran nilai pembiayaan netto yang dapat digunakan untuk menutupnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah.

Dalam lima tahun terakhir (2020-2024) perkembangan defisit riil anggaran relatif berfluktuatif. Defisit riil anggaran hanya terjadi pada tahun 2020 dan 2023 dimana defisit tahun 2020 sebesar Rp 65,489 miliar, defisit tahun 2023 sebesar Rp 227,70 miliar dan tahun 2024 surplus rill anggaran sebesar 13.664 miliar.

Jika dibandingkan antara defisit riil angggaran daerah dengan komponen penutupnya diketahui bahwa semua defisit riil anggaran yang terjadi ditahun 2020 dan 2023 dapat ditutup oleh SiLPA dimana SilPA yang dapat dimanfaatkan ditahun 2020 sebesar Rp. 105,492 miliar dari tahun 2019 dan SiLPA yang dapat dimanfaatkan pada tahun 2023 sebesar Rp. 345,484 miliar dari tahun 2022.

Tabel III.14
Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Realisasi Pendapatan Daerah	1.303.242,40	1.513.778,05	1.558.655,32	1.602.392,63	15.239.888,87
dikurangi realisasi:					
Belanja Daerah	1.350.731,46	1.297.150,10	1.451.160,73	1.820.445,43	1.565.388,68
Pengeluaran Pembiayaan	18.000,00	8.995,08	9.646,94	9.646,94	9.646,94
(Defisit Riil)	**(65.489,06)**	**207.632,87**	**97.847,65**	**(227.699,74)**	**13.664.853,25**

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Selatan, 2025 (diolah)

Di Kabupaten Tapanuli Selatan, sumber utama penutup defisit riil anggaran dalam beberapa tahun terakhir berasal dari besaran SiLPA. Nilai SiLPA tahun 2019 mencapai Rp. 105,492 miliar dan naik menjadi Rp. 345,484 miliar pada tahun 2022. Peningkatan tersebut menggambarkan kurang efektifnya penggunaan anggaran yang ada. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian yang serius. Meskipun begitu dalam penyelenggaraan pembangunan, perlu dipahami bahwa tidak selalu SiLPA sifatnya negatif, jika SiLPA terjadi karena penghematan belanja dimana target sudah tercapai maka justru berdampak positif bagi pembangunan. Untuk itu yang perlu ditekan dari SiLPA ialah yang disebabkan oleh tidak termanfaatkannya anggaran untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan. Adapun efektifitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran tetap harus terus ditingkatkan meskipun kemudian dapat meningkatkan besaran SiLPA.

Secara rinci komposisi penutup defisit riil anggaran Kabupaten Tapanuli Selatan pada tabel III.14 sebagai berikut:

Tabel III.14
Nilai Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	105.492,19	40.003,12	247.635,99	345.483,65	117.783,91
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-
penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan	-	-	-	-	-
Total Komposisi Penutup Defisit	**105.492,19**	**40.003,12**	**247.635,99**	**345.483,65**	**117.783,91**

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Selatan, 2025 (diolah)

Tabel III.15
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)

URAIAN	Proporsi dari total defisit riil				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	100%	100%	100%	100%	100%
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-
penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Selatan, 2025 (diolah)

Jika dilihat dari sumber SiLPA di Kabupaten Tapanuli Selatan dari tahun 2020-2024 terlihat bahwa nilai SiLPA tersebut berasal dari Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa sisa penghematan belanja atau akibat lainnya merupakan komponen utama penutup defisit rill anggaran yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Tabel III.15
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun 2020-2024 (dalam Jutaan)

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
Jumlah SiLPA	**105.492,19**	**100%**	**40.003,12**	**100%**	**247.635,99**	**100%**	**345.483,65**	**100%**	**117.783,91**	**100%**
Pelampauan Penerimaan PAD	-		-		-		-		-	
Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan										
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah										
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	105.492,19	100%	40.003,12	100%	247.635,99	100%	345.483,65	100%	117.783,91	100%
Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-		-		-		-		-	
Kegiatan Lanjutan	-		-		-		-		-	

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Selatan, 2025 (diolah)

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan RPJMD hingga tahun 2030. Dalam konteks menghadapi gejolak internasional seperti perang Rusia ukraina, perang israel palestina dan iran dan efisiensi anggran secara nasional, dan lain-lain ruang fiskcal pada periode RPJMD ini kemungkinan besar akan menyempit seiring penerimaan dana transfer kedepan yang kemungkinan semakin berkurang. Oleh karena itu penggunaan

ruang fiskal daerah kedepan harus lebih efektif dan efisien khususnya terkait pemulihan ekonomi dampak Covid-19, efisiensi anggaran, konflik global dan kondisi elnino.

Pada bagian kerangka pendaaan ini akan diberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan, Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Proyeksi belanja wajib dan mengikat yang kemudian akan dihitung seberapa besar kapasitas riil daerah untuk pendanaan indikatif pada tahun 2025 hingga 2030.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Struktur Pendapatan dan Belanja dalam APBD disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Pendapatan Daerah dengan rincian pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan komponen belanja daerah dibagi atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah dapat dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

a. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu dengan menstandarkan data outlier atau ekstrem;
b. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
c. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
d. Kebijakan dibidang keuangan negara terutama terkait konflik-konflik internasional

Dalam penyusunan proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk periode perencanaan tahun 2025–2029, pendekatan yang digunakan adalah analisis tren rata-rata pertumbuhan berdasarkan realisasi APBD tahun 2020 hingga 2024 (APBD), Proyeksi ini disesuaikan dengan target kinerja dan capaian pendapatan serta belanja daerah tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 dan penetapan RKPD Tahun 2024, yang di dalamnya telah memuat proyeksi awal APBD Tahun Anggaran 2025. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang realistis, terukur, dan terintegrasi antara kapasitas fiskal daerah dan rencana pembiayaan pembangunan selama lima tahun

mendatang, sekaligus menjaga konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan dan lima tahunan, Selain itu, analisis ini mempertimbangkan dinamika ekonomi makro, kebijakan transfer pusat ke daerah, serta potensi pendapatan asli daerah (PAD), sehingga penyusunan RPJMD 2025–2029 tetap memperhatikan prinsip **fiskal berkelanjutan (fiscal sustainability)** dalam kerangka keuangan daerah, disamping itu asumsi-asumsi proyeksi pendapatan ini masih memakai pendekatan proyeksi yang ketat, mengingat kondisi keuangan negara diproyeksi masih belum pulih dalam beberapa tahun kedepan. Oleh karena itu proyeksi lebih ditekankan pada sumber internal. Hal ini dilakukan agar proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ini bisa mendekati proyeksi yang logis dengan melihat target-target pendapatan yang mampu dicapai.

a.Proyeksi Pendapatan

Dalam memproyeksi pendapatan, proyeksi lebih difokuskan pada penerimaan yang bersumber dari daerah sendiri (PAD). Adapun penerimaan yang sifatnya eksternal dan bersumber dari luar baik itu dari pendapatan transfer maupun lain-lain pendapatan yang sah cenderung ditarget relatif tetap (flat) bahkan relatif menurun terlebih dahulu mengingat adanya pandemi Covid-19 ditahun 2019 dan tahun 2020 yang memungkinkan berdampak pada keuangan negara hingga tahun 2023. Adapun seluruh proyeksi menggunakan tahun dasar target 2025 sebagaimana terdapat dalam RKPD tahun 2025.

Penerimaan pendapatan daerah pada tahun 2025-2030 ditargetkan naik ± 0,65% pertahun dari tahun dasar 2025. Jika dilihat pada seluruh komponen pendapatan daerah, komponen pendapatan asli daerah ditargetkan naik 7,67%, pendapatan transfer diprediksi akan mengalami penurunan sebesar -0,38%, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah yang diproyeksikan naik sebesar 8,93% pertahun.

PAD diproyeksi naik 7,67% pertahun dari tahun dasar 2025 dimana PAD pada tahun 2026 sebesar Rp. 148,567 miliar dan naik menjadi Rp. 173,201 miliar ditahun 2030. Target pertumbuhan PAD tersebut didasarkan asumsi bahwa pendapatan pajak turun sebesar -1,47% pertahun, Pendapatan Retribusi Daerah juga diproyeksikan akan mengalami penurunan pertahun sebesar -6,00, serta Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan naik 15,32% pertahun dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan turun -0,95% pertahun.

Target penurunan pajak daerah ditentukan dengan asumsi bahwa berkurangnya penggunaan anggaran akibat efisiensi anggaran dll sehingga potensi-potensi pajak banyak yang tidak mencapai target. Selain itu dengan adanya potensi investasi yang. Dengan mendasarkan hal tersebut maka pendapatan pajak daerah ditargetkan sebesar Rp. 43,905 miliar ditahun 2025 meningkat menjadi Rp. 40,763 miliar ditahun 2030.

Adapun target pendapatan retribusi daerah tahun 2025 sebesar 15.111 miliar dan diprediksi turun sebesar Rp. 11,089 miliar pada tahun 2030, target pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2025 sebesar Rp. 58,423 miliar dan meningkat menjadi Rp. 119,176 miliar ditahun 2030, dan target lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditahun 2025 sebesar Rp. 2,280 miliar dan turun menjadi Rp. 2,74 miliar ditahun 2030.

Proyeksi pendapatan transfer diperkirakan akan mengalami penurunan dengan mencapai -0,38% pertahun dari Rp. 1,313 triliun ditahun 2025 menjadi Rp. 1,288 triliun ditahun 2030. Secara umum penurunan tersebut sangat dipengaruhi dari transfer pemerintah pusat khususnya dari dana perimbangan yang berkurang ke daerah akibat efisiensi anggaran dll.

Oleh karena adanya konflik-konflik internasional yang berefek pada lesunya perekonomian nasional dan global yang belum bisa di proyeksikan kapan akan berakhir, maka skema proyeksi pendapatan transfer pemerintah pusat yaitu:

a. Dana Perimbangan:
   - Nilai Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak diprediksi menurun sebesar -1,50% pertahun dari tahun 2025 sebesar 268,179 miliar menjadi Rp. 248,601 miliar tahun 2030;
   - Nilai Dana Alokasi Umum ditargetkan tumbuh 0,31% pertahun dari tahun 2025 sebesar 649,967 miliar menjadi Rp. 660,185 miliar tahun 2030
   - Dana Alokasi Khusus fisik dan non fisik diprediksi Dak fisik naik sebesar 20,07 dimana tahun 2025 sebesar 14.288 miliar menjadi 35.660 miliar di tahun 2030 dan Dak non Fisik turun sebesar -4,93% ditahun 2025 sebesar 181.279 miliar dan ditahun 2030 sebesar Rp. 140,774 miliar.

b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya diproyeksi mengalami pertumbuhan sebesar 2,04% di tahun 2025 diharapkan sebesar Rp. 32,879 miliar menjadi 36,373 miliar.

Peningkatan pendapatan transfer lainnya berasal dari pendapatan transfer antar daerah yang bersumber dari pendapatan bagi hasil.

Adapun Lain-lain pendapatan yang sah ditargetkan naik sebesar 8,93% dari tahun 2025 sebesar Rp. 37.233 miliar dan ditahun 2030 sebesar Rp. 57.106 miliar. Adapun rincian proyeksi pendapatan Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.16
Kondisi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026-2030

KODE	URAIAN	PROYEKSI PERTUMBUHAN	RENCANA TA. 2025	RENCANA TA. 2026	RENCANA TA. 2027	RENCANA TA. 2028	RENCANA TA. 2029	RENCANA TA. 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**0,65**	**1.470.171.135.599**	**1.430.614.106.647**	**1.451.365.859.188**	**1.472.924.151.541**	**1.495.147.856.517**	**1.518.523.829.859**
4.01	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**7,67**	**119.719.219.050**	**148.567.176.099**	**154.247.663.613**	**160.234.449.263**	**166.546.313.617**	**173.201.170.426**
4.1.01	Pajak Daerah	**-1,47**	43.904.935.539	39.450.740.153	39.768.745.333	40.093.250.642	40.424.945.577	40.762.499.171
4.1.02	Retribusi Daerah	**-6,00**	15.111.177.770	10.060.205.976	10.306.210.111	10.559.525.980	10.820.373.068	11.088.977.472
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**15,32**	58.423.105.741	96.925.629.970	102.031.455.169	107.429.713.376	113.138.275.911	119.176.161.127
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	**-0,95**	2.280.000.000	2.130.600.000	2.141.253.000	2.151.959.265	2.162.719.061	2.173.532.656
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**-0,38**	**1.313.219.065.639**	**1.234.941.211.548**	**1.247.842.476.575**	**1.261.092.083.278**	**1.274.519.490.900**	**1.288.216.940.433**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**-0,45**	**1.280.340.205.000**	**1.200.929.680.751**	**1.213.266.619.593**	**1.225.934.970.326**	**1.238.763.684.297**	**1.251.844.479.371**
4.2.01.05	**Dana Desa**	**0,00**	**159.313.559.000**	**159.313.559.000**	**159.313.559.000**	**159.313.559.000**	**159.313.559.000**	**159.313.559.000**
4.2.01.06	**Insentif Fiskal**	**0,00**	**7.311.671.000**	**7.311.671.000**	**7.311.671.000**	**7.311.671.000**	**7.311.671.000**	**7.311.671.000**
4.2.01.07	**Dana Bagi Hasil (BDH)**	**-1,50**	**268.178.638.000**	**226.098.219.223**	**231.353.967.489**	**236.853.582.646**	**242.601.106.042**	**248.600.710.539**
4.2.01.07.01	DBH Pajak	**1,16**	64.916.003.000	65.365.824.000	66.065.824.000	66.865.824.000	67.765.824.000	68.765.824.000
4.2.	DBH Sumber	**-2,36**	199.829.195.000	157.844.895.223	162.508.924.739	167.312.760.599	172.260.596.422	177.356.751.630

KODE	URAIAN	PROYEKSI PERTUMBUHAN	RENCANA TA. 2025	RENCANA TA. 2026	RENCANA TA. 2027	RENCANA TA. 2028	RENCANA TA. 2029	RENCANA TA. 2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.07.02	Daya Alam (SDA)							
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	**-6,31**	3.433.440.000	2.887.500.000	2.779.218.750	2.674.998.047	2.574.685.620	2.478.134.909
4.2.01.08	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	**0,31**	**649.968.808.000**	**631.860.075.724**	**638.941.266.300**	**646.022.456.876**	**653.103.647.452**	**660.184.838.027**
4.2.01.09	**Dana Alokasi Khusus (DAK)**	**-2,04**	**195.567.529.000**	**176.346.155.804**	**176.346.155.804**	**176.433.700.804**	**176.433.700.804**	**176.433.700.804**
4.2.01.09.01	DAK Fisik	**20,07**	14.288.364.000	35.572.315.137	35.572.315.137	35.659.860.137	35.659.860.137	35.659.860.137
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	**-4,93**	181.279.165.000	140.773.840.667	140.773.840.667	140.773.840.667	140.773.840.667	140.773.840.667
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**2,04**	**32.878.860.639**	**34.011.530.797**	**34.575.856.982**	**35.157.112.953**	**35.755.806.603**	**36.372.461.062**
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	**2,04**	32.878.860.639	34.011.530.797	34.575.856.982	35.157.112.953	35.755.806.603	36.372.461.062
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	**#DIV/0!**	0	0	0	0	0	0
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**8,93**	**37.232.850.910**	**47.105.719.000**	**49.275.719.000**	**51.597.619.000**	**54.082.052.000**	**57.105.719.000**
4.3.01	Pendapatan Hibah	**14,51**	20.824.800.000	31.000.000.000	33.170.000.000	35.491.900.000	37.976.333.000	41.000.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	**-0,37**	16.408.050.910	16.105.719.000	16.105.719.000	16.105.719.000	16.105.719.000	16.105.719.000

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Selatan, 2025 (diolah)

a.Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat

Proyeksi belanja wajib mengikat dilakukan untuk mengetahui estimasi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama yang harus

Dalam melakukan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka yang harus dihitung diawal ialah proyeksi besaran belanja operasi (belanja pegawai, belanja bunga, blanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial), belanja transfer (belanja transfer bagi hasil dan belanja transfer bantuan keuangan), dan belanja tak terduga serta pengeluaran pembiayaan yang ada.

Berdasarkan hasil analisis, proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dari Belanja Operasi khususnya belanja pegawai ditargetkan naik ± 0,41% pertahun. Penekanan kenaikan belanja pegawai tersebut dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah P3K dan penambahan jumlah pegawai dan menekan honorarium yang kurang efisien. Selain itu untuk meningkatkan kualitas belanja publik yang lebih berkualitas.

Berdasarkan bebeberapa hal diatas maka total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025-2030 secara berturut-turut sebesar, Rp. 1,372 triliun , Rp. 1,243 triliun, Rp 1,221 triliun Rp. 1,241 triliun; Rp. 1,269 triliun dan Rp. 1,292 triliun.

Adapun rincian proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.17
Proyeksi Belanja Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026-2030 (dalam jutaan)

Uraian	Proyeksi						Proyeksi Pertumbuhan (%)
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
BELANJA	**1.362.210**	**1.232.460**	**1.210.706**	**1.231.004**	**1.259.038**	**1.282.399**	**- 1,20**
BELANJA OPERASI	**1.098.510**	**971.738**	**950.731**	**969.777**	**996.527**	**1.013.578**	**- 1,60**
Belanja Pegawai	713.908	701.772	706.577	713.845	721.221	728.709	0,41
Belanja Barang dan Jasa	358.363	254.120	229.333	240.912	237.875	238.854	- 7,79
Belanja Hibah	23.197	14.095	13.070	13.270	35.681	44.265	13,80
Belanja Bantuan Sosial	3.043	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	- 10,47
BELANJA TIDAK TERDUGA	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**10.000**	**14,87**
Belanja Tidak Terduga	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	14,87
BELANJA TRANSFER	**258.701**	**255.722**	**254.975**	**256.227**	**257.512**	**258.821**	**0,01**
Belanja Bagi Hasil	5.563	6.605	6.623	6.617	6.619	6.620	3,54
Belanja Bantuan Keuangan	253.137	249.118	248.352	249.610	250.893	252.201	- 0,07
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**-**
Penyertaan Modal Daerah	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-
Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas	**1.372.210**	**1.242.460**	**1.220.706**	**1.241.004**	**1.269.038**	**1.292.399**	**- 1,2**

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Selatan, 2025 (diolah)

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendapatan

Penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk memperoleh kapasitas riil yang digunakan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas program dan kegiatan pembangunan. Pada dasarnya Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah diperoleh dari proyeksi penerimaan dikurangi dengan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas.

Kapasitas riil Kabupaten Tapanuli Selatan dari tahun 2025 hingga 2030 diproyeksi dengan tren relatif fluktuatif dimana kapasitas riil tahun 2025 hingga 2030 secara berurutan adalah Rp. 171.281 miliar, Rp 223,654 miliar, Rp 266.160 miliar, Rp 267,420 miliar dan Rp 261,610 miliar dan 261.625.

Secara rinci kapasitas riil dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel III.18
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2026-2030 (dalam jutaan)

No.	Uraian	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendapatan	1.470.171	1.430.614	1.451.366	1.472.924	1.495.148	1.518.524
2	Penerimaan Pembiayaan	73.320	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	TOTAL PENERIMAAN	**1.543.491**	**1.466.114**	**1.486.866**	**1.508.424**	**1.530.648**	**1.554.024**
	(***Dikurangi***):						
3	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	1.372.210	1.242.460	1.220.706	1.241.004	1.269.038	1.292.399
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	**171.281**	**223.654**	**266.160**	**267.420**	**261.610**	**261.625**

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Selatan, 2025 (diolah)

Dengan kapasitas riil yang tersedia sebagaimana tabel diatas maka pendanaan selama 5 (lima) tahun dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Prioritas I. digunakan untuk alokasi pembangunan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
b. Prioritas II. digunakan untuk dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah.

c. Prioritas III. digunakan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya

Pembagian pendanaan untuk program prioritas diatas secara lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel III.19
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah (dalam jutaan)

No	Uraian		Proyeksi				
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan (tanpa DAK dan Bankeu)	171.280,909	223.653,774	266.159,580	267.419,686	261.609,568	261.624,623
2	Prioritas I	41.762.328	54.532.069	90.690.467	89.244.744	87.557.817	87.270.644
3	Prioritas II	67.722.115	88.429.625	94.834.628	96.532.057	94.580.158	95.003.606
4	Prioritas III	61.796.466	80.692.081	80.634.486	81.642.885	79.471.593	79.350.373
	JUMLAH	**171.280.909**	**223.653.774**	**266.159.580**	**267.419.686**	**261.609.568**	**261.624.623**

Sumber: BPKAD Kabupaten Tapanuli Selatan, 2025 (diolah)

2.4 PERMASALAHAN DAN ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Pendirian suatu wilayah administrasi memiliki tujuan utama dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat sehingga mampu menikmati hasil pembangunan. Tak terkecuali Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagai daerah yang sudah didirikan pada tahun 1956 ini merupakan salah satu daerah administrasi yang telah lama didirikan melalui Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956. Dalam perjalanannya, pembangunan Tapanuli Selatan memiliki berbagai visi dan misi yang silih berganti sesuai dengan kepala daerah yang mengampu tugas dalam memimpin Tapanuli Selatan hingga yang berakhir pada tahun 2024 ini.

Dokumen RPJMD Kab.Tapsel 2025-2029 yang disusun ini perlu memberikan pemahaman bahwa program kerja yang dijanjikan oleh kepala daerah dan wakilnya harus relevan dengan kondisi pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan saat ini, khususnya arah kebijakan pembangunan tahap pertama pembangunan jangka panjang Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2045. Hal ini akan terlihat dari permasalahan dan isu-isu strategis yang dipilih dan disusun sebagai pijakan awal bagi kepala daerah beserta wakilnya agar tidak melebar dalam menyusun program kerja sehingga visi dan misi pembangunan jangka panjang tetap terjaga konsistensinya.

Perumusan berbagai analisis permasalahan baik melalui identifikasi, pemahaman, hingga solusi menjadi salah satu titik awal penentuan kebijakan yang akan diambil. Hal tersebut dikarenakan melalui analisis permasalahan pembangunan, pemerintah daerah dapat menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh regionalnya sebagai bahan untuk kemudian mendalami akar masalah permasalahan pada masing-masing bidang urusan pembangunan daerah. Alhasil, jika poin-poin inti dari permasalahan pembangunan dapat ditemukan secara relevan maka program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan akan mampu menyelesaikan permasalahan pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Isu-isu strategis baik berskala regional, nasional, maupun internasional merupakan suatu kesatuan peluang yang dipandang dari sisi positif

penyelenggaraan pembangunan untuk mendapatkan rumusan kerangka kebijakan yang tepat. Setiap peluang yang memungkinkan akselerasi capaian pembangunan harus dimanfaatkan seoptimal mungkin, sedangkan ancaman yang mengiringi pembangunan sebagai penghambat harus segera diantisipasi dengan menjadikannya sebagai peringatan dalam upaya mewujudkan capaian pembangunan.

Hasil analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah akan menjadi dasar pemikiran untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam pembangunan lima tahun mendatang. Oleh karena itu, analisis terhadap permasalahan dan isu strategis menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029 untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan selama periode pembangunan lima tahun ke depan.

4.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara realisasi kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target pembangunan (harapan) yang telah direncanakan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Dalam perumusan RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029 yang merupakan perencanaan kebijakan pembangunan lima tahun mendatang, permasalahan pembangunan daerah memiliki urgensi vital dalam

menyusun setiap tahapan kebijakan agar relevan dan mampu secara optimal mencapai visi pembangunan yang diharapkan. Setelah menelaah kajian data dan informasi di Bab II serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, diperoleh gambaran permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, yakni: "Belum kuatnya fondasi transformasi dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat Tapanuli Selatan".

Permasalahan utama pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia
2. Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah yang inklusif
3. Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang wilayah yang berkelanjutan serta yang menopang perekonomian daerah
4. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik
5. Terjadinya pergeseran karakter dan nilai-nilai budaya masyarakat
6. Belum Optimalnya pemerataan akses dan kualitas Pelayanan Dasar seperti fasilitas Pendidikan dan Kesehatan di daerah terpencil.
7. Masih Tingginya kerentanan dan Potensi Bencana
8. Belum optimalnya Perencanaan Pembangunan Yang berkesinambungan

Ilustrasi keterkaitan antara permasalahan utama dengan permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada bagan berikut.

Gambar IV.1
Keterkaitan Permasalahan Utama dengan Permasalahan Pokok
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029



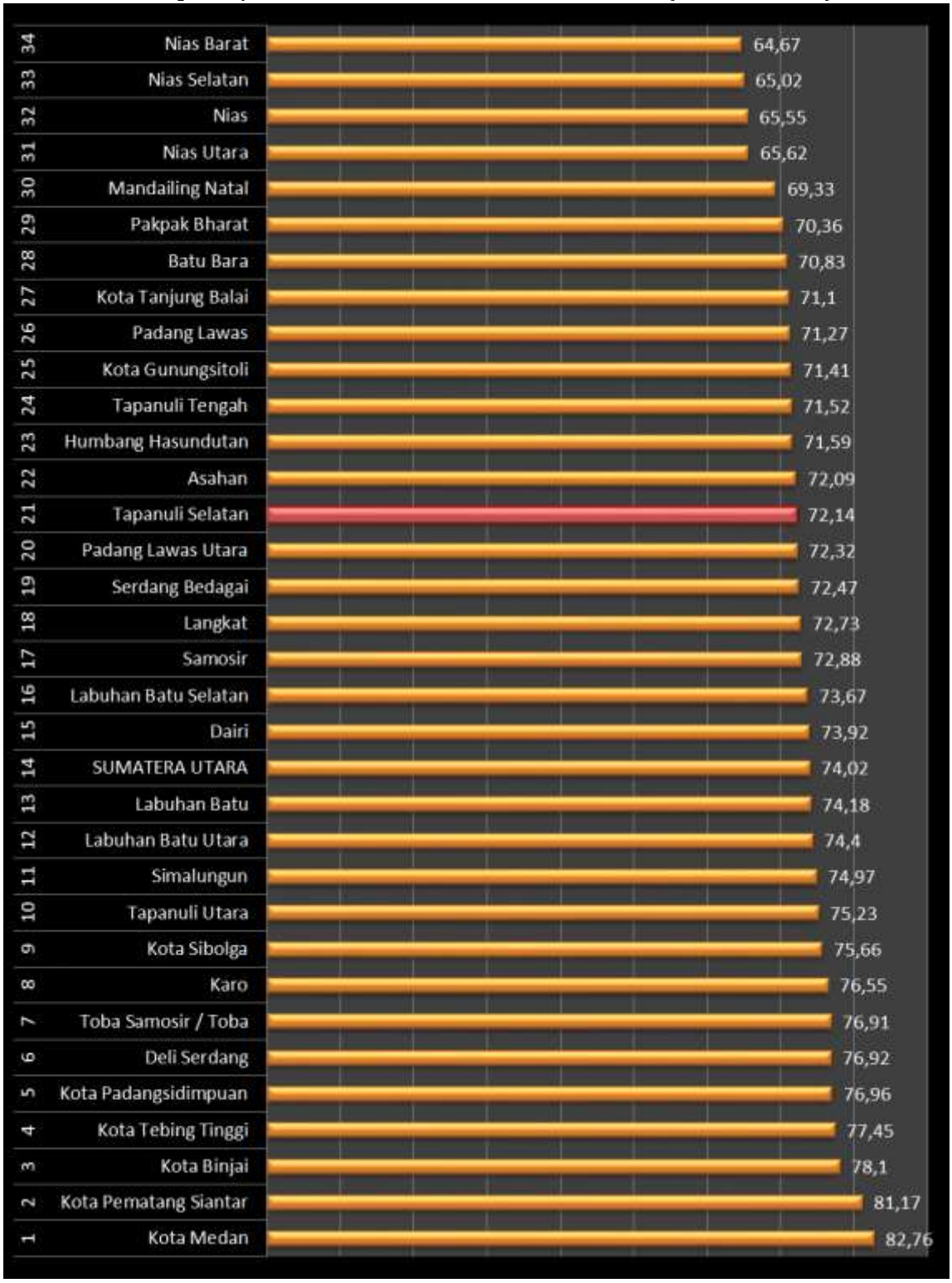
Untuk lebih melihat bagaimana penjabaran permasalahan pembangunan Tapanuli Selatan, berikut analisis permasalahan pokok di Kabupaten tapanuli Selatan berdasarkan data aktual sebagai bentuk pencapaian pelaksanaan pembangunan daerah.

1. Belum optimalnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan modal dasar sekaligus aset pokok dalam pelaksanaan pembangunan. Sebagai salah satu penentu keberhasilan pembangunan daerah, sumber daya manusia harus memiliki kompetensi dan kualifikasi tertentu berdasarkan kontribusi di bidangnya masing-masing. Upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan

berdaya saing secara otomatis akan memberikan sumbangsih atas keberhasilan setiap capaian kinerja pembangunan daerah. Hal tersebut secara positif akan berdampak pada ketercapaian visi dan misi pembangunan daerah serta menjadi daya dorong perwujudan target dari aspek-aspek pembangunan, baik dari sektor ketenagakerjaan, kehidupan sosial masyarakat, hingga infrastruktur dasar kehidupan masyarakat.

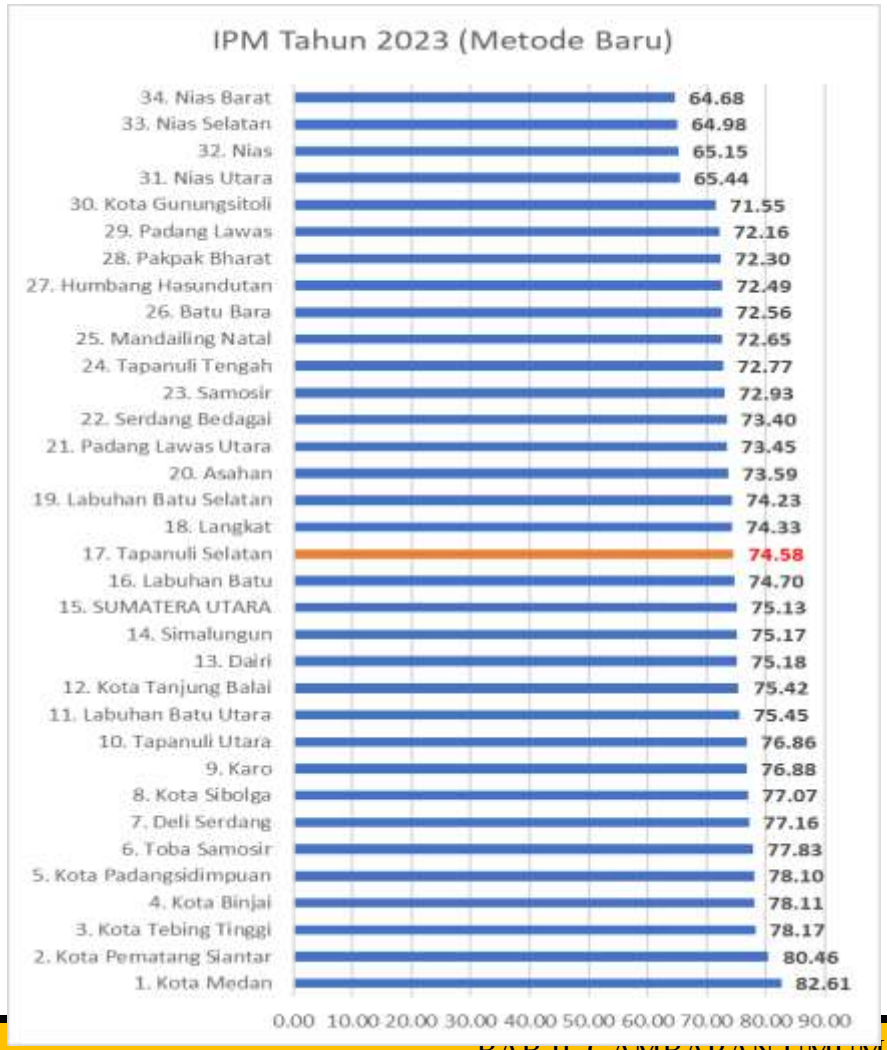
Gambar IV.2
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Tahun 2024 (Metode Lama)



Sumber: BPS RI, 2025

Terlihat secara umum bahwa kualitas sumber daya manusia di Tapanuli Selatan masih berada cukup jauh dari capaian sebagian besar kabupaten/kota di Sumatera Utara masih di posisi 22 dari Kabupaten/kota pada tahun 2024 dengan angka capaian IPM Tapanuli Selatan sebesar 72.14 masih berada di bawah angka IPM Sumatera Utara yang mencapai 74.02.(dengan menggunakan Metode Perhitungan yang lama) Terlebih lagi jika dibandingkan dengan angka IPM tertinggi di Sumatera Utara yakni Kota Medan yang mencapai 82,76.

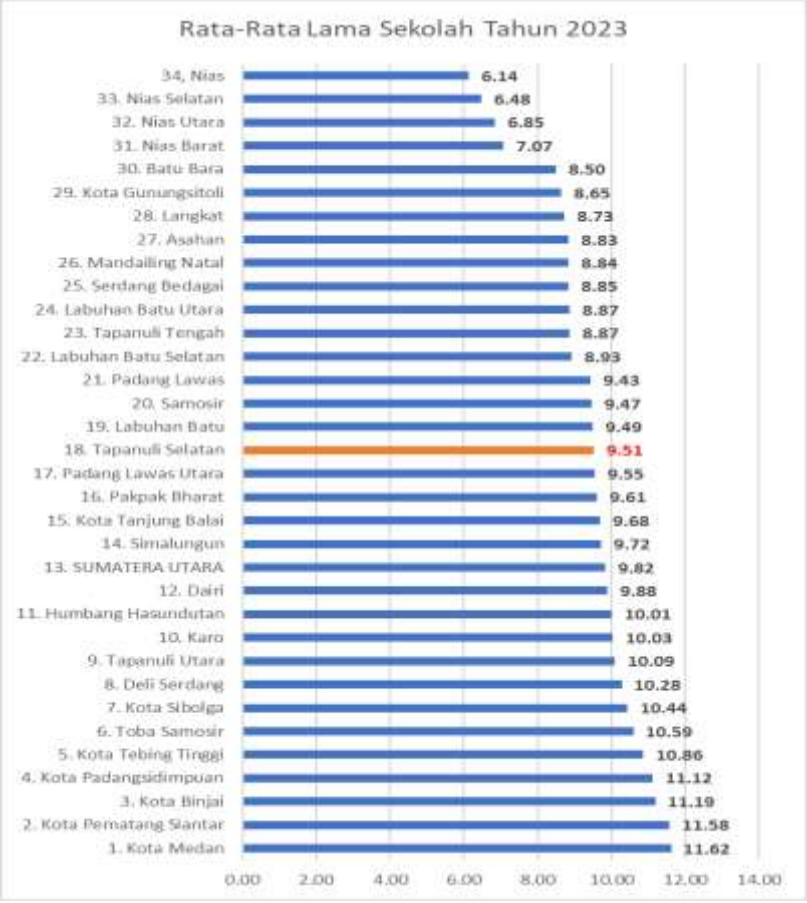
Gambar IV.2
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Tahun 2023 (Metode Baru)



Sumber: BPS RI, 2025

Terlihat secara umum bahwa kualitas sumber daya manusia di Tapanuli Selatan masih berada cukup jauh dari capaian sebagian besar kabupaten/kota di Sumatera Utara masih di posisi 17 dari Kabupaten/kota pada tahun 2023 dengan angka capaian IPM Tapanuli Selatan sebesar 74.58 masih berada di bawah angka IPM Sumatera Utara yang mencapai 75,13.(dengan menggunakan Metode Perhitungan yang baru) Terlebih lagi jika dibandingkan dengan angka IPM tertinggi di Sumatera Utara yakni Kota Medan yang mencapai 82,61.

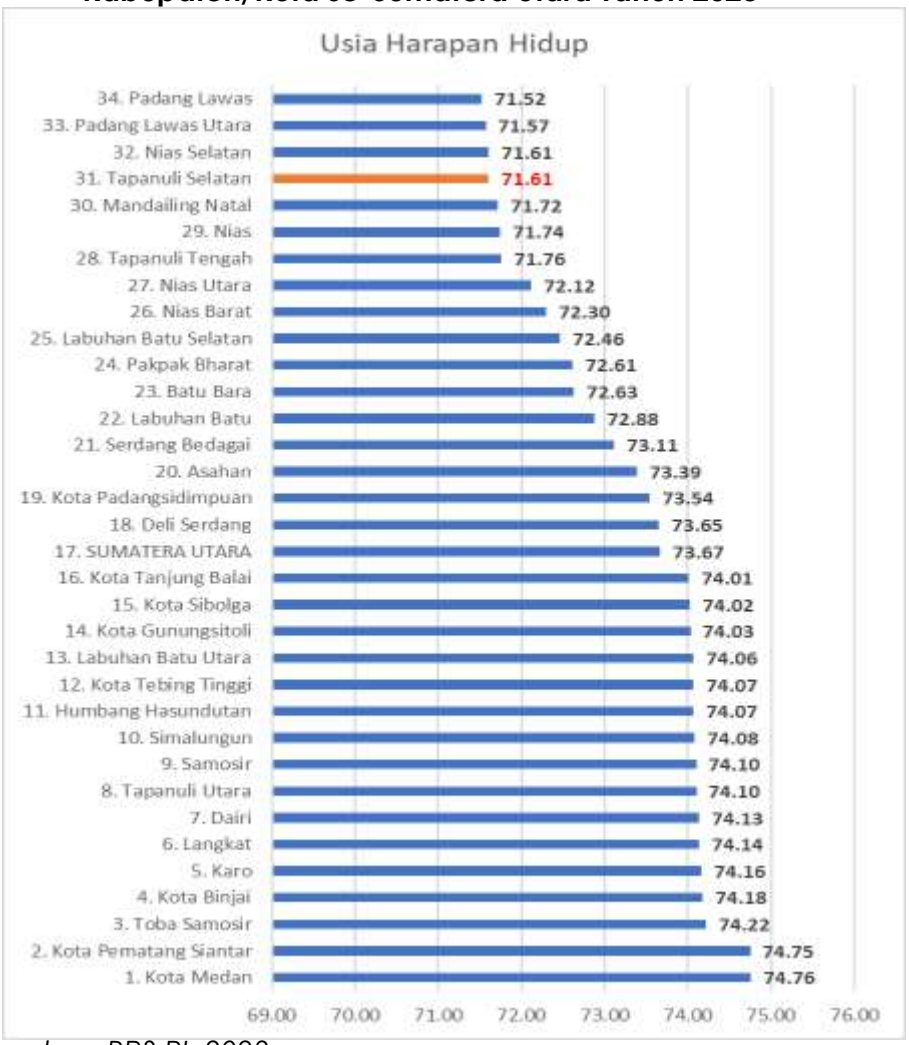
Gambar IV.3
Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Tahun 2023



Sumber: BPS RI, 2023

Belum optimalnya capaian pembangunan kualitas sumber daya manusia disebabkan karena belum optimalnya pelayanan pendidikan dan kesehatan di Tapanuli Selatan. Hal ini terlihat dari capaian rata-rata lama sekolah yang masih cukup jauh dari harapan. Terlihat bahwa angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tapanuli Selatan mencapai 9,51 tahun yang jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se Sumatera Utara masih berada di peringkat 18 se-Sumatera Utara. Hal ini terindikasi dari rata-rata lama sekolah Tapanuli Selatan berada di bawah angka rata-rata lama sekolah Sumatera Utara yang mencapai 9,82 tahun.

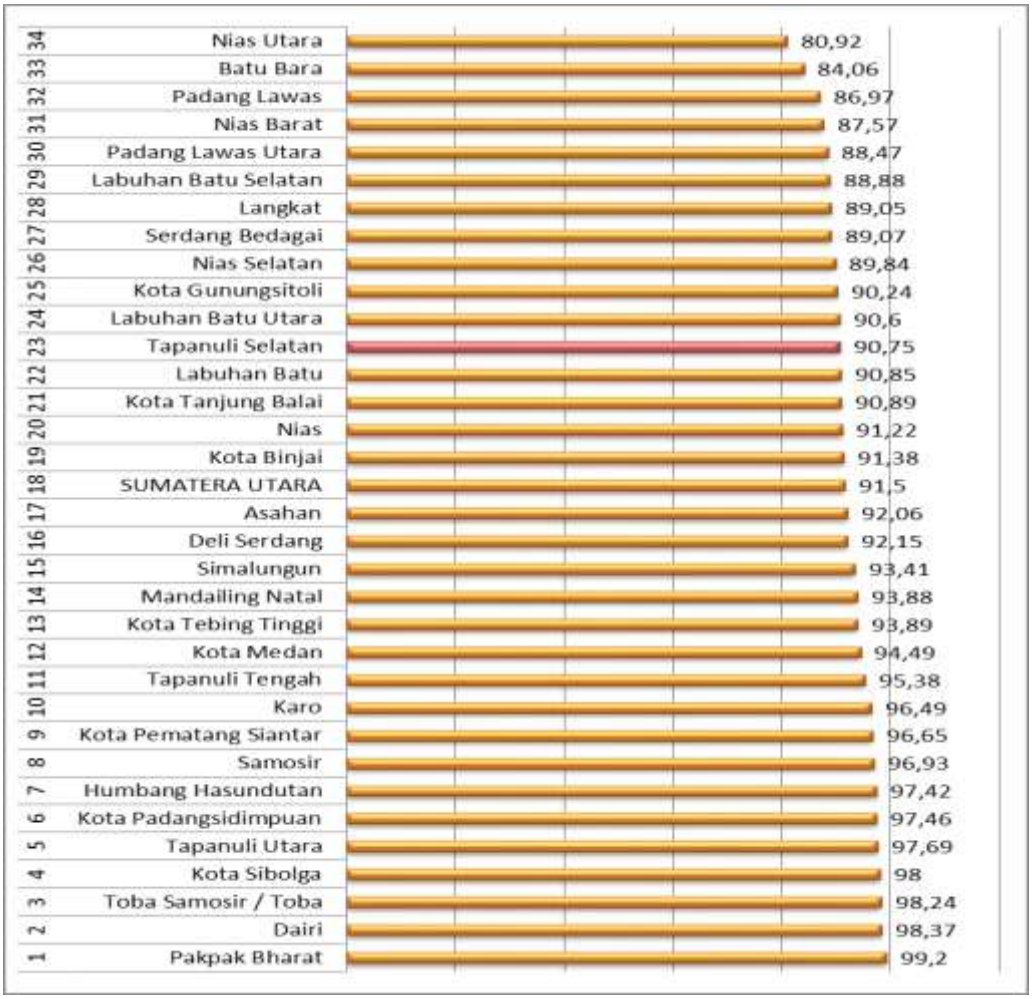
Gambar IV.4
Usia Harapan Hidup
Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Tahun 2023



Sumber: BPS RI, 2023

Jika dibandingkan dengan kondisi pendidikan, maka derajat kesehatan masyarakat Tapanuli Selatan masih memerlukan upaya lebih untuk meningkatkan kualitas pembangunan kesehatan wilayah. Hal ini terlihat dari rendahnya Usia harapan hidup Tapanuli Selatan sebesar 71.61 jika dibandingkan dengan daerah lain di Sumatera Utara, bahkan berada di peringkat empat terbawah setelah Padang Lawas, Padang Lawas Utara dan Nias Selatan .

Gambar IV.5
Indeks Pembangunan Gender
Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Tahun 2024



Sumber: BPS RI, 2025

Jika dilihat pembangunan gender di Tapanuli Selatan, maka posisi daerah berada di 23 kabupaten/kota se-Sumatera Utara dengan angka 90.75. Hal ini mengindikasikan masih perlunya optimalisasi dalam pengarusutamaan gender pada pelaksanaan pembangunan Tapanuli Selatan. Selain itu, terlihat pula dari angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Tapanuli Selatan pada tahun 2023 dimana TPAK laki-laki mencapai 85,15 sedangkan perempuan hanya sebesar 66.12

2. Belum Optimalnya Pembangunan Perekonomian Daerah yang inklusif

Kondisi perekonomian daerah merupakan salah satu syarat utama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Hal tersebut sangat disadari oleh pengambil kebijakan di Kabupaten Tapanuli Selatan dimana perhatian yang cukup tinggi ditujukan pada peningkatan pergerakan perekonomian daerah, khususnya perekonomian kerakyatan.

Potensi perekonomian di Tapanuli Selatan cukup besar, namun dalam pengelolaannya masih belum menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan dalam pembangunan perekonomian Sumatera Utara. Kontribusi nilai PDRB Tapanuli Selatan pada struktur ekonomi Sumatera Utara hanya mencapai 1,84 persen pada tahun 2023.

Jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapanuli Selatan berada pada posisi ke 3 dari 33 Kab/Kota yang ada di Provinsis Sumatera Utara, dimana pencapaian pertumbuhan ekonomi Tapanuli Selatan sebesar 5,11% pada tahun 2023 berada diatas pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara sebesar 5,01%. Namun jika dibandingkan dengan Kabupaten deli Serdang dan Kabupaten Padang Lawas di Sumatera Utara masih berada di atasnya yaitu berada diangka 5,34% dan 5,14%.

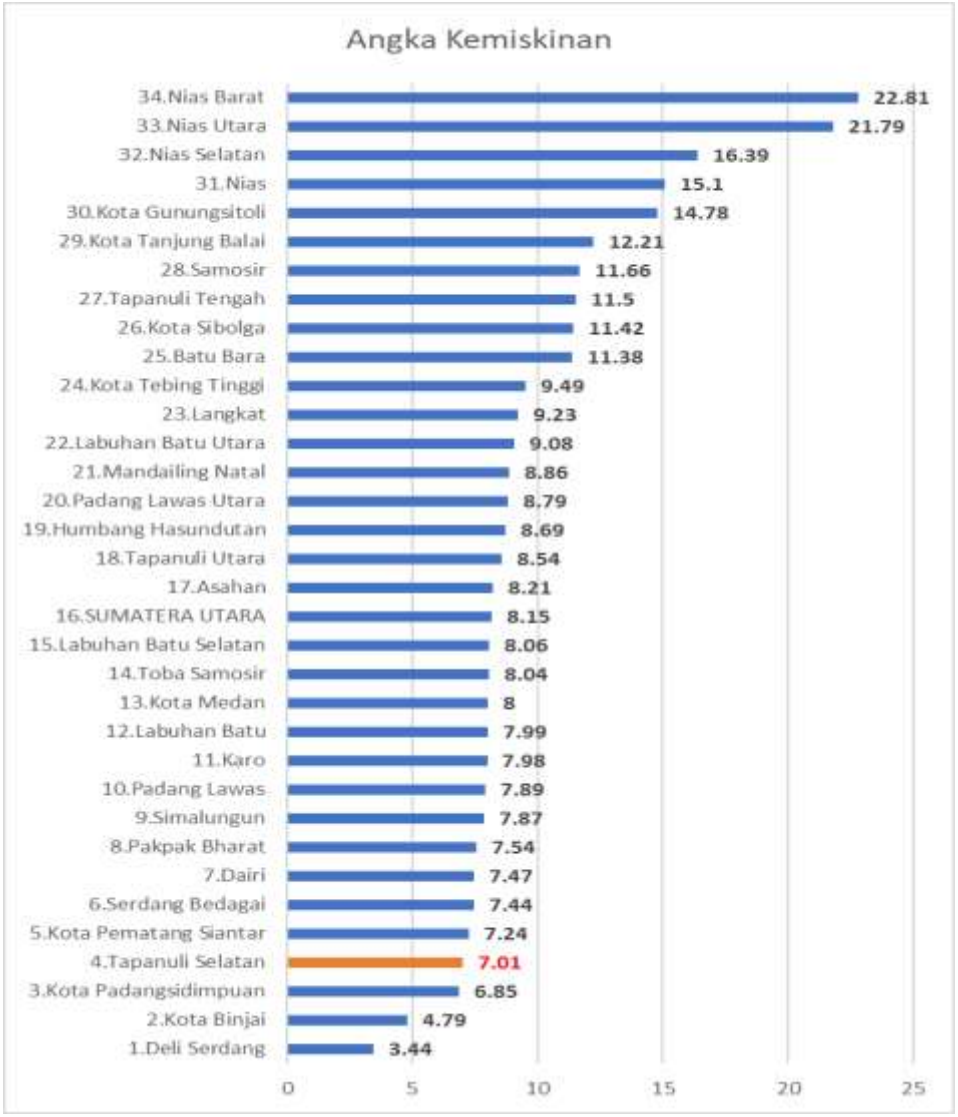
Gambar IV.6
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Tahun 2024



Sumber: BPS RI, 2024

Salah satu tujuan pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi kualitas maupun pemerataannya. Oleh karena itu, berbagai program dan kegiatan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mencukupi setiap kebutuhan hidupnya. Indikator utama dalam melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah angka kemiskinan yang merupakan ukuran untuk melihat bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Gambar IV.7
Angka Kemiskinan
Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Tahun 2023



Sumber: BPS RI, 2024

Saat ini angka kemiskinan Kabupaten Tapanuli Selatan (7,01%) berada pada posisi 4 terendah dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara bahkan lebih rendah dari angka kemiskinan rata-rata Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Tapanuli Selatan berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 8,80% (25.010 jiwa) pada Tahun 2021 menjadi 7.01% (20.090 jiwa) pada Tahun 2023 atau menurun sebesar 1,79% dimana pada tahun 2023 angka kemiskinan Provinsi Sumatera Utara mencapai 8,15% (1239,710 Jiwa). Namun upaya penurunan angka kemiskinan perlu terus dioptimalkan lagi dengan tetap mewaspadai dampak dari el nino atau konflik internasional seperti konflik rusia dan ukraina, israel dan gaza. ini kedepannya yang belum dapat dipastikan kapan akan berakhir.

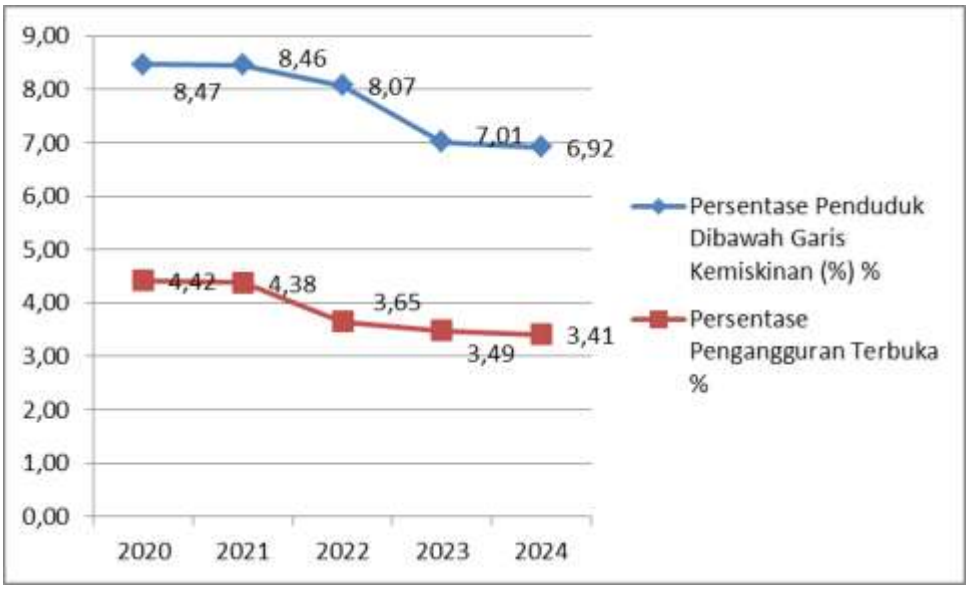
Gambar IV.8
Angka Pengangguran
beberapa Kabupaten/kota tahun 2020-2024

Angka Pengangguran Terbuka	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
Sumatera Utara	6,91	6,33	6,16	5,89	5,60
Mandailing Natal	6,5	6,12	7,64	7,45	7,22
Tapanuli Selatan	4,42	4,00	3,65	3,49	3,41
Padang Lawas Utara	3,11	3,19	4,31	4,42	3,99
Padang Lawas	4,11	4,07	5,9	5,75	5,47
Padangsidimpuan	7,45	7,18	7,76	7,57	7,17

Sumber: BPS RI, 2025

Angka pengangguran Kabupaten Tapanuli Selatan saat ini sebesar 3,49% berada pada posisi 13 terendah dari seluruh dari 33 kabupaten/kota bahkan lebih rendah dari angka pengangguran Provinsi Sumatera Utara sebesar 5,89%.

Gambar IV.9
Perkembangan Angka Pengangguran dan Angka Kemiskinan
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020-2024



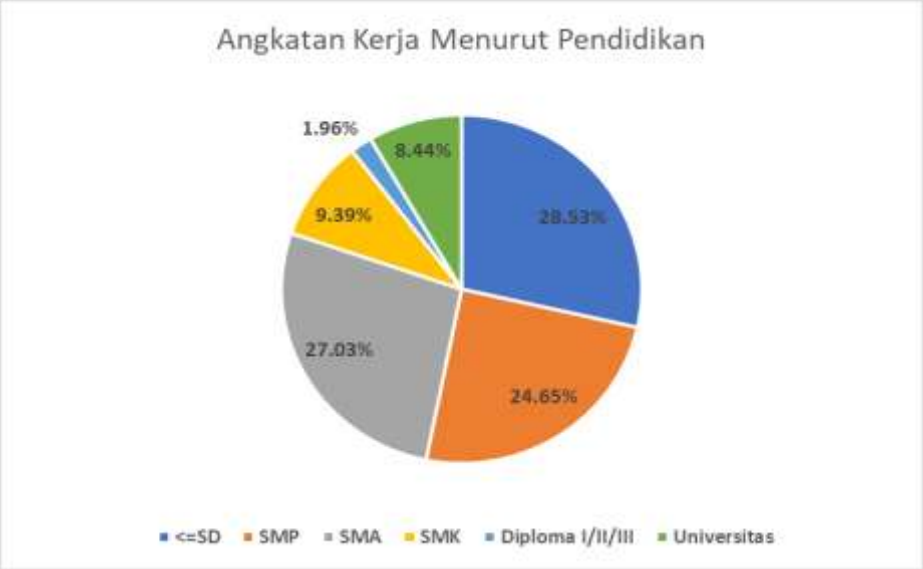
Sumber: BPS Tapanuli Selatan, 2025

Permasalahan ketenagakerjaan dan kesejahteraan masyarakat memiliki hubungan yang cukup dinamis dalam perkembangan pembangunan daerah, tak terkecuali Kabupaten Tapanuli Selatan. Selama kurun waktu pelaksanaan pembangunan tahun 2020-2024, angka kemiskinan berbanding lurus dengan angka pengangguran, namun pada kondisi tahun 2020 penurunan angka kemiskinan tidak diikuti dengan penurunan angka pengangguran dimana angka kemiskinan menurun dari 8,60 persen menjadi 8,47 persen namun angka pengangguran meningkat dari 4,17 persen menjadi 4,42 persen, sebaliknya di tahun 2021 angka kemiskinan naik menjadi 8.80 persen sementara angka kemiskinan turun menjadi 4.00 persen. Pada tahun 2024 angka kemiskinan menurun menjadi 6,92% dan angka pengangguran terbuka juga mengalami penurunan menjadi 3,41%. Peningkatan angka Pengangguran pada Tahun 2020 dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemi yang cukup memberikan dampak signifikan pada gejolak ekonomi daerah dimana kemiskinan yang dihitung dengan dasar kondisi maret mengalami penurunan karena dampak

pandemi yang belum memberikan pengaruh signifikan hingga Tapanuli Selatan. Sedangkan pada periode penghitungan angka pengangguran dilakukan pada bulan Agustus dimana Pandemi COVID-19 sudah menyebar dan memberikan dampak cukup signifikan pada sektor-sektor ekonomi yang memiliki penyerapan tenaga kerja cukup tinggi. Dalam rilis BPS juga terlihat secara Nasional bahwa salah satu efek dari penurunan kegiatan ekonomi akibat pandemi adalah diberlakukannya kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja sehingga menimbulkan kenaikan angka pengangguran, termasuk Tapanuli Selatan.

Permasalahan ketenagakerjaan berikutnya adalah masih minimnya kompetensi angkatan kerja Tapanuli Selatan dimana sebagian besar angkatan kerja hanya memiliki jenjang Pendidikan SMA/SMK sebesar 36,42 persen kemudian disusul pendidikan Sekolah Dasar atau bahkan belum tamat/belum sekolah sebesar 28,53 persen, angkatan kerja dengan pendidikan SMP sebesar 27,03 persen, Adapun angkatan kerja yang memiliki kompetensi dan kualifikasi dari perguruan tinggi (Diploma dan S1) hanya sebesar 10,40 persen.

Gambar IV.10
Persentase Angkatan Kerja Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023



Sumber: BPS Tapanuli Selatan, 2024

3. **Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang wilayah yang berkelanjutan serta yang menopang perekonomian daerah**

Pembangunan daerah yang memiliki tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata mengindikasikan adanya pelayanan kepada setiap penduduk dalam menjalani kesehariannya. Hal tersebut menjadi suatu "pekerjaan rumah" bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mengingat masih belum optimalnya pelayanan baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Salah satu kendala pembangunan Tapanuli Selatan yang menjadi sorotan pada setiap periode pembangunan adalah terkait aksesibilitas wilayah. Belum optimalnya Pemerataan pembangunan konektivitas dalam wilayah Tapanuli Selatan menjadikan distribusi barang maupun orang masih belum optimal. Hal ini tentu saja berdampak pada sektor-sektor pelayanan publik lainnya.

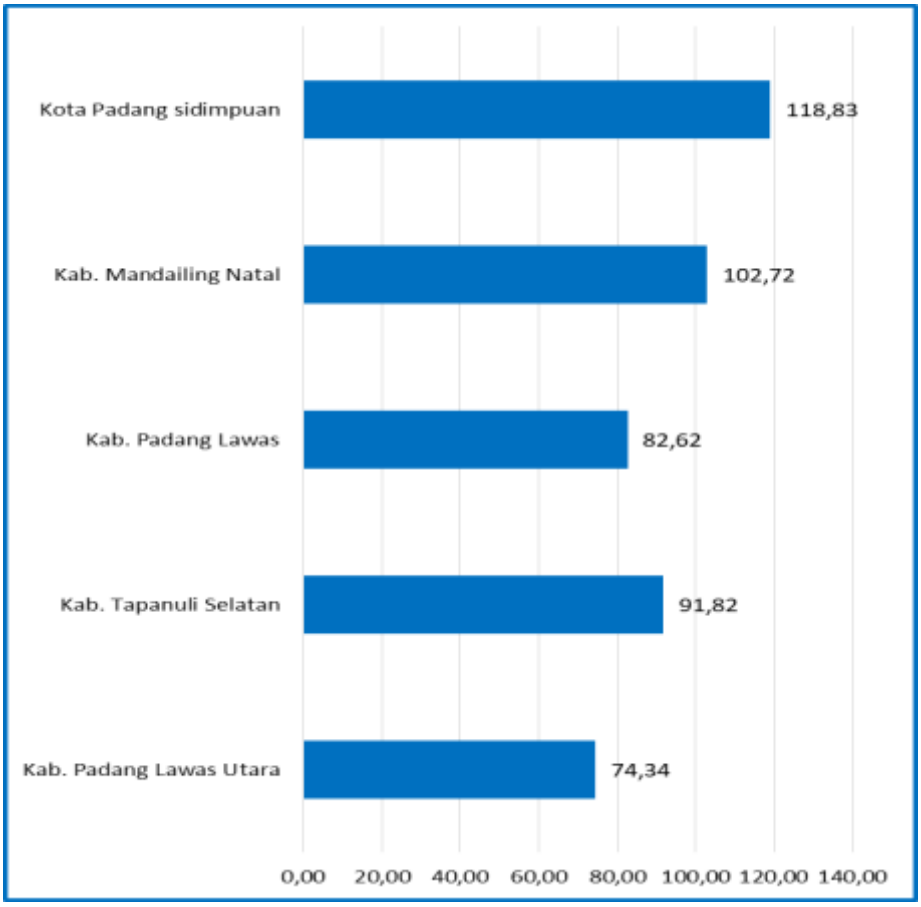
Sebagai sarana vital dalam aksesibilitas wilayah, kondisi jalan Tapanuli Selatan masih memerlukan perbaikan. Masih cukup banyaknya panjang jalan berjenis permukaan tanah (14,92%) dan kerikil+batu (25,85%) pada tahun 2023 menjadikan moda transportasi sulit untuk mengakses suatu wilayah. Selain itu, dari sisi pemeliharaan jalan, masih tingginya persentase jalan yang rusak (10,24%) dan rusak berat (18,85%) pada tahun 2023 menjadikan tidak optimalnya kelancaran distribusi barang dan orang.

Dari sisi fasilitas energi listrik, sebanyak 99,32% masyarakat sudah dapat menikmati listrik yang bersumber dari listrik PLN sebesar 91,82%, sisanya sebesar 7,50% listrik Non PLN seperti PLTMH dan PLTS Terpusat. Dari 248 Desa/Kelurahan di Tapanuli Selatan seluruhnya telah dapat menikmati aliran listrik baik PLN maupun Non PLN (Rasio Desa/Kelurahan - RD/RK sudah mencapai 100%), namun dari segi pengguna, masih terdapat 0,68% rumah tangga yang belum mendapatkan layanan listrik baik PLN maupun Non PLN (PLTMH dan PLTS Terpusat),

Bila dibandingkan dengan target pada RPJMD 2021-2026 (target tahun 2023 sebesar 90,00%), maka capaian pada tahun 2023 tersebut telah

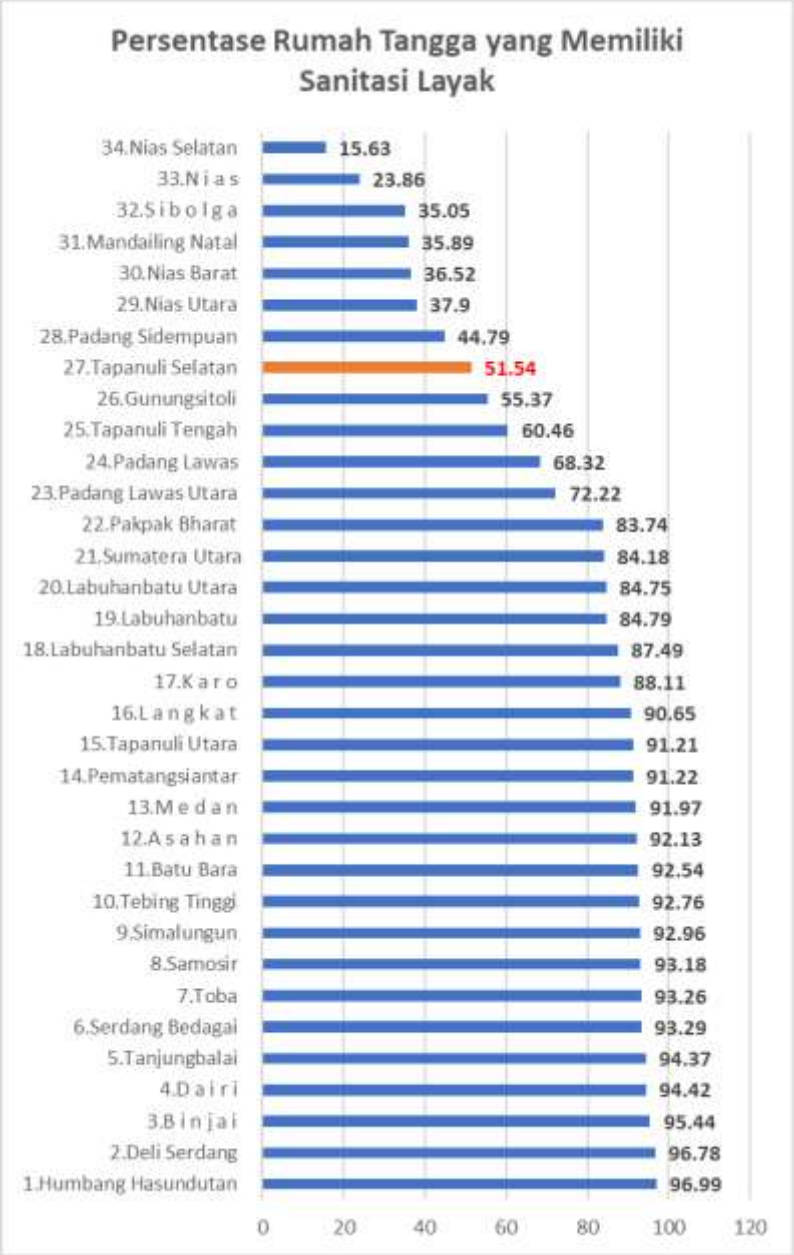
melampaui target tahun 2023 dan tahun 2024 sebesar 93,00% . Namun dengan pesatnya perkembangan aktivitas masyarakat termasuk kebutuhan terhadap listrik, capaian tersebut perlu ditingkatkan lagi sehingga diharapkan seluruh masyarakat Tapanuli Selatan dapat menikmati listrik.

Gambar IV.11
Rasio Elektrifikasi Listrik PLN
Kabupaten/Kota se Tapanuli Bagian Selatan Utara Tahun 2024



Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Selatan, 2024

Gambar IV.12
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Sanitasi Layak
Kabupaten/Kota se Sumatera Utara Tahun 2023



Sumber: BPS Sumatera Utara, 2024

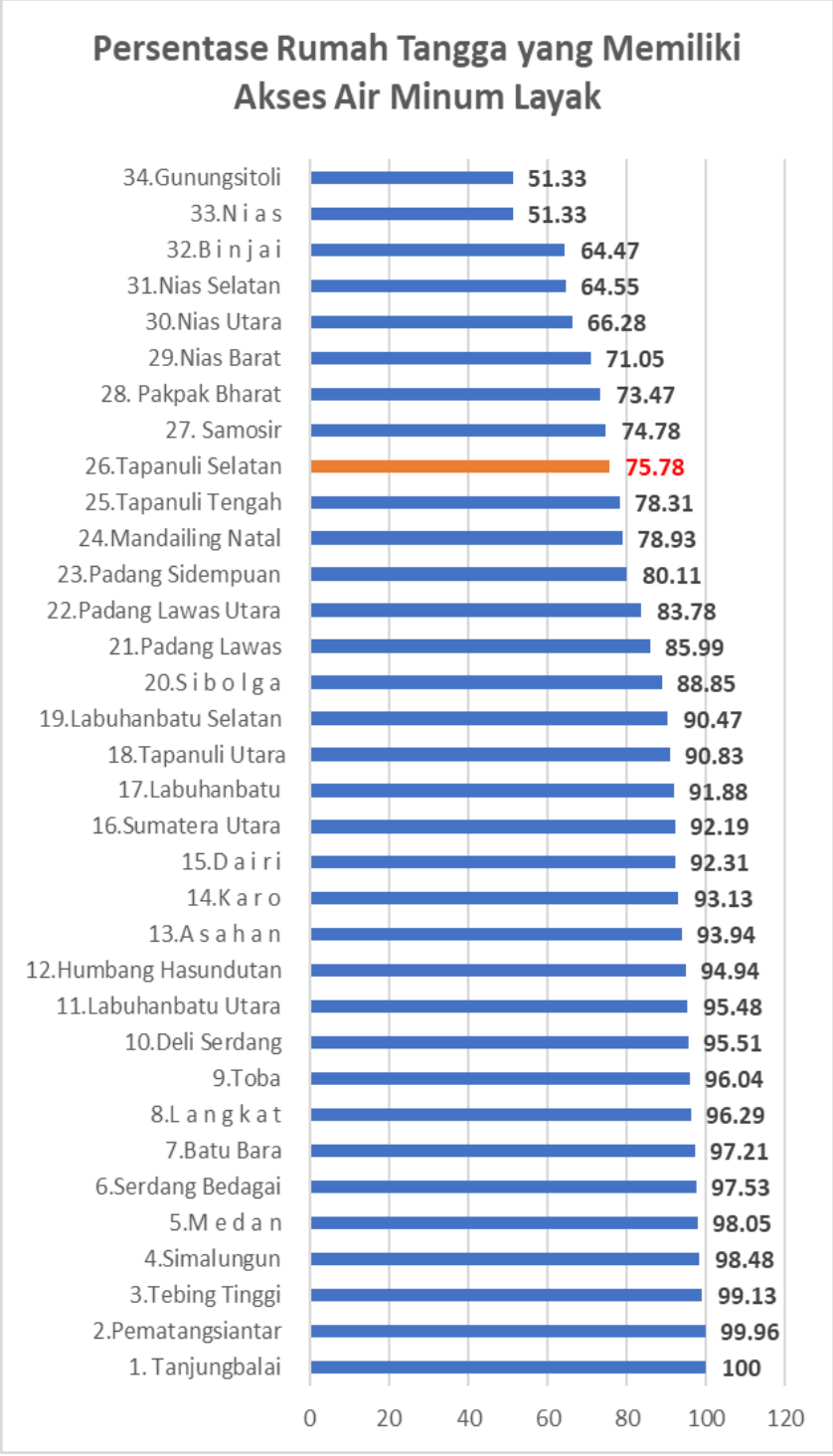
Dari segi kuantitas, akses sanitasi mayarakat Tapanuli Selatan masih rendah yaitu sebesar 51,54% pada Tahun 2023.

Secara umum akses sanitasi layak di Sumatera Utara sudah lebih baik dimana 84.18% pada tahun 2023 rumah tangga telah memiliki akses sanitasi

yang layak. Kondisi ini tentunya menjadi perhatian Kabupaten Tapanuli Selatan bahwa pembangunan sanitasi yang akan dilakukan kedepan disamping meningkatkan kuantitas juga sudah saatnya lebih memperhatikan aspek kelayakan dan keamanan terhadap lingkungan.

Selain sanitasi, akses air minum layak juga menjadi salah satu indikator dalam menjaga kesehatan lingkungan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Secara kuantitas, akses terhadap air minum masyarakat Tapanuli Selatan sudah cukup memadai yaitu sebesar 75,78% pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan capaian Sumatera Utara sebesar 92,19% pada tahun 2023. Hal ini akan menjadi perhatian bagi pemerintah daerah. Sudah saatnya bagi daerah untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan kualitas air minum yang dihasilkan termasuk meningkatkan kuantitas ketersediaan akses air minum.

Gambar IV.12
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak
Kabupaten/Kota se Sumatera Utara Tahun 2023



Sumber: BPS Sumatera Utara, 2024

4. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi tujuan utama pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan Tapanuli Selatan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di segala bidang. Sekurang-kurangnya, terdapat empat elemen penting penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi: *accountability, transparancy, predictability*, dan *participation*. Tanpa empat elemen tersebut, sulit sekali untuk menjamin bahwa pembangunan daerah diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Mencermati kinerja "tata kelola pemerintahan yang baik" di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan yang belum sepenuhnya terwujud. Beberapa permasalahan yang disinyalir penyebab beberapa faktor penyebabnya dapat diidentifikasi antara lain: belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, belum optimalnya pelayanan publik, belum optimalnya peningkatan pendapatan asli daerah, hingga belum optimalnya perwujudan kondusivitas wilayah.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan dari sisi unsur penunjang kinerja pemerintah daerah adalah terkait perumusan perencanaan pembangunan. Terlihat bahwa hanya sebanyak 95,00 persen saja penjabaran program RPJMD yang sinkron dengan perumusan dalam program RKPD di setiap tahunnya. Hal ini tentu saja menjadi "pekerjaan rumah" bagi kinerja koordinasi dan pengawasan dalam perumusan perencanaan pembangunan yang akan menjadi panduan dalam setiap tahapan pembangunan.

Dari sisi peningkatan pendapatan asli daerah, maka baru sebesar 33,68 persen peningkatan pendapatan asli daerah. Selain itu, masih minimnya aparatur PNS yang mengikuti diklat fungsional dan kepemimpinan untuk kinerja lebih baik. Hal ini terlihat dari besaran Persentase aparatur PNS yang mengikuti diklat teknis fungsional dan kepemimpinan sebesar 67.54 persen pada tahun 2023.

Dari sisi pengawasan pengelolaan keuangan daerah, sebesar 85,58 persen rasio temuan BPK RI yang telah ditindaklanjuti. Sedangkan dari sisi

pengawasan internal, sebesar 89,43 persen pengawasan internal yang dilakukan secara berkala.

Dari segi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan masih mendaptkan nilai yang kurang memuaskan yaitu sebesar 55,05 atau CC pada tahun 2023. Sedangkan Nilai SPI (Survei Penilaian Integritas) dalam perbaikan pelayanan publik pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Pada tahun 2023 masih mendapat nilai 80,50.

5. Terjadinya pergeseran karakter dan nilai-nilai budaya masyarakat

Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan salah satu daerah yang menjungjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya, sebagai warisan leluhur masyarakat Tapanuli Selatan, dan mewujud dalam perilaku masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan yang santun, memiliki tata krama tinggi, kerukunan, serta gotong royong, Masyarakat Tapanuli Selatan menjunjung nilai-nilai **Dalihan Natolu** sehingga diharapkan akan memberikan dampak pada tercipatanya lingkungan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram, dan tanpa konflik. Dinamika modernisasi dan globalisasi yang terjadi saat ini, memiliki dua sisi implikasi kebudayaan masyarakat, implikasi positif dan negatif. Implikasi positif tentunya bukan menjadi masalah, namun berbagai implikasi negatifnya menjadi permasalahan yang berpengaruh terhadap **ketahanan budaya** dan masyarakat. Permasalahan yang dijumpai antara lain pergeseran karakter, pola pikir dan ideologi, budaya dan pranatanya. Hal tersebut terlihat dari antara lain perilaku masyarakat yang tidak sesuai etika, norma dan moral, hilangnya peminatan akan pelestarian kesenian tradisional, tradisi kehidupan masyarakat seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, rasa saling tolong menolong yang berangsur menghilang, regenerasi budayawan dan seniman yang terhambat, apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kesenian menurun, perhatian pemerintah yang kurang terhadap pelestarian budaya dan kesenian, pelaksanaan dan penegakan regulasi terkait pelestarian budaya dan seni belum optimal, serta tidak adanya

sinergi pembudayaan Tapanuli antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Pergeseran karakter dan budaya akibat pengaruh budaya dari luar juga memberikan pengaruh pada perubahan kondisi lingkungan masyarakat salah satunya adalah potensi terjadinya intoleransi, radikalisasi dan ekstremisme yang mengarah pada aksi terorisme. Permasalahan tersebut terjadi juga tidak terlepas dari peran keluarga dan perempuan yang memegang peranan penting sebagai pendidik awal bagi anak dalam proses pembentukan sumber daya manusia yang memiliki karakter dan identitas budaya sejak usia dini

6. **Belum Optimalnya pemerataan akses dan kualitas Pelayanan Dasar seperti fasilitas Pendidikan dan Kesehatan di daerah terpencil**

   Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan daerah yang cukup luas dan berbukit-bukit mempunyai berbagai macam tantangan yang harus di hadapi, seperti penyebaran penduduk yang tidak merata, ketimpangan sosial dan ekonomi, serta pembangunan yang belum merata dikarenakan sulitnya akses penghubung. Pemerintah terus berupaya untuk dapat memaksimalkan pemeratan pembangunan di Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang semula bentuk pemerintahan terpusat menjadi otonomi daerah. Ini menjadi dasar membawa pemerataan pembangunan dan kesejehteraan, khususnya di daerah terpencil dan perbatasan. Untuk bidang Kesehatan **Dari 16 Puskesmas di Kabupaten Tapanuli Selatan, tidak ada satu pun Puskesmas (0%) yang memiliki lengkap 9 jenis tenaga Kesehatan yang terdiri dari Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Promosi Kesehatan, Tenaga Kesehatan Lingkungan, ATLM (Ahli Teknologi Laboratorium Medik), Tenaga Gizi dan Tenaga Kefarmasian.** Namun karena keterbatasan anggaran dan kondisi daerah masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dasar yang diperlukan masyarakat, antara lain keterbatasan layanan Pendidikan yang berkualitas layanan kesehatan yang bermutu dan infrastruktur dasar lainnya. Sedangkan dalam Undang-Undang otonomi daerah disebutkan

jika pendidikan dan kesehatan merupakan jenis pelayanan wajib yang menjadi kewenangan serta tanggung jawab daerah.

Beikut table sarana dan prasaran Pendidikan di kabupaten Tapanuli Selatan

NO	Nama Kecamatan	Jumlah desa	Jumlah Sekolah		Jumlah Guru		
			SD	SMP	PNS	P3K	THL
1	Angkola Barat	12	20	2	119	17	15
2	Angkola Selatan	13	21	4	113	52	13
3	Angkola Timur	13	19	5	166	31	8
4	Arse	8	12	2	54	23	2
5	Aek Bilah	12	14	2	32	23	7
6	Batang Angkola	23	20	3	140	17	1
7	Batang Toru	19	26	3	113	45	7
8	Marancar	11	13	2	57	30	4
9	Muara Batangtoru	6	11	2	36	29	2
10	Saipar Dolok Hole	12	29	4	79	61	17
11	Sayurmatinggi	18	19	1	95	28	6
12	Sipirok	34	46	9	196	71	1
13	Angkola Sangkunur	8	11	5	49	50	9
14	Tantom Angkola	16	17	3	83	37	2
15	Angkola Muaratais	15	10	3	67	10	4
TOTAL		**220**	**288**	**50**	**1399**	**524**	**98**

7. Masih Tingginya kerentanan dan Potensi Bencana

Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan daerah yang terjal dan berkelok-kelok sebagai wujud dari daerah pegunungan atau perbukitan sehingga pada posisi secara geografis, geologis, hidrologis dan demografis menyebabkan Tapanuli Selatan sangat rawan terhadap berbagai bencana alam, seperti banjir,longsor dan lain-lain. Berikut ini kami tampilkan KAJIAN RISIKO BENCANA di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Tabel

Kajian Resiko Bencana Di Tapanuli Selatan

No.	JENIS BAHAYA	PROVINSI	KABUPATEN	BAHAYA				
				LUAS BAHAYA (HA)			TOTAL LUAS	KELAS
				RENDAH	SEDANG	TINGGI		
1	BANJIR	SUMATERA UTARA	TAPANULI SELATAN	11,601	21,149	32,104	64,854	TINGGI
2	BANJIR BANDANG	SUMATERA UTARA	TAPANULI SELATAN	391	1,940	4,020	6,351	TINGGI
3	CUACA EKSTRIM	SUMATERA UTARA	TAPANULI SELATAN	832	4,673	82,568	88,073	TINGGI
4	GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	SUMATERA UTARA	TAPANULI SELATAN	37	13	500	550	TINGGI
5	GEMPABUMI	SUMATERA UTARA	TAPANULI SELATAN	54,006	109,715	280,762	444,482	TINGGI
6	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	SUMATERA UTARA	TAPANULI SELATAN	81,208	346,231	10,808	438,247	TINGGI
7	KEKERINGAN	SUMATERA UTARA	TAPANULI SELATAN	-	255,924	188,558	444,482	TINGGI
8	TANAH LONGSOR	SUMATERA UTARA	TAPANULI SELATAN	7,973	232,432	98,654	339,059	TINGGI
9	TSUNAMI	SUMATERA UTARA	TAPANULI SELATAN	1,528	518	4,944	6,990	TINGGI
				157,575	972,595	702,918	1,833,088	-

8. Belum optimalnya Perencanaan Pembangunan Yang berkesinambungan

Perencanaan merupakan salah satu tahapan penting dalam pembangunan daerah. Perencanaan yang baik dapat menjadi awal mula dari kegiatan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Karena dengan perencanaan kegiatan yang baik, tepat sasaran akan mendorong pelaksanaan perencanaan yang lebih optimal sehingga menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Bahwa perencanaan sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu untuk masa yang akan dating melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan, peningkatan akuntabilitas pemerintah, dan pengembangan pembiayaan inovatif.

Tabel IV.1
Hubungan Misi RPJPD, Permasalahan Pokok dan Permasalahan Pembangunan
Kabupaten Tapanuli Selatan

Kabupaten Tapanuli Selatan	PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN
Mewujudkan transformasi Sosial dalam terwujudnya Sumber Daya Manusia Dan Masyarakat Yang Berkualitas, Cerdas dan Sehat	Belum optimalnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Belum optimalnya perwujudan kualitas derajat kesehatan masyarakat
		Belum optimalnya pelayanan pendidikan yang berkualitas
Mewujudkan transformasi ekonomi dalam Terwujudnya perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan	Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah yang inklusif	Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produk komoditas unggulan daerah
		Belum optimalnya perkembangan penanaman modal daerah
		Belum optimalnya peningkatan aktivitas ekonomi kerakyatan
		Belum optimalnya pertumbuhan sektor pariwisata daerah
		Belum optimalnya peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja
		Belum optimalnya peningkatan pendapatan masyarakat
Terwujudnya transformasi tata Kelola melalui tata pemerintahan yang baik (good governance), dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		Belum optimalnya pelayanan publik
Mewujudkan Stabilitas Daerah Melalui Penciptaan Lingkungan yang Aman, Tertib dan Nyaman, Stabilitas Ekonomi, serta Kebebasan Demokrasi yang Terjamin	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang wilayah yang berkelanjutan serta yang menopang perekonomian daerah	Belum optimalnya peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah
		Sinkronisasi pembangunan & visi
		Potensi energi terbarukan belum optimal
		Belum optimalnya pengelolaan fasilitas pemukiman layak
		Belum optimalnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi yang Kuat dengan menciptakan Ketahanan Keluarga, Kesetaraan Gender, Pembangunan Inklusif serta Pembangunan Karakter dan Lingkungan	Terjadinya pergeseran karakter dan nilai-nilai budaya masyarakat	Tingginya potensi masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan karakteristik adat istiadat dan budaya daerah

Kabupaten Tapanuli Selatan	PERMASALAHAN POKOK	PERMASALAHAN
Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan adil berbasis karakteristik wilayah	Belum Optimalnya pemerataan akses dan kualitas Pelayanan Dasar	Belum Optimalnya akses dan kualitas Pelayanan Dasar
Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Masih Tingginya kerentanan dan Potensi Bencana	Adanya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup
Mewujudkan Pembangunan yang berkesinambungan	Belum optimalnya Perencanaan Pembangunan Yang berkesinambungan	Belum optimalnya perwujudan kondusivitas wilayah

4.2. ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis merupakan berbagai persoalan yang menjadi perbincangan baik internasional, nasional, hingga regional karena krusialnya kondisi atau perihal dalam pembangunan daerah masa kini maupun mendatang. Terkait dengan hal tersebut, perlu kiranya isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam menyusun program kegiatan prioritas pembangunan jangka menengah agar pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat lebih terstruktur, tepat, dan cepat. Isu-isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya, akan menjadi kelebihan tersendiri dalam meningkatkan peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan, namun sebaliknya jika isu strategis tidak diindahkan maka bukan hal yang mustahil terjadi beberapa kegagalan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan daerah. Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dari berbagai bidang dan memiliki pengaruh terhadap agenda pembangunan jangka menengah. Rumusan dari isu strategis mencakup isu internasional, isu nasional, dan isu regional yang memiliki keterkaitan dan integrasi.

8.2.1. Isu Strategis Internasional

Saat ini, isu strategis internasional yang memiliki keterhubungan cukup signifikan dengan pelaksanaan pembangunan daerah di Tapanuli Selatan adalah adanya Konflik internasional seperti konflik ukraina dan rusia, konflik timur Tengah israel dan hamas di Palestina, Israel dan iran, perang dagang AS dan Cina.

Konflik Rusia dengan Ukraina memberikan dampak bagi perekonomian global, tidak terkecuali Indonesia. Konflik ini memberikan pengaruh bagi kinerja perdagangan antara Indonesia dengan kedua negara. Komoditas utama ekspor ke kedua negara, merupakan komoditas utama Indonesia yakni CPO dan turunannya, sementara 25,91% impor tepung gandum berasal dari Ukraina. Salah satu dampak yang berat adalah kenaikan harga energi secara global. Kenaikan ini menekan kondisi fiskal karena meningkatnya subsidi untuk penggunaan BBM dan LPG. Setiap kenaikan harga minyak mentah US$1 per barel berdampak pada kenaikan subsidi LPG sekitar Rp1,47 triliun, minyak tanah Rp49 miliar, dan beban kompensasi BBM lebih dari Rp2,65 triliun. Selain itu, kenaikan ICP US$1 per barel berdampak pada tambahan subsidi dan kompensasi listrik sebesar Rp295 miliar. Pemerintah perlu mendorong Pemerintah untuk mengambil

langkah-langkah antisipatif agar tingkat inflasi terkendali di tengah harga beberapa komoditas global yang meningkat. konflik Timur Tengah juga membuat kondisi perekonomian dunia berada dalam posisi tidak stabil dan memicu ketidakpastian baru dan kondisi ekonomi global belum sepenuhnya pulih pascapandemi COVID-19 Akibat dari kondisi tersebut membuat ketidak stabilan harga energi dan harga pangan dunia meningkat, terdapat beberapa isu strategis Internasional lain yang memiliki keterhubungan dengan perencanaan pembangunan Tapanuli Selatan seperti:

a. *Sustainable Development Goals*/SDGs

Tujuan pembangunan dalam *Millennium Development Goals* (MDGs) sebagai nomenklatur tidak berhenti pada tahun 2015. Agenda ke depan untuk melanjutkan MDGs adalah dikembangkannya suatu konsepsi yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs). Perbedaan yang terlihat jelas antara MDGs dan SDGs adalah permasalahan isu lingkungan global yang lebih ditekankan dan diprioritaskan pada SDGs. Sehingga program baru ini merupakan hasil evaluasi terhadap perubahan selama kurun waktu 15 tahun program MDGs berjalan.

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu *deplation* sumberdaya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, *food and energy security*, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu: (1) indikator yang melekat pada pembangunan manusia (*Human Development*), di antaranya: pendidikan dan kesehatan; (2) Indikator yang melekat pada lingkungan sosialnya *(Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, dan (3) indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan, juga harus memerhatikan bahwa segala sesuatunya itu harus terukur, tidak terlepas dari

prinsip *Environmental Sustainability, Economic Sustainability* dan *Social Sustainability*. Secara Global terdapat 17 *Goals* yang mesti dicapai hingga 2030, yaitu:

1) Mengentaskan kemiskinan dari segala bidang;
2) Pengentasan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan peningkatan nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan;
3) Memastikan tingkat kesehatan dan usia hidup, untuk semua usia;
4) Memastikan kesamaan kualitas pendidikan dan mempromosikan peluang pembelajaran untuk semua pihak;
5) Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak;
6) Memastikan keberadaan dan keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi untuk semua;
7) Memastikan akses, daya dukung, dan keberlanjutan energi untuk semua;
8) Mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, pekerja yang produktif untuk semua pihak;
9) Membangun infrastruktur yang memiliki reliansi dan mendukung industrialisasi yang berkelanjutan, keterbukaan serta mendukung inovasi;
10) Menurunkan ketidakadilan dalam dan antar Negara;
11) Membentuk kota dan pemukiman masyarakat, aman, kuat dan berkelanjutan;
12) Memastikan keberlanjutan konsumsi dan pola-pola produksi;
13) Beraksi dalam mencegah perubahan iklim dan dampaknya;
14) Konservasi dan sumberdaya laut, samudera dan pantai untuk pembangunan berkelanjutan;
15) Melindungi, mengembalikan dan mendorong pemanfaatan ekosistem teresterial secara berkelanjutan, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, mencegah/menghentikan penggurunan, mencegah degradasi dan hilangnya keragaman hayati;
16) Mendukung perdamaian dan keterbukaan masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dapat dipertanggungjawabkan serta kelembagaan yang terbuka pada setiap level; dan
17) Penguatan implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Sebagai wilayah yang berupaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, Tapanuli Selatan berupaya semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dimana salah satu upayanya adalah mengarusutamakan berbagai tujuan penggunaan lahan. Hal ini dikarenakan Tutupan hutan di Tapanuli Selatan telah berkurang lebih karena ekspansi kebun kelapa sawit ke dalam kawasan hutan. Hal ini tentu saja berdampak pada hilangnya modal alam terutama keanekaragaman hayati, frekuensi bencana banjir dan tanah longsor bertambah serta peningkatan emisi gas rumah kaca.

b. Ancaman Krisis Ekonomi Global

Krisis ekonomi global adalah suatu masa menurunnya perekonomian dunia yang berdampak pada perekonomian beberapa Negara, termasuk Indonesia. Hal ini menjadi ancaman yang cukup krusial bagi Indonesia sebagai negara berkembang yang sangat tergantung pada fluktuasi perekonomian global. Dalam indikator Indeks Negara Gagal (*Failed Stated Index*) 2012, di Washington DC, Amerika Serikat, Indonesia terancam menjadi negara gagal dengan menempatkan Indonesia di urutan ke 63 dari 178 negara dengan posisi kategori negara bahaya (*in danger*). Semakin tinggi peringkat sebuah negara, menandakan semakin buruk kondisi Negara tersebut dan semakin mendekati kategori Negara Gagal (*Failed States*).

Ancaman ini diperparah dengan adanya konflik-konflik internasioanl dan pemulihan dampak Pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh Negara di dunia. Pertumbuhan ekonomi yang menurun bahkan mengalami kontraksi parah terjadi di beberapa Negara di belahan dunia. Secara umum, gejolak perekonomian ini menyebabkan seluruh Negara harus saling mendukung dan bekerjasama dalam penanggulangan Konflik internasional dan penanggulangan dampak Pandemi COVID-19 ini dan bersama memulihkan perekonomian dunia.

c. Penerapan *Green Economic Global* (Ekonomi Ramah Lingkungan)

Menurut PBB, apabila dunia berhasil mengurangi perusakan hutan hingga separuh pada 2030, dunia akan bisa mencegah kerugian senilai US$ 3,7 triliun akibat kenaikan emisi gas rumah kaca global. Indonesia memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi pengalihan pembangunan tradisional (industrialis) ke pola

pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pencegahan pembalakan liar hutan sehingga Indonesia dapat menciptakan sumber pendapatan dan lapangan kerja ramah lingkungan baru, menjaga keanekaragaman hayati, menjaga ketersediaan air bersih dan obat-obatan alami bagi masyarakat. Tentunya beberapa tahun belakangan ini, negara-negara maju yang telah mulai menerapkan berbagai produk hijau juga telah mendorong negara-negara berkembang untuk segera saling mengupayakan langkah-langkah menuju pengembangan ekonomi ramah lingkungan agar masyarakat dapat hidup lebih sehat ke depan.

Sebagai wilayah yang memiliki 277.926 ha kawasan hutan, Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup, khususnya dalam menurunkan emisi gas rumah kaca yang memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Upaya penerapan ekonomi ramah lingkungan di Tapanuli Selatan akan memberi rasa aman pada generasi selanjutnya sekaligus pada habitat satwa langka yang ada di Tapanuli Selatan seperti harimau sumatera, orang utan tapanuli, tapir dan trenggiling sunda.

d. Antisipasi Perubahan Iklim Global (*Global Warming*/*Climate Change*)

Global warming merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam akibat dari pembangunan yang tidak memerhatikan kelestarian lingkungan. *Global warming* dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama terjadinya berbagai bencana alam. Melihat dampaknya yang besar bagi manusia dan lingkungan maka perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi isu *global warming*. Salah satunya melalui perencanaan pembangunan yang harus ramah lingkungan (pembangunan berkelanjutan). Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetap terlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Salah satu hal yang telah dilakukan dalam menjaga keberlangsungan kualitas lingkungan hidup adalah persetujuan Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah sebuah amendemen terhadap Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan global. Negara-negara yang

meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi/pengeluaran karbon dioksida dan lima gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah atau menambah emisi gas-gas tersebut, yang telah dikaitkan dengan pemanasan global. Indonesia sendiri telah meratifikasi Protokol Kyoto pada tahun 2014 dan juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim).

Selain Protokol Kyoto, Negara-negara di dunia yang tergabung dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), pada pertemuan para pihak ke-21 bulan Desember 2015, telah menyepakati Perjanjian Paris (*Paris Agreement*), untuk menjaga ambang batas suhu bumi di bawah dua derajat Celcius dan berupaya menekan hingga 1,5 derajat Celcius di atas suhu bumi pada masa pra-industri. 5 (lima) kesepakatan pokok Perjanjian Paris, yaitu:

1. Upaya mitigasi dengan cara mengurangi emisi dengan cepat untuk mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi yang disepakati, yakni di bawah 2 derajat Celcius dan diupayakan ditekan hingga 1,5 derajat Celcius.
2. Sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi secara transparan.
3. Upaya adaptasi dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim.
4. Kerugian dan kerusakan dengan memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim.
5. Bantuan, termasuk pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut Perjanjian Paris tersebut, Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan Iklim). Perjanjian Paris tersebut telah diuraikan lebih lanjut melalui "Katowice Climate Package" yang memberikan panduan dalam operasionalisasi perjanjian Paris. Dengan dihasilkannya output ini, tentunya memerlukan tindak lanjut baik dalam tataran global maupun implementasi pada lingkup Indonesia selaku negara, serta

dilaksanakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga desa, termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan.

e. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pada era globalisasi sekarang ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat dan semakin mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan perkembangan yang positif ini, dunia industri teknologi informasi dan komunikasi semakin menunjukkan agregrat yang signifikan. Dengan segala sumberdaya yang ada dimiliki, Indonesia seharusnya mampu mengikuti setiap perkembangan globalisasi yang ada sehingga diharapkan Indonesia mempunyai peluang dalam memanfaatkan atau membuat produk yang unggul dalam pengembangan teknologi informasi, dan komunikasi.

Ke depannya nanti, diharapkan Indonesia tidak hanya sebagai pemakai (*user*) tetapi mampu menjadi pembuat (produsen) sehingga Indonesia mampu bersaing secara sehat di kancah internasional. Jika hal tersebut terealisasi maka Indonesia akan mampu menjadi Negara yang tidak hanya mengandalkan teknologi dari luar negeri, namun mampu mengekspor segala bentuk teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan spesifikasi dan berdaya saing internasional. Namun untuk mencapai kondisi tersebut, berbagai infrastruktur IT harus dipersiapkan dengan matang, dimana salah satunya adalah telah berkembangnya sinyal 4.0 ke seluruh wilayah Indonesia dan saat ini sedang persiapan untuk pengembangan sinyal 5.0. Meskipun belum merata ke seluruh wilayah, namun upaya ini mampu meningkatkan kualitas teknologi informasi daerah.

Pandemi COVID-19 yang lalu juga secara tidak langsung meningkatkan frekuensi penggunaan IT dalam mempermudah kegiatan sehari-hari. Salah satu yang paling signifikan adalah dikarenakan kebijakan *physical distancing* diharuskan setiap pelaksanaan kegiatan tatap muka dilakukan secara video conference. Selain itu, berbagai kebijakan seperti bekerja dari rumah atau sekolah dari rumah otomatis sangat membutuhkan jaringan komunikasi yang lebih intens. Hal ini berdampak pada meningkatnya penggunaan sarana dan prasarana IT, khususnya pada bidang telekomunikasi.

8.2.2. Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Masih adanya isu-isu strategis nasional yang belum terselesaikan menjadi catatan tersendiri bagi pemerintah untuk berusaha lebih keras dalam menyelesaikannya. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika isu strategis nasional belum terselesaikan dan muncul isu strategis baru yang tentu saja perlu adanya *treatment* khusus dalam mengantisipasinya.

Selain memerhatikan isu skala internasional, hal-hal lain yang menjadi pertimbangan perumusan isu-isu strategis adalah isu/kebijakan nasional, antara lain: Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan tahapan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sehingga menjadi tahapan pembangunan pondasi dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional. Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPN yaitu NEGARA NUSANTARA BERDAULAT, MAJU, DAN BERKELANJUTAN maka untuk memajukan Negara Indonesia Emas ke depan ditetapkan Sasaran indikator utama visi Indonesia Emas 2045 di tahun 2025-2029 maka tema RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

"Penguatan Fondasi Transformasi"

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) sasaran Visi sebagai berikut:

1. Pendapatan Perkapita setara negara maju
2. Kemiskinan 0% dan Ketimpangan berkurang

3. Kepemimpinan dan Pengaruh di dunia Internasioanl Meningkat
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat
5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission

Dalam mewujudkan Penguatan tema fondasi Trasnsformasi tersebut arah kebijakannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Transformasi Sosial
   Pemenuhan pelayanan dasar Kesehatan, Pendidikan dan perlindungan sosial.
2. Transformasi Ekonomi
   Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja
3. Transformasi Tata Kelola
   Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif,digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil
4. Supermasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   Memperkuat supermasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar Kawasan dan ketangguhan diplomasi
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   Memperkuatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebgai landasan dan modal dasar pembangunan

Kemudian, kelima arahan tersebut diimplementasikan dalam agenda pembangunan, yakni:

1. Transformasi Sosial agenda pembangunannya adalah Kesehatan untuk semua, Pendidikan yang berkualitas yang merata, perlindungan sosial yang adaptif
2. Transformasi Ekonomi agenda pembangunannya adalah Industri, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Ekonomi biru
3. Transformasi Tata Kelola agenda Pembangunan sebagai berikut : Integritas Partai Politik, Sistem Penggajian Tunggal, Kualitas Regulasi, Sistem Anti Korupsi dan Akuntabilitas Pembangunan, Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik, Manajement Talenta, Integrasi Proses Bisnis

4. Supermasi Hukum, Stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan agenda Pembangunan Stabilitas Makro, Politik Luar Negeri, Keamanan, Pertahanan, Hukum, dana Demokrasi
5. Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi dengan Agenda Pembangunan Pembangunan Agama,Budaya, Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan msyarakat inklusif, Kualitas Lingkungan Hidup dan keanekaragaman hayati, Energi, dan pangan

Pembangunan wilayah Sumatera tahun 2025-2029 diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi, dan sekaligus memantapkan hilirisasi pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. Prioritas pembangunan Wilayah Sumatera tahun 2025-2029 akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

Pada pengembangan sektor unggulan, proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029 di Sumatera Utara yakni pengembangan komoditas unggulan karet, kopi, kelapa sawit, tebu, dan perikanan tangkap dan budidaya. Sedangkan di Tapanuli Selatan sendiri, proyek prioritas nasional yang dilaksanakan seperti Pembangunan Desa Terpadu dengan rincian proyek Desa Digital, Penetapan Batas Desa, Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat, BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa, Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional, Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa, Pendampingan pada 74.957 desa, Daerah yang Desanya tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa, Pengendalian Penggunaan Dana Desa, dan Usaha Ekonomi Desa yang Dikembangkan yang Terintegrasi dengan BUMDes.

b. Kebijakan Strategis Nasional

Beberapa permasalahan pembangunan nasional terus bergulir dengan dampak yang cukup signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan warga Negara. Oleh karena itu, lembaga legislatif dibarengi dengan lembaga eksekutif merumuskan berbagai kebijakan strategis nasional dengan menyelesaikan berbagai permasalahan dan

mengantisipasi dampak negatif pada pelaksanaan pembangunan hingga akhir periode. Implementasi kebijakan tersebut memiliki efek domino yang cukup signifikan pada daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk Tapanuli Selatan. Sehingga dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah, perlu melihat beberapa kebijakan nasional yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi capaian kinerja pembangunan daerah.

1. Undang-Undang Cipta Kerja

   Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disingkat UU Ciptaker atau UU CK) adalah undang-undang di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah.

   Namun dalam rancangannya, Undang-Undang Cipta Kerja menuai kritik karena dikhawatirkan akan merugikan hak-hak pekerja serta meningkatkan deforestasi di Indonesia dengan mengurangi perlindungan lingkungan. Meskipun begitu, UU tersebut telah disahkan dan diundangkan sehingga harus dilaksanakan oleh seluruh elemen. Beberapa poin yang akan berdampak merugikan, khususnya yang mempengaruhi kinerja ketenagakerjaan dan perekonomian daerah, sebagai berikut:

   - Substansi UU Cipta Kerja mengubah waktu kerja yaitu dihilangkannya ketentuan lima hari kerja dan dua hari istirahat mingguan. Di dalam UU Ciptaker pasal 79 ayat 1 b disebutkan bahwa waktu istirahat mingguan hanya 1 hari untuk 6 hari dalam seminggu.
   - Pada pasal 88 UU Ciptaker menghapus ketentuan rinci mengenai perhitungan upah yaitu tidak ada lagi ketentuan upah minimum.
   - Dalam UU Cipta Kerja, upah dihitung berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil (produktivitas) yang terdapat dalam pasal 88B. Selain itu, upah dibayarkan sesuai dengan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Hal ini tentu saja berpotensi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak bertanggungjawab.

- Ketentuan UU Cipta Kerja memang tidak menghilangkan pasal dalam UU No 13 tahun 2003 mengenai cuti haid dan cuti melahirkan. Akan tetapi, substansi tentang upah per jam menghilangkan esensi dari cuti haid dan cuti melahirkan karena jika pekerja perempuan menjalani cuti tersebut otomatis tidak dihitung bekerja.
- Sejumlah cuti seperti cuti panjang tidak lagi diatur oleh pemerintah, tetapi diatur oleh perusahaan dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan dengan Perjanjian Kerja Bersama.
- Perusahaan dapat memutus hubungan kerja (PHK) secara sepihak melalui Pasal 154A UU Ciptaker yaitu PHK dapat dilakukan dengan alasan perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan; efisiensi; tutup karena rugi, force majeur, menunda utang, dan pailit.
- Ketentuan dalam UU Ciptaker pasal 156 mengurangi jumlah pesangon jika pekerja di-PHK karena menghapus uang penggantian hak.

Sebagian tenaga kerja di Tapanuli Selatan memiliki status pekerjaan utama buruh/karyawan/pegawai sebanyak 27.427 jiwa atau 20,43 persen. UU Cipta Kerja yang telah ditetapkan ini tentu memiliki dampak pada tenaga kerja yang berstatus buruh/karyawan/pegawai tersebut sehingga perlu adanya campur tangan pemerintah, khususnya dalam hubungan industrial.

8.2.3. Isu Strategis Regional

8.2.3.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sumatera Utara Tahun 2025-2029

Didalam RPJMN 2025-2029 tema pembangunan Sumatera adalah "*Mata rantai Utama Bioindustri dan kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelanjutan*", RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025 – 2029 merupakan tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025 – 2045 yaitu dengan tema Pembangunan "*Pusat Pengembangan Bioindustri dan Pariwisata bertaraf Global, seta mandala keberagaman budaya yang harmonis*"

Dalam mewujudkan Penguatan tema tersebut arah kebijakannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Transformasi Sosial

   Penguatan pendidikan tinggi STEAM, khususnya untuk mendukung pengembangan bioindustri dan kepariwisataan (pilot project: Universitas Sumatra Utara), Peningkatan rumah sakit di Kota Gunungsitoli menjadi RS kelas B dan Percepatan penuntasan dan pencegahan stunting pada Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Padang Lawas, Kab. Mandailing Natal, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Nias Barat, Kab. Padang Lawas Utara, Kota Padangsidampuan, Kab. Dairi, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Nias Selatan, Kota Tanjung Balai, Kab. Labuhan Batu Selatan, Kab. Samosir, Kab. Nias, Kab. Karo, Kab. Toba, Kab. Labuhan Batu, Kab. Batu Bara, Kab. Serdang Bedagai.

2. Transformasi Ekonomi

   Pengembangan hilirisasi bioindustri pada Kota Medan, Kab. Deli Serdang, Kab. Serdang Bedagai; Percepatan transisi kendaraan hijau di WM Medan dan Kws. Perkotaan Sibolga guna mengurangi emisi GRK; Pengembangan transportasi perkotaan yang terpadu dan berkelanjutan di Wilayah Metropolitan Medan; Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif pada KPPN Nias Barat, KPPN Teluk Dalam, KPPN Medan Kota, KPPN Tangkahan–Leuser, KPPN Bukit Lawang, KPPN Toba, KPPN Sibolga; Pembangunan jalan tol Trans Sumatra; Pengembangan dan peningkatan kinerja layanan Pelabuhan Belawan dan Kuala Tanjung; Pengembangan Aerocity Kualanamu dan layanan penerbangan di daerah 3TP; Pembangunan pembangkit listrik terbarukan berbasis hidro (PLTA Asahan) dan panasbumi serta interkoneksi Sistem Transmisi Sumatera 500 kV; Penerapan meteran listrik pintar untuk layanan yang akurat dan optimal; Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata kelola; Peremajaan kota (urban renewal) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.

3. Transformasi Tata Kelola dengan arah Pembangunan sebagai berikut :

   Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah, menuju penyelenggaraan pemerintahan daerah di Sumatera Utara yang profesional dan bebas korupsi; dan Penguatan tata kelola dan kelembagaan perkotaan di Metropolitan Medan.

4. Supermasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

   Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal (Sumatera Utara menduduki peringkat pertama provinsi dengan jumlah kriminal pada tahun 2022, dengan jumlah kejahatan terlaporkan sebanyak 36.534 kejadian).

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

   Pengembangan pertanian di Kab. Serdang Bedagai, Kab. Mandailing Natal, Kab. Langkat, Kab. Deli Serdang, Kab. Labuhanbatu, Kab. Simalungun, Kab. Nias, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Nias Selatan, Kab. Samosir, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Batu Bara, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Toba, Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat dengan pengembangan irigasi di WS Barumun-Kualuh, Wampu-Besitang, Nias, Belawan-Ular- Padang; Akselerasi pemanfaatan sumber daya EBT sebagai sumber pembangkitan tenaga Listrik (potensi hydropower Sumatra Utara: 1.700 MW); dan Mitigasi bencana banjir secara struktural dan nonstruktural di Kota Medan

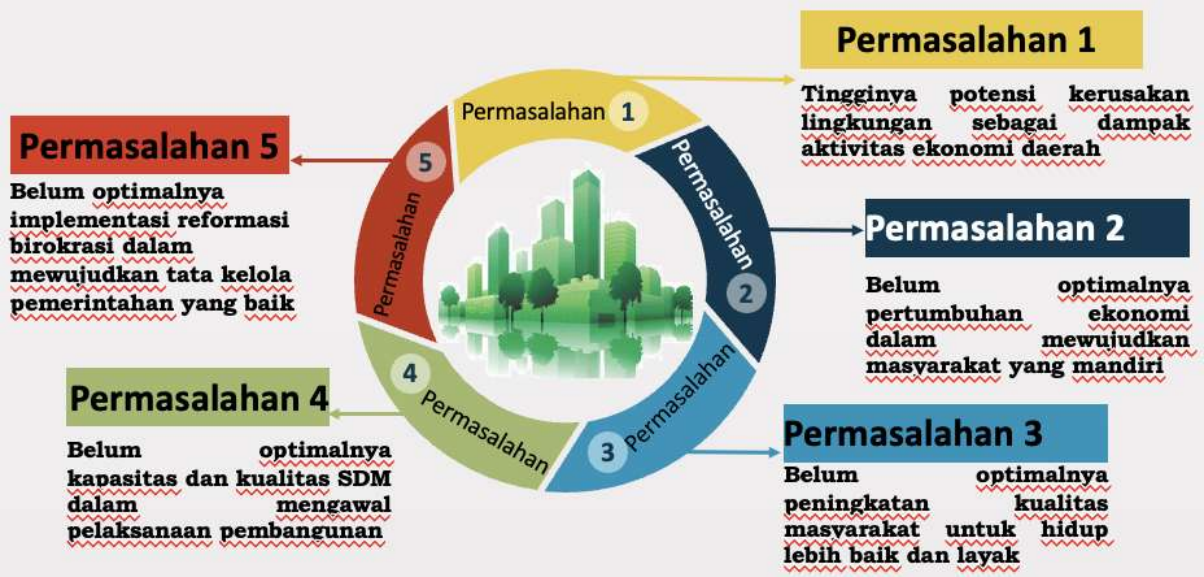
8.2.3.2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sekitar

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Padangsidimpuan

Dalam RPJPD Kota Padangsidimpuan pada tahap pertama (2025-2029) memuat haluan dan arah kebijakan yang ingin dicapai Kota Padangsidimpuan yang ditujukan untuk mewujudkan Padangsidimpuan sebagai Kota Pendidikan, Perdagangan, Jasa, dan Pariwisata yang Terdepan di Pantai Barat Sumatera Utara. Selanjutnya untuk melaksanakan tahapan RPJPD tersebut maka rumusan permasalahn dan isu strategis Rencana Ranwal Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padangsidimpuan Tahun 2025-2029, Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, diperoleh gambaran permasalahan pembangunan daerah Kota Padangsidimpuan disajikan pada gambar sebagai berikut.

Gambar III.1.

Permasalahan Pembangunan Kota Padangsidimpuan



Dengan Isu Strategis Kota Padangsidimpuan

Isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah. Isu strategis menjadi hal krusial karena pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada pembangunan masa mendatang. Isu strategis untuk Kota Padangsidimpuan yang akan ditangani dalam 20 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Bonus Demografi dalam Peningkatan Kualitas SDM

Kualitas sumber daya manusia di Kota Padangsidimpuan menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian mendalam. Sumber daya manusia menjadi penggerak utama dalam pembangunan suatu daerah. SDM berkualitas dan unggul tentunya akan membantu mendorong pembangunan suatu daerah menjadi lebih baik. Saat ini, Indonesia sedang berada di situasi dimana jumlah penduduk usia produktif melebihi jumlah penduduk yang terlalu muda atau terlalu tua sehingga Kota Padangsidimpuan harus mampu mengambil peluang tersebut dalam kaitan peningkatan sumber daya manusia yang akan menciptakan pembangunan ekonomi.

Dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, unggul, dan berkarakter terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, seperti evaluasi terhadap sektor pendidikan termasuk untuk pelatihan dan pengembangan keterampilan, evaluasi dalam bidang kesehatan juga perlu diperhatikan agar dapat menghasilkan kualitas generasi penerus yang berkompeten. Selain itu, pentingnya kerja sama antara pemerintah, institusi pendidikan, dan industri terlihat sebagai kunci keberhasilan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai dengan tuntutan pasar tenaga kerja. Pemahaman mendalam terhadap pemanfaatan teknologi dalam pengembangan sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa masyarakat Padangsidimpuan memiliki keterampilan yang relevan dalam era teknologi saat ini. Sinergi antara upaya-upaya ini diharapkan dapat menciptakan landasan kokoh untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan di Kota Padangsidimpuan. Pembangunan berkelanjutan terkait kualitas Sumber Daya Manusia juga tertuang dalam prioritas konsepsi SDGs dimana tujuan yang harus dicapai adalah memastikan kesamaan kualitas Pendidikan dan memprioritaskan peluang pembelajaran untuk semua pihak.

2. Akselerasi pengentasan kemiskinan struktural maupun kultural

Kemiskinan struktural biasanya terkait dengan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya ekonomi, akses terbatas terhadap peluang ekonomi, dan keterbatasan dalam struktur ekonomi. Akselerasi pengentasan kemiskinan, baik yang bersifat struktural maupun kultural, merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk mengurangi

dan menghilangkan kemiskinan secara cepat dan berkelanjutan dalam pembangunan daerah. Kemiskinan struktural dan kultural memiliki karakteristik dan penyebab yang berbeda, dan oleh karena itu, strategi akselerasi harus merangkul pendekatan yang komprehensif dan terarah. Penyebab kemiskinan struktural melibatkan faktor-faktor ekonomi seperti kurangnya lapangan kerja, minimnya infrastruktur ekonomi, dan distribusi yang tidak merata dari manfaat pembangunan ekonomi. Akselerasi pengentasan kemiskinan harus diarahkan pada solusi yang mengakomodasi karakteristik unik dari kemiskinan struktural dan kultural di suatu daerah. Pendekatan yang holistik dan berkelanjutan diperlukan untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan dengan dampak yang signifikan.

3. Transformasi Ekonomi Berkelanjutan

Upaya untuk memajukan sektor ekonomi di wilayah Kota Padangsidimpuan dengan langkah strategis melibatkan diversifikasi ekonomi, peningkatan produktivitas sektor agroindustri dengan pendekatan berkelanjutan, dan penguatan sektor pertanian yang berwawasan lingkungan. Pada hakikatnya, transformasi ekonomi berkelanjutan merupakan rangkaian proses perubahan ekonomi daerah untuk menciptakan pertumbuhan dalam jangka panjang. Proses transformasi ekonomi berkelanjutan ini merupakan proses dari bahan mentah kemudian diolah menjadi barang jadi yang nilai jualnya lebih tinggi dan mengedepankan keberlangsungan lingkungan sekitar (proses pengolahan industri hulu hingga ke hilir). Dengan adanya pertambahan lahan pertanian yang direncanakan dalam pembangunan kedepan, maka hal ini sangat mendukung dalam pembangunan ekonomi yang berorientasi pada ekonomi hijau. Dengan meningkatkan produk-produk pertanian yang nantinya diharapkan mampu diolah dengan skema industri berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah. Dengan ini, nantinya Kota Padangsidimpuan diharapkan mampu membangun ekonomi yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

4. Akselerasi penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur pembangunan daerah

Infrastruktur pembangunan menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat untuk beraktivitas dan meningkatkan distribusi ataupun mobilisasi barang dan orang dalam pembangunan daerah. Pembangunan infrastruktur akan menjadi stimulus dan

pertimbangan investor untuk membangun kerjasama dalam berinvestasi. Dalam pembangunan pemerataan infrastruktur diharapkan tetap memperhatikan kondisi lingkungan dan tata ruang dan wilayah, sehingga pembangunan infrastruktur ini dilaksanakan sesuai dengan arahan RTRW dan meminimalisir dampak negatif pada lingkungan sekitar. Kualitas infrastruktur akan berpengaruh pada standar kehidupan masyarakat, pendidikan, kesehatan, serta aktivitas ekonomi karena infrastruktur yang baik dan tangguh akan mampu melayani dan memfasilitasi masyarakat dalam meningkatkan ekonomi dan kualitas hidupnya. Dengan memahami hal ini, maka pembangunan infrastruktur haruslah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sehingga dengan pemenuhan infrastruktur yang layak dan sesuai, masyarakat akan merasa nyaman dengan tercipta berbagai kemudahan dalam beraktivitas. Infrastruktur yang kemungkinan nanti akan dibutuhkan tidak hanya infrastruktur dasar, namun juga infrastruktur yang mampu mendorong pembangunan perekonomian daerah. Dengan memahami bahwa Kota Padangsidimpuan memiliki sektor unggulan pada sektor perdagangan, jasa dan penyediaan akomodasi dan makan minum. Memahami hal tersebut, perlu adanya infrastruktur perkotaan yang mendukung dalam pembangunan ekonomi. Hal ini akan memberikan peluang perputaran ekonomi yang lebih cepat dan mampu meningkatkan daya tarik serta iklim investasi di Kota Padangsidimpuan. Dengan demikian pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata diharapkan mampu meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat Kota Padangsidimpuan.

5. Penguatan kinerja pemerintahan berbasis akuntabilitas, pelayanan publik dan inovasi berkelanjutan

Penguatan kinerja pemerintahan berbasis akuntabilitas, pelayanan publik, dan inovasi berkelanjutan adalah upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan dampak positif pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas dalam pemerintahan mencakup tanggung jawab dan kewajiban pemerintah untuk bertanggung jawab atas kebijakan, tindakan, dan pengelolaan sumber daya publik. Pemerintahan berbasis akuntabilitas menciptakan mekanisme untuk memastikan bahwa kebijakan dan keputusan diambil secara transparan, dan bahwa pemerintah dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan dan hasilnya. Ini melibatkan pembentukan sistem akuntabilitas, pengawasan yang kuat, dan pelaporan

yang jelas. Dalam pelaksanaan kinerja pemerintahan harus memiliki inovasi yang berkelanjutan. Inovasi berkelanjutan dalam pemerintahan melibatkan penggunaan ide-ide baru, teknologi, dan metode yang dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kreativitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Inovasi dapat melibatkan penerapan teknologi informasi, pengembangan model bisnis yang baru, dan penggunaan data untuk pengambilan keputusan. Pemerintahan yang mendorong budaya inovasi juga menciptakan lingkungan di mana pegawai didorong untuk berpikir kreatif dan mencari solusi baru. Dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, pelayanan publik yang efisien, dan budaya inovasi, pemerintah dapat meningkatkan kinerjanya dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan Kota Padangsidimpuan yang responsif, transparan, dan berdaya saing dalam menghadapi dinamika yang terus berubah dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan teknologi.

6. Stabilitas Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam konsepsi SDGs yang mana dapat dilakukan melalui pertanian berkelanjutan untuk pengentasan kelaparan guna mencapai ketahanan pangan dan peningkatan nutrisi. Berdasarkan data BPS Kota Padangsidimpuan terkait pertumbuhan PDRB ADHK pada sektor pertanian ditahun dalam kurun beberapa tahun ini mengalami pergerakan yang fluktuaktif, dan capaian ditahun 2022 mencapai 3,72 persen. Hal ini mengindikasikan Pemerintah daerah belum maksimal dalam mengelola sektor pertanian di Kota Padangsidimpuan. Hal ini berpotensi adanya kelangkaan atau ketergantungan bahan pangan dari daerah lain. Hal ini harus mulai menjadi "warning action" dalam pembangunan kedepan. Memahami kondisi tersebut, kedepan perlu adanya pengembangan pertanian yang dapat dilakukan bersama Pemerintah dan masyarakat. Pembangunan sektor pertanian dalam skala kecil/rumah tangga dapat menjadi salah satu cara untuk menjaga kestabilan pangan masyarakat. Kedepannya diharapkan Kota Padangsidimpuan memiliki kemampuan dalam ketahanan pangan untuk dapat menjamin seluruh kebutuhan pagan untuk masyarakat dapat terpenuhi dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman, dan juga halal. Dengan didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumber

daya domestik. Dengan ketahanan pangan sendiri akan mengubah wilayah tersebut menjadi mandiri dan dapat menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

7. Potensi Tergerusnya Kearifan Budaya Lokal

Dalam konteks globalisasi dan modernisasi yang terjadi saat ini sangat berpotensi untuk menggerus kearifan budaya lokal. Adanya pengaruh budaya luar di suatu wilayah dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Pengaruh budaya luar dapat berasal dari berbagai sumber seperti informasi yang tidak terbatas, interaksi dengan budaya luar, dan migrasi. Hal-hal tersebut dapat berdampak pada pergeseran nilai budaya dan karakter di Kota Padangsidimpuan. Karakter dan budaya merupakan hal yang penting dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat yang memiliki karakter budaya yang baik, maka akan berdampak pada kehidupan sosial sesama manusia dan akan mendorong kondisi masyarakat menjadi lebih mandiri dan maju yang mana hal tersebut juga akan berdampak pada pembangunan ekonomi di Kota Padangsidimpuan.

Pemeliharaan kearifan budaya lokal memerlukan upaya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional. Hal ini melibatkan upaya untuk membangkitkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kearifan budaya lokal, mendukung pelestarian warisan budaya, serta mendorong pendekatan pembangunan yang menghormati dan mempertahankan identitas budaya setempat. Melalui upaya ini, diharapkan dapat meminimalkan potensi tergerusnya kearifan budaya lokal dan menjaga keberagaman budaya di tengah arus globalisasi.

8.2.3.3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan

Salah satu poin penting perencanaan pembangunan Tapanuli Selatan adalah dirumuskannya Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017-2037 sebagai upaya pemerintah daerah untuk menata pembangunan dari sisi spasial. Tujuan penataan ruang Tapanuli Selatan adalah "Mewujudkan Kabupaten Tapanuli Selatan yang maju, sejahtera dan mandiri berbasis pertanian, sumberdaya alam, dan pariwisata yang berwawasan lingkungan". Untuk mencapai tujuan penataan ruang maka kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah:

1. Peningkatan produktivitas pertanian dan sumber daya alam yang berkelanjutan berbasis komoditas unggulan. Strategi dari kebijakan ini adalah:
   a. Menetapkan komoditas unggulan sesuai dengan potensi wilayah;
   b. Mengembangkan sistem hulu hilir pertanian;
   c. Meningkatkan produksi hortikultura melalui pendekatan agropolitan;
   d. memanfaatkan lahan budidaya yang tidak produktif;
   e. mengembangkan kawasan tanaman pangan dengan tetap mempertahankan
      kawasan tanaman pangan yang ada;
   f. mengintensifkan pengelolaan kawasan perkebunan dan peternakan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan berkelanjutan; dan
   g. meningkatkan usaha budidaya perikanan darat.
2. Pengembangan berbagai potensi sumber daya alam berbasis konservasi. Strategi dari kebijakan ini adalah:
   a. memanfaatkan berbagai potensi sumber daya alam dengan memperhatikan daya dukung lingkungan berkelanjutan;
   b. memantapkan fungsi kawasan hutan melalui sosialisasi tata batas hutan;
   c. meningkatkan konservasi kawasan lindung; dan
   d. mencegah dan mengendalikan dampak negatif kegiatan budidaya lainnya di kawasan lindung.
3. Perwujudan struktur ruang yang akomodatif terkait dengan kebutuhan masyarakat dan pengembangan wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Strategi dari kebijakan ini adalah:
   a. membangun kawasan pusat pemerintahan Kabupaten;
   b. menyediakan sarana dan prasarana mendukung;
   c. mewujudkan pemerataan pembangunan daerah
   d. mengembangkan potensi ekonomi daerah; dan
   e. menyediakan jalur evakuasi bencana.
4. Pengembangan Kawasan Strategis
   a. membuat rencana rinci kawasan strategi;
   b. membangun fasilitas pendukung kawasan strategis;
   c. menciptakan iklim investasi di kawasan strategis ekonomi; dan

d. pengawasan dan pengendalian kawasan strategis;

Kabupaten Tapanuli Selatan sendiri memiliki kawasan strategis provinsi. Dimana Provinsi Sumatera Utara telah merencanakan dan menetapkan kawasan strategis pertanian dataran tinggi di Kabupaten Tapanuli Selatan. Kawasan Lindung Tapanuli (Hutan Batang Toru); nilai aspek strategis Lingkungan Hidup, issue penangganan Menjaga keutuhan hutan lindung Batang Toru. Potensi/kendala merupakan hulu sungai-sungai besar ke kota utama, meningkatkan fungsi hutan Batang Toru menjadi hutan lindung. Kawasan strategis ini yang ditetapkan berdasarkan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan agropolitan Dataran Tinggi nilai aspek strategis ekonomi, issue penangganan Daerah berpotensi untuk dikembangkan dengan sinergitas antar daerah Di beberapa segmen kawasan ada limitasi fisik untuk pengembangan, potensi/kendala terdapat potensi agroindustri. Sedangkan kawasan strategi Kabupaten Tapanuli Selatan terdapat dua jenis yang dijabarkan sebagai berikut:

a. Kawasan Strategis dari Sudut Pandang Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Penetapan kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut:

1) Kawasan Lindung Sempadan Danau Isis

Kawasan ini merupakan area danau, sempadan danau, kawasan lindung dan lahan di sekitar danau. Kawasan strategis Danau Siais diarahkan untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata terpadu mengingat potensi yang ada, dapat dikatakan hampir sama dengan potensi yang dimiliki Danau Toba di Kabupaten Toba Samosir-Provinsi Sumatera Utara.

2) Kawasan Hutan Lindung Batang Toru

Kawasan hutan lindung di Kecamatan Batang Toru saat ini telah ditetapkan sebagai salah satu kawasan lindung yang memiliki nilai kepentingan yang sangat tinggi bukan hanya bagi pemerintah kabupaten, tetapi juga bagi pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 579 Tahun 2014 tentang Kawasan Hutan Sumatera Utara. Banyaknya kegiatan konversi lahan menjadi kegiatan perkebunan kelapa sawit, sedemikian

rupa sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan dan perlindungan terhadap ekosistem yang ada di Hutan Lindung Batang Toru melalui penetapan kawasan strategis ini.

b. Kawasan Strategis Ekonomi

Kawasan Strategis Ekonomi di Kabupaten Tapanuli Selatan meliputi:

1) Kawasan Wisata Danau Isis

Pengembangan paket wisata Danau Siais diharapkan mampu menjadi magnet kegiatan pariwisata yang unggul di Kabupaten Tapanuli Selatan dan mampu memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi kas daerah. Pengembangan kegiatan pariwisata ini juga diproyeksikan dapat menjadi pusat pertumbuhan kegiatan baru bagi masyarakat sekitar untuk memasarkan hasil produksi lokal sehingga kegiatan ekonomi mikro tumbuh dengan baik dan progresif.

2) Kawasan Strategis Perkotaan Batang Toru, Sipirok, dan Batang Angkola

Kawasan strategis Batang Toru di Kecamatan Batang Toru merupakan kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan perkotaan. Hal ini didasarkan pada potensinya sebagai pusat pertumbuhan Industri.

Pengembangan Kawasan Perkotaan Batang Toru dilakukan juga untuk mengurangi tekanan terhadap perluasan pengembangan Kecamatan Sipirok sebagai ibukota kabupaten yang memiliki potensi menjadi kawasan agropolitan. Pengembangan pusat pertumbuhan industri ini dilakukan dengan memperhatikan kawasan konservasi hutan.

Pengembangan kawasan perkotaan baru di Kecamatan Batang Angkola tumbuh sebagai akibat arah pergerakan dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Munculnya beberapa fasilitas skala kabupaten dan aksesibilitas yang mendukung memunculkan magnet aktivitas baru bagi masyarakat. Diharapkan dengan tumbuhnya kawasan perkotaan baru di Kecamatan Batang Angkola ini dapat memecah padatnya aktivitas di Kecamatan Batang Toru yang juga merupakan kawasan lindung serta kawasan perkotaan di Kecamatan Sipirok yang juga merupakan area pengembangan Agropolitan di dataran tinggi.

3) Kawasan Strategis Agropolitan Sitinjak

Kawasan Agropolitan Sitinjak di Kecamatan Angkola Barat merupakan kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan agropolitan dengan basis ekonomi komoditi tanaman salak, durian dan buah-buahan lainnya, namun cakupan kawasan ini meliputi Kecamatan Marancar dan sebagian Angkola Timur.

4) Kawasan Strategis Agropolitan Sipirok

Kawasan Agropolitan Sipirok di Kecamatan Sipirok merupakan kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan agropolitan dengan basis ekonomi sayuran dan buah-buahan, komoditi pertanian lahan basah dan pariwisata.

5) Kawasan Stategis Agromarine (Minapolitan) Muara Upu

Kawasan ini sangat potensial dikembangkan menjadi tujuan wisata. Pantai ini merupakan satu-satunya wilayah laut yang dimiliki Kabupaten Tapanuli Selatan sepanjang ± 18,38 km, yang terletak di desa Muara Upu, Kecamatan Muara Batang Toru. Selain untuk pengembangan pariwisata di Muara Upu sedang berkembang pembukaan perkebunan.

6) Kawasan Strategis Agropolitan Pintu Padang

Kawasan Agropolitan Pintu Padang di Kecamatan Batang Angkola merupakan kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan agropolitan dengan basis ekonomi komoditi pertanian lahan basah.

7) Kawasan Strategis Budidaya Perikanan

Kawasan Strategis Budidaya Perikanan di Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Desa Si bulele memiliki potensi yang besar dijadikan sebagai kampung budidaya ikan di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dilihat dari potensi wilayah yang cukup bagus dalam perairan, dan sumber daya manusia yang mengelola perikanan di desa tersebut.

8.2.4. Isu Strategis Tapanuli Selatan

Perumusan isu strategis Kabupaten Tapanuli Selatan pada RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan periode 2025-2029 merupakan perencanaan pembangunan daerah periode pembangunan 2025-2029, dapat diselaraskan dengan arah kebijakan tahap I RPJPD Tapanuli Selatan yang telah diinventarisasi permasalahan pembangunannya. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan pembangunan dan tantangan pembangunan sebagaimana dijabarkan pada isu internasional, isu nasional, isu regional, maupun telaahan RTRW Tapanuli Selatan dapat dilihat pada penjabaran isu strategis pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut:

a. Peningkatan Kesehatan Untuk Semua Masyarakat Tapanuli Selatan termasuk dalam peningkatan Penanganan Stunting

Sebagai daerah yang memiliki geografis cukup sulit, Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki kendala dalam mengakses seluruh wilayah sehingga menyebabkan permasalahan bagi pelayanan publik yang seharusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Tak terkecuali pelayanan kesehatan, dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat perlu adanya pelayanan kesehatan yang berkualitas secara merata di seluruh wilayah Tapanuli Selatan tanpa terkecuali. Namun dalam kenyataannya, saat ini aksesibilitas seluruh masyarakat menuju fasilitas kesehatan cukup terbatas, bahkan meskipun penyediaan puskesmas dan puskesmas pembantu sudah tersebar, namun kualitas fasilitas kesehatan beberapa wilayah juga terbatas. Oleh karena itu, perlu adanya strategi khusus dalam penanganan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah terpencil/terdalam demi terwujudnya derajat kesehatan masyarakat Tapanuli Selatan yang lebih baik.

Konsep hidup sehat sampai saat ini masih relevan untuk diterapkan. Kondisi sehat secara holistik bukan saja kondisi sehat secara fisik melainkan juga spiritual dan sosial dalam bermasyarakat. Untuk menciptakan kondisi sehat seperti ini diperlukan suatu keharmonisan dalam menjaga kesehatan tubuh dimana ada empat faktor utama yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Keempat faktor tersebut merupakan faktor determinan timbulnya masalah kesehatan. Keempat faktor tersebut terdiri dari faktor perilaku/gaya hidup (life style), faktor lingkungan

(sosial, ekonomi, politik, budaya), faktor pelayanan kesehatan (jenis cakupan dan kualitasnya) dan faktor genetik (keturunan/heriditer/penduduk). Keempat faktor tersebut saling berinteraksi yang mempengaruhi kesehatan perorangan dan derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan ditentukan oleh 40% faktor lingkungan, 30% faktor perilaku, 20% faktor pelayanan kesehatan, dan 10% faktor genetika (keturunan). Dengan kata lain, faktor lingkungan yang dalam hal ini seperti menjaga kebersihan lingkungan dan sanitasi harus baik, menjadi faktor penentu tertinggi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Namun yang terjadi di masyarakat saat ini, dalam meningkatkan derajat kesehatan justru lebih tinggi pada pelayanan kesehatan yang artinya banyak masyarakat yang dilakukan pengobatan atau kuratif di fasilitas kesehatan tapi kebersihan lingkungan kurang diperhatikan. Di zaman yang semakin maju seperti sekarang ini maka cara pandang kita terhadap kesehatan juga mengalami perubahan. Apabila dahulu paradigma sakit yakni kesehatan hanya dipandang sebagai upaya menyembuhkan orang yang sakit dimana terjalin hubungan dokter dengan pasien (dokter dan pasien), namun sekarang konsep yang dipakai adalah paradigma sehat, dimana upaya kesehatan dipandang sebagai suatu tindakan untuk menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan individu ataupun masyarakat. "Berubahnya paradigma masyarakat akan kesehatan, juga akan merubah pemeran dalam pencapaian kesehatan masyarakat. Perubahan paradigma dapat menjadikan masyarakat sebagai pemeran utama dalam pencapaian derajat kesehatan. Dengan peruahan paradigma sakit menjadi paradigma sehat ini dapat membuat masyarakat menjadi mandiri dalam mengusahakan dan menjalankan upaya kesehatannya.

Sebagaimana yang kita ketahui, peran keluarga merupakan hal yang perlu dioptimalkan dalam membentuk generasi yang berkualitas dan berkarakter. Saat ini salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian dalam membentuk generasi yang berkualitas adalah adanya resiko stunting. Mengingat sangat diperlukannya intervensi pemerintah untuk menghindarkan generasi yang akan datang dari kondisi stunting, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memberikan amanat melalui Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan

Stunting. Berdasarkan Perpres tersebut, BKKBN ditugaskan sebagai koordinator pelaksanan percepatan penurunan stunting di lapangan bekerja sama dengan Kepala Daerah yang ada di Indonesia termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan, Bupati Tapanuli Selatan dalam berbagai kesempatan memberikan penegasan bahwa peran keluarga harus dioptimalkan sebagai entitas utama dalam pencegahan stunting. Keluarga perlu memperhatikan periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sangat penting dan menjadi prioritas utama, dimulai dari 270 hari masa kehamilan hingga 730 hari setelah lahir. Hal ini membuat peran keluarga harus dioptimalkan sebagai pelopor awal dalam pencegahan stunting. Untuk mengoptimalkan peran keluarga, salah satunya dilakukan proses intervensi dalam bentuk pendampingan petugas BKKBN yang bersinergi Pemda, Kader PKK maupun bidan, yang disebut sebagai pendamping keluarga. Diharapkan dengan adanya pendampingan keluarga ini, upaya untuk melakukan Percepatan Penurunan Stunting dapat terlaksana dengan baik. Oleh sebab itulah maka Pusdiklat Kependudukan dan KB membangun perangkat pembelajaran ini sebagai acuan pengelolaan pelatihan untuk menyelenggarakan Training of Trainers (TOT) Pelatihan Teknis Pendampingan Keluarga dalam Percepatan Penurunan Stunting Fasilitator Tingkat Provinsi dan Kabupaten. Stunting telah ditetapkan 5 pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting, dan untuk memperkuat pelaksanaannya mengamanatkan disusunnya rencana aksi nasional, mekanisme tata kerja serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang akan menjadi panduan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten dan kota, Pemerintah Desa, serta Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan stunting sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Ranwal (RPJMN) tahun 2025-2029.

b. Pendidikan yang berkualitas dan Merata serta Peningkatan Derajat dan Kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia Tapanuli Selatan**.**

Pendidikan merupakan kunci utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak pembangunan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan pendidikan menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat maupun daerah dalam memeratakan seluruh layanan pendidikan kepada masyarakat yang

tinggal di suatu wilayah, dalam hal ini Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebagai wilayah yang memiliki geografis yang sulit, pemerataan layanan pendidikan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat berdaya saing sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Masih rendahnya capaian pendidikan masyarakat Tapanuli Selatan, khususnya angkatan kerja, menjadikan pemerataan layanan pendidikan prioritas bagi stakeholder beserta perangkat daerah penunjangnya. Dalam menyelesaikan permasalahan ini, perlu adanya koordinasi dan inovasi dalam perwujudan pemerataan layanan pendidikan ini, khususnya penggunaan teknologi infomasi yang mempermudah setiap aktivitas pembangunan selama ini.

Pembangunan responsif gender di Kabupaten Tapanuli Selatan masih diarahkan pada pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan merupakan agenda pembangunan yang penting, khususnya di Tapanuli Selatan yang masih terikat pada permasalahan *culture mindset*. Pemberdayaan perempuan bertujuan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam semua aspek kehidupan, dan meningkatkan peran perempuan sebagai pengambil keputusan. Di Kabupaten Tapanuli Selatan, permasalahan kesetaraan gender merupakan dampak dari *culture mindset* setempat dimana beberapa budaya bagi perempuan yang menyebabkan sulit berkembang. Diharapkan ke depannya, peran serta perempuan dalam pelaksanaan pembangunan dapat lebih ditingkatkan, khususnya dengan memberi kesempatan bagi perempuan Tapanuli Selatan untuk tampil mengekspresikan diri tanpa melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat.

c. Peningkatan Industri Daerah

Belum optimalnya pengembangan industri daerah yang berbasis potensi unggulan lokal, serta rendahnya nilai tambah dari komoditas unggulan Tapanuli Selatan, Komoditas seperti kopi, kakao, karet, nilam, dan andaliman masih dijual dalam bentuk mentah atau setengah jadi tanpa proses industri lanjutan di daerah dan Belum tersedia kawasan industri terpadu yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dan mengolah hasil pertanian dan perkebunan masyarakat.

d. Peningkatan Daya Saing Berbasis Potensi Unggulan

Dalam menggerakkan perekonomian daerah, potensi unggulan Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sektor pertanian dimana sektor tersebut memiliki dominasi terhadap struktur perekonomian daerah hingga mencapai 39,25 persen. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sangat vital dalam upaya pembangunan perekonomian daerah. Hal ini dikarenakan upaya pengembangan nilai tambah dengan memanfaatkan segala potensi unggulan sumber daya daerah dapat dilakukan dengan maksimal jika memiliki faktor produksi yang besar. Dalam melihat isu strategis ini, peran kebijakan pemerintah akan memberikan dampak signifikan sebagai upaya peningkatan perekonomian daerah melalui berbagai inovasi seperti penggunaan teknologi tepat guna maupun penerapan agroindustri atau agrobisnis.

Salah satu potensi sektor pertanian adalah subsektor perkebunan yang memiliki dominasi dalam pembentukan struktur ekonomi Tapanuli Selatan maupun memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi. Dalam kerangka pembangunan perekonomian berkelanjutan, salah satu fokus adalah penerapan program sawit berkelanjutan dengan melakukan perencanaan spasial. Tata guna lahan dalam implementasi program sawit berkelanjutan diharapkan akan mencapai keseimbangan dan keberlanjutan antara kepentingan masyarakat, komersial dan konservasi.

Program sawit berkelanjutan ini dilaksanakan dengan Rencana Aksi Kabupaten untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan Tapanuli Selatan. Rencana aksi ini dilakukan untuk perkebunan sawit masyarakat, yang masih belum sepenuhnya mengelola perkebunan sawit dengan standar ISPO. Diharapkan rencana aksi ini akan membangun perkebunan sawit yang menjadi kebanggaan masyarakat dan Pemerintah Tapanuli Selatan, yang memberi manfaat sosial-ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, dengan tetap menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan hidup, serta produktivitas dan kelestarian wilayah.

e. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan

Salah satu isu strategis penting dalam pembangunan daerah Tapanuli Selatan adalah **belum optimalnya peningkatan aktivitas ekonomi kerakyatan** yang berbasis

potensi lokal. Ekonomi kerakyatan, yang sebagian besar digerakkan oleh pelaku UMKM, koperasi, dan BUMDes, memiliki peran sentral dalam menopang kesejahteraan masyarakat. Namun, hingga saat ini, produktivitas dan daya saing usaha rakyat masih rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, seperti keterbatasan akses terhadap permodalan dan pembiayaan inklusif, rendahnya literasi manajerial dan digital pelaku usaha, serta belum berkembangnya industri pengolahan berbasis produk unggulan lokal.

Di sisi lain, kelembagaan ekonomi rakyat seperti koperasi dan BUMDes belum dimanfaatkan secara optimal sebagai motor penggerak kegiatan ekonomi masyarakat desa. Produk-produk lokal, seperti kopi, kakao, sereh wangi, nilam, dan kerajinan tradisional, umumnya masih dipasarkan dalam bentuk mentah dan belum melalui proses hilirisasi yang dapat meningkatkan nilai tambah. Akses pasar pun masih terbatas, baik dalam lingkup regional maupun digital, sehingga pelaku usaha kesulitan menjangkau konsumen yang lebih luas.

Dalam kerangka penyelesaiannya, Pemerintah Daerah perlu mendorong strategi pemberdayaan pelaku UMKM melalui pelatihan manajemen usaha, penguatan akses permodalan (seperti KUR dan dana bergulir koperasi), serta pengembangan ekosistem digital bagi usaha mikro. Revitalisasi koperasi sektor riil dan penguatan kapasitas kelembagaan BUMDes juga menjadi prioritas, agar dapat berperan sebagai pusat pengolahan dan distribusi produk lokal. Di samping itu, dibutuhkan pembangunan infrastruktur ekonomi kerakyatan seperti pasar desa, sentra produksi UMKM, dan gudang komunal.

Isu ini juga memiliki keterkaitan erat dengan dinamika lingkungan strategis. Secara global, terdapat tuntutan untuk memperkuat ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip Sustainable Development Goals (SDGs). Di tingkat nasional, arah pembangunan dalam RPJMN 2025–2029 menekankan pentingnya transformasi ekonomi kerakyatan melalui penguatan UMKM dan koperasi. Sementara di tingkat regional (Sumatera Utara), pengembangan ekonomi rakyat perlu diintegrasikan dengan program konektivitas kawasan, penguatan ketahanan pangan lokal, dan penciptaan ekosistem usaha yang ramah lingkungan.

Dengan pendekatan yang tepat, peningkatan ekonomi kerakyatan di Tapanuli Selatan dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi inklusif yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan.

f. Pengembangan Pariwisata di Tapanuli Selatan Berbasis Lingkungan

Sesuai dengan Rencana Induk Pariwisata Daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2019, potensi wilayah hutan yang luas bisa menjadi daya tarik wisatawan dengan dilaksakannya Pariwisata konservasi. Pengembangan kepariwisataan daerah tentu akan memberikan kontribusi dalam peningkatan perekonomian daerah. Sebagai salah satu *leading sektor* pembangunan, pariwisata di Tapanuli Selatan memiliki potensi yang menjanjikan dalam pergerakan pembangunan daerah. Upaya untuk tetap menjaga ketahanan kualitas lingkungan hidup juga menjadi salah satu titik sentral dalam upaya pengembangan pariwisata daerah. Oleh karena itu, kebijakan strategis pengelolaan pariwisata daerah perlu disinkronisasikan dengan berbagai dokumen kebijakan pembangunan beserta stakeholder yang mengampunya.

Di Tapanuli Selatan terdapat keanekaragaman flora fauna yang menjadi daya tarik kepariwisataan daerah, salah satunya yang langka adalah orang utan Tapanuli Selatan yang hampir punah. Selain itu, di Pantai Muara Oku yang membentang sepanjang 18,36 km merupakan tempat berkembangbiaknya penyu antara lain penyu belimbing, penyu sisik dan penyu hijau. Wisata pelepasan penyu ke laut juga dapat menjadi potensi wisata ke depannya sehingga mampu menarik wisatawan baik dalam maupun luar negeri untuk mengunjunginya.

g. Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan

Salah satu sebab terjadinya kemiskinan adalah kurangnya kemampuan dan kemauan yang dimiliki seseorang untuk memasuki profesi kerja yang berpenghasilan tinggi. Salah satu cara memutus rantai kemiskinan adalah dengan memfasilitasi pendidikan, pelatihan dan peningkatan kesadaran akan berwirausaha dan pemberdayaan, terutama pada masyarakat miskin. Dengan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada sektor ekonomi diharapkan cara pandang dan cara berfikir masyarakat akan menjadi lebih maju dan berkembang.

Sebagian besar penduduk Tapanuli Selatan memiliki mata pencaharian di sektor pertanian hingga mencapai 60,45 persen. Hal ini menjadi salah satu pemicu masih terjadinya fluktuasi angka kemiskinan karena penduduk yang bekerja di sektor pertanian masih memiliki kerentanan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, salah satu sasaran program pengentasan kemiskinan dapat difokuskan pada masyarakat petani sehingga mampu mendongkrak pendapatan masyarakat.

Rendahnya kualitas Angkatan Kerja di Kabupaten Tapanuli Selatan terlihat dari jenjang pendidikan masyarakat yang masuk pada kategori Angkatan Kerja dimana sebanyak 34,17 persen angkatan kerja hanya memiliki pendidikan SD atau bahkan tidak bersekolah. Hal ini tentu saja menjadi perhatian bagi pemerintah, khususnya perangkat daerah terkait untuk lebih memfokuskan berbagai kebijakan pembangunannya dalam kerangka meningkatkan kualitas masyarakat baik dari segi keterampilan teknis maupun non teknis. Karena selain dikarenakan pendidikan formal yang diduduki, kualitas tenaga kerja juga dipengaruhi oleh pelatihan yang pernah diikuti serta pengalaman kerja yang dimiliki.

Imbas dari rendahnya kualitas tenaga kerja tersebut tentu saja adalah rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dikarenakan minimnya pendapatan yang masuk ke dalam rumah tangga tersebut. Secara umum, rendahnya kualitas tenaga kerja akan berbanding lurus dengan penghasilan yang diterima sehingga pengeluaran konsumsi rumah tangga terbatas pada penghasilan yang telah didapatkan. Selain itu, lapangan usaha untuk tenaga kerja yang minim keterampilan rata-rata tidak memiliki potensi untuk mengembangkan tenaga kerjanya seperti pertanian maupun buruh/karyawan level menengah ke bawah. Oleh karena itu, diharapkan dengan peningkatan keterampilan dan kemandirian tenaga kerja, akan memberikan andil dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan menyeluruh.

Kemandirian desa merupakan kemampuan yang dimiliki pemerintah desa dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan melalui potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemandirian desa dilaksanakan melalui pembangunan desa yang sudah direncanakan cukup lama sehingga saat ini bergulir program dana desa untuk peningkatan kemampuan desa. Pada dasarnya, membangun desa dalam konteks UU No 6 Tahun 2014 setidaknya mencakup upaya-upaya untuk

mengembangkan keberdayaan dan pembangunan masyarakat desa di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan.

e. Implementasi Reformasi Birokrasi Pada Setiap Aspek Pembangunan termasuk berbasi digital

Prioritas utama Kabupaten Tapanuli Selatan dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan meliputi kapabilitas, integritas, akuntabilitas, ketaatan pada hukum, kredibilitas dan transparansi. Langkah utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas di Kabupaten Tapanuli Selatan adalah melalui penciptaan struktur pemerintah yang efisien, peningkatan kapasitas aparatur dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih baik dengan memegang komitmen dalam melaksanakan reformasi birokrasi di setiap jenjang dan struktur organisasi pemerintah daerah.

Fokus reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan melalui peningkatan pelayanan publik dengan penguatan sistem dan akses pelayanan berbasis teknologi informasi yang terpadu yang memungkinkan penyediaan pelayanan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, inklusif dan berkualitas. Selain itu, pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perbaikan manajemen (struktur) pemerintah daerah secara efektif dan efisien menjadi dukungan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari sisi pelayanan publik, saat ini teknologi informasi sudah sangat memberikan kemudahan bagi setiap masyarakat dalam meningkatkan kapasitas dirinya. Hal tersebut juga seharusnya mampu ditangkap oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai pelayanan masyarakat maupun dalam menjalankan kinerja masing-masing bidang urusan pembangunan, khususnya pelayanan publik. Peningkatan teknologi informasi dalam pelayanan publik akan sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan layanan yang maksimal. Namun perlu juga dilakukan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan teknologi informasi tersebut sehingga tidak terkesan memperumit jalur pelayanan publik.

Beberapa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi akan menjadikan kemudahan dalam pelaksanaan koordinasi bagi perangkat daerah; pemberian pendidikan dan pelatihan bagi pegawai pemerintah di daerah yang sulit dijangkau

atau membutuhkan biaya besar; meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah; mempermudah berbagai pelayanan masyarakat seperti kependudukan dan catatan sipil, kesehatan, penanaman modal, dan sebagainya. Diharapkan berbagai inovasi melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara berkualitas dan merata akan akan mampu memberikan dampak signifikan pada peningkatan dan optimalisasi capaian pembangunan di Tapanuli Selatan.

Pada prinsipnya, pembangunan daerah merupakan salah satu upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kemandirian daerah disini tidak hanya berlaku pada pelaksana pembangunan baik pemerintah, swasta maupun masyarakat, akan tetapi kemandirian juga diharapkan terealisasi dalam keuangan daerah baik dari segi pengelolaan dan penyediaan anggaran.

h. Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas Wilayah

Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana serta infrastruktur pembangunan yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Dengan aset Infrastruktur yang baik akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Tapanuli Selatan merujuk pada penyediaan transportasi, kelistrikan, air bersih, perumahan layak huni, drainase, dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Peningkatan berbagai infrastruktur pembangunan daerah diharapkan akan berdampak langsung pada perekonomian daerah maupun kesejahteraan masyarakat, sehingga hal tesebut akan mewujudkan pemerataan pembangunan.

i. Penerapan SDG's Dalam Pencapaian Visi Daerah

Dalam upaya menindaklanjuti pelaksanaan *Millennium Development Goals* (MDGs), telah dikembangkan suatu konsepsi dalam konteks kerangka/agenda pembangunan, yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs). Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Hal ini dilakukan mengingat perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu deplation sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, *food and energy security*, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Kerangka Pembangunan Pasca 2015 menjadi salah satu isu yang dibahas di KTT Rio. Adapun 3 (tiga) pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu, pertama indikator yang melekat pembangunan manusia (*Human Development*), diantaranya pendidikan, kesehatan. Indikator kedua yang melekat pada lingkungan kecilnya (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, indikator ketiga melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs pasca MDGs 2015, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan, tetapi ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan, di antaranya segala sesuatu itu harus terukur, tidak terlepas dari prinsip *Environmental Sustainability*, *Economic Sustainability* dan *Social Sustainability*, serta juga ditentukan apakah ini difokuskan pada negara berkembang atau negara maju. Ketiga pilar tersebut memiliki peran penting dalam penerapan SDG's untuk perwujudan visi pembangunan Tapanuli Selatan. Dengan mewujudkan *green economy* dan berbagai upaya pembangunan berkelanjutan lainnya, diharapkan Tapanuli Selatan mampu mempertahankan kualitas lingkungan hidup tanpa mengurangi esensi dan capaian perekonomian daerah sebagai motor penggerak pembangunan daerah.

f. Tapanuli Selatan Sebagai Lumbung Energi Baru Terbarukan

Sebagai wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, Tapanuli Selatan berupaya untuk meningkatkan kualitas pemenuhan infrastruktur dasar kehidupan masyarakat, khususnya tenaga kelistrikan, melalui pembangunan 2 (dua) pembangkit listrik yaitu PLTA Batangtoru (proyek nasional) dan PLTPB atau pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi. Kedua proyek ini merupakan proyek energi baru terbarukan sehingga tidak akan meninggalkan kerusakan lingkungan hidup pada ekosistem Tapanuli Selatan. Tentu saja selain meningkatkan kapasitas dan pemerataan pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat, proyek energi ini juga diharapkan menjadikan Tapanuli Selatan Sebagai kawasan (EBT) Energi Baru Terbarukan karena jika pembangkit ini telah selesai dibangun, maka bukan hanya Tapanuli Selatan saja yang terpenuhi kebutuhan listriknya, namun seluruh Provinsi Sumatera Utara juga dapat mengakses tenaga listrik tersebut guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Kabupaten Tapanuli Selatan juga memiliki potensi besar sebagai lumbung energi baru terbarukan (EBT), melalui pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Siborpa. PLTA ini merupakan bagian dari pemanfaatan potensi sumber daya alam berbasis air yang melimpah di kawasan pegunungan Tapanuli Selatan, khususnya di wilayah Kecamatan Sipirok dan sekitarnya. PLTA Siborpa dirancang untuk menghasilkan energi listrik ramah lingkungan dengan kapasitas potensial mencapai energi listrik hingga ratusan megawatt.

j. Optimalnya Pengelolaa Fasilitas Permukiman Layak

belum optimalnya pengelolaan fasilitas pemukiman layak, terutama di wilayah pedesaan, kawasan kumuh, dan daerah rawan bencana. Kondisi ini ditandai dengan masih terbatasnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana pemukiman dasar, seperti air bersih, sanitasi, drainase, pengelolaan sampah, dan rumah layak huni. Permasalahan tersebut berdampak pada rendahnya kualitas hidup masyarakat,

meningkatnya risiko kesehatan lingkungan, serta ketimpangan antarwilayah dalam hal pelayanan permukiman.

Secara umum, rendahnya kapasitas kelembagaan pengelola perumahan dan kawasan permukiman di tingkat daerah, serta minimnya kolaborasi antarstakeholder (pemerintah, swasta, dan masyarakat), turut memperburuk efektivitas pengelolaan fasilitas pemukiman. Selain itu, ketersediaan lahan yang sesuai tata ruang, terbatasnya anggaran pembangunan perumahan rakyat, serta belum terintegrasinya data kebutuhan pemukiman menjadi tantangan tersendiri.

Untuk mengatasi isu ini, arah kebijakan yang perlu diambil mencakup peningkatan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas permukiman dasar yang ramah lingkungan, berbasis kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan daya dukung lingkungan. Pemerintah daerah perlu mendorong pengembangan kawasan permukiman berbasis perencanaan terpadu yang mengintegrasikan air bersih, sanitasi, drainase, serta pengelolaan persampahan dengan pola swakelola dan partisipatif. Kemitraan dengan sektor swasta dan pemanfaatan skema pembiayaan inovatif (misalnya KPBU atau program BSPS) juga menjadi solusi strategis.

Dalam konteks lingkungan strategis, isu ini juga berkaitan dengan agenda pembangunan berkelanjutan global (SDGs), khususnya tujuan ke-11: *kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan*. Secara nasional, penguatan pengelolaan pemukiman tercermin dalam program prioritas RPJMN 2025–2029 melalui pengentasan kawasan kumuh dan peningkatan akses perumahan layak. Di tingkat regional, Tapanuli Selatan perlu menyesuaikan pengelolaan pemukiman dengan arah tata ruang provinsi dan strategi pengurangan risiko bencana. Dengan pendekatan kolaboratif dan berorientasi jangka panjang, pengelolaan fasilitas pemukiman layak akan menjadi pilar penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan wilayah yang berkelanjutan.

k. Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Menurut pasal 1 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya perluasan wewenang pemerintah daerah ini dapat menciptakan lokal accountability yaitu meningkatnya kemampuan daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat terutama pada penyediaan barang publik

Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu: a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. b) Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah. c) Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Salah satu konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah adalah kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah, "Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang", demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keuangan daerah memiliki lingkup yang terdiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik, daerah. Keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah, yakni pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatau daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut. Manajemen keuangan daerah pengelolaannya terdiri atas pengurusan umum dan pengurusan khusus. Pengurusan umum berkaitan dengan APBD, dan kepengurusan khusus berkaitan dengan barang-barang inventaris kekayaan daerah. Manajemen keuangan daerah juga dapat pula dilihat dari segi tata usaha atau administrasi keuangan daerah. Keuangan daerah mempunyai hak dan kewajiban. Hak-hak dari keuangan daerah yang bersumber dari penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahan milik daerah, dan lain-lain, ataupun hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain.

l. Isu agama dan Budaya

Peran agama dan budaya sangat penting dalam menjaga Keharmonisan dan kerukunan di masyarakat Tapanuli Selatan, perlu kiranya peran pemerintah dalam menjaga kerukunan antar umat beragama, menjaga kelestarian kearifan lokal termasuk budaya dari pengaruh luar, apalagi bersifat negative yang dapat merusak tatanan budaya dan agama masyarakat Tapanuli Selatan, sehingga pelu adanya interpensi dari pemerintah daerah, dengan mudahnya pengaruh luar masuk ke masyarakat akan mempengaruhi terhap sikap dan perilaku masyarakat itu sendiri bahkan dapat mempengarihu adat budaya serta pelaksanan agama masyarakat tersebut, sehingga perlu kirannya mempersiapkan masayarakt tapanuli Selatan yang Tangguh terhadap pengaruh luar yang tidak baik. Kemajuan dan masa depan suatu daerah dapat dilihat dari kesiapn dan penguasaan masyarakat terhadap kemajuan IPTEK, namun perlu kiranya menciptakan masyarakat tapanuli Selatan yang bisa menguasai IPTEK dengan berlandaskan agama dan adat istiadat daerah.

m. Pemerataan Akses dan Kualitas Palayanan Dasar

Dalam meningkatkan strategi Pemerataan dan Kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat miskin, terpencil dan rentan, Dalam implementasi kegiatan ini, masing-masing unit pelayanan lini depan dan desa tidak berdiri sendiri, akan pula dilakukan inisiatif untuk mengintervensi tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Hal ini merujuk pada dukungan dalam advokasi peraturan di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten, dukungan dalam proses perencanaan dan penganggaran, penelitian dan kajian, atau intervensi serupa lainnya yang memiliki dampak pada penyediaan pelayanan dasar, Strategi peningkatan dan perluasan pelayanan dasar dengan pendekatan lini depan merupakan kerjasama lintas sektoral.

g. Tingginya Potensi Kebencanaan Geologi

Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan wilayah yang masuk dalam kawasan lingkar api Indonesia, dimana intensitas bencana geologi sering terjadi. Intensitas gempa di Kabupaten Tapanuli Selatan cukup tinggi dengan frekuensi pada kisaran 12 kali di setiap bulan. Bencana Geologi adalah bencana yang terjadi dipermukaan bumi

atau disebabkan oleh gerakan atau aktifitas dari dasar bumi yang muncul ke permukaan. Pada kasus Tapanuli Selatan, bencana geologi yang sering dialami adalah gempa bumi dikarenakan terdapat patahan yang cukup rawan akan gempa bumi. Potensi kebencanaan ini perlu diperhitungkan dalam upaya meningkatkan ketahanan bencana daerah serta mewujudkan masyarakat tanggap bencana agar memiliki kesiapan dalam menghadapi apapun bencana yang terjadi.

h. Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Tapanuli Selatan

Dengan adanya berbagai perencanaan dalam pemanfaatan kawasan hutan yang cukup masif dalam pelaksanaan pembangunan Tapanuli Selatan ke depan, maka diperlukan beberapa perubahan kebijakan perencanaan pembangunan, salah satunya adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Tapanuli Selatan Tahun 2017-2037. Hal ini dilakukan juga terkait dengan pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Upaya perubahan ini tentu saja sebagai bagian dalam upaya optimalisasi capaian pembangunan dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan hidup agar tidak terjadi kerusakan dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian di kawasan hutan dan kawasan lainnya.

4.3. Potensi Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

1. Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Tapanuli Selatan memiliki potensi besar dalam peningkatan kualitas kesehatan ini dapat dilihat dari Tapsel memiliki banyak Puskesmas dan Pustu (Puskesmas Pembantu) di berbagai kecamatan yang menjangkau masyarakat hingga ke desa-desa, dan dapat dengan masyarakat melalui penguatan Posyandu aktif, pengembangan layanan di RSUD Sipirok, dan pemanfaatan pangan lokal bergizi. Upaya ini mendukung percepatan penurunan stunting dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

2. Pendidikan dan SDM Pertanian

Pengembangan SMK pertanian, beasiswa daerah, dan pembelajaran digital merupakan potensi unggulan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber

daya manusia, khususnya di sektor pertanian. Hal ini sejalan dengan transformasi pendidikan vokasi berbasis kebutuhan daerah.

3. Hilirisasi Komoditas Unggulan

Tapanuli Selatan memiliki komoditas strategis seperti kopi, kakao, karet, sawit, dan padi yang sangat potensial untuk hilirisasi. Pengembangan industri pengolahan komoditas ini dapat meningkatkan nilai tambah produk lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

4. Energi dan Kawasan Ekonomi

Usulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tapsel dan potensi panas bumi menjadi kekuatan strategis daerah dalam menarik investasi dan mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan. Ini juga menjadi langkah konkret dalam pengembangan ekonomi hijau.

5. Ekonomi Kreatif dan UMKM

Tapanuli Selatan memiliki potensi pengembangan UMKM melalui koperasi Merah Putih, kerajinan batik khas Tapsel, dan komoditas unggulan seperti salak. Ekonomi kreatif ini dapat menjadi pengungkit kesejahteraan masyarakat secara inklusif.

6. Pariwisata Alam dan Budaya

Danau Siais, TWA Sibual-buali, dan budaya Mandailing merupakan potensi wisata alam dan budaya yang unik. Pengembangan destinasi ini dapat mendorong sektor pariwisata berkelanjutan dan memperkuat identitas lokal.

7. Vokasi dan Kewirausahaan

Balai Latihan Kerja (BLK), pendidikan vokasi, dan pelatihan kewirausahaan memberikan peluang besar untuk membentuk tenaga kerja terampil yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja regional dan nasional.

8. Tata Kelola Digital

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan integrasi melalui platform SIMRAL memperkuat transparansi dan efisiensi layanan publik. Ini menunjukkan komitmen daerah dalam transformasi digital pemerintahan.

9. Pelayanan Terpadu

Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan potensi strategis dalam memudahkan akses layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha, mendukung efisiensi birokrasi dan pelayanan prima, ini bias juga dengan pembuatan Mall Pelayanan Publik namun pada dasarnya pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sudah berada pada hamparan yang sama sehingga mudah dalam pelayanan.

10. Infrastruktur Strategis

Pembangunan jalan strategis dan jembatan Batang Toru merupakan potensi besar untuk memperluas konektivitas antar wilayah, mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan, dan mempercepat distribusi logistik.

11. Perencanaan Terpadu

Integrasi antara RTRW, RPJMD, dan KLHS menjadi kekuatan dalam merancang pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan dan tata ruang yang selaras, adaptif terhadap dinamika perubahan.

12. Energi Baru dan Terbarukan

Pemanfaatan potensi geothermal Sorik Marapi dan mikrohidro menjadi penggerak energi bersih daerah. Hal ini mendukung agenda nasional dalam pengembangan energi ramah lingkungan dan kemandirian energi.

13. Permukiman dan Air Bersih

Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), program Pamsimas, dan sanitasi merupakan potensi penting dalam mewujudkan permukiman yang layak huni dan sehat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

14. Pendapatan Asli Daerah

Pajak sektor mineral, pariwisata, serta optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memberikan ruang besar bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan dan mandiri.

15. Budaya dan Adat

Festival budaya serta pelestarian adat Dalihan Natolu merupakan kekuatan sosial budaya yang unik. Ini menjadi potensi besar dalam memperkuat identitas lokal sekaligus memperluas pariwisata budaya.

16. Pelayanan Dasar

Ketersediaan PDAM, puskesmas, dan sekolah terpadu mendukung akses layanan dasar yang inklusif dan merata, menjadi pondasi pembangunan kualitas hidup masyarakat.

17. Kebencanaan dan Lingkungan

Sistem peringatan dini dan survei geologi menjadi aspek penting dalam mitigasi bencana, terutama dalam menghadapi risiko kebencanaan geologi seperti gempa bumi dan letusan gunung.

18. Kawasan Industri dan Pariwisata Baru

Potensi didaerah Tapanuli Selatan berupa Pengembangan zona industri dan kawasan pariwisata baru sangan besar karena keadaan Geografis Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Yang berbukit-buki, kondisi alam yang masih asri membuka potensi penciptaan

lapangan kerja dan investasi baru yang mendukung pemerataan pembangunan di wilayah Tapanuli Selatan.

maka dapat diindikasikan bahwa isu strategis pada Rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Tapanuli Selatan periode pembangunan 2025-2029 dapat dilihat pada hubungan antara Potensi, permasalahan pembangunan dan isu strategis sebagai berikut.

Tabel. 3.4
Teknik menyimpulkan Isu Strategis Daerah pada Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029

Potensi Daerah	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
				Isu Lingkungan Global	Isu Lingkungan Nasional	Isu Lingkungan Regional	
1	2	3	4	5	6	7	8
Kesehatan dan Gizi Masyarakat berupa : Posyandu aktif, RSUD Sipirok, pangan lokal bergizi	Belum optimalnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	Belum optimalnya perwujudan kualitas derajat kesehatan masyarakat	Kesehatan masyarakat, air bersih, gizi	SDG 3, pandemic preparedness, dampak perubahan iklim pada kesehatan	Target stunting turun (RPJMN), perluasan JKN–KIS	Prevalensi stunting Tapsel, sanitasi pedesaan terbatas	Peningkatan kesehatan untuk semua (termasuk penanganan stunting)
Pendidikan dan SDM Pertanian : SMK pertanian, beasiswa daerah, pembelajaran digital		Belum optimalnya pelayanan pendidikan yang berkualitas	Pembangunan SDM, kesenjangan akses	SDG 4, kesenjangan digital	Kebijakan Merdeka Belajar, Kurikulum 2024	Rasio guru–murid tidak seimbang, blank-spot internet desa	Pendidikan berkualitas dan merata
Hilirisasi Komoditas Unggulan : Hilirisasi kopi, kakao & karet,Perkebunan Sawit Sawit, Pertanian Padi	Belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah yang inklusif	Belum optimalnya peningkatan nilai tambah produk komoditas unggulan daerah	Industri hijau, emisi rendah	Volatilitas harga komoditas, standar ESG	Downstreaming industri (RPJMN)	Rencana kawasan industri Tapsel, biaya logistik tinggi	Peningkatan industri daerah
Energi dan Kawasan Ekonomi : Usulan KEK Tapsel, potensi panas bumi		Belum optimalnya perkembangan penanaman modal daerah	Investasi berkelanjutan, kesesuaian tata ruang	Green finance, relokasi rantai pasok	Reformasi EoDB, Proyek Strategis Nasional	Percepatan OSS daerah, akses Bandara Silangit	Peningkatan daya saing berbasis potensi unggulan
Ekonomi Kreatif dan UMKM : Koperasi Merah Putih, kerajinan batik Tapsel, Salak		Belum optimalnya peningkatan aktivitas ekonomi kerakyatan	Ekonomi inklusif & efisiensi sumber daya	E-commerce & gig-economy	Digitalisasi UMKM, KUR	Klaster kerajinan lokal, revitalisasi pasar	Peningkatan ekonomi kerakyatan
Pariwisata Alam dan Budaya : Danau Siais, TWA Sibual-buali, budaya Mandailing		Belum optimalnya pertumbuhan sektor pariwisata daerah	Daya dukung, konservasi biodiversitas	Tren ekowisata, jejak karbon wisatawan	10 Bali Baru, pedoman pariwisata lestari	Keterhubungan ke Danau Siais, otorita Danau Toba	Pengembangan pariwisata berbasis lingkungan
Vokasi dan Kewirausahaan : BLK, pendidikan		Belum optimalnya peningkatan	Kesetaraan sosial	Automasi & gig-economy	Program Prakerja, peningkatan	Migrasi ke Medan, pengangguran	Optimalisasi penanggulangan kemiskinan

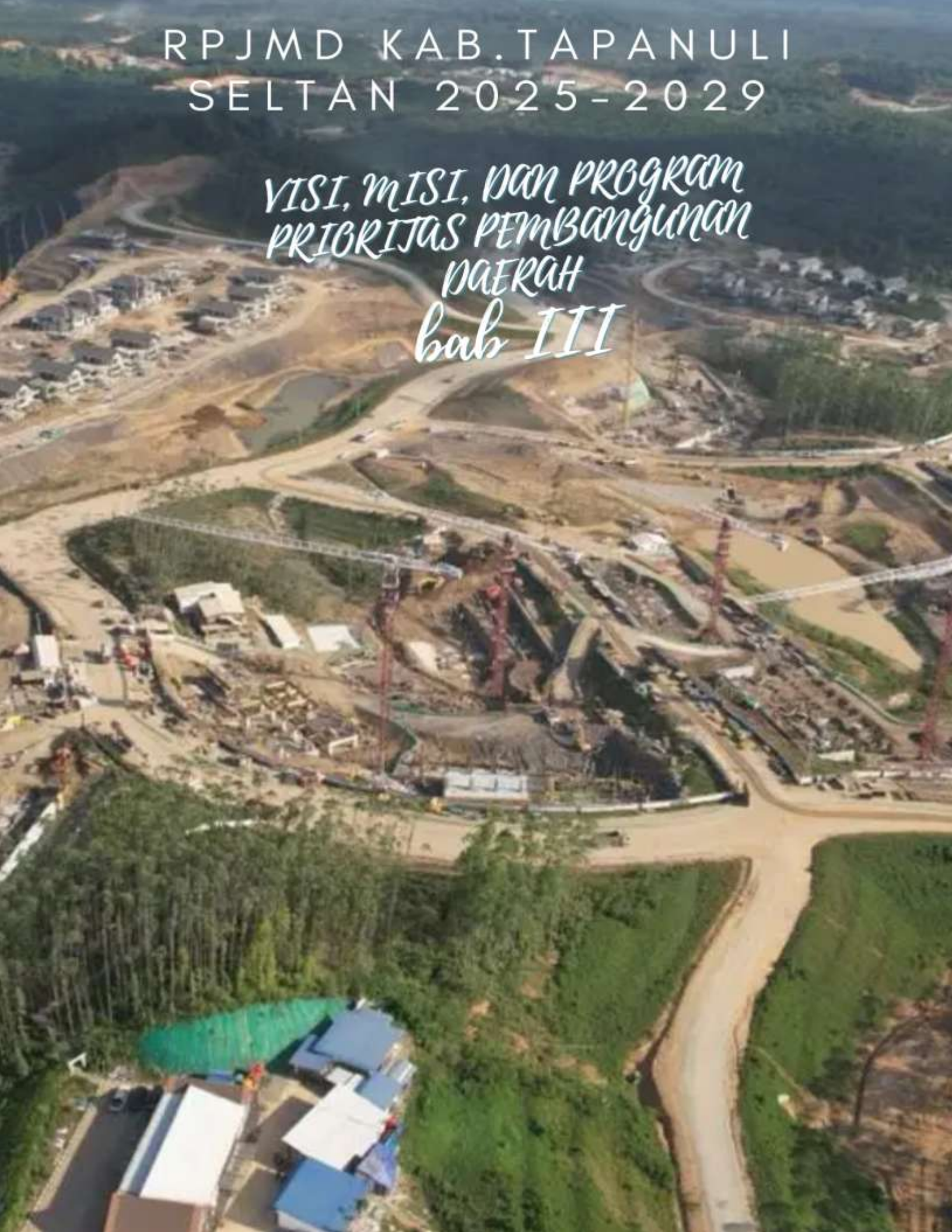
Potensi Daerah	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
				Isu Lingkungan Global	Isu Lingkungan Nasional	Isu Lingkungan Regional	
1	2	3	4	5	6	7	8
vokasi, kewirausahaan		kualitas dan daya saing tenaga kerja			TPAK	muda 9%	
Tata Kelola Digital : SPBE, e-Government (SIMRAL)	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik	Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Governance & transparansi	Open Government, keamanan siber	SAKIP, indeks RB, SPBE nasional	Peraturan tanda tangan digital daerah	Implementasi Reformasi Birokrasi Pada Setiap Aspek Pembangunan termasuk berbasis digital
Pelayanan Terpadu : Mal Pelayanan Publik (MPP)		Belum optimalnya pelayanan publiK	Kesetaraan akses layanan	Layanan publik berbasis warga	Program MPP nasional	IKM pelayanan 3,4 / 5 (2024)	
Infrastruktur Strategis : Jalan strategis, jembatan Batang Toru	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dan penataan ruang wilayah yang berkelanjutan serta yang menopang perekonomian daerah	Belum optimalnya peningkatan kualitas aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Penggunaan lahan, deforestasi	Infrastruktur berkelanjutan, Belt & Road	Trans-Sumatra, PSN jalan	Jalan lingkar Tapsel, pelebaran provinsi	Optimalisasi pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah
Perencanaan Terpadu : Integrasi RTRW-RPJMD-KLHS		Sinkronisasi pembangunan & visi	Ketahanan iklim & wilayah	Paris Agreement, SDG 13	RPJPN 2025-2045, NZE 2060	Revisi RTRW 2024, DAS Batang Toru	Penerapan SDG's Dalam Pencapaian Visi Daerah
Energi Baru dan Terbarukan : Geothermal Sorik Marapi, mikrohidro		Potensi energi terbarukan belum optimal	Energi bersih, emisi karbon	Transisi energi & RE100	RUEN: 23 % bauran (2025)	Ekspansi PLTP Sorik Marapi	Tapanuli Selatan Sebagai Lumbung Energi Baru Terbarukan
Permukiman dan Air Bersih : RTLH, Pamsimas, sanitasi		Belum optimalnya pengelolaan fasilitas pemukiman layak	Permukiman kumuh, sanitasi lingkungan	New Urban Agenda, penanganan slum	Program Kotaku, 100-0-100	12 desa kumuh <10 ha	Optimalnya pengelolaan fasilitas pemukiman layak
Pendapatan Asli Daerah : Pajak mineral, wisata, BUMD		Belum optimalnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Kemandirian fiskal	Transparansi pajak global	Digital tax, e-SPPT	E-retribusi daerah, levy batubara	Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Budaya dan Adat : Festival budaya, adat Dalihan Natolu	Terjadinya pergeseran karakter dan nilai-nilai budaya masyarakat	Tingginya potensi masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan karakteristik adat istiadat dan budaya daerah	Kohesi sosial & identitas	Homogenisasi budaya via internet	Revitalisasi budaya nusantara	Budaya Mandailing vs pengaruh luar	Isu agama dan Budaya
Pelayanan Dasar : PDAM, puskesmas, sekolah terpadu	Belum Optimalnya pemerataan akses dan kualitas Pelayanan Dasar	Belum Optimalnya akses dan kualitas Pelayanan Dasar	WASH, kesehatan dasar	SDG 6 air bersih, SDG 3 kesehatan	UHC, program 100-0-100	Cakupan PDAM 62 %	Pemerataan Akses dan Kualitas Palayanan Dasar
Kebencanaan dan Lingkungan : Sistem peringatan dini, survei geologi	Masih Tingginya kerentanan dan Potensi Bencana	Adanya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup	Risiko bencana & adaptasi	Kerangka Sendai, iklim ekstrem	RIPB BNPB 2020-2024	Sesar Barisan, longsor Batang Toru	Tingginya Potensi Kebencanaan Geologi
Kawasan Industri	Belum	Belum	Fragmentasi	Sustainability	Smart city,	Pembaharuan	Perubahan

Potensi Daerah	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
				Isu Lingkungan Global	Isu Lingkungan Nasional	Isu Lingkungan Regional	
1	2	3	4	5	6	7	8
dan Pariwisata Baru : Zona industri & pariwisata baru	optimalnya Perencanaan Pembangunan Yang berkesinambungan	optimalnya perwujudan kondusivitas wilayah	habitat, tutupan lahan	land-use	pembangunan rendah karbon	batas kecamatan & desa	Rencana Tata Ruang Wilayah Tapanuli Selatan

RPJMD KAB.TAPANULI SELTAN 2025-2029

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

bab III



BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi dan Misi

Pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025-2029 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan selama lima tahun kedepan. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan tahun 2025-2029 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/ kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis global serta nasional, dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

3.1.1. Visi

Visi pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2025-2029 yaitu**: "Tapanuli Selatan yang Maju dan Berkarakter Unggul, Sehat, Cerdas dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045."**

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahap – I (Pertama) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029, merupakan bagian yang tidak terlepas dari upaya pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2045.

Penjelasan makna atas pernyataan Visi dimaksud adalah**:**

1. **TAPANULI SELATAN YANG MAJU** merupakan perwujudan kondisi masayarakat Tapanuli Selatan yang tumbuh dan berkembang baik secara ekonomi, sosial, kependudukan, dan politik. Menjadi Daerah yang maju yang memiliki daya saing wilayah yang baik dan perekonomian yang produktif dan harapannya menjadikan Tapanuli Selatan menjadi daerah paling maju diwilayah pantai barat daerah propinsi Sumatera Utara.

2. **Berkarakter Unggul** mengandung arti yakni bahwa sumber daya manusia Tapanuli Selatan memiliki watak dan kepribadian yang baik, serta berperilaku sesuai dengan nilai-nilai, norma adat istiadat daerah Tapanuli Selatan.
3. **Sehat** mengandung arti terwujudnya derajat Kesehatan masyarakat Tapanuli Selatan yang lebih baik.
4. **Cerdas** mengandung arti terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia Tapanuli Selatan yang Tangguh, mandiri dan berwawasan serta memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pada berbagai bidang dan sektor pembangunan.
5. **Sejahtera** mengandung arti : perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidupnya yang meliputi: sandang, pangan, papan dan kesehatan maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai, selain itu setiap pelaksanaan pembangunan harus memiliki tujuan akhir bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan, artinya bahwa setiap aktifitas kegiatan pembangunan yang dihasilkan diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat secara fisik maupu non fisik, yaitu meliputi terbentuknya lapangan kerja, berkurangnya pengangguran, peningkatan kualitas pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya sehingga masyarakat merasa terpenuhi kebutuhan hidupnya dan diharapkan terwujudnya masyarakat Tapanuli selatan yang dapat menyongsong Indonesia emas 2045.

Visi pembangunan Tapanuli Selatan 2025-2029 mendukung visi pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029 yaitu : "**Kolaborasi Sumut Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan**" dan Visi dalam RPJMN 2025-2029 yaitu : "**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045".**

3.1.2 Sasaran Visi

Mewujudkan Tapanuli Selatan yang Maju dan Berkarakter Unggul, Sehat, Cerdas dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045 dalam sasaran visi, yaitu:

1. Per Kapita Penduduk Pendapatan per kapita Tapanuli Selatan diperkirakan meningkat yaitu senilai Rp 78.61 Juta di tahun 2029. Sasaran ini berkontribusi

terhadap sasaran utama pembangunan RPJMN 2025-2029 yaitu Pendapatan Per Kapita sebesar 8.000 USD ditahun 2029.

2. Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang Perekonomian Tapanuli Selatan yang semakin berkembang meningkatkan pendapatan penduduk dan menurunkan kemiskinan hingga mencapai nilai 5.00% di tahun 2029. Ketimpangan pendapatan antar penduduk Tapanuli Selatan juga menurun dengan Rasio Gini mencapai hingga 0,204. Sasaran ini berkontribusi terhadap sasaran utama pembangunan RPJMN 2025-2029 yaitu kemiskinan menuju 4.5-5.0 % dan Ketimpangan Berkurang menjadi 0.372-0,375.
3. Peran dan Posisi di Tingkat Nasional dan Global Meningkat Kemajuan pembangunan Tapanuli Selatan meningkatkan nilai peran dan posisi Tapanuli Selatan di Tingkat Provinsi Sumatera Utara serta tingkat nasional dan global yang diukur dengan Indeks Daya Saing Daerah dengan nilai 3.60 di tahun 2029. Dan Sasaran ini berkontribusi terhadap sasaran utama pembangunan RPJMN 2025-2029 yaitu Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat menjadi peringkat 29 dunia tahun 2029 dari peringkat 33 di tahun 2025.
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia meningkat, daya saing sumber daya manusia Sumatera Utara memiliki peningkatan kualitas secara adil dan merata dengan peningkatan Indeks Modal Manusia menjadi 0.73 di tahun 2045 dan IPM Tapanuli Selatan pada Tahun 2029 di targetkan mencapai 77,21 Sasaran ini berkontribusi terhadap sasaran utama pembangunan RPJPN 2025 2045 yaitu Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat.
5. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tapanuli Selatan meningkatkan komitmen di Tingkat Provinsi, nasional dan global dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan Indeks Lingkungan Hidup sebesar 78,50 pada tahun 2029 Sasaran ini berkontribusi terhadap sasaran utama pembangunan RPJMN 2025-2029 yaitu Intensitas Emisi GRK menurun menjadi 45,17% ditahun 2029 dan Indeks Lingkungan Hidup menjadi 77.20% ditahun 2029.

   Untuk melihat keterkaitan hubungan sasaran utama dalam RPJMN 2025-2029, dengan sasaran utama dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029

serta sasaran utama dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2.1
Sasaran Utama Kabupaten Tapanuli Selatan 2025-2029

NO	RPJMN 2025-2029	RPJMD Provinsi Sumaterata Utara 2025-2029	RPJPD Kabupaten Tapanuli Selatan 2025-2029
1	2	3	4
1	Pendapatan per kapita setara negara maju	Peningkatan Pendapatan Per Kapita Penduduk	Peningkatan Pendapatan Per Kapita Penduduk
2	Kemiskinan menuju 0% & Ketimpangan Berkurang	Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang	Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang
3	Kepemimpinan & Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat	Peran & Posisi di Tingkat Nasional & Global Meningkat	Peran & Posisi di Tingkat Nasional & Global Meningkat
4	Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat	Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat	Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat
5	Intensitas Emisi GRK Menurun menuju Net Zero Emission, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Emisi Gas Rumah Kaca Menurun, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sumber : Bappeda Kab. Tapsel, diolah

Untuk tabel indikator sasaran utama Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tebel dibawah ini.

Tabel 1.2.2
Indikator Sasaran Utama Kabupaten Tapanuli Selatan 2025-2029

INDIKATOR	Kondisi Awal	Target				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
Peningkatan Pendapatan per kapita						
PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	67,23	69,27	70,66	72,07	73,51	78,61
Proporsi PDRB Subsektor Perikanan (%)	n.a	1.20	1.22	1.23	1.23	1.23
Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	n.a	6.47	7.12	7.97	8.77	9.64
Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan						
Tingkat Kemiskinan (%)	6,92	6,60	6,41	6,22	6,04	5,00
Rasio Gini (indeks)	0.206	0,205	0,2048	0,2046	0,2044	0,2042
Nilai PDRB Kabupaten/Kota (Rp Juta)	5.12	5,40	5,51	5,62	5,73	6,00
Kepemimpinan dan pengaruh di						

INDIKATOR	Kondisi Awal	Target				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
dunia internasional meningkat						
Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah/ Indeks Daya Saing	3,32	3,33	3,39	3,46	3,53	3,60
Peningkatan daya saing Sumber daya manusia						
Indeks Pembangunan Manusia (indeks)	75,18	76,18	76,33	76,49	76,64	77,21
Peningkatan Indeks Lingkungan Hidup						
Indeks Kualitas Udara	n.a	94.70	94.71	94.72	94.73	94.74
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,90	78,27	78,43	78,58	78,74	78,90

3.1.3. Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, maka dirumuskan misi **(Panca Cita)** Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029 yakni :

1. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sarana air bersih, listrik desa dan jaringan telekomunikasi;
2. Peningkatkan pendapatan masyarakat;
3. Penciptaan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehat dan cerdas;
4. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
5. Perbaikan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang asri dan berkelanjutan.

Sedangkan untuk penjelasan makna atas pernyataan misi di atas adalah :

1. **Perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sarana air bersih, listrik desa dan jaringan telekomunikasi** bermakna bahwa dalam rangka kemajuan **Perbaikan dan pembangunan infrastruktur** ditandai dengan tumbuhnya wilayah pertumbuhan baru, dan kualitas infrastruktur yang berkualitas, inklusif, dan tangguh. Infrastruktur yang berkualitas juga bermakna ramah lingkungan, hemat energi, atau menggunakan energi terbarukan serta berkelanjutan dan memiliki Tata ruang daerah yang sehat, nyaman, dan aman. Misi ini mengarahkan pengembangan Jalan dengan mempertimbangkan keterpaduan dengan daerah sekitar untuk menguatkan peran Kabupaten Tapanuli Selatan

sebagai daerah yang dapat menjadi penyokong bagi daerah lainnya, Pembangunan jembatan bagi daerah-daerah yang belum terhubung dan terisolir, pengembangan irigasi bagi daerah-daerah pengembangan sektor pertanian terutama bagi daerah yang akan dijadikan sebagai pusat pertanian terintegrasi dalam menyokong ketahann pangan daerah maupun nasional, peningkatan sarana air bersih dalam meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat, peningkatan penyediaan Listrik bagi desa-desa yang terisolir dan jaringan telekomunikasi yang baik.

2. **Peningkatkan pendapatan masyarakat** bermakna bahwa dalam rangka memperhatikan Peningkatan pendapatan masyarakat arah kebijakan yang perlu diperhatikan dalam misi ini adalah komponen lapangan usaha bagi masyarakat sebagai penopang ekonomi dan kesejahteraan penduduknya serta dapat mengoptimalkan kreativitas masyarakat, Peningkatan UMKM, optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan keberlanjutan (sustainability) dan daya dukung lingkungan, serta memperkuat daya tawar ekonomi daerah untuk menjaga keseimbangan pasar supaya ketersediaan kebutuhan bahan pangan aman, dan keberlanjutan rantai pasok komoditas pangan, sebagai komponen penting pendukung PDRB dari sektor perdagangan, industri makan minum, dan jasa lainnya

3. **Penciptaan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehat dan cerdas** bermakna bahwa dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Selatan Pembangunan diarahkan pada upaya menumbuhkan masyarakat cerdas, sehat dan berkarakter unggul dapat berkompetensi dan berdaya saing, serta mendapatkan kesempatan pendidikan yang tinggi, Pengoptimalisasian sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga pendidik, Peningkatan pelayanan Kesehatan dan kualitas tenaga Kesehatan, Perluasan pelayanan berobat gratis, Penambahan sarana dan prasana kesehatan untuk mudah dijangkau masyarakat dan pengembangan keterampilan yang luas dengan penerapan sistem dan teknologi, kemampuan penduduk mengaktualisasikan nilai-nilai budaya dalam bentuk produk seni integratif lokal berskala global serta kemampuan masyarakat merevitalisasi nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari

(living culture) secara inklusif dan menjadikan masyarakat Tapanuli Selatan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

4. **Reformasi birokrasi dan pelayanan publik** bermakna bahwa dalam rangka kemajuan daerah arah kebijakan pada misi ini ditunjukkan dengan adanya implementasi e-government dalam pelayanan publik, sehingga masyarakat semakin mudah dalam mengakses informasi dan pelayanan publik, pengembangan smart city dengan menggunakan Sumber Daya Manusia, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kehidupan yang berkualitas tinggi, dan sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan yang kolaboratif melibatkan partisipasi masyarakat. Smart city digerakkan oleh smart governance yang membangun smart people, smart economy, smart mobility, smart environment, smart living berbasis smart culture**;**
5. **Perbaikan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang asri dan berkelanjutan** bermakna bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan antar wilayah, maka arah kebijakan pembangunan ke depan difokuskan kepada perbaikan prasarana dan sarana lingkungan penunjang kegiatan ekonomi, pemukiman masyarakat yang asri dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip tujuan dan program SDGs (Suistainable Development Goals) dalam menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045;

Gambar 3.1 Hubungan Antar Visi dan Misi Kabupaten Tapanuli Selatan



Untuk melihat keterkaitan antara Misi dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029 serta RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 dapat dilihat sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Keterkaitan Misi pada RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029 dengan Misi pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029

NO	Misi RPJMD Kab. Tapanuli Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Prov. Sumatera Utara Tahun 2025-2029	Misi RPJMN Tahun 2025-2029
1	2	3	4
1	Perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sarana air bersih, listrik desa dan jaringan telekomunikasi	Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan ke4a yang berkualitas, mendorong kelyirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
2	Peningkatkan pendapatan masyarakat	Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,

NO	Misi RPJMD Kab. Tapanuli Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Prov. Sumatera Utara Tahun 2025-2029	Misi RPJMN Tahun 2025-2029
1	2	3	4
			ekonomi hijau, dan ekonomi biru
			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, sena pmguatan peran perempuan. pemuda (generasi milenial dan qenerasi Z), dan penyandang disabilitas
3	Penciptaan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehat dan cerdas	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
		Memperkuat ketahanan sosial, dan budaya untuk membangun masyarakat Sumut yang tangguh	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur;
4	Reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta

NO	Misi RPJMD Kab. Tapanuli Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Prov. Sumatera Utara Tahun 2025-2029	Misi RPJMN Tahun 2025-2029
1	2	3	4
			memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
5	Perbaikan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang asri dan berkelanjutan	Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang Berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

Untuk melihat Keselarasan Kebijakan dan Strategi RTRW Tahun 2017- 2037 dengan Misi RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 1.3. Keselarasan Kebijakan dan Strategi RTRW Tahun 2017- 2037 dengan Misi RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025 – 2029

No	Kebijakan RTRW Kab. Tapanuli Selatan Tahun 2017 - 2037	Penerjemahan RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025–2029
1	2	3
1	Pengembangan struktur ruang daerah	Diterjemahkan dalam misi ke :
		M1. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sarana air bersih, listrik desa dan jaringan telekomunikasi
		M2. Peningkatkan pendapatan masyarakat
		M3. Penciptaan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehat dan cerdas
		M4. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik
		M5. Perbaikan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang asri dan berkelanjutan
2	Pengembangan pola ruang daerah	Diterjemahkan dalam misi ke :
		M1. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sarana air bersih, listrik desa dan jaringan telekomunikasi
		M2. Peningkatkan pendapatan masyarakat
3	Penetapan kawasan strategis daerah	Diterjemahkan dalam misi ke :
		M2. Peningkatkan pendapatan masyarakat

3.1.4. Tujuan dan Sasaran

Agar visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025-2029 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025-2029 meliputi 5 tujuan dan 14 sasaran, yang diuraikan sebagai berikut:

3.1.4.1. Tujuan :

Tujuan yang ingin dicapai pada periode 2025 – 2029 adalah :

1. **Misi 1: Mewujudkan Perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sarana air bersih, listrik desa dan jaringan telekomunikasi**

   Misi ke-1 bertujuan untuk Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah, pada tujuan ini memiliki 1 sasaran yaitu: 1) Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur daerah; Ukuran keberhasilan yang diharapkan dari tujuan ini adalah: 1) Indeks Infrastruktur daerah, Indikator keberhasilan untuk sasaran pada misi ini adalah: 1) Indeks Infrastruktur daerah;

2. **Misi 2: Mewujudkan Peningkatkan pendapatan masyarakat.**

   Misi ini memiliki tujuan Mewujudkan Peningkatkan pendapatan masyarakat, yang didukung dengan 3 sasaran yaitu: 1) Peningkatan Pendapatan perkapita masyarakat; 2) Meningkatnya Daya Saing Daerah 3) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi dan Indeks Akses Keuangan Daerah, dengan 6 indikator sasarannya 1) PDRB Perkapita; 2) Kontribusi PDRB Kabupaten; 3) Indeks Daya Saing Daerah; 4) Persentase Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan; 5) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); 6) Gini Ratio

3. **Misi 3: Mewujudkan Penciptaan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehat dan cerdas**

   Misi ini memiliki tujuan Mewujudkan Penciptaan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehat dan cerdas, terdapat 2 sasaran yang dicapai pada misi ini, yaitu: 1) Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing dan 2). Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; Ukuran keberhasilan untuk tujuan pada misi ini adalah: 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan ukuran keberhasilan untuk sasarannya adalah: 1) Harapan Lama Sekolah (HLS); 2) Rata-Rata Lama Sekolah (3) Usia Harapan Hidup (UHH).

4. **Misi 4: Mewujudkan Reformasi birokrasi dan pelayanan publik**

   Misi keempat bertujuan untuk Mewujudkan Reformasi birokrasi dan pelayanan publik, dengan sasaran 1). Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah . Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Reformasi Birokrasi, dengan indikator sasarannya: 1) Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI); 2) peringkat/ nilai SAKIP.

5. **Misi 5: Mewujudkan Perbaikan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang asri dan berkelanjutan**

   Misi ini memiliki tujuan Mewujudkan Perbaikan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang asri dan berkelanjutan, Tujuan pada misi ini diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan sasaran yaitu: 1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan 2 indikator sasaran yaitu: 1). Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan 2) Penurunan Intensitas Emisi GRK , dan sasaran 2). Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Rumah Layak Huni, dengan indikator Persentase Penurunan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni).

Tabel 3.5

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029

Visi : Tapanuli Selatan yang Maju dan Berkarakter Unggul, Sehat, Cerdas dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045													
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan Pemerintahan Terkait
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Misi 1: Perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sarana air bersih, listrik desa dan jaringan telekomunikasi	**Tujuan 1: Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah**		Indeks Infrastruktur Daerah	**%**	75,99	77,96	78,60	79,26	79,92	80,59	81,72	81,72	**Seluruh Urusan**
		Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	**%**	75,99	77,96	78,60	79,26	79,92	80,59	81,72	81,72	**Seluruh Urusan**
			Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	%	59,67	59,97	60,27	60,57	60,87	61,18	61,48	61,48	
			Persentase jembatan dengan kondisi baik	%	77,75	78,14	78,53	78,92	79,32	79,71	80,11	80,11	
			Luas Daerah Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	67,10	68,41	69,78	71,17	72,60	74,05	75,53	75,53	
			Persentase penududuk berakses air minum	%	86,44	94,95	95,42	95,90	96,38	96,86	100,00	100,00	

Visi : Tapanuli Selatan yang Maju dan Berkarakter Unggul, Sehat, Cerdas dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045													
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan Pemerintahan Terkait
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Rasio ketersediaan daya listrik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
			Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	65,00	66,30	67,63	68,98	70,36	71,77	73,20	73,20	
Misi 2 : Peningkatkan pendapatan masyarakat	**Tujuan 2 : Mewujudkan Peningkatkan pendapatan masyarakat**		**Pertumbuhan Ekonomi**	%	5.12	5,40	5,51	5,62	5,73	6,00	6,12	6,12	Seluruh Urusan
			Indeks Akses Keuangan Daerah	indeks	4.30	4.33	4.35	4.37	4.38	4.40	4.41	4.41	Seluruh Urusan
			Indeks Zakat	indeks	n.a	0,36	0,38	0,40	0,42	0,44	0,46	0,46	
		Sasaran 1: Peningkatan Pendapatan perkapita masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	%	5.12	5,40	5,51	5,62	5,73	6,00	6,12	6,12	Seluruh Urusan
			PDRB Perkapita	Rp. Juta	67,23	69,27	70,66	72,07	73,51	78,61	80,18	80,18	3.27 Pertanian 3.25 Kelautan dan Perikanan
			Kontribusi PDRB Kabupaten	%	1,80 (2023)	1,84	1,87	1,91	1,95	1,99	2,03	2,03	
		Sasaran 2: Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,32	3,33	3,39	3,46	3,53	3,60	3,67	3,67	Seluruh Urusan
		Sasaran 3 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Persentase Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan	%	6,92	6,60	6,41	6,22	6,04	5,00	4,85	4,85	Seluruh Urusan
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,41	3,34	3,28	3,21	3,15	3,09	3,03	3,03	Seluruh Urusan
			Gini Ratio	%	0,206	0,205	0,2048	0,2046	0,2044	0,2042	0,200	0,200	Seluruh

Visi : Tapanuli Selatan yang Maju dan Berkarakter Unggul, Sehat, Cerdas dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045													
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan Pemerintahan Terkait
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													Urusan
Misi 3 : Penciptaan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehat dan cerdas	**Tujuan 3 : Mewujudkan Penciptaan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehat dan cerdas**		**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Indeks**	75,18	76,18	76,33	76,49	76,64	77,21	77,46	77,46	Seluruh Urusan
		Sasaran 1: Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	75,18	76,18	76,33	76,49	76,64	77,21	77,46	77,46	Seluruh Urusan
			Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,72	13,85	14,13	14,41	14,70	14,99	15,29	15,29	1.01. Pendidikan
			Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,56	9,75	9,95	10,15	10,35	10,56	10,77	10,77	1.01. Pendidikan
		Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	71,77	71,99	72,20	72,42	72,64	72,85	73,07	73,07	1.02. Kesehatan
			Prevalensi Stunting	%	6,60	6,10	5,90	5,60	5,40	5,20	5,00	5,00	
			Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	49,5	70	90	90	90	90	90	90	
Misi 4 : Reformasi birokrasi dan pelayanan publik	**Tujuan 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi dan pelayanan publik**		**Indeks Reformasi Birokrasi**	Indeks	**64,56 (B)**	**65,85 (B)**	**67,17 (B)**	**68,51 (B)**	**71,25 (BB)**	**72,68 (BB)**	**74,13 (BB)**	**74,13 (BB)**	Seluruh Urusan
		Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas dan	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	**64,56 (B)**	**65,85 (B)**	**67,17 (B)**	**68,51 (B)**	**71,25 (BB)**	**72,68 (BB)**	**74,13 (BB)**	**74,13 (BB)**	Seluruh Urusan

Visi : Tapanuli Selatan yang Maju dan Berkarakter Unggul, Sehat, Cerdas dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045													
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan Pemerintahan Terkait
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		transparansi dan kinerja pemerintah daerah											
			Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	78,25	78,50	78,75	79,00	79,25	79,50	79,75	79,75	6.01. Pengawasan
			Peringkat/ Nilai SAKIP	Nilai	58,26 CC(2023)	66,76(B)	70.00(B)	77,86(BB)	79,06 (BB)	81.00(A)	82.00(A)	82.00(A)	4.01 Sekretariat Daerah
Misi 5 : Perbaikan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang asri dan berkelanjutan	**Tujuan 5 : Mewujudkan Perbaikan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang asri dan berkelanjutan**		**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	**Indeks**	77,90	78,27	78,43	78,58	78,74	78,90	79,06	79,06	Seluruh Urusan
		Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	77,90	78,27	78,43	78,58	78,74	78,90	79,06	79,06	2.11. Lingkungan Hidup
			Penurunan Intensitas Emisi GRK	Juta ton/quplane	n.a	5.20	5,10	5,00	4,90	4,81	4,80	4,80	2.11. Lingkungan Hidup
		Sasaran 2 : Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Rumah Layak Huni	Persentase Penurunan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	19,38	19,26	19,10	18,92	18,71	18,48	18,21	18,21	Perkim

4. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025-2029, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan kedepan.

4.1. Strategi

Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi. Untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Tapanuli SelatanTahun 2025-2029, maka pemerintah daerah menyusun strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Misi 1 : Perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sarana air bersih, listrik desa dan jaringan telekomunikasi, Misi Pertama ini bertujuan untuk Mewujudkan Perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sarana air bersih, listrik desa dan jaringan telekomunikasi, dengan indikator kinerja tujuan adalah 1) Peningkatan Indeks Infrastruktur wilayah. Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 4 hal, yaitu: 1) Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur daerah; 2) Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang; 3) Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas penyelenggaraan angkutan dan 4) Meningkatnya Meningkatnya ketersediaan Air Bersih;. Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

1. Meningkatkan Pembangunan Jalan Pada daerah terpencil dan daerah yang mendukung ketahanan pangan.
2. Meningkatkan pembangunan jalan dan penataan sistem drainase untuk menunjang konektivitas dan pengembangan wilayah.

3. Meningkatkan dan rehabilitasi Jembatan untuk menunjang Konektivitas dan pengembangan wilayah
4. Meningkatkan penyediaan infrastruktur sumberdaya air untuk menunjang irigasi pertanian untuk ketahanan pangan.
5. Meningkatkan kualitas bangunan gedung pelayanan publik bagi masyarakat.
6. Peningkatan kualitas penataan ruang, dan pengendalian perijinan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang serta rencana detail tata ruang.
7. Meningkatkan penataan bangunan dan lingkungannya melalui penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
8. Meningkatkan kualitas pelayanan lalu lintas angkutan terintegrasi melalui penyusunan perencanaan jaringan lalu lintas angkutan jalan, perencanaan dan penataan jaringan trayek, penyediaan fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan, penyediaan angkutan orang dan barang, penataan parkir, dan mendorong kepemilikan KIR kendaraan bermotor.
9. Meningkatkan akses sanitasi dan perilaku higienis melalui penerapan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan mendorong penciptaan lingkungan yang kondusif, peningkatan kebutuhan sanitasi, dan peningkatan penyediaan akses sanitasi.
10. Meningkatkan akses air bersih melalui pengembangan dan peningkatan layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan dan non perpipaan.
11. Meningkatkan penyediaan infrastruktur Jaringan Listrik untuk menyediakan listrik kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian.
12. Meningkatkan penyediaan infrastruktur jaringan komunikasi untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat berbasis online dan mengurangi keterisoliran desa.

Misi 2 : Peningkatkan pendapatan masyarakat bertujuan untuk Mewujudkan Peningkatkan pendapatan masyarakat, dengan indikator kinerja tujuan adalah pertumbuhan ekonomi. Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 2 hal, yaitu: 1) Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi dan 2)

Meningkatnya investasi daerah. Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

1. Peningkatan produktivitas pertanian melalui pengembangan pertanian organik, pengembangan dan branding padi unggulan lokal, pengembangan sistem pertanian terpadu (terintegrasi) khususnya di daerah Batang Angkola dan berbasis teknologi, pembangunan pertanian berbasis kawasan dan teknologi, peningkatan dan pengembangan Lumbung Pangan serta penguatan kelembagaan pangan, peningkatan pengembangan ternak unggul berbasis potensi lokal, peningkatan dan pengembangan produk unggulan perkebunan, intensifikasi usaha tani, penggunaan benih bermutu dan bersertifikat, pengembangan infrastruktur pertanian, pemanfaatan teknologi mekanisasi pertanian, pencegahan, pengendalian, dan pemantauan Organisme Penganggu Tanaman (OPT), penanganan pasca panen serta promosi pemasaran, peningkatan kompetensi sumberdaya manusia pertanian, revitalisasi penyuluhan pertanian dan penguatan kelompok tani, serta penyediaan basis data pertanian.
2. Peningkatan produktivitas perikanan budidaya dan perikanan tangkap melalui cetak 1000 kolam ikan (dibagi atas zona Sipirok Budidaya Ikan Nila, Zona Batang angkola Budi daya ikan Mas dan Zona Batang Toru budidaya ikan lele), penyediaan dan pendistribusian benih unggul, restocking di perairan umum, penguatan teknologi pemasaran produksi perikanan, pemberdayaan usaha nelayan tangkap dan pembudidaya ikan skala kecil, peningkatan fasilitasi usaha, meningkatkan konsumsi ikan dikalangan masyarakat serta penyediaan basis data sektor perikanan.
3. Meningkatkan kunjungan wisata melalui pengembangan Kawasan Pariwisata Unggulan, Desa Wisata dan destinasi wisata berbasis potensi lokal yang terintegrasi yang merupakan program nasional maupun program daerah dalam menciptakan Tapanuli Selatan sebagai salah satu daerah tujuan wisata seperti destinasi wisata Danau Siais disamping danau toba, peningkatan kemitraan antar pelaku industri pariwisata, penyelenggaraan event budaya, promosi digital, dan partisipasi dalam pemasaran pariwisata tingkat Provinsi dan Nasional bahkan internasional, serta pengembangan ekonomi kreatif

berbasis pada potensi unggulan serta pengembangan basis data pariwisata dan ekonomi kreatif.

4. Memetakan pengembangan Produksi pertanian misalkan untuk dataran tinggi pengembangan budidaya Kopi, dataran rendah untuk pengembangan tanaman pisang, pepaya dll yang bernilai ekspor.
5. Meningkatkan Pemasaran produk unggulan daerah melalui pengembangan kemitraan pemasaran produk, mengembangkan promosi dan pameran produk unggulan, meningkatkan pengawasan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat; dan meningkatkan kualitas pasar tradisional, serta pengembangan perlindungan konsumen.
6. Mengembangkan industri kecil berbahan baku lokal dengan mengintensifkan pembinaan teknologi produksi, perijinan usaha dan akses pemasaran produk melalui e-commerce untuk menunjang Smart City, Pemutakhiran basis data Industri Kecil Menengah, pengembangan kawasan peruntukan industri yang selaras dengan tata ruang, pola kemitraan industri kecil dengan industri menengah dan besar, fasilitasi penguatan perlindungan pekerja industri, pemutakhiran basis data industri dan fasilitasi pemberdayaan IKM, peningkatan dan Pengembangan potensi lokal yang produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berbasis ekonomi kerakyatan dan potensi lokal.
7. Mengembangkan usaha mikro dan koperasi melalui pembinaan dan pemberdayaan manajemen usaha, teknologi produksi dan pemasaran produk melalui e-commerce untuk menunjang Smart City, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan koperasi dan UKM, pengembangan basis data koperasi dan UKM, pemberdayaan Klaster UKM berbasis teknologi informasi, fasilitasi akses permodalan dengan program subsidi bunga, membranding produk unggulan dan penguatan gerakan “Aku Cinta Produk Tapanuli Selatan” serta peningkatan daya saing UKM dan koperasi.
8. Meningkatkan investasi sesuai rencana induk penanaman modal daerah melalui peningkatkan iklim investasi dan promosi investasi berkelanjutan sesuai potensi dan peluang investasi, penyediaan basis data informasi investasi, kemudahan perijinan dengan optimalisasi teknologi informasi dan

penyediaan mall pelayanan publik, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan pola kemitraan dan kerjasama investasi.

9. Menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keahlian (skill) melalui Balai Latihan Kerja, Peningkatan peran lembaga pelatihan kerja swasta dan lainnya pelatihan wirausaha untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan padat karya, tenaga kerja mandiri (TKM), terapan teknologi tepat guna (TTG), peningkatan Bursa Kerja online, fasilitasi hubungan industrial ketenagakerjaan dan industri, peningkatan pelayanan dalam rangka penempatan dan perlindungan tenaga kerja dalam dan luar negeri, serta kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, peningkatan jenis pelatihan berdasarkan klaster kompetensi dunia usaha dan industri.
10. Fasilitasi dan penguatan partisipasi dunia usaha dalam pembangunan daerah.

Misi 3 : Penciptaan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehat dan cerdas misi ini bertujuan untuk Mewujudkan Penciptaan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehat dan cerdas sehingga dapat berdaya saing dengan mengedepankan budaya daerah, dengan indikator kinerja tujuan adalah 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM); dan Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 4 hal, yaitu: 1) Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing; 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; 3) Meningkatnya kesejahteraan kesehatan masyarakat dan 4) Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak. Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

1. Menciptakan sekolah-sekolah unggulan yaitu satu (1) kecamatan satu (1) sekolah unggulan.
2. Peningkatan partisipasi dan mutu pendidikan PAUD, SD/MI dan SMP/MTs melalui pencanangan Gerakan ayo sekolah untuk PAUD, penyediaan Sarana dan prasarana PAUD, pendataan ulang penduduk usia 7–12 tahun dan 13–15 tahun yang tidak sekolah dan memberikan insentif berupa beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu.
3. Meningkatkan partisipasi pendidikan kesetaraan melalui identifikasi penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan

atau menengah dan sudah tidak sekolah; dan meningkatkan fasilitas pendidikan kesetaraan.

4. Peningkatan kesejahteraan Guru
5. Pemberian makanan gratis bagi siswa sekolah bahan proteinnya disesuaikan dengan potensi di tiap-tiap desa.
6. Menciptakan UGN menjadi salah satu Universitas Negeri di daerah tapanuli bagian selatan (tabagsel) yang berkualitas
7. Meningkatkan aktualisasi budaya dalam kehidupan masyarakat melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan dan cagar budaya.
8. Pemerataan, jangkauan, dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan/rujukan yang didukung oleh persebaran sarana prasarana, tenaga kesehatan yang memadai dan berkualitas, serta mampu menjangkau masyarakat miskin
9. Peningkatan kualitas konsumsi pangan melalui penyediaan pangan yang merata diseluruh wilayah dan terjangkau serta terjamin keamanannya, berbasis sumberdaya lokal sehingga mengatasi kerawan pangan bagi masyarakat.
10. Meningkatkan kegemaran dan budaya olahraga dikalangan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana olahraga, meningkatkan pembinaan olahraga, meningkatkan kapasitas dan sertifikasi pelatih olahraga, serta meningkatkan kapasitas pemuda pelopor dan wirausaha muda.
11. Meningkatkan pengendalian penduduk melalui program Keluarga Berencana dengan mendorong penggunakan metode kontrasepsi jangka panjang dan pengembangan Kampung KB untuk meningkatkan Partisipasi Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R).
12. Meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui rehabilitasi sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
13. Meningkatkan kemandirian desa melalui pembangunan desa terpadu dengan memperkuat kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan desa

yang baik, termasuk pengelolaan anggaran dan aset desa; memperkuat tata kelola BUMDes dalam pengembangan potensi unggulan desa, dan mengembangkan kerjasama antar desa.

14. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak di berbagai bidang pembangunan, peningkatan pemberdayaan perempuan, penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak berbasis keluarga.

Misi 4 : Reformasi birokrasi dan pelayanan publik misi ini bertujuan untuk Mewujudkan Reformasi birokrasi dan pelayanan publik dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance), dengan indikator kinerja tujuan adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 2 hal, yaitu: 1) Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah, dan 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

1. Meningkatkan kematangan organisasi perangkat daerah melalui penguatan sistem perencanaan pembangunan daerah; monitoring dan pengendalian pelaksanaan tugas; penjaminan mutu layanan daerah; penerapan SOP; diklat aparatur; analisis kebijakan dan pemecahan masalah tugas; manajemen sumberdaya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur; manajemen resiko pelaksanaan tugas aparatur; pengukuran kinerja daerah; pengembangan inovasi layanan, dan budaya organisasi yang sehat.
2. Meningkatkan Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah melalui intensifikasi pengelolaan pajak daerah, intensifikasi retribusi daerah, menyusun kajian potensi Pendapatan Asli Daerah dari sumber Pajak dan Retribusi daerah.
3. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya tanah milik Pemerintah Daerah melalui pengamanan administrasi (pensertifikatan tanah) dan pengamanan fisik Barang Milik Daerah serta perbaikan manajemen tata kelola Barang Milik Daerah.
4. Meningkatkan pengawasan intern dan pengawasan khusus, serta pengendalian risiko melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah, pengembangan zona integritas, dan peningkatan upaya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

5. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah melalui perbaikan mekanisme dan harmonisasi dalam perumusan kebijakan antara pemerintah daerah, stakeholder dan masyarakat, dan penguatan kapasitas aparatur perencana perangkat daerah.
6. Memperkuat inovasi daerah dan tata kelola kelitbangan dalam mendukung pencapaian prioritas daerah melalui peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan, dan mendorong perangkat daerah untuk mengembangkan inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
7. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pelayanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik untuk menunjang Smart City.
8. Meningkatkan keamanan informasi dan pemanfaatan persandian dalam pembangunan daerah.
9. Meningkatkan implementasi pengembangan satu data Kabupaten Tapanuli Selatan.
10. Mengoptimalkan penerapan merit sistem khususnya pada aspek perencanaan kebutuhan, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, sistem informasi kepegawaian.
11. Meningkatkan Kualifikasi dalam bentuk penerimaan ASN yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, peningkatan Kompetensi ASN dalam bentuk penddikan dan pelatihan.
12. Meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dan penyediaan data kependudukan untuk menunjang pembangunan berwawasan kependudukan melalui peningkatan pelayanan jemput bola, pelayanan keliling ke desa ke desa dan kelurahan, pelayanan bagi masyarakat difabel dan penduduk rentan administrasi kependudukan, serta peningkatan pemanfaatan data kependudukan kepada perangkat daerah.
13. Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan melalui penambahan SDM Pustakawan, peningkatkan kualitas SDM Pustakawan, pengembangan

layanan buku digital, pengembangan bahan bacaan dan perbaikan sarana prasarana perpustakaan.

14. Meningkatkan layanan kearsipan dan penerapan pengelolaan arsip secara baku di seluruh perangkat daerah melalui penambahan SDM Arsiparis, peningkatan kualitas SDM Arsiparis, dan peningkatan sarana dan prasarana Kearsipan.
15. Meningkatkan kualitas layanan kecamatan dan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan kepada kecamatan.
16. Meningkatkan kualitas layanan sekretariat DPRD kepada DPRD

Misi 5 : Perbaikan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang asri dan berkelanjutan, misi ini bertujuan untuk Mewujudkan Perbaikan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang asri dan berkelanjutan, dengan indikator kinerja tujuan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 2 (dua) hal, yaitu: 1) meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan 2) meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

1. Meningkatkan penyediaan rumah layak huni dan penanganan kawasan kumuh melalui pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh melalui pemugaran (rehabilitasi), peremajaan (revitalisasi) dan permukiman kembali (relokasi).
2. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup melalui peningkatan ketaatan pelaku usaha terhadap ketentuan dokumen lingkungan dan pemantauan kualitas air, tanah dan udara secara berkala.
3. Meningkatkan pemenuhan ruang terbuka hijau melalui pembangunan taman; pengelolaan hutan kota, taman kota dan ruang publik lainnya.
4. Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan melalui peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah, optimalisasi TPA, pengurangan sampah dengan TPS 3R dan Bank Sampah serta pemenuhan sarana dan prasarana persampahan.

5. Kerjasama Dinas Lingkungan Hidup dengan dunia pendidikan terkait literasi sampah bagi Siswa sekolah
6. Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana melalui pelayanan informasi kebencanaan, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, penanganan pasca bencana, peningkatan kerjasama dan pembinaan relawan, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana

Keterkaitan misi, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tapanuli Selatan tertuang dalam tabel berikut:

VISI : Tapanuli Selatan yang Maju dan Berkarakter Unggul, Sehat, Cerdas dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045			
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**STRATEGI**
1	**2**	**3**	**4**
Misi 1: Perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sarana air bersih, listrik desa dan jaringan telekomunikasi	**Tujuan 1: Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah**		
		Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur daerah	1 Meningkatkan pembangunan jalan dan penataan sistem drainase untuk menunjang konektivitas dan pengembangan wilayah.
			2 Meningkatkan dan rehabilitasi Jembatan untuk menunjang Konektivitas dan pengembangan wilayah
			3 Meningkatkan penyediaan infrastruktur sumberdaya air untuk menunjang irigasi pertanian.
			4 Meningkatkan kualitas bangunan gedung pelayanan publik bagi masyarakat.
			5 Meningkatkan akses air bersih melalui pengembangan dan peningkatan layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan dan non perpipaan.
			6 Meningkatkan penyediaan infrastruktur Jaringan Listrik untuk menyediakan listrik kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian.
			7 Meningkatkan penyediaan infrastruktur jaringan komunikasi untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat berbasis online.

VISI : Tapanuli Selatan yang Maju dan Berkarakter Unggul, Sehat, Cerdas dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045			
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**STRATEGI**
1	**2**	**3**	**4**
			8 Peningkatan kualitas penataan ruang, dan pengendalian perijinan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang serta rencana detail tata ruang.
			9 Meningkatkan penataan bangunan dan lingkungannya melalui penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
			10 Meningkatkan kualitas pelayanan lalu lintas angkutan terintegrasi melalui penyusunan perencanaan jaringan lalu lintas angkutan jalan, pengelelolaan terminal tipe C, perencanaan dan penataan jaringan trayek, penyediaan fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan, penyediaan angkutan orang dan barang, penataan parkir, dan mendorong kepemilikan KIR kendaraan bermotor.
Misi 2 : Peningkatkan pendapatan masyarakat	**Tujuan 2 : Mewujudkan Peningkatkan pendapatan masyarakat**		
		Sasaran 1: Peningkatan Pendapatan perkapita masyarakat	1 Peningkatan produktivitas pertanian melalui pengembangan pertanian organik, pengembangan dan branding padi unggulan lokal, pengembangan sistem pertanian terpadu (terintegrasi) berbasis teknologi, pembangunan pertanian berbasis kawasan dan teknologi, peningkatan dan pengembangan Lumbung Pangan serta penguatan kelembagaan pangan, peningkatan pengembangan ternak unggul berbasis potensi lokal, peningkatan dan pengembangan produk unggulan perkebunan, intensifikasi usaha tani, penggunaan benih bermutu dan bersertifikat, pengembangan infrastruktur pertanian, pemanfaatan teknologi mekanisasi pertanian, pencegahan, pengendalian, dan pemantauan Organisme Penganggu Tanaman (OPT), penanganan pasca panen serta promosi pemasaran, peningkatan kompetensi

VISI : Tapanuli Selatan yang Maju dan Berkarakter Unggul, Sehat, Cerdas dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045			
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**STRATEGI**
1	**2**	**3**	**4**
			sumberdaya manusia pertanian, revitalisasi penyuluhan pertanian dan penguatan kelompok tani, serta penyediaan basis data pertanian.
			2 Peningkatan produktivitas perikanan budidaya dan perikanan tangkap melalui penyediaan dan pendistribusian benih unggul, restocking di perairan umum, penguatan teknologi pemasaran produksi perikanan, pemberdayaan usaha nelayan tangkap dan pembudidaya ikan skala kecil, peningkatan fasilitasi usaha, meningkatkan konsumsi ikan dikalangan masyarakat serta penyediaan basis data sektor perikanan.
			3 Meningkatkan kunjungan wisata melalui pengembangan Kawasan Pariwisata Unggulan, Desa Wisata dan destinasi wisata berbasis potensi lokal yang terintegrasi yang merupakan program nasional maupun program daerah dalam menciptakan Tapanuli Selatan sebagai salah satu daerah tujuan wisata seperti destinasi wisata Danau Siais disamping danau toba, peningkatan kemitraan antar pelaku industri pariwisata, penyelenggaraan event budaya, promosi digital, dan partisipasi dalam pemasaran pariwisata tingkat Provinsi dan Nasional bahkan internasional, serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis pada potensi unggulan serta pengembangan basis data pariwisata dan ekonomi kreatif.
			4 Meningkatkan Pemasaran produk unggulan daerah melalui pengembangan kemitraan pemasaran produk, mengembangkan promosi dan pameran produk unggulan, meningkatkan pengawasan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat; dan meningkatkan kualitas pasar tradisional, serta pengembangan perlindungan konsumen.
			5 Mengembangkan industri kecil berbahan baku lokal dengan mengintensifkan pembinaan teknologi produksi,

VISI : Tapanuli Selatan yang Maju dan Berkarakter Unggul, Sehat, Cerdas dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045			
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**STRATEGI**
1	**2**	**3**	**4**
			perijinan usaha dan akses pemasaran produk melalui e-commerce untuk menunjang Smart City, Pemutakhiran basis data Industri Kecil Menengah, pengembangan kawasan peruntukan industri yang selaras dengan tata ruang, pola kemitraan industri kecil dengan industri menengah dan besar, fasilitasi penguatan perlindungan pekerja industri, pemutakhiran basis data industri dan fasilitasi pemberdayaan IKM, peningkatan dan Pengembangan potensi lokal yang produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berbasis ekonomi kerakyatan dan potensi lokal.
			6 Mengembangkan usaha mikro dan koperasi melalui pembinaan dan pemberdayaan manajemen usaha, teknologi produksi dan pemasaran produk melalui e-commerce untuk menunjang Smart City, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan koperasi dan UKM, pengembangan basis data koperasi dan UKM, pemberdayaan Klaster UKM berbasis teknologi informasi, fasilitasi akses permodalan dengan program subsidi bunga, membranding produk unggulan dan penguatan gerakan "Aku Cinta Produk Tapanuli Selatan" serta peningkatan daya saing UKM dan koperasi.
		Sasaran 2: Meningkatnya Daya Saing Daerah	7 Meningkatkan investasi sesuai rencana induk penanaman modal daerah melalui peningkatkan iklim investasi dan promosi investasi berkelanjutan sesuai potensi dan peluang investasi, penyediaan basis data informasi investasi, kemudahan perijinan dengan optimalisasi teknologi informasi dan penyediaan mall pelayanan publik, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan pola kemitraan dan kerjasama investasi.
		Sasaran 3 :	8 Menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keahlian (skill)

VISI : Tapanuli Selatan yang Maju dan Berkarakter Unggul, Sehat, Cerdas dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045			
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**STRATEGI**
1	**2**	**3**	**4**
		Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	melalui Balai Latihan Kerja, Peningkatan peran lembaga pelatihan kerja swasta dan lainnya pelatihan wirausaha untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan padat karya, tenaga kerja mandiri (TKM), terapan teknologi tepat guna (TTG), peningkatan Bursa Kerja online melalui aplikasi SIAP kerja, fasilitasi hubungan industrial ketenagakerjaan dan industri, peningkatan pelayanan dalam rangka penempatan dan perlindungan tenaga kerja dalam dan luar negeri, serta kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, peningkatan jenis pelatihan berdasarkan klaster kompetensi dunia usaha dan industri.
			9 Fasilitasi dan penguatan partisipasi dunia usaha dalam pembangunan daerah
			10 Peningkatan kualitas konsumsi pangan melalui penyediaan pangan yang merata diseluruh wilayah dan terjangkau serta terjamin keamanannya, berbasis sumberdaya lokal sehingga mengatasi kerawan pangan bagi masyarakat
			11 Meningkatkan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi/lingkungan di tingkat desa
Misi 3 : Penciptaan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehat dan cerdas	Tujuan 3 : Mewujudkan Penciptaan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehat dan cerdas		
		Sasaran 1: Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing	1 Peningkatan partisipasi dan mutu pendidikan PAUD, SD/MI dan SMP/MTs melalui pencanangan Gerakan ayo sekolah untuk PAUD, penyediaan Sarana dan prasarana PAUD, pendataan ulang penduduk usia 7–12 tahun dan 13–15 tahun yang tidak sekolah dan memberikan insentif berupa beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu.
			2 Meningkatkan partisipasi pendidikan kesetaraan melalui

VISI : Tapanuli Selatan yang Maju dan Berkarakter Unggul, Sehat, Cerdas dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045			
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**STRATEGI**
1	**2**	**3**	**4**
			identifikasi penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah dan sudah tidak sekolah; dan meningkatkan fasilitas pendidikan kesetaraan.
			3 Peningkatan kesejahteraan Guru
			4 Meningkatkan aktualisasi budaya dalam kehidupan masyarakat melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan dan cagar budaya
		Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5 Pemerataan, jangkauan, dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan/rujukan yang didukung oleh persebaran sarana prasarana, tenaga kesehatan yang memadai dan berkualitas, serta mampu menjangkau masyarakat miskin
			6 Meningkatkan kegemaran dan budaya olahraga dikalangan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana olahraga, meningkatkan pembinaan olahraga, meningkatkan kapasitas dan sertifikasi pelatih olahraga, serta meningkatkan kapasitas pemuda pelopor dan wirausaha muda.
			7 Meningkatkan pengendalian penduduk melalui program Keluarga Berencana dengan mendorong penggunakan metode kontrasepsi jangka panjang dan pengembangan Kampung KB untuk meningkatkan Partisipasi Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R).
			9 Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak di berbagai bidang pembangunan, peningkatan pemberdayaan perempuan, penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak berbasis keluarga
Misi 4 : Reformasi birokrasi dan	Tujuan 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi dan		

VISI : Tapanuli Selatan yang Maju dan Berkarakter Unggul, Sehat, Cerdas dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045			
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**STRATEGI**
1	**2**	**3**	**4**
pelayanan publik	pelayanan publik		
		Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah	1 Meningkatkan kematangan organisasi perangkat daerah melalui penguatan sistem perencanaan pembangunan daerah; monitoring dan pengendalian pelaksanaan tugas; penjaminan mutu layanan daerah; penerapan SOP; diklat aparatur; analisis kebijakan dan pemecahan masalah tugas; manajemen sumberdaya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur; manajemen resiko pelaksanaan tugas aparatur; pengukuran kinerja daerah; pengembangan inovasi layanan, dan budaya organisasi yang sehat.
			2 Meningkatkan Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah melalui intensifikasi pengelolaan pajak daerah, intensifikasi retribusi daerah, menyusun kajian potensi Pendapatan Asli Daerah dari sumber Pajak dan Retribusi daerah.
			3 Meningkatkan pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya tanah milik Pemerintah Daerah melalui pengamanan administrasi (pensertifikatan tanah) dan pengamanan fisik Barang Milik Daerah serta perbaikan manajemen tata kelola Barang Milik Daerah.
			4 Meningkatkan pengawasan intern dan pengawasan khusus, serta pengendalian risiko melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pengembangan zona integritas, dan peningkatan upaya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
			5 Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah melalui perbaikan mekanisme dan harmonisasi dalam perumusan kebijakan antara pemerintah daerah, stakeholder dan masyarakat, dan penguatan kapasitas aparatur perencana perangkat daerah.

VISI : Tapanuli Selatan yang Maju dan Berkarakter Unggul, Sehat, Cerdas dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045			
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**STRATEGI**
1	**2**	**3**	**4**
			6 Memperkuat inovasi daerah dan tata kelola kelitbangan dalam mendukung pencapaian prioritas daerah melalui peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan, dan mendorong perangkat daerah untuk mengembangkan inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
			7 Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pelayanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik untuk menunjang Smart City.
			8 Meningkatkan keamanan informasi dan pemanfaatan persandian dalam pembangunan daerah.
			9 Meningkatkan implementasi pengembangan satu data Kabupaten Tapanuli Selatan.
			10 Mengoptimalkan penerapan merit sistem khususnya pada aspek perencanaan kebutuhan, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, sistem informasi kepegawaian.
			11 Meningkatkan Kualifikasi dalam bentuk penerimaan ASN yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, peningkatan Kompetensi ASN dalam bentuk penddikan dan pelatihan.
			12 Meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dan penyediaan data kependudukan untuk menunjang pembangunan berwawasan kependudukan melalui peningkatan pelayanan jemput bola, pelayanan keliling ke desa ke desa dan kelurahan, pelayanan bagi masyarakat difabel dan penduduk rentan administrasi kependudukan, serta peningkatan pemanfaatan data kependudukan kepada perangkat daerah.
			13 Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan melalui penambahan SDM Pustakawan, peningkatkan kualitas SDM Pustakawan, pengembangan layanan buku digital,

VISI : Tapanuli Selatan yang Maju dan Berkarakter Unggul, Sehat, Cerdas dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045			
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**STRATEGI**
1	**2**	**3**	**4**
			pengembangan bahan bacaan dan perbaikan sarana prasarana perpustakaan.
			14 Meningkatkan layanan kearsipan dan penerapan pengelolaan arsip secara baku di seluruh perangkat daerah melalui penambahan SDM Arsiparis, peningkatan kualitas SDM Arsiparis, dan peningkatan sarana dan prasarana Kearsipan.
			15 Meningkatkan kualitas layanan kecamatan dan penyelenggaraan pelimpahan kewenangan kepada kecamatan.
			16 Meningkatkan kualitas layanan sekretariat DPRD kepada DPRD
Misi 5 : Perbaikan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang asri dan berkelanjutan	**Tujuan 5 : Mewujudkan Perbaikan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang asri dan berkelanjutan**		
		Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	1 Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup melalui peningkatan ketaatan Pemerintah dan pelaku usaha terhadap ketentuan dokumen lingkungan dan pemantauan kualitas air, tanah dan udara secara berkala.
			2 Meningkatkan pemenuhan ruang terbuka hijau melalui pembangunan taman; pengelolaan hutan kota, taman kota dan ruang publik lainnya.
			3 Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan melalui peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah, optimalisasi TPA, pengurangan sampah dengan TPS 3R dan Bank Sampah serta pemenuhan sarana dan prasarana persampahan.
			4 Meningkatkan akses sanitasi dan perilaku higienis melalui

VISI : Tapanuli Selatan yang Maju dan Berkarakter Unggul, Sehat, Cerdas dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045			
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**	**STRATEGI**
1	**2**	**3**	**4**
			penerapan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan mendorong penciptaan lingkungan yang kondusif, peningkatan kebutuhan sanitasi, dan peningkatan penyediaan akses sanitasi.
			5 Meningkatkan penyediaan rumah layak huni dan penanganan kawasan kumuh melalui pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh melalui pemugaran (rehabilitasi), peremajaan (revitalisasi) dan permukiman kembali (relokasi).
			6 Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana melalui pelayanan informasi kebencanaan, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, penanganan pasca bencana, peningkatan kerjasama dan pembinaan relawan, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana

6.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan pemerintah daerah dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Dengan mempedomani ketentuan yang berlaku, penyusunan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menentukan pilihan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama kurun waktu 2025-2029.

Arah Kebijakan Kabupaten Tapanuli Selatan dalam kurun 5 tahun kedepan merupakan penjabaran arah kebijakan yang tertuang RPJPD Kabupaten Tapanuli Selatan 2025-2045 Tahap I tahun 2025-2029 yaitu **Penguatan Fondasi Transformasi** serta berpedoman juga dengan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029 sehingga sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah akan tertata dengan baik, tahapan pertama yang merupakan penguatan fondasi transformasi yang dimaksud terdiri dari:

1. Trasnsformasi Sosial berupa Penuntasan Pemenuhan Pelayanan Dasar Baik itu dari bidang pendidikan. Kesehatan dan Perlindungan Sosial, serta Menciptakan SDM Tapanuli Selatan yang unggul dan produktif
2. Transformasi Ekonomi : Peningkatan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang berorientasi ekspor dan memiliki daya saing baik melalui hilirisasi dll. Peningkatan peran UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan nasional bahkan berorientasi ekspor, serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing. Peningkatan produktivitas pertanian, perikanan, kelautan, dan

kehutanan yang berorientasi pada sistem agribisnis guna mempertahankan swasembada pangan.

3. Trasnformasi Tata Kelola : Pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Perbaikan kelembagaan, Peningkatan Kualitas ASN daerah, Kebijakan pembangunan berbasis bukti Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan Penguatan kapasitas masyarakat sipil, Peningkatan kualitas aparatur melalui peningkatan kesadaran akan budaya kerja yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa dalam rangka menunjang tata pengelolaan pemerintahan yang baik
4. Mewujudkan Stabilitas Daerah Melalui Penciptaan Lingkungan yang Aman, Tertib dan Nyaman, Stabilitas Ekonomi, serta Kebebasan Demokrasi yang Terjamin melalui : Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, lembaga demokrasi yang kuat Peningkatan sinkronisasi, harmonisasi produk-produk hukum pusat dan daerah, serta peningkatan kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum dalam rangka meningkatkan kepastian hukum. Peningkatan kesadaran masyarakat dan aparat untuk memahami prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM melalui pemasyarakatan dan pendidikan hukum dan HAM. Peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban Tapanuli Selatan yang diwujudkan melalui keterpaduan upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menjaga kerukunan sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan dengan memerhatikan kondisi wilayah, penduduk, dan sosial masyarakat Tapanuli Selatan dengan tetap memperhatikan penegakan hukum dan HAM. Pengembangan upaya untuk menjaga dan memelihara keamanan,

ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat diantaranya melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat Tapanuli Selatan. meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta menjaga stabilitas harga untuk tetap menjaga daya beli masyarakat.

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi : Peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban Tapanuli Selatan yang diwujudkan melalui keterpaduan upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menjaga kerukunan sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan dengan memerhatikan kondisi penduduk, kesetaraan gender dan sosial masyarakat Tapanuli Selatan, wilayah, Peningkatan kualitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penanganan penduduk usia lanjut melalui peningkatan partisipasi sosial dan kesetiakawanan sosial masyarakat, Pengembangan pemberdayaan perempuan melalui kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuai dengan norma-norma agama dan falsafah Pancasila, Peningkatan kepedulian pada etika dan moral serta nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal dalam rangka mewujudkan ketahanan dalam dinamika pergaulan nasional, regional, dan internasional. Pengembangan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama/kepercayaan melalui pemeliharaan kerukunan hubungan antarumat beragama. Peningkatan kepedulian terhadap nilai-nilai budaya lokal dalam rangka memperkuat identitas masyarakat Tapanuli Selatan.
6. Pembangunan wilayah dan Sarana Prasarana melalui Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan kesehatan, infrastruktur dasar, listrik) yang diprioritaskan di daerah terpencil serta pemerataan pembangunan di seluruh Kabupaten Tapanuli Selatan, `Pembangunan konektivitas difokuskan iuntuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan,

pusat pertumbuhan ekonomi (kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus), pusat komoditas sumber daya alam, serta kawasan pariwisata Pemerataan pembangunan wilayah yang mendasarkan karateristik potensi dan kesesuaian dengan RTRW melalui peningkatan kerja sama pembangunan kawasan strategis; peningkatan fungsi perkotaan; Pemerataan pembangunan perdesaan; dan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah Pemerataan ketersediaan rumah dan prasarana dasar permukimannya (air bersih, sanitasi, dan persampahan), terutama bagi masyarakat RTM (Rumah Tangga Miskin) di perkotaan dan perdesaan. Pembangunan dan penerapan penatagunaan pertanahan mendasarkan pada RTRW dan peningkatan cakupan pelayanan administrasi pertanahan. Pengembangan pembangunan penataan ruang melalui peningkatan efektivitas dan peran RTRW Tapanuli Selatan, peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan ruang, dan pembangunan kelembagaan dan penerapan pengendalian pemanfaatan ruang. Pemerataan sistem dan sarana-prasarana telekomunikasi yang mampu mendukung pertumbuhan perekonomian daerah melalui Peningkatan cakupan layanan dan kemudahan akses bagi masyarakat luas. Pemerataan cakupan layanan energi listrik bagi masyarakat perdesaan, serta pemenuhan energi listrik untuk industri yang ada melalui perluasan jaringan distribusi.

7. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan melalui : Peningkatan penyediaan fasilitas umum berupa prasarana dan sarana transportasi melalui pembangunan jalan dan jembatan baru, pemeliharaan kondisi jalan dan jembatan yang sudah ada, dan pelebaran jalan untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah, Pengembangan fungsi prasarana dan sarana sumberdaya air dan irigasi guna mendukung aktivitas produksi, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan, melalui konservasi sumber-sumber air, pendayagunaan irigasi, air baku, drainase, industri, serta pengendalian banjir dan kekeringan. Perbaikan

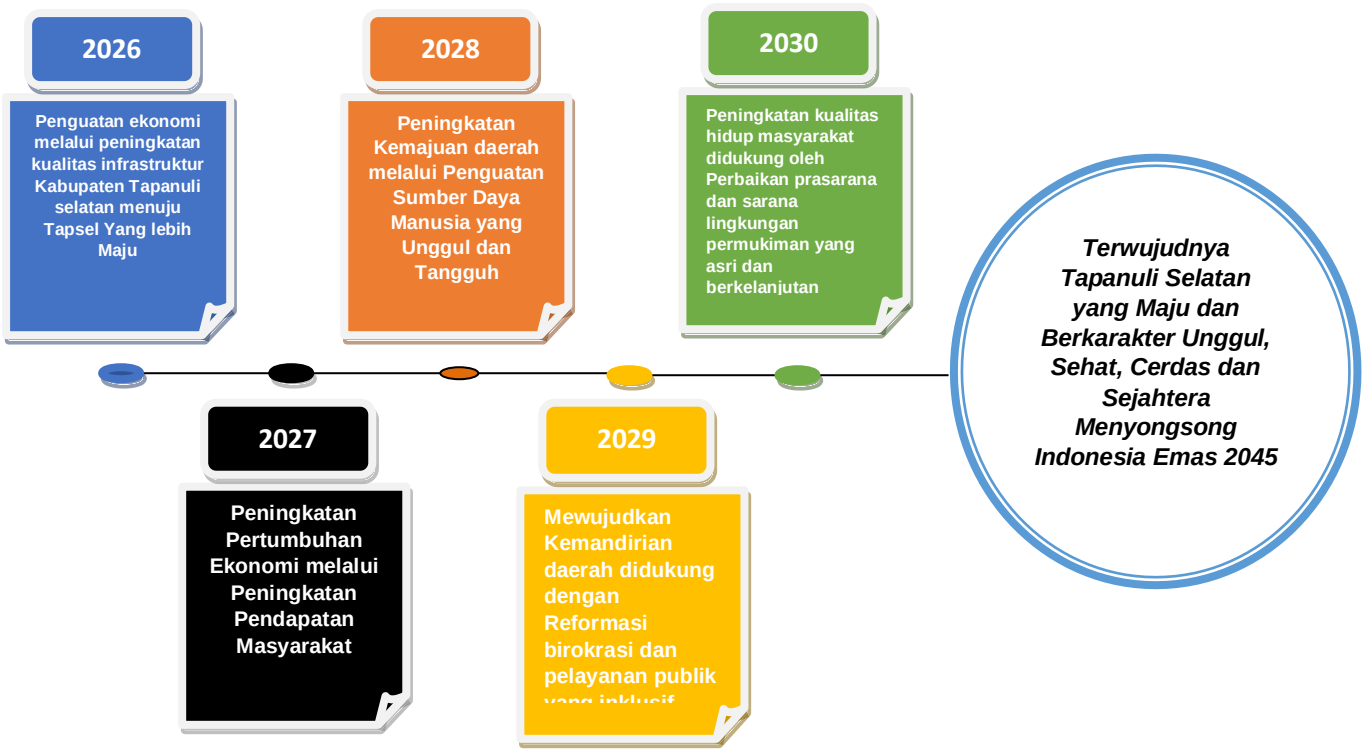
pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui rehabilitasi lahan kritis secara terpadu berbasis ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) serta pengembalian fungsi kawasan lindung. Peningkatan inventarisasi dan identifikasi keanekaragaman hayati dalam rangka penyusunan profil. Pengembangan sistem pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan penegakan hukum lingkungan. Peningkatan sosialisasi dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana.

8. Mewujudkan Pembangunan yang berkesinambungan melalui sinkronisasi perencanaan pembangunan, peningkatan akuntabilitas pemerintah, dan pengembangan pembiayaan yang inovatif

Dari tahapan tersebut maka penekanan fokus atau tema dalam setiap tahun selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan Fokus atau tema pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut

Gambar 3. 2

Fokus atau tema pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029



Penjelasan keterhubungan antara sasaran dengan arah kebijakan dapat dilihat sebagai berikut :

A. Arah Kebijakan Tahun 2026

Pembangunan tahun 2026 diarahkan pada: "Penguatan Ekonomi melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kabupaten Tapanuli Selatan menuju Tapsel yang lebih maju" Prioritas pembangunan tahun 2026 diarahkan pada:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur melalui Pembangunan konektivitas difokuskan untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan, pusat pertumbuhan ekonomi (kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus), pusat komoditas sumber daya alam, serta kawasan pariwisata, Peningkatan penyediaan fasilitas umum berupa prasarana dan sarana transportasi melalui pembangunan jalan dan jembatan baru, pemeliharaan kondisi jalan dan jembatan yang sudah ada, dan pelebaran jalan untuk

meningkatkan aksesibilitas wilayah; Pemerataan ketersediaan prasarana dasar (air bersih, sanitasi, dan persampahan), terutama bagi masyarakat RTM (Rumah Tangga Miskin) di perkotaan dan perdesaan, Pengembangan pembangunan penataan ruang melalui peningkatan efektivitas dan peran RTRW Tapanuli Selatan, peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan ruang, dan pembangunan kelembagaan dan penerapan pengendalian pemanfaatan ruang; Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan kesehatan, infrastruktur dasar, listrik) yang diprioritaskan di daerah terpencil serta pemerataan pembangunan di seluruh Kabupaten Tapanuli Selatan; Pemerataan cakupan layanan energi listrik bagi masyarakat perdesaan, serta pemenuhan energi listrik untuk industri yang ada melalui perluasan jaringan distribus dan Pemerataan sistem dan sarana-prasarana telekomunikasi yang mampu mendukung pertumbuhan perekonomian daerah melalui Peningkatan cakupan layanan dan kemudahan akses bagi masyarakat luas

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Transformasi Sosial berupa mewujudkan Kesehatan Untuk semua, Pendidikan berkualitas yang merata, Pemberian makanan bergizi untuk siswa,santri, ibu hamil, menyusia dan balita pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggulan dan Perlindungan sosial yang adaptif serta Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi berupa mewujudkan masyarakat Beragama dan Berbudaya, Keluarga yang berkualitas, Kesetaraan gender dan Masyarakat yang inklusi, Lingkungan Hidup yang berkualitas, berketahaan energi dan Kemandirian Pangan, Reseliensi terhadap bencana dan perubahan iklim);
3. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat melalui perwujutan transformasi ekonomi dalam Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah

berupa Peningkatan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang berorientasi ekspor dan memiliki daya saing Peningkatan peran UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan nasional bahkan berorientasi ekspor, serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing. Peningkatan produktivitas pertanian, perikanan, kelautan, dan kehutanan yang berorientasi pada sistem agribisnis guna mempertahankan swasembada pangan terutama untuk daerah batang angkola sebagai lokus pertanian terintegrasi. Peningkatan kualitas produk sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan, dan sarana-prasarana pendukung. Penguatan Transformasi perlindungan sosial menuju perlindungan sosial yang adaftif diarahkan untuk meningkatkan cakupan perlindungan sosial, berdasarkan status kerentanan, jamsos dan kesempatan kerja dan berwira usaha kepada seluruh masyarakat Tapanuli Selatan baik dalam kondisi tanpa bencana maupun dengan bencana.

4. Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Perekonomian masyarakat Tapanuli Selatan baik berupa hilirisasi kelapa, kelapa sawit dll.
5. Kelestarian lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana; dan
6. Mewujudkan transformasi tata Kelola melalui tata pemerintahan yang baik dengan Fokus Pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peningkatan kualitas aparatur melalui peningkatan kesadaran akan budaya kerja yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa dalam rangka menunjang tata pengelolaan pemerintahan yang baik. Pengembangan sistem pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai dengan kewenangan

berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar.

B. Arah Kebijakan Tahun 2027

Pembangunan tahun 2027 diarahkan pada: "Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Peningkatan Pendapatan Masyarakat" Prioritas pembangunan tahun 2027 diarahkan pada:

1. Mengurangi tingkat kemiskinan daerah melalui Mewujudkan transformasi ekonomi dalam Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan
2. Penciptaan lapangan kerja dan penguatan daya saing ekonomi, penguatan transformasi Sosial melauli Pengembangan SDM dan Meningkatkan kualitas SDM dengan peningkatan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja melalui Balai Latihan Kerja yang ada di daerah.
3. Inovasi : Mendorong inovasi dan kewirausahaan melalui ekonomi kreatif, hal ini dapat dilakukan dengan penggunaan inovasi market digital dalam pemasaran produk-produk UMKM dan industry kecil daerah Tapanuli Selatan serta **Transformasi digital**: Melakukan transformasi ekonomi digital untuk meningkatkan produktivitas seperti E-commerce, Platform pembelajaran online dll.
4. **Melanjutkan Hilirisasi** komoditi daerah tapanuli selatan seperti Kelapa, Kelapa sawit dll sehingga dapat membuka peluang kesempatan kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
5. **Meningkatkan investasi**: Mendukung iklim investasi untuk penciptaan lapangan kerja
6. Peningkatan produktivitas pertanian, perikanan, kelautan, dan kehutanan yang berorientasi pada sistem agribisnis guna mempertahankan swasembada pangan maluai peningkatan

infrastruktur di daerah pertanian terintegrasi dan lumbung pangan seperti batang angkola. Peningkatan kualitas produk sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan, dan sarana-prasarana pendukung Pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas;

7. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusifitas wilayah; dan
8. Pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesiapsiagaan bencana.

C. Arah Kebijakan Tahun 2028

Pembangunan tahun 2028 diarahkan pada: "Peningkatan Kemajuan Daerah melalui melalui Penguatan Sumber Daya Manusia yang unggul dan tangguh" Prioritas pembangunan tahun 2027 diarahkan pada:

1. Penguatan transformasi Sosial dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia Dan Masyarakat Yang Berkualitas, Cerdas dan Sehat dilakukan dengan arah kebijakan pembangunan sumbr daya manusia yang produktif adalah intervensi secara konkret dalam pendidikan dan kesehatan. Intervensi di bidang pendidikan antara lain peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan, penguatan pengelolaan pendidik, serta penciptaan tenaga kependidikan berkualitas. Strategi peningkatan kualitas pendidikan dilakukan melalui wajib beljar 13 tahun; pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul; revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas; restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru, perlindungan hukum dan kesejahteraan berbasis kinerja; perluasan layanan pendidikan anak usia dini; pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah; peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan; serta peningkatan kualitas dan relevansi lulusan pendidikan vokasi berdaya saing unggul. Penguatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal;

2. Pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran melaui penyediaan dan perluasan Lapangan kerja dan peningkatan kemampuan pencari kerja di tapanuli selatan melaui balai latihan kerja ;
3. Peningkatan Produksi Pertanian dan Perikanan
4. Pemantapan Hilirisasi komoditi lokal Tapanuli Selatan : padat karya berorientasi ekspor dan berkelanjutan
5. Pemantapan dan pemerataan kualitas sarana dan prasarana wilayah untuk mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan adil berbasis karakteristik wilayah;
6. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjuitan; dalam Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dan
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi dalam mewujudkan transformasi tata Kelola melalui tata pemerintahan yang baik.

D. Arah Kebijakan Tahun 2029

Pembangunan tahun 2029 diarahkan pada: “Mewujudkan Kemandirian Daerah didukung dengan Reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang inklusif” Prioritas pembangunan tahun 2028 diarahkan pada:

1. Dalam Penguatan Fondasi transformasi tata Kelola Pemerintahan Pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik melalui Percepatan Transformasi digital antara lain dengan cara :
    a. Perluasan Infrastruktur digital
    b. Peningkatan Kapasitas SDM digital dan literasi digital

c. Pembangunan Jaringan ***Broadband*** hingga ke desa terpelosok

2. Peningkatan kualitas aparatur melalui peningkatan kesadaran akan budaya kerja yang profesional, bersih, beretika, dan berwibawa dalam rangka menunjang tata pengelolaan pemerintahan yang bai
3. Peningkatan investasi dan daya saing potensi ekonomi daerah dapat dilakukan juga dengan Mewujudkan Stabilitas Daerah Melalui Penciptaan Lingkungan yang Aman, Tertib dan Nyaman, Stabilitas Ekonomi,;
4. Pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
5. Penguatan keunggulan dan daya saing sumberdaya manusia; dan
6. Pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan hidup

E. Arah Kebijakan Tahun 2030

Pembangunan tahun 2030 diarahkan pada: “Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat didukung oleh Perbaikan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang asri dan berkelanjutan ” Prioritas pembangunan tahun 2030 diarahkan pada:

1. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam
2. Pengembangan sistem pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan penegakan hukum lingkungan
3. Pengembangan fungsi prasarana dan sarana sumberdaya air dan irigasi guna mendukung aktivitas produksi, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan, melalui konservasi sumber-sumber air, pendayagunaan irigasi, air baku, drainase, industri, serta pengendalian banjir dan kekeringan
4. Peningkatan sosialisasi dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam rangka pengurangan risiko bencana

5. Perwujudan kemandirian ekonomi berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan;
6. Perwujudan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender;
7. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi; dan
8. Perwujudan pemerataan sarana prasarana yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah.

Menindaklanjuti tahapan dan fokus pembangunan di atas, maka arah kebijakan tiap tahun yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan disajikan dalam keterkaitan strategi/prioritas pembangunan jangka menengah dengan arah kebijakan sebagai berikut:

Tabel 3.6
Penahapan Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN				
Tahun I 2026	**Tahun II 2027**	**Tahun III 2028**	**Tahun IV 2029**	**Tahun V 2030**
Fokus pembangunan yang dilakukan yaitu Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur melalui Pembangunan konektivitas difokuskan untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan, pusat pertumbuhan ekonomi (kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus)	Fokus pembangunan yang akan dilakukan yaitu Mengurangi tingkat kemiskinan daerah melalui Mewujudkan transformasi ekonomi dalam Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan	Fokus pembangunan yang akan dilakukan yaitu Penguatan transformasi Sosial dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia Dan Masyarakat Yang Berkualitas, Cerdas dan Sehat dilakukan dengan arah kebijakan pembangunan sumbr daya manusia yang produktif adalah intervensi secara konkret dalam pendidikan dan kesehatan	Fokus pembangunan pada tahun 2025 ini, Penguatan Fondasi transformasi tata Kelola Pemerintahan Pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik	Fokus pembangunan pemerintah Kabaupaten Tapanuli Selatan Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam

Disamping itu juga dalam rangka mendukung pencapaian visi pembangunan Tapanuli Selatan, optimalisasi aset daerah menjadi salah satu fokus strategis Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam periode RPJMD 2025–2029. Aset daerah memiliki peran penting sebagai sumber daya strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan akan mengedepankan tata kelola aset yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pemanfaatan ekonomi melalui berbagai strategi, di antaranya:

- Inventarisasi dan penilaian ulang aset daerah secara berkala guna menjamin akurasi dan legalitas kepemilikan.
- Pemanfaatan aset secara produktif, termasuk melalui kerja sama pemanfaatan (KSP), sewa, bangun guna serah (BGS), dan bentuk lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- Digitalisasi pengelolaan aset melalui sistem informasi manajemen aset daerah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
- Revitalisasi dan optimalisasi aset tidak aktif atau diam, agar dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah.
- Peningkatan kapasitas SDM pengelola aset agar mampu mengelola aset secara efisien dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Optimalisasi aset juga diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, seperti penyediaan lahan untuk infrastruktur publik, kawasan industri, serta mendukung pengembangan investasi daerah. Dengan optimalisasi aset yang tepat, diharapkan mampu meningkatkan kemandirian fiskal daerah, memperkuat pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

6.3 Penjabaran Implementasi Program Unggulan Daerah

Program unggulan Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025-2029 yang merupakan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati dalam 5 tahun kedepan, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu 19 program unggulan yang antara lain:

Pada misi 1 – mewujudkan infrastruktur mantap & merata

1. Jalan mantap tapsel

   Pengembangan infrastruktur jalan dan meningkatkan kondisi mantap jalan kabupaten penghubung pusat layanan, pusat ekonomi dan akses jalan ke desa terluar (sipirok, sd hole , aek bilah) , termasuk menjalin sinergitas dengan pemerintah atasan pada ruas jalan nasional/provinsi.

2. Akses desa maju

   membangun/menembus koridor jalan baru ke desa tertinggal agar rasio keterhubungan desa terpencil naik pada 2029

3. Jembatan aman tapsel

   Pengelolaan, rehabilitasi, pembangunan dan pengawasan jembatan berisiko & pembangunan jembatan strategis di lintas ekonomi utama (koridor pasar-sentra produksi).

4. Sistem irigasi terpadu

Melakukan koordinasi, kolaborasi dan sinergitas untuk mendukung ketahanan pangan pada daerah irigasi baik kewenangan pusat seperti daerah irigasi payasordang dan daerah irigasi batang angkola , kewenangan provinsi seperti pada daerah irigasi sipirok kompleks juga mengoptimalkan penanganan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten dimulai dari hulu bendung, embung, cekdam, pintu air hingga ke saluran irigasi untuk menjamin ketersediaan air persawahan dan perikanan.

5. Air bersih untuk semua

   Pembangunan dan perbaikan infrastruktur air bersih (sumur, tangki, instalasi pengolahan) untuk menambah kapasitas air bersih, perluasan jaringan distribusi, berkolaborasi untuk mengoptimalkan potensi air bersih yang belum termanfaatkan, perlindungan dan revitalisasi sumber daya air pada bagian hulu, edukasi masyarakat , efisiensi dan efektifitas pemanfaatan air bersih melalui meterisasi serta kemandirian pengelolaan air bersih di desa-desa terluar.

6. Desa terang energi

   Perluasan energi terbarukan (surya/mikro-hidro) untuk mewujudkan 100 % rumah tangga berlistrik dan lampu jalan

desa serta pemberian subsidi instalasi listrik untuk masyarakat kurang mampu .

7. Tapsel digital connect
   Kerjasama penyediaan wifi gratis di lokasi strategis dengan operator seluler dan perluasan jangkauan jaringan internet ke seluruh kecamatan.

Misi 2 – pendapatan masyarakat naik

8. Petani sejahtera
   Peningkatan sarana produksi pertanian (bibit unggul, pupuk bersubsidi, obat obatan) dan alsintan untuk meningkatan produktifitas hasil pertanian, mengoptimalkan potensi komoditi unggulan sektor pertanian seperti padi,kopi , salak, gula aren, sawit dan komoditi lainnya serta peningkatan produksi perikanan seperti Danau Siais yang memiliki potensi pengembangan budi daya perikanan.
9. Stabilitas harga gabah dan logistik
   Stabilitas harga gabah yang menguntungkan petani dan dipantau dengan informasi harga real-time; termasuk juga pengendalian inflasi beberapa komoditi.
10. Umkm naik kelas
    Pengembangan umkm melalui akses modal, peningkatan

Daya saing, perluasan pasar, dan penerapan teknologi, sertifikasi halal;

11. Ekonomi kreatif & pariwisata tapsel
    Peningkatan kerjasama pengembangan objek wisata seperti pengembangan Potensi wisata Danau Siais, kampanye melalui content creator lokal, promosi dan identifikasi wisata baru, serta pengembangan konsep gerakan sadar wisata (gsw), kampanye kreator lokal,

12. Pemberdayaan ibu rumah tangga dan wira usaha pesantren
    Pembentukan dan pemberdayaan kelompok keuangan mikro perempuan untuk ekonomi keluarga dan pengembangan potensi ekonomi pondok pesantren melalui wirausaha produktif.

Misi 3 – SDM unggul, sehat & cerdas

13. Karakter unggul tapsel
    Peningkatan akhlak masyarakat, imtaq keagamaan, kebudayaan, adat istiadat dan pendidikan moral terutama generasi muda dan menjaga kearifan lokal

14. Peningkatan kualitas pendidikan renovasi/pembangunan ruang kelas, membangun sekolah unggul dan pengoptimalisasian sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik. Juga termasuk

mendukung sekolah rakyat.

Peningkatan sarana dan prasarana sekolah Paud dan pembangunan PAUD di setiap desa

15. Beasiswa prestasi tapanuliselatan

    Pemberian beasiswa hingga jenjang pendidikan tinggi.

16. Sehat tapsel 2029

    Penambahan sarana dan prasana kesehatan, peningkatan kualitas tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat termasuk pemerataan bidan desa ke seluruh desa, perluasan pelayanan berobat gratis kepada seluruh masyarakat tapanuli selatan, revitalisasi rsud menciptakan rumah sakit unggulan berskala regional

Misi 4 – reformasi pelayanan publik

17. Birokrasi lincah & bersih

    Peningkatan kompetensi, integritas dan moral aparatur sipil negara (asn) secara adil, fair dan akuntabel dimulai dari, desa, kelurahan sampai kabupaten, memperpendek prosedur dan mempercepat penyelesaian pelayanan, peningkatan kompetensi petugas pelayanan, pelayanan proaktif dan menghilangkan pungutan liar

18. Adminduk jemput bola

    Jemput bola kepada masyarakat tapsel untuk melengkapi administrasi kependudukan (ktp elektronik, kartu keluarga dan akte kelahiran anak) melalui mobil layanan keliling;

Misi 5 – permukiman asri & berkelanjutan

19. Permukiman hijau tapsel

    Penyediaan bantuan untuk perbaikan rumah bagi Keluarga kurang mampu melalui program bedah rumah, penyediaan akses kepada masyarakat untuk ikut serta dalam program bedah rumah melalui program partisipatif, peningkatan kerja sama dengan pemerintah pusat, swasta, masyarakat dalam pendanaan dan pelaksanaan program perbaikan, sanitasi, lingkungan dan permukiman dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan sumber daya alam yang asri dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip tujuan dan program sdgs (suistainable development goals).

Didalam dokumen RPJM ada 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2025–2029 yang terdiri dari :

1. Makan Bergizi Gratis di Sekolah dan Pesantren
2. Pemeriksaan Kesehatan Gratis & Penuntasan TBC
3. Pembangunan & Pengembangan Rumah Sakit Daerah
4. Renovasi & Pembangunan Sekolah
5. Pengembangan Lumbung Pangan Nasional, Daerah & Desa
6. Kartu Kesejahteraan Sosial & Kartu Usaha

7. Pembangunan Infrastruktur Desa & Penyediaan Rumah Murah Bersanitasi
8. Peningkatan Penerimaan Negara terhadap PDB

Untuk mendukung Program Hasil cepat Nasional tersebut Provinsi Sumatera Utara metepakan 8 Program Hasil Cepat/Quick Wins Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Puskesmas
2. Pembangunan Rumah Sakit di Daerah Terpencil
3. Program Penurunan Stunting melalui Inovasi BKKBN (Genting, Tamasya, GATI, Lansia Berdaya, SuperApp)
4. Program Makan Bergizi Gratis untuk Anak dan Ibu Hamil
5. enerapan Universal Health Coverage (UHC)
6. Penyediaan Listrik dan Internet untuk Sekolah di Daerah Tertinggal
7. Peningkatan Jalan, Jembatan, dan Irigasi Mendukung Ketahanan Pangan
8. Perbaikan Jalan Provinsi dan Aksesibilitas Publik

Kemudian untuk mendukung Program Hasil Terbaik Cepat/ Quick Wins Nasional dan Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Selatan merumuskan 9 Program Hasil Terbaik Cepat/ Quick Wins, dan program hasil cepat ini merupakan dari upaya menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan

struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah. Berikut adalah program kerja hasil terbaik yang akan dijalankan untuk mencapai lima Misi (Panca Cita) yang akan dijalankan untuk kemajuan masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut :

1. **Swasembada Ikan dan Peternakan**

   Mendorong ketahanan pangan dan ekonomi rakyat melalui peningkatan produksi ikan budidaya dan peternakan rakyat. Pemerintah akan memperluas kawasan budidaya, mendukung penyediaan bibit, pakan, serta penguatan koperasi nelayan, mendorong pengembangan potensi budidaya ikan di Danau Siais dan peternak untuk mewujudkan kemandirian sektor pangan hewani.

2. **Tata Kelola Irigasi dan Air Minum**

   Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi serta sistem air minum desa yang berkelanjutan guna mendukung ketahanan pertanian dan kesehatan masyarakat. Diterapkan sistem pengelolaan terpadu berbasis partisipasi masyarakat dan teknologi tepat guna.

3. **Konektivitas Jalan dan Telekomunikasi**

   Peningkatan aksesibilitas antarwilayah dengan pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, jalan kabupaten, serta perluasan

jaringan telekomunikasi dan internet ke wilayah blank spot sebagai fondasi transformasi digital daerah.

4. **Digitalisasi Sistem Keuangan Puskesmas, Sekolah, dan Desa**
   Transformasi tata kelola keuangan berbasis digital di unit pelayanan dasar (puskesmas, sekolah, dan desa) untuk mendorong transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dana publik secara real time dan terintegrasi.
5. **Kemudahan Akses Permodalan UMKM, Branding dan Marketing Produk Lokal**
   Memperkuat ekosistem UMKM melalui fasilitasi akses pembiayaan, pelatihan penguatan merek (branding), digital marketing, serta promosi produk unggulan lokal di pasar nasional dan internasional.
6. **Reformasi Birokrasi melalui Penilaian Kinerja Berbasis Digitalisasi, Satu Data, dan Inovasi**
   Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan responsif melalui sistem penilaian kinerja digital, integrasi data antarperangkat daerah (satu data), serta penerapan inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada hasil.
7. **Pemerataan "Dokter Spesialis Masuk Desa" dan "Bidan Desa"**
   Peningkatan layanan kesehatan primer melalui distribusi tenaga kesehatan secara merata, khususnya di wilayah terpencil, untuk

menjamin hak dasar masyarakat dalam mendapatkan layanan medis yang berkualitas dan mudah dijangkau.

8. **Beasiswa Hingga Pendidikan Tinggi**

   Investasi jangka panjang di bidang SDM melalui pemberian beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa berprestasi serta dari keluarga kurang mampu hingga jenjang perguruan tinggi, sebagai bentuk keberpihakan pada masa depan generasi emas Tapanuli Selatan.

9. **Pengembangan Pariwisata dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan**

   Pemajuan destinasi wisata berbasis budaya dan alam yang ramah lingkungan, disertai pelestarian ekosistem dan tata ruang hijau, sebagai penggerak ekonomi kreatif, pelestarian budaya,Pengembangan Potensi destinasi wisata danau Siais dan pembangunan berkelanjutan.

Dari Program unggulan Daerah tersebut makan dapat disimpulkan memuat 13 program prioritas Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Selatan yang mendukung Program Prioritas Nasional Dan Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara serta mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor, Program Prioritas Pembangunan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah

2. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan swasembada pangan;
3. Peningkatan Kesempatan Kerja, Kesejahteraan Ekonomi dan Pelayanan Sosial Masyarakat;
4. Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM
5. Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)
6. Penguatan Ekosistem investasi daerah dan daya saing ekonomi berbasis Potensi Unggul
7. Penguatan Dan Pemenuhan Akses Pendidikan dan Keterjangkauan Layanan Pendidikan;
8. Penguatan dan Peningkatan Kualitas dan Aksessibilitas Pelayanan Kesehatan serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat;
9. Penguatan Reformasi Birokrasi di Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
10. Pembangunan Permukiman Layak dan Berkelanjutan
11. Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup melalui Pengembangan Wilayah Yang berwawasan Lingkungan serta kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana;
12. Pengembangan Kepariwisataan Daerah;

13. Pelestarian seni budaya,kearifan lokal, peningkatan kepariwisataan, Peningkatan prestasi Kepemudaan dan Olahraga;

Program Prioritas ini akan mendukung 17 Program Prioritas Nasional yaitu :

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi
5. Pemberantasan kemiskinan
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba
7. Menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat (melalui BPJS, penyediaan obat)
8. Penguatan pendidikan, sains, teknologi, dan digitalisasi
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara, serta hubungan internasional yang kondusif
10. Penguatan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, anak dan penyandang disabilitas
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani

13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau dan bersanitasi baik
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM (melalui kredit usaha dan pengembangan IKN serta kota inovatif mandiri)
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA, termasuk sumber daya maritim
16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan prestasi olahraga

Sedangkan Program Prioritas Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Ekonomi Kreatif dan Industri Berbasis Teknologi
2. Infrastruktur dengan Prioritas Jalan, Jembatan, dan Irigasi yang Langsung Berdampak pada Peningkatan Ekonomi Masyarakat Lokal
3. Kesehatan yang Terintegrasi di Beberapa Titik Kawasan yang Menjadi Sentra Layanan Kesehatan Masyarakat Terpadu

4. Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Nilai Budaya dan Kearifan Lokal Agar Diversifikasi Hasil Pertanian Menjadi Lebih Produktif dan Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Lokal
5. Melanjutkan Pembangunan Berbasis Desa
6. Meningkatkan Ketahanan Sosial dan Budaya yang Mendukung Suasana yang Harmonis, Toleran dan Rukun
7. Pariwisata yang Menggerakkan Potensi Alam Lokal di Pedesaan dan Perkotaan dengan Melibatkan Partisipasi Masyarakat Secara Langsung (Komunitas, Pemerintah Daerah/Desa/Kelurahan dan Pengusaha Lokal)
8. Pemberantasan Kemiskinan melalui Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Rentan Secara Menyeluruh dan Tepat Sasaran
9. Pemberdayaan Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas dalam Berkarya dan Berprestasi
10. Pendidikan Melalui Program Sekolah Unggulan Berbasis Peningkatan Skill yang Berhubungan dengan Kebutuhan Industri dan Potensi Wilayah di Tingkat Lokal
11. Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dan Berketahanan Terhadap Bencana
12. Pengembangan Ekonomi Hijau dan Biru

13. Pengembangan Sistem Logistik dan Transportasi yang Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Daya Saing
14. Penguatan Stabilitas Makro ekonomi dan Kesinambungan Fiskal Daerah
15. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
16. Terciptanya Kehidupan yang Lebih Aman dan Tertib
17. Transformasi Digital dan Inovasi Teknologi Pada Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat.

Tabel 3.9.

Keterkaitan arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029 dengan Program Prioritas

Visi : Tapanuli Selatan yang Maju dan Berkarakter Unggul, Sehat, Cerdas dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045							
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Outcome**	**Indikator**	**Satuan**	**Program Prioritas**	**Keterangan**
1	**2**	**3**		**4**	**5**		**14**
Misi 1: Perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sarana air bersih, listrik desa dan jaringan telekomunikasi	**Tujuan 1: Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah**			**Indeks Pembangunan Infrastruktur**	**Point**		
		Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur daerah	Meningkatnya aksesibilitas, konektivitas, dan keberlanjutan infrastruktur dalam mendukung pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	**%**	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah	
Misi 2 : Peningkatkan pendapatan masyarakat	**Tujuan 2 : Mewujudkan Peningkatkan pendapatan**			**Pertumbuhan Ekonomi**	%		

Visi : Tapanuli Selatan yang Maju dan Berkarakter Unggul, Sehat, Cerdas dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045							
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Outcome**	**Indikator**	**Satuan**	**Program Prioritas**	**Keterangan**
1	**2**	**3**		**4**	**5**		**14**
	masyarakat						
				Indeks Akses Keuangan Daerah	indeks		
		Sasaran 1: Peningkatan Pendapatan perkapita masyarakat	Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat secara merata	PDRB Perkapita	Rp. Juta	Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan swasembada pangan	
			Meningkatnya peran dan kinerja sektor-sektor unggulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan	Kontribusi PDRB Kabupaten	%	Hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA)	
		Sasaran 2: Meningkatnya Daya Saing Daerah	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, inovatif, dan kompetitif berbasis potensi unggulan	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	Penguatan Ekosistem investasi daerah dan daya saing ekonomi berbasis Potensi Unggul dan Pengembangan Kepariwisataan	

Visi : Tapanuli Selatan yang Maju dan Berkarakter Unggul, Sehat, Cerdas dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045							
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Outcome**	**Indikator**	**Satuan**	**Program Prioritas**	**Keterangan**
1	**2**	**3**		**4**	**5**		**14**
			local			Daerah	
		Sasaran 3 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Menurunnya jumlah penduduk miskin dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara merata	Persentase Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan	%	Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM	
			Menurunnya tingkat pengangguran terbuka melalui peningkatan kesempatan kerja yang produktif dan berkelanjutan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	Peningkatan Kesempatan Kerja, Kesejahteraan Ekonomi dan Pelayanan Sosial Masyarakat	
			Menurunnya tingkat ketimpangan distribusi pendapatan antarpenduduk sehingga tercipta keadilan sosial dan ekonomi	Gini Ratio	%	Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM	
Misi 3 : Penciptaan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehat dan cerdas	**Tujuan 3 : Mewujudkan Penciptaan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehat dan cerdas**			**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Indeks**		

Visi : Tapanuli Selatan yang Maju dan Berkarakter Unggul, Sehat, Cerdas dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045							
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Outcome**	**Indikator**	**Satuan**	**Program Prioritas**	**Keterangan**
1	**2**	**3**		**4**	**5**		**14**
		Sasaran 1: Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing	Meningkatnya akses dan keberlanjutan pendidikan masyarakat untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	Penguatan Dan Pemenuhan Akses Pendidikan dan Keterjangkauan Layanan Pendidikan	
			Meningkatnya capaian pendidikan penduduk yang mencerminkan pemerataan dan kesinambungan pendidikan dasar hingga menengah	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	Penguatan Dan Pemenuhan Akses Pendidikan dan Keterjangkauan Layanan Pendidikan	
		Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	Penguatan dan Peningkatan Kualitas dan Aksessibilitas Pelayanan Kesehatan serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat	
Misi 4 : Reformasi birokrasi dan pelayanan publik	**Tujuan 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi dan pelayanan publik**			**Indeks Reformasi Birokrasi**	Indeks		

Visi : Tapanuli Selatan yang Maju dan Berkarakter Unggul, Sehat, Cerdas dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045							
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Outcome**	**Indikator**	**Satuan**	**Program Prioritas**	**Keterangan**
1	**2**	**3**		**4**	**5**		**14**
		Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya budaya integritas dan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah yang tercermin dari tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	Penguatan Reformasi Birokrasi di Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program pembangunan secara efisien dan efekti	Peringkat/ Nilai SAKIP	Nilai	Penguatan Reformasi Birokrasi di Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan	
Misi 5 : Perbaikan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang asri dan berkelanjutan	**Tujuan 5 : Mewujudkan Perbaikan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang asri dan berkelanjutan**			**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**	**Indeks**		
		Sasaran 1 : Meningkatnya	Meningkatnya kualitas dan daya	**Indeks Kualitas**	**Indeks**	Pembangunan Permukiman	

Visi : Tapanuli Selatan yang Maju dan Berkarakter Unggul, Sehat, Cerdas dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045							
Misi	**Tujuan**	**Sasaran**	**Outcome**	**Indikator**	**Satuan**	**Program Prioritas**	**Keterangan**
1	**2**	**3**		**4**	**5**		**14**
		kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	dukung lingkungan hidup yang mendukung kehidupan masyarakat secara sehat, aman, dan berkelanjutan	**Lingkungan Hidup (IKLH)**		Layak dan Berkelanjutan	
			Menurunnya dampak perubahan iklim melalui pengendalian emisi gas rumah kaca dari aktivitas pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Juta ton/quplane	Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup melalui Pengembangan Wilayah Yang berwawasan Lingkungan serta kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana	
		Sasaran 2 : Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Rumah Layak Huni	Meningkatnya persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni sesuai kriteria SPM dan indikator perumahan	Persentase Penurunan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	Pembangunan Permukiman Layak dan Berkelanjutan	

Sedangkan untuk melihat keterkaitan antara Visi dan Misi yang telah dirumuskan dengan Arah kebijakan dapat dilihat pada tabel 3.8 dibawah ini.

Tabel 3.8

Keterkaitan Misi dengan Arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029

VISI : Tapanuli Selatan yang Maju dan Berkarakter Unggul, Sehat, Cerdas dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045		
MISI	**ARAH KEBIJAKAN**	**KETERANGAN**
1	**2**	**3**
Misi 1: Perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sarana air bersih, listrik desa dan jaringan telekomunikasi		
	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan dan penataan sistem drainase untuk menunjang konektivitas dan pengembangan wilayah.	
	Peningkatan penyediaan fasilitas umum berupa prasarana dan sarana transportasi melalui jembatan baru, pemeliharaan kondisi jembatan yang sudah ada untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah	
	Pemerataan dan perbaikan ketersediaan penyediaan infrastruktur sumberdaya air untuk menunjang irigasi pertanian	
	Konservasi dan Pengelolaan Air Berkelanjutan	
	Menyediakan bangunan gedung yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik	
	Pengembangan Infrastruktur SPAM Perpipaan dan Non-Perpipaan serta Peningkatan Kualitas dan Keberlanjutan Sumber Air	
	Peningkatan akses listrik di daerah terpencil melalui pembangunan jaringan listrik baru dan optimalisasi jaringan eksisting,Mendorong penggunaan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik di desa-desa yang belum terjangkau jaringan listrik PLN, Optimalisasi kerja sama dengan PLN dan sektor swasta dalam mempercepat elektrifikasi pedesaan serta Penyediaan bantuan sambungan listrik bagi masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan kesejahteraan.	
	Pemberian subsidi atau bantuan untuk pemasangan instalasi listrik di rumah-rumah penduduk yang kurang mampu	
	Pembangunan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang merata untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat,	
	Membangun dan memperluas jaringan **internet broadband** hingga ke daerah terpencil dan tertinggal	
	Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan para provider dan operator seluler	
	Meningkatkan edukasi masyarakat tentang pemanfaatan internet secara produktif dan aman	
	Penguatan Regulasi dan Kepatuhan Tata Ruang, Revisi RTRW sesuai dengan perkembangan dan	

VISI : Tapanuli Selatan yang Maju dan Berkarakter Unggul, Sehat, Cerdas dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045		
MISI	**ARAH KEBIJAKAN**	**KETERANGAN**
1	**2**	**3**
	penyusunan Dokumen RDTR Sipirok	
	Pengelolaan Ruang yang Berkelanjutan	
	Penyusunan dan Implementasi RTBL yang Berbasis Perencanaan Terpadu, terutama Kecamatan sipirok sebagai Ibu kota Kabupaten	
	Pengembangan dan Integrasi Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
	Mendorong kerja sama pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur komunikasi	
Misi 2 : Peningkatkan pendapatan masyarakat	Pegembangan Potensi Wisata dan Potensi Budi daya ikan di Danau Siais	
	Pengembangan Pertanian Organik dan Padi Unggulan Lokal	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian dalam meningkatkan Produksi hasil Pertanian (Baik berupa Jaringan Irigasi, Jalan Usaha Tani, Jalan Produksi, Bibit, Pupuk,alsinta dll)	
	Peningkatan Pengendalian Kesehatan hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner	
	Pemetaan dan penyediaan peternakan di daerah Tapanuli Selatan	
	Peningkatan SDM Pertanian dan Penyediaan Basis Data Pertanian (Digitalisasi Pertanian)	
	Pengaturan Pola Tanaman dalam meningkatkan Produksi Hasil Pertanian	
	Penanganan Pasca Panen dan Promosi Pemasaran	
	Peningkatan dan pengembangan Lumbung Pangan serta penguatan kelembagaan pangan	
	Penguatan Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap	
	Pembangunan 1000 Kolam ikan dan penyediaan pakan, Peningkatan kwalitas dan produksi BBI	
	Penguatan Teknologi dan Inovasi Pemasaran Hasil Perikanan	
	Pengembangan Kawasan Pariwisata Unggulan dan Desa Wisata serta Memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha pariwisata, dan komunitas lokal dalam pengembangan destinasi,	
	Pengembangan Kemitraan Pemasaran Produk Unggulan	
	Penguatan Promosi dan Pameran Produk Unggulan	
	Peningkatan Pengawasan Harga Bahan Kebutuhan Pokok	
	Peningkatan Kualitas Pasar Tradisional	
	Memperbaiki **fasilitas infrastruktur pasar**, seperti sanitasi, drainase, dan manajemen limbah	
	Mendorong **digitalisasi pasar tradisional** dengan sistem pembayaran non-tunai dan pemasaran berbasis online.	
	Penguatan Teknologi Produksi dan Pembinaan IKM	
	Peningkatan Kemudahan Perizinan Usaha dan Legalitas IKM	
	Akses Pemasaran Melalui E-Commerce dan Digitalisasi Industri	
	Pembinaan dan Pemberdayaan Manajemen Usaha	
	Peningkatan Teknologi Produksi dan Pemasaran Berbasis E-Commerce	

VISI : Tapanuli Selatan yang Maju dan Berkarakter Unggul, Sehat, Cerdas dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045		
MISI	**ARAH KEBIJAKAN**	**KETERANGAN**
1	**2**	**3**
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Penguatan Kelembagaan, Koperasi, UMKM dan UKM	
	Pengembangan Basis Data Koperasi,UMKM dan UKM	
	Pemberdayaan Klaster UMKM dan UKM Berbasis Teknologi Informasi	
	Fasilitasi Akses Permodalan dengan Program Subsidi Bunga, menaikkan kelas usaha mikro dan memperluas peran dalam rantai pasok industri dan ekspor	
	Branding Produk Unggulan dan Gerakan “Aku Cinta Produk Tapanuli Selatan" dalam meningkatkan daya saing produk lokal, meningkatkan standar mutu dan perluasan kanal promosi	
	Peningkatan Iklim Investasi dan Promosi Investasi Berkelanjutan	
	Penyediaan Basis Data Informasi Investasi	
	Kemudahan Perizinan Melalui Optimalisasi Teknologi Informasi	
	Peningkatan Kapasitas SDM dalam Mendukung Investasi	
	Penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta	
	Pengembangan Pelatihan Wirausaha untuk Meningkatkan Kemandirian Tenaga Kerja	
	Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Tenaga Kerja Mandiri (TKM), Perlu peningkatan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja saat ini, dan Perlindungan bagi Pekerja Rentan	
	Peningkatan Bursa Kerja Online untuk Mempermudah Akses Informasi Ketenagakerjaan melauai aplikasi SIAP Kerja	
	Fasilitasi Hubungan Industrial dan Perlindungan Ketenagakerjaan	
	Peningkatan Kemitraan Strategis antara Pemerintah dan Dunia Usaha	
	Memberikan Kemudahan Berusaha bagi Dunia Usaha	
	Optimalisasi Program CSR (Corporate Social Responsibility) untuk Pembangunan Daerah	
	Pemerataan Distribusi dan Ketersediaan Pangan	
	Meningkatkan Aksesibilitas dan Keterjangkauan Pangan	
	Pemanfaatan Sumber Daya Lokal untuk Ketahanan Pangan	
	Meningkatkan jumlah desa mandiri dan maju,Mengurangi jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal,Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar,Meningkatkan daya saing ekonomi desa dan Meningkatkan ketahanan lingkungan desa	
Misi 3 : Penciptaan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehat dan cerdas		
	Peningkatan Akses dan Partisipasi Pendidikan Dasar melalui : Mengoptimalkan Gerakan Ayo Sekolah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sejak dini	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs	
	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kompetensi Guru	
	Pemberian Insentif dan Beasiswa bagi Siswa Kurang Mampu	

VISI : Tapanuli Selatan yang Maju dan Berkarakter Unggul, Sehat, Cerdas dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045		
MISI	**ARAH KEBIJAKAN**	**KETERANGAN**
1	**2**	**3**
	Meningkatkan Kolaborasi dengan Masyarakat dan Sektor Swasta dalam bidang pendidikan	
	Melakukan pendataan komprehensif terhadap anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah	
	Peningkatan Fasilitas,kualitas, jumlah SDM pendidik dan Infrastruktur Pendidikan Kesetaraan	
	Pengembangan Minat dan bakat serta Karakter anak didik agar lebih unggul contoh dengan menghidupkan kembali Ekstrakurikuler di sekolah	
	Peningkatan Penghasilan dan Insentif Guru	
	Pemajuan Kebudayaan dan perlindungan Cagar Budaya melalui Melakukan pendataan, identifikasi, dan inventarisasi warisan budaya dan cagar budaya di daerah dan Memperkuat regulasi dan kebijakan perlindungan cagar budaya agar tidak mengalami kerusakan atau alih fungsi dll	
	Pendistribusian, Pemerataan dan Peningkatan Akses Layanan Kesehatan sesuai dengan Standar pelayanan Kesehatan	
	Penanggulangan Stunting di daerah	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan	
	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Tenaga Kesehatan	
	Perlindungan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan Rentan	
	Peningkatan Akses dan Penyediaan Sarana Prasarana Olahraga	
	Peningkatan Pembinaan dan Kompetisi Olahraga	
	Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Pelatih Olahraga	
	Pemenuhan Jumlah Dokter umum dan Spesialis dan Tenaga Medis sesuai dengan standar kebutuhan Rumah Sakit Umum	
	Penigkatan Rumah Sakit Umum daerah spesialis berskala Regional	
	Pengoptimalisasian Kegiatan Posyandu di tingkat desa/kelurahan	
	Penguatan Program Keluarga Berencana (KB) dan Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang	
	Pengembangan dan Optimalisasi Kampung KB	
	Peningkatan Partisipasi Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R)	
	Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan dengan Mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan di berbagai sector	
	Pemenuhan Hak Anak di Berbagai Bidang Pembangunan dengan Mengembangkan kebijakan dan program yang menjamin perlindungan serta pemenuhan hak anak, seperti hak atas identitas, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang aman dll	
	Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dengan Memperkuat peran perempuan dalam ekonomi, politik, sosial, dan budaya, termasuk kepemimpinan perempuan dalam organisasi dan pemerintahan dll	

VISI : Tapanuli Selatan yang Maju dan Berkarakter Unggul, Sehat, Cerdas dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045		
MISI	**ARAH KEBIJAKAN**	**KETERANGAN**
1	**2**	**3**
	Penguatan Sistem Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Keluarga	
	Mendorong peran serta masyarakat, komunitas, dan dunia usaha dalam perlindungan perempuan dan anak, termasuk melalui CSR yang berorientasi social	
Misi 4 : Reformasi birokrasi dan pelayanan publik		
	Penguatan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah melalui Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan pendekatan berbasis data dan evidence-based policy dan Memperkuat sinkronisasi perencanaan antara pemerintah daerah tetangga, provinsi, dan pusat agar lebih efektif dan efisien	
	Meningkatkan efektivitas sistem pengawasan internal melalui monitoring dan evaluasi berbasis kinerja	
	Meningkatkan standar layanan publik melalui SOP yang terukur dan berbasis kebutuhan masyarakat	
	Pengembangan SDM Aparatur Melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	
	Intensifikasi Pengelolaan Pajak Daerah dengan Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi, edukasi, dan pengawasan yang lebih ketat dan Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam sistem pemungutan pajak daerah untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dll	
	Intensifikasi Retribusi Daerah dengan Melakukan evaluasi dan revisi tarif retribusi daerah secara berkala agar sesuai dengan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat dan Meningkatkan pengelolaan retribusi daerah berbasis digital untuk meminimalisir kebocoran dan meningkatkan transparans dll	
	Pengamanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD), Khususnya Tanah, Pengamanan Fisik Barang Milik Daerah (BMD), Perbaikan Manajemen Tata Kelola Barang Milik Daerah dan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Secara Optimal	
	Pengembangan Zona Integritas untuk Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	
	Perbaikan Mekanisme dan Harmonisasi dalam Perumusan Kebijakan dengan Meningkatkan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah tetangga, provinsi, pusat, stakeholder, dan masyarakat melalui forum konsultasi publik yang efektif dan Memanfaatkan teknologi informasi (e-Planning, e-Monev) untuk menyusun perencanaan berbasis data yang lebih akurat dan terintegrasi.	
	Peningkatan Kualitas Penelitian dan Pengembangan (Litbang) untuk Mendukung Pembangunan Daerah,Mendorong Perangkat Daerah untuk Mengembangkan Inovasi dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Penguatan Tata Kelola Kelitbangan untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah	
	Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintahan	
	Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Smart City	

VISI : Tapanuli Selatan yang Maju dan Berkarakter Unggul, Sehat, Cerdas dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045		
MISI	**ARAH KEBIJAKAN**	**KETERANGAN**
1	**2**	**3**
	Penguatan Keamanan Informasi dalam Sistem Pemerintahan Daerah, Optimalisasi Pemanfaatan Persandian untuk Keamanan Data Pemerintah dan Penguatan Regulasi dan Tata Kelola Keamanan Siber Daerah	
	Penguatan Tata Kelola dan Regulasi Satu Data Daerah melalui Menyusun Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) tentang Satu Data Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai dasar hukum dalam implementasi kebijakan dan Mengembangkan pedoman standar data, metadata, dan interoperabilitas sistem data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia (SDI) dll	
	Penguatan Infrastruktur Teknologi dan Integrasi Sistem Data	
	Penguatan Regulasi dan Tata Kelola Sistem Merit dengan Menyusun regulasi daerah terkait penerapan sistem merit, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ASN, terutama dalam perencanaan kebutuhan pegawai, pengisian jabatan, serta pola karier ASN berbasis kompetensi dan kinerja dll	
	Peningkatan Kualitas Penerimaan ASN Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi dan Penguatan Pendidikan dan Pelatihan ASN untuk Meningkatkan Kompetensi	
	Peningkatan Akses dan Kemudahan Layanan Administrasi Kependudukan dengan Memperluas layanan jemput bola dengan melakukan pelayanan langsung ke desa-desa dan kelurahan, terutama di daerah terpencil dan sulit dijangkau dan Mengoptimalkan layanan keliling administrasi kependudukan melalui mobil layanan kependudukan yang menjangkau berbagai wilayah dll	
	Peningkatan Kualitas dan Kecepatan Layanan Administrasi Kependudukan	
	Penguatan Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Pembangunan melalui Meningkatkan integrasi dan pemanfaatan data kependudukan dalam berbagai sektor pemerintahan untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis data kependudukan	
	Penguatan Regulasi dan Kepatuhan terhadap Administrasi Kependudukan	
	Penguatan SDM Pustakawan dengan Menambah jumlah pustakawan sesuai dengan kebutuhan perpustakaan di tingkat daerah dan Meningkatkan kualitas SDM pustakawan melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi di bidang literasi digital, manajemen perpustakaan, serta layanan informasi berbasis teknologi dll	
	Penguatan SDM Arsiparis dengan Menambah jumlah Arsiparis di perangkat daerah sesuai kebutuhan guna memastikan pengelolaan arsip yang profesional dan Meningkatkan kualitas SDM Arsiparis melalui pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan kompetensi di bidang pengelolaan arsip, baik secara konvensional maupun digital dll	
	Menerapkan standar nasional dalam pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	
	Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Kecamatan	

VISI : Tapanuli Selatan yang Maju dan Berkarakter Unggul, Sehat, Cerdas dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045		
MISI	**ARAH KEBIJAKAN**	**KETERANGAN**
1	**2**	**3**
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kecamatan	
	Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kecamatan	
	Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penyusunan kebijakan tingkat kecamatan, seperti melalui musyawarah kecamatan dan forum komunikasi warga	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Sekretariat DPRD	
Misi 5 : Perbaikan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang asri dan berkelanjutan	Penguatan Fasilitasi Fungsi Legislasi, Penganggaran, dan Pengawasan	
	Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Keberlanjutan	
	Peningkatan Ketaatan Pelaku Usaha terhadap Regulasi Lingkungan dan Penguatan Pemantauan dan Evaluasi Kualitas Lingkungan	
	Pengembangan dan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau dengan Memperluas pembangunan taman kota dan taman lingkungan di berbagai kawasan untuk menciptakan ruang hijau yang nyaman dan sehat dan Mengintegrasikan RTH dalam rencana tata ruang kota untuk memastikan keseimbangan antara pembangunan dan ekosistem hijau dll	
	Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Kota serta Taman Kota	
	Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Publik sebagai Ruang Hijau	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan RTH	
	Pembuatan, penegakan regulasi pengelolaan persampahan masyarakat dan Peningkatan Kesadaran serta Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	
	Mendorong Penciptaan Lingkungan yang Kondusif untuk Sanitasi Total melalui Meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang pentingnya sanitasi yang baik dan perilaku hidup bersih serta sehat (PHBS) serta Peningkatan Penyediaan Akses Sanitasi yang Layak	
	Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	
	Penguatan Pelayanan Informasi Kebencanaan melalui Pembangunan sistem peringatan dini (Early Warning System) untuk memberikan informasi bencana secara cepat dan akurat, Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, Peningkatan Penanganan Pasca Bencana dan Peningkatan Kerjasama dan Pembinaan Relawan	

6.4. Sikronisasi Kegiatan Prioritas Pemerintah Pusat (RPJMN) dengan Kegiatan Strategis Daerah (RPJMD Kanupaten Tapanuli Selatan)

Sinkronisasi kegiatan Prioritas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan langkah penting dalam memastikan keterpaduan arah pembangunan nasional dengan pembangunan daerah, serta untuk mendukung pencapaian Nawacita dan Visi Indonesia Emas 2045 yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menyelaraskan kegiatan Prioritas dalam RPJMD 2025–2029 dengan prioritas nasional melalui 37 agenda pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025–2029, dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 3.12 Sinkronisasi Kegiatan Prioritas Nasional dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Tapanuli Selatan

NO	Kegiatan Prioritas Nasional	Sasaran	Kegiatan Prioritas Daerah	Sasaran
1	2	3	4	5
1	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	Peningkatan produksi bahan pangan Utama	Pengembangan kawasan lumbung pangan tapsel termsuk kawasan batang angkola	Meningkatnya produktivitas dan pendapatan petani dari komoditas unggulan
2	Pengembangan Pangan Akuatik (BIue Food)	Meningkatnya Penyediaan ikan Untuk konsumsi masyarakat	Swasembada Ikan (Pembuatan 1000 kolam ikan)	Meningkatnya produktivitas dan pendapatan petani dari komoditas unggulan
3	Pengembangan Pangan Hewani	Meningkatnya produksi bahan pangan hewani	Swasembada Peternakan	Meningkatnya produktivitas dan pendapatan petani dari komoditas unggulan
4	Pengembanggan Pangan Lokal dan Nabati	Meningkatnya produksi pangan lokal dan nabati	Pengembanggan Pangan Lokal dan Nabati	Meningkatnya produksi pangan lokal dan nabati
5	Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	Meningkatya Jumlah dan Kapasitas SPAM yang dikembangkan serta	Tata kelola air minum	Meningkatnya akses rumah tangga terhadap air minum layak

NO	Kegiatan Prioritas Nasional	Sasaran	Kegiatan Prioritas Daerah	Sasaran
1	2	3	4	5
		dikelola secara terintegrasi daru hulu ke hilir		
6	Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, berkelanjutan dan berketahan iklim berbasis CWIS	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur SPLAD	Permukiman Hijau Tapsel	Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni & meningkatnya lingkungan sehat
7	Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital	Meningkatnya jumlah digital SDM digital dan terjaganya keamanan data	Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital	Meningkatnya jumlah digital SDM digital dan terjaganya keamanan data
8	Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Danau	Meningkatnya Ketersediaan data kualitas air sungai dan danau	Penguatan Sistem Irigasi Terpadu	Terpenuhinya kebutuhan air irigasi persawahan dan perikanan
9	Perubahan Prilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	Meningkatnya sampah yang dikelola	Perubahan Prilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	Meningkatnya sampah yang dikelola
10	Peningkatan Pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemprosesan TPA/LUR	Menurunnya sampah residu yang masuk di TPA/LUR	Peningkatan Pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemprosesan TPA/LUR	Menurunnya sampah residu yang masuk di TPA/LUR
11	Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	Meningkatnya kontribusi Koperasi sektor produksi terhadap total Kontribusi Koperasi	Pengembangan UMKM Naik Kelas	Meningkatnya UMKM berdaya saing dan tersertifikasi
12	Percepatan Pembanguan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing keparawisataan Danau Toba	Pengembangan Ekonomi Kreatif & Pariwisata Tapsel	Meningkatnya kunjungan wisata dan pendapatan ekonomi kreatif
13	Penguatan Ekosistem aplikasi dan Gim	Meningkatnya kinerja Subsektor aplikasi dan Gim	Penguatan Ekosistem aplikasi dan Gim	Meningkatnya kinerja Subsektor aplikasi dan Gim
14	Perluasan layanan pendidikan Anak Usia Dini	Tercapainya pemerataan akses dan pelayanan	Peningkatan Akses & Kualitas Pendidikan Usia Dini (Pembangunan 1 PUD	Meningkatnya APK & mutu pendidikan,

NO	Kegiatan Prioritas Nasional	Sasaran	Kegiatan Prioritas Daerah	Sasaran
1	2	3	4	5
		pendidikan pra sekolah dalam mendukung tumbuh kembang anak	1 desa)	termasuk layanan PAUD merata
15	Revitalisasi Sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas (PHTC)	Tercapainya pemerataan akses pendidikan berkualitas	Revitalisasi Sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas (PHTC)	Tercapainya pemerataan akses pendidikan berkualitas
16	Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah	Tercapainya Penurunan kasus anak putus sekolah dan anak tidak sekolah	Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah	Tercapainya Penurunan kasus anak putus sekolah dan anak tidak sekolah
17	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggulan	Terselenggaranya layanan pendidikan disekolah unggul yang mewadahi SDM dalam meningkatkan daya saing di tingkat global	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggulan	Terselenggaranya layanan pendidikan disekolah unggul yang mewadahi SDM dalam meningkatkan daya saing di tingkat global
18	Restrukturisasi Kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (E.G Pelatihan.in service training) Perlindungan Hukum dan kesejahteraan berbasis kinerja	Terpenuhinya kebutuhan guru di tingkat daerah, satuan pendidik dan mata pelajaran	Restrukturisasi Kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (E.G Pelatihan.in service training) Perlindungan Hukum dan kesejahteraan berbasis kinerja	Terpenuhinya kebutuhan guru di tingkat daerah, satuan pendidik dan mata pelajaran
19	Peningkatan Fungsi Intermediasi dan layanan pemanfaatan Iptek dan Inovasi	Meningkatnya peran lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat dalam pengelolaan Iptek dan Inovasi	Peningkatan Fungsi Intermediasi dan layanan pemanfaatan Iptek dan Inovasi	Meningkatnya peran lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat dalam pengelolaan Iptek dan Inovasi
20	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olah	Terbinanya olahragawan	Pengembangan Manajemen Talenta Daerah (MTD) Olah	Terbinanya olahragawan

NO	Kegiatan Prioritas Nasional	Sasaran	Kegiatan Prioritas Daerah	Sasaran
1	2	3	4	5
	raga	muda yang mampu bersaing di kancah global	raga	muda yang mampu bersaing di kancah global
21	Penurunan Kematian Ibu dan Anak	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai standar dengan persalinan di fasyankes, memperkuat deteksi dini,ANC,layanan persalinan, KF,KN,layanan emergensi, pelayanan darah, tatalaksana balita sakit serta imunisasi	Penurunan Kematian Ibu dan Anak	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai standar dengan persalinan di fasyankes, memperkuat deteksi dini,ANC,layanan persalinan, KF,KN,layanan emergensi, pelayanan darah, tatalaksana balita sakit serta imunisasi
22	Pencegahan dan penurunan stunting	Pencegahan dan penurunan stunting melalui pendekatan spesfik dan sensitif	Pencegahan dan penurunan stunting	Pencegahan dan penurunan stunting melalui pendekatan spesfik dan sensitif
23	Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Mcnintkatnya Meningkatnya masyarakat kelompok usia bayi, balita, remaja, dewasa dan lansia yang menerima pemeriksaan kesehatan gratis sebagai upaya deteksi dini, pencegahan penyakit dan pengurangan potensi beban anggaran pengendalian penyakit	Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Mcnintkatnya Meningkatnya masyarakat kelompok usia bayi, balita, remaja, dewasa dan lansia yang menerima pemeriksaan kesehatan gratis sebagai upaya deteksi dini, pencegahan penyakit dan pengurangan potensi beban anggaran pengendalian penyakit

NO	Kegiatan Prioritas Nasional	Sasaran	Kegiatan Prioritas Daerah	Sasaran
1	2	3	4	5
24	Penguatan ekosistem pendukung pemberian makanan bergizi	Terlaksananya penguatan ekosistem pendukung pemberian makanan bergizi untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi	Penguatan ekosistem pendukung pemberian makanan bergizi	Terlaksananya penguatan ekosistem pendukung pemberian makanan bergizi untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi
25	Penuntasan TBC	Tercapainya Penuntasan TBC melalu peningkatan upaya pencegahan TBC, intensifikasi penemuan kasus secara masif dan pengobatan TBC samapi tuntas	Penuntasan TBC	Tercapainya Penuntasan TBC melalu peningkatan upaya pencegahan TBC, intensifikasi penemuan kasus secara masif dan pengobatan TBC samapi tuntas
26	Eleminasi Penyakit kusta dan schistosomiasis	Meningkatnya pengendalian kusta dan schistosomiasis	Eleminasi Penyakit kusta dan schistosomiasis	Meningkatnya pengendalian kusta dan schistosomiasis
27	Investasi pelayanan kesehatan Primer	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer hingga tingkat desa dan menguatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Investasi pelayanan kesehatan Primer	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer hingga tingkat desa dan menguatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat
28	Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan RS di seluruh indonesia dan berkembangnya pendekatan khusus pelayanan kesehatan di daerah yang memiliki akses	Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses (Rumah Sakit Unggul berskal regional)	Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan RS di seluruh indonesia dan berkembangnya pendekatan khusus pelayanan kesehatan di daerah yang memiliki akses

NO	Kegiatan Prioritas Nasional	Sasaran	Kegiatan Prioritas Daerah	Sasaran
1	2	3	4	5
		sulit termasuk layanan kesehatan bergerak		sulit termasuk layanan kesehatan bergerak
29	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	Meningkatnya pemenuhan dan pendayagunaan SDM kKesehatan dengan mendorong peningkatan, pemenuhan dan pemerataan dari sisi produksi, kompetensi,jumlah maupun jenis dari SDM kesehatan yang berkualitas, kompeten dan responsif sesuai kondisi wilayah	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan (dokter dan bidan masuk desa)	Meningkatnya pemenuhan dan pendayagunaan SDM kKesehatan dengan mendorong peningkatan, pemenuhan dan pemerataan dari sisi produksi, kompetensi,jumlah maupun jenis dari SDM kesehatan yang berkualitas, kompeten dan responsif sesuai kondisi wilayah
30	Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsiditepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan	Meningkatnya kualitas penyaluran bantuan sosial, yang adaptif terhadap berbagai kondisi	Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsiditepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan	Meningkatnya kualitas penyaluran bantuan sosial, yang adaptif terhadap berbagai kondisi
31	Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif	Terwujudnya penguatan ekonomi yang berdaya saing bagi masyarakat menuju kelas menengah dan kelas menengah	Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha Produktif	Terwujudnya penguatan ekonomi yang berdaya saing bagi masyarakat menuju kelas menengah dan kelas menengah
32	Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU	Meningkatnya penyediaan hunian baru atau peningkatan kualitas yang terintegrasi dengan PSU	Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU	Meningkatnya penyediaan hunian baru atau peningkatan kualitas yang terintegrasi dengan PSU
33	Pemenuhan Infrastruktur	Meningkatnya	Pemenuhan Infrastruktur	Meningkatnya

NO	Kegiatan Prioritas Nasional	Sasaran	Kegiatan Prioritas Daerah	Sasaran
1	2	3	4	5
	dasar dan infrastruktur desa	pemenuhan kebutuhan terhadap layanan dasar serta infrastruktur desa	dasar dan infrastruktur desa	pemenuhan kebutuhan terhadap layanan dasar serta infrastruktur desa
34	Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja ASN	Terwujudnya kesejahteraan ASN yang adil, layak dan kompetitif	Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja ASN	Terwujudnya kesejahteraan ASN yang adil, layak dan kompetitif
35	Transformasi digital layana publik prioritas	Terselenggaranya layanan digital pemerintah yang berkualitas dan terpadu	Transformasi digital layana publik prioritas	Terselenggaranya layanan digital pemerintah yang berkualitas dan terpadu
36	Penguatan Karakter dan jati diri bangasa	Terwujudnya kawasan pemajuan kebudayaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM kebudayaan	Penguatan Karakter dan jati diri bangasa	Terwujudnya kawasan pemajuan kebudayaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM kebudayaan
37	Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan	Terwujudnya ekosistem kebudayaan yang menumbuhkan kepastian SDM dan lembaga kebudayaan dalam berkarya	Penguatan Karakter Unggul Tapsel	Terkuatkannya nilai moral, budaya & keagamaan masyarakat tapsel

RPJMD KAB.TAPANULI SELTAN 2025-2029

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

bab IV



BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Sebelum penentuan program perangkat daerah terlebih dahulu ditentukan Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun kedepan. Penghitungan kerangka pendanaan pada dasarnya dilakukan dengan menganalisis sejauhmana relevansi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang telah dibuat dalam RPJMD sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Perhitungan kerangka pendanaan menjadi dasar dalam alokasi anggaran tiap urusan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatifnya. Perangkat daerah bertanggungjawab terhadap pencapaian kinerja sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Kerangka pendanaan RPJMD ini juga dirancang untuk mendukung pelaksanaan program responsif gender, dengan memastikan alokasi anggaran yang memadai dan adil bagi program-program yang mendukung kesetaraan gender. Penguatan anggaran responsif gender dilakukan melalui mekanisme Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di seluruh OPD.

4.1.1. Target Kinerja Pelaksanaan APBD

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor. 050 Tahun 2020 bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek Pendapatan, aspek Belanja dan aspek pembiayaan.

Aspek pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Aspek belanja daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Aspek Pembiayaan meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Tabel 4.1. Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2030

No.	Uraian	Proyeksi					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendapatan	1,510,225,677,681	1,488,221,184,685	1,497,321,789,572	1,511,791,371,676	1,539,060,388,796	1,561,502,819,586
2	Penerimaan Pembiayaan	56,879,397,176	73,000,000,000	72,900,011,383	71,000,000,000	77,850,392,853	81,427,569,033
	TOTAL PENERIMAAN	**1,567,105,074,857**	**1,561,221,184,685**	**1,570,221,800,955**	**1,582,791,371,676**	**1,616,910,781,649**	**1,642,930,388,619**
	(***Dikurangi***):						
3	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	1,338,316,049,323	1,334,148,910,389	1,337,557,804,038	1,352,020,022,839	1,390,901,613,094	1,417,738,091,904
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	**228,789,025,534**	**227,072,274,296**	**232,663,996,917**	**230,771,348,837**	**226,009,168,555**	**225,192,296,715**

Hasil perhitungan kerangka pendanan menjadi dasar alokasi bagi setiap urusan dan program-program perangkat daerah. Program Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berisi program-program pembangunan baik untuk mencapai visi dan misi Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), pencapaian SDG's dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan, dimana program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaan terlampir pada lampiran 3.9.

Tabel 3.9.

Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					703.284.978.158		764.959.577.675		771.366.084.065		774.139.347.108		790.380.015.698		797.333.286.594		4.058.475.214.816
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					412.012.927.975		301.293.151.349		301.507.236.440		310.023.630.027		315.739.906.995		321.738.755.884		1.550.302.680.695
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan Daerah					410.737.531.575		299.788.985.129		299.918.070.220		308.282.505.496		313.843.476.238		319.678.503.588		1.541.511.540.671
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningktanya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan. Pembangunan dan Kemasyarakatan	%	100%	295.574.280.705	100%	185.803.170.876	100%	179.637.301.287	100%	181.419.166.351	100%	180.090.124.669	100%	179.567.769.825	100%	906.517.533.009
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningktnya Partisipasi Anak usia Sekolah	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (%)	%	67,00	115.163.250.870	73,24	113.985.814.253	76,28	120.280.768.933	79,32	126.863.339.144	82,36	133.753.351.569	85,33	140.110.733.763	85,33	634.994.007.662
						Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	98,47		98,96		99,20		99,45		99,70		99,94		99,94	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
						(%)															
						Partisipasi anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (APS)		43,80	0	60,02		66,51		73,00		73,76		74,53		74,53	
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							221.461.969.466		224.227.616.656		216.672.309.656		217.272.479.129		209.518.934.957		1.185.294.518.805
1	02	1.02.5.02.0.00.02.0000		Dinas Kesehatan Daerah					205.346.956.883		221.461.969.466		224.227.616.656		216.672.309.656		217.272.479.129		209.518.934.957		1.185.294.518.805
1	02	1.02.5.02.0.00.02.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningktanya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	117.976.106.582,00	100,00	95.731.127.729	100,00	95.791.163.826	100,00	95.789.051.114	100,00	95.790.176.216	100,00	95.783.170.343	100,00	604.615.530.965
1	02	1.02.5.02.0.00.02.0000	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarak	Jumlah Kematian Ibu	Orang	3,00	51.920.227.680,00	2,00	62.503.621.062	2,00	73.745.485.380	2,00	55.071.238.896	2,00	55.369.928.192	2	56.482.287.672	2	336.400.067.869

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
				KESEHATAN MASYARAKAT	at																
						Prevalensi Stunting (pendek dan Sangat Pendek) pada balita	%	6,60		5,90		5,60		5,40		5,20		5,00		5,00	
1	02	1.02.5.02.0.00.02.0000	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan Yang memiliki Izin	Orang	345	855.655.300,00	430	204.366.350	500	204.366.350	570	214.366.350	600	214.366.350	600	220.366.350	600	853.465.400
						Persentase Tenaga Kesehatan Sesuai Kompetensi	%	45		50,00		60,00		75,00		85,00		85,00		85,00	
1	02	1.02.5.02.0.00.02.0000	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan dan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	%	40,00	598.237.400,00	60,00	410.081.212	65,00	418.538.903	70,00	415.185.734	75,00	416.976.615	75,00	417.713.483	75,00	1.668.414.735
1	02	1.02.5.02.0.00.02.0000	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehata	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persen	30	722.245.320,00	70,00	519.135.054	80,00	569.135.054	90,00	579.135.054	100,00	580.135.054	100,00	595.135.054	100,00	2.733.621.428

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
					n																
				RUMAH SAKIT UMUM																	
			01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.429.874.468,00												
1	02	1.02.5.02.0.00.02.0000	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Jumlah Kematian Ibu	Orang	3	24.844.610.133,00	2	62.093.638.059	2	53.498.927.143	2	64.603.332.508	2	64.900.896.702	2	56.020.262.055	2	239.023.418.408
						Prevalensi Stunting (pendek dan Sangat Pendek) pada balita	%														
						Rasio posyandu per satuan balita	/1000	1/56 Balita		1/56 Balita		1/56 Balita		1/56 Balita		1/56 Balita		1/56 Balita		1/56 Balita	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
						Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk															
						Rasio Puskesmas	/1000	0,052		0,058		0,058		0,058		0,058		0,058		0,058	
						Rasio Poliklinik	/1000	-		-		-		-		-		-		-	
						Rasio Pustu	/1000	0,16		0,17		0,17		0,17		0,17		0,17		0,17	
						Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	/1000	0,0092		0,0092		0,0092		0,0092		0,0092		0,0092		0,0092	
						Rasio dokter per satuan penduduk	/1000	0,28		0,40		0,45		0,50		0,55		0,60		0,60	
						Rasio tenaga medis per satuan penduduk	/1000	5,68		5,80		5,90		5,95		6,00		6,50		6,50	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
						Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100,00		100		100,000		100		100		100		100	
1	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					240.523.113.100		208.236.722.804		211.197.888.652		213.494.887.675		214.148.663.281		216.476.904.607		1.063.555.067.018
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah					240.523.113.100		208.236.722.804		211.197.888.652		213.494.887.675		214.148.663.281		216.476.904.607		1.063.555.067.018
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningktanya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	95,72	Rp 34.986.318.792	100,00	16.400.983.556	100,00	14.825.822.839	100,00	15.123.689.744	100,00	14.470.293.714	100,00	15.282.902.687	100,00	76.103.692.540
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	%	17,23	28.202.669.112	19,13	45.391.688.588	19,51	45.713.750.546	19,90	45.973.728.219	20,30	46.066.959.545	20,70	49.330.347.836	20,70	232.476.474.733

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
					meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi																
						Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob	%	1,025		1,025		1,025		1,025		1,025		1,025		1,03	
						Persentase Luas layanan Irigasi Multikomoditas		67,10		69,78		71,17		72,60		74,05		75,53		75,53	
						Luas Daerah Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik		67,10		69,78		71,17		72,60		74,05		75,53		75,53	
						Rasio Jaringan Irigasi		61,15		61,76		62,07		62,38		62,69		63,01		63,01	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/ Kota	%	94,95	4.709.384.000	95,42	15.811.065.320	95,90	16.132.347.058	96,38	16.277.661.399	96,86	16.373.342.309	97,35	16.149.947.754	97,35	80.744.363.840

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
						Persentase penududuk berakses air minum	%	94,95		95,42		95,90		96,38		96,86		97,35		97,35	
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	04	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	%	94,58	Rp 26.860.440.000	95,53	6.805.707.566	96,01	8.583.016.282	96,49	8.558.311.610	96,97	8.915.470.795	97,45	6.489.942.451	97,45	39.352.448.704
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	05	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	25,75	Rp 8.796.470.750	26,79	9.217.569.793	27,33	9.344.446.947	27,87	9.444.158.679	28,43	9.471.024.396	29,00	9.572.086.797	29,00	47.049.286.612
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	06	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	%	59,67	131.197.830.446	58,62	105.901.037.255	58,77	107.546.027.348	58,92	108.821.337.016	59,06	109.213.276.042	59,21	110.497.916.512	59,21	541.979.594.173
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	07	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	%	100	1.910.000.000	100	807.010.996	100	808.263.043	100	809.112.797	100	809.314.600	100	810.303.616	100,00	4.044.005.052
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	08	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	5,25	Rp 1.950.000.000	5,46	2.000.000.000	5,57	2.040.000.000	5,68	2.080.800.000	5,80	2.122.416.000	5,91	2.164.864.320	5,91	10.408.080.320
																				0,00	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	%	60,95		62,18	94.648.734	62,80	95.951.546	63,42	96.975.414	64,06	97.251.280	64,70	98.289.018	64,70	483.115.992
1	03	1.03.0.00.0.00.03.0000	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	%	100	1.910.000.000	100	807.010.996	100	808.263.043	100	809.112.797	100	809.314.600	100	810.303.616	100,00	4.044.005.052
						Persentase Pemanfaatan dan kesesuaian Tata Ruang	%	100		100		100		100		100		100		100,00	
						Ketaatan terhadap RTRW	%	93,00		93,00		93,50		94,00		94,50		95,00		95,00	
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	%	65,31		67,95	5.000.000.000	69,31	5.300.000.000	70,7	5.500.000.000	72,11	5.800.000.000	73,55	5.270.000.000	73,55	26.870.000.000
				Program Pengembangan Permukiman	Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondidi															

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
						Baik															
1	04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					38.539.424.542		21.516.399.526		21.844.590.007		21.124.653.344		30.368.340.396		35.797.340.182		194.807.018.189
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah					38.539.424.542		21.116.399.526		21.434.590.007		20.684.653.344		29.913.340.396		35.397.340.182		128.546.323.454
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningktanya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100	4.110.177.982	100,00	5.162.667.443	100	5.233.730.051	100	5.289.577.582	100	5.304.624.797	100	5.361.228.825	100,00	26.351.828.698
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana Kabupaten/ Kota	%	80,61	573.958.409	20,00	1.024.286.877	20,00	1.038.385.887	20,00	1.049.466.185	20,00	10.213.763.118	20,00	1.063.681.981	20,00	14.389.584.048

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
						Fasilitasi Penyedian dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi masyarakat terkena Relokasi Program Pemerintah	unit	0		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00	0
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 ha di Kab/Kota yang ditangani	%	3,11	13.861.937.444	18,05	5.575.704.485	19,95	5.658.646.545	20,90	5.723.830.043	21,85	4.966.392.683	22,80	17.671.819.821	22,80	39.596.393.577
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Berkurangnya kawasan permukiman kumuh dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat di lingkungan permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 ha di Kab/Kota yang ditangani	%	3,11		80,70	1.450.000.000	80,74	1.450.000.000	80,78	450.000.000	80,83	1.225.000.000	80,87	2.977.500.000	80,87	7.552.500.000
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000	04	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA. SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Cakupan Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	51,00	19.993.350.707	52,82	7.903.740.721	53,23	8.053.827.524	54,44	8.171.779.534	56,45	8.203.559.798	57,26	8.323.109.555	57,26	40.656.017.132

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					12.209.512.541		12.451.334.531		12.588.752.310		12.823.866.407		12.850.625.897		13.801.350.965		64.515.930.110
1	05	1.05.0.00.0.00.20.0000		Badan Penanggulangan Bencana Daerah					4.824.556.541		5.063.393.934		5.133.820.916		5.227.703.955		5.323.310.384		6.120.674.672		26.868.903.861
1	05	1.05.0.00.0.00.20.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningktanya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100	4.053.207.441	100,00	4.253.477.379	100,00	4.308.477.379	100,00	4.394.646.927	100,00	4.482.539.865	100,00	4.572.190.662	100,00	22.011.332.212
1	05	1.05.0.00.0.00.20.0000	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningktanya kualitas layananan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Rasio peningkatan kemampuan masyarakat tentang kebencanaan (kajian rawan kebencanaan)	%	90	771.349.100	95,00	809.916.555	97,00	825.343.537	98,00	833.057.028	99,00	840.770.519	100,00	1.548.484.010	100,00	4.857.571.649
					Meningktanya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase pelayanan penanganan darurat bencana terhadap kejadian bencana	%	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
					Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase pemenuhan kebutuhan dan penanganan infrastruktur pasca bencana	%	30		30,00		35,00		40,00		45,00		50,00		50,00	
						Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	orang	820		820,00		1.020,00		1.300,00		1.540,00		1.780,00		1.780,00	
						Persentase petugas yang aktif dalam penanggulangan bencana	%	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
						Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana		90		95,00		97,00		98,00		99,00		100,00		100,00	
1	05	1.05.5.02.0.00.05.0000		Satuan Polisi Pamong Praja					7.384.956.000		7.387.940.597		7.454.931.394		7.596.162.452		7.527.315.513		7.680.676.292		37.647.026.248
1	05	1.05.5.02.0.00.05.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningktanya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	97	7.014.956.000	100,00	7.014.940.597	100,00	7.067.871.394	100,00	7.216.981.252	100,00	7.016.981.252	100,00	7.275.064.172	100,00	35.591.838.667

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
1	05	1.05.5.02.0.00.05.0000	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Penegakan Perda	%	100	150.000.000	100	153.000.000	100	156.060.000	100	159.181.200	100	162.364.824	100	165.612.120	100	796.218.144
					Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban tertangani	%	100		100		100		100		100		100		100	
					Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat		100		100		100		100		100		100		100	
					Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya		60		61,80		63,65		65,56		67,53		69,56		69,56	
1	05	1.05.5.02.0.00.05.0000	03	PROGRAM PENCEGAHAN. PENANGGULANGAN. PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	%	0,003	220.000.000	0,004	220.000.000	0,004	231.000.000	0,004	220.000.000,00	0,005	347.969.437	0,005	240.000.000	0,005	1.258.969.437

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
						Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten															
					Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran															
1	06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																	
1	06	1.06.0.00.0.00.06.0000		Dinas Sosial Daerah					8.412.792.902		8.623.112.722		8.838.690.540		9.059.657.804		9.286.149.248		9.518.302.980		45.325.913.294
1	06	1.06.0.00.0.00.06.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningktanya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100	4.496.670.077	100,00	4.609.086.828	100,00	4.724.313.999	100,00	4.842.421.849	100,00	4.963.482.395	100,00	5.087.569.455	100,00	24.226.874.526
1	06	1.06.0.00.0.00.06.0000	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanak	%	N.A	1.371.068.300	70,00	1.405.345.007	75,00	1.440.478.632	78,00	1.476.490.598	80,00	1.513.402.863	85,00	1.551.237.935	85,00	7.386.955.035

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
						an pelayanan di Panti Sosial Rehabilitasi Sosial															
						Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan Pelayanan Sosial Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA	%	N.A		65,00		66,30		67,63		68,98		70,36		70,36	
						Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana sesuai	%	N.A		65,00		66,30		67,63		68,98		70,36		70,36	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
						standar															
						Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	%	N.A		60,00		61,20		62,42		63,67		64,95		64,95	
						Persentase Lembaga Bidang Kesejahteraan Sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	%	N.A		65,00		66,30		67,63		68,98		70,36		70,36	
				Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Jumlah warga negera migran korban tindak kekerasan dalam dan luar negeri yang mendapatkan pelayanan pemulangan		N.A	-	5		7		9		10		10		10,00	0
1	06	1.06.0.00.0.00.06.0000				Persentase warga negera migran korban tindak kekerasan	%	N.A	-	60		7		9		10		10		10,00	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
						yang tertangani															
			03	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	N.A	251.836.700	70,00	258.132.617	71,40	264.585.932	72,83	271.200.581	74,28	277.980.595	75,77	284.930.110	75,77	1.356.829.835
						Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	N.A		70,00		71,40		72,83		74,28		75,77		75,77	
						Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	N.A		65,00		66,30		67,63		68,98		70,36		70,36	
						Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	N.A	0	67,00		68,34		69,71		71,10		72,52		72,52	
1	06	1.06.0.00.0.00.06.0000				Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	N.A		68,00		69,36		70,75		72,16		73,61		73,61	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
						Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas	Indeks	N.A		68,00		69,36		70,75		72,16		73,61		73,61	
						Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	Indeks	N.A	-	65,00		66,30		67,63		68,98		70,36		70,36	
						Indeks Peranan Sosial	Indeks	N.A	-	65,00		66,30		67,63		68,98		70,36		70,36	
			04	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	N.A	2.169.670.025	70,00	2.223.911.775	71,40	2.279.509.570	72,83	2.336.497.309	74,28	2.394.909.741	75,77	2.454.782.485	75,77	11.689.610.880
						Persentase Penerima manfaat yang meningkat Kemandirian Ekonomi	%	N.A		76,00		77,52		79,07		80,65		82,26		82,26	
						Persentase daerah yang melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	%	N.A		75,00		76,50		78,03		79,59		81,18		81,18	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
1	06	1.06.0.00.0.00.06.0000	06			Peningkatan indeks kebutuhan dasar	Indeks	N.A	-	75		76,50		78,03		79,59		81,18		81,18	
						Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi	Indeks	N.A	-	60,00		61,20		62,42		63,67		64,95		64,95	
						Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	(%)	N.A	-	65,00		66,30		67,63		68,98		70,36		70,36	
			05	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana alam/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	(%)	N.A	123.547.800	68	126.636.495	69,36	129.802.407	70,75	133.047.467	72,16	136.373.654	73,61	139.782.995	73,61	665.643.018
						Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	(%)	N.A		60		61,20		62,42		63,67		64,95		64,95	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
						Persentase korban bencana yang mendapat layanan pemulihan sosial	(%)	N.A		65		66,30		67,63		68,98		70,36		70,36	
			06	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	(%)	N.A		70		71,40		72,83		74,28		75,77		75,77	0
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					9.828.380.700		12.228.700.000		13.264.937.000		13.866.729.500		14.908.432.500		15.534.849.900		69.803.648.900
2	07	2.07.3.32.5.02.01.0000		Dinas Ketenagakerjaan Daerah					9.828.380.700		12.228.700.000		13.264.937.000		13.866.729.500		14.908.432.500		15.534.849.900		69.803.648.900
2	07	2.07.3.32.5.02.01.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningktanya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	95,70	4.260.810.003	100,00	5.516.600.000	100,00	6.145.950.000	100,00	6.470.700.000	100,00	6.987.150.000	100,00	7.267.390.000	100,00	32.387.790.000

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
2	07	2.07.3.32.5.02.01.0000	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu kerencana Tenaga kerja Daerah (RTKD)	%	32,14	0	33,44		34,11	92.837.000	34,79		35,49	95.119.000	36,19		36,19	187.956.000
						Persentase Kabupaten/ Kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja	%	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
2	07	2.07.3.32.5.02.01.0000	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	Orang	21,17	1.756.676.735	23,26	2.278.000.000	25,32	2.365.000.000	27,47	2.441.000.000	28,53	2.523.400.000	29,61	2.640.000.000	29,61	12.247.400.000
						Jumlah pencari kerja yang dilatih dan bekerja	Orang	100		144,00		172,00		180,00		190,00		200,00		200,00	
						Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	22,07		22,96		23,42		23,89		24,37		24,85		24,85	
						Tingkat Produktfitas Tenaga Kerja	%	70,40		72,25		73,16		73,24		74,12		74,68		74,68	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
2	07	2.07.3.32.5.02.01.0000	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri	%	61,26	269.904.006	63,14	574.600.000	64,37	617.750.000	65,24	619.429.500	66,49	656.763.500	67,74	683.459.900	67,74	3.152.002.900
						Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	%	86,91		88,65		89,12		89,86		90,26		91,46		91,46	
						Persentase Penganggur an Terbuka	%	3,41		3,28		3,21		3,15		3,09		3,03		3,03	
2	07	2.07.3.32.5.02.01.0000	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya pekerja Kabupaten yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	%	11.552	3.540.989.956	11.522	3.859.500.000	11.860	4.043.400.000	12.140	4.335.600.000	12.430	4.646.000.000	12.750	4.944.000.000	12.750	21.828.500.000
						Angka sengketa pengusaha-pekerja	Angka	9,78		9,40		9,22		9,04		8,86		8,68		8,68	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
						Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	8,69		9,04		9,22		9,41		9,59		9,79		9,79	
			05	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI																	
2	08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					10.402.519.440		10.126.368.758		10.430.885.143		10.736.102.536		11.020.859.697		11.159.200.891		53.473.417.025
2	08	2.08.0.00.0.00.02.0000		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah					10.402.519.440		10.126.368.758		10.430.885.143		10.736.102.536		11.020.859.697		11.159.200.891		53.473.417.025
2	08	2.08.0.00.0.00.02.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningktanya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100	7.937.519.440	100	7.518.118.758	100	7.684.885.143	100	7.879.852.536	100	8.072.859.697	100	8.211.200.891	100	39.366.917.025

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
					Kemasyarakatan																
2	08	2.08.0.00.0.00.02.0000	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan	%	69,01	785.000.000	69,05	830.000.000	69	865.000.000,00	69,09	886.000.000	70	907.500.000,00	70,03	907.500.000	70,03	4.396.000.000
						Persentase kelompok perempuan mandiri	%	50		60		60		60		60		70		70	
						Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	1,6		1,7		2		1,9		2,00		2,00		2,00	
						Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota		100		100		100		100		100		100		100	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
2	08	2.08.0.00.0.00.02.0000	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100,00	380.000.000	100,00	402.500.000	100,00	418.500.000	100,00	432.500.000	100,00	442.500.000	100,00	442.500.000	100,00	2.138.500.000
						Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
						Rasio Kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk Perempuan)	%	0,009		0,04		0,03		0,02		0,01		0,01		0,01	
						Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota		100		100		100		100		100		100		100	
2	08	2.08.0.00.0.00.02.0000	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender pemenuhan hak serta	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	%	4	355.000.000	3,5	372.000.000	3,8	394.500.000	3,8	420.000.000	3,9	434.500.000	4,01	434.500.000	4,01	2.055.500.000

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
					perlindungan perempuan dan anak																
						Persentase penyelesaian pengaduan dan tindak kekerasan dan traficking	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
						Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		100		100		100		100		100		100		100		100	
			05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan		60,00	60.000.000	65,00	62.750.000	70,00	65.500.000	75,00	70.750.000	75,00	73.500.000	80,00	73.500.000	80,00	346.000.000	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
						Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		100		100		100		100		100		100		100	
2	08	2.08.0.00.0.00.02.0000	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks pemenuhan anak (IPHA)	%	60	430.000.000	60,11	447.500.000	60,3	467.500.000	60,5	490.000.000	60,73	505.000.000	60,98	505.000.000	60,98	2.415.000.000
						Tingkat capaian Kota Layak Anak		Madya		Madya		Madya		Madya		Nindya		Nindya		Nindya	
						Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
						Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota		100		100		100		100		100		100		100	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
			07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	455.000.000	100	493.500.000	100	535.000.000	100	557.000.000	100	585.000.000	100	585.000.000	100	2.755.500.000
						Indeks perlindungan khusus anak	Indeks	100		100		100		100		100		100		100	
						Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota		100		100		100		100		100		100		100	
2	09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					3.814.085.326		8.630.325.839		8.802.932.356		8.978.991.003		9.158.570.823		9.341.742.239		9.528.577.084
2	09	2.09.5.02.0.00.03.0000		Dinas Ketahanan Pangan Daerah					3.814.085.326		8.630.325.839		8.802.932.356		8.978.991.003		9.158.570.823		9.341.742.239		9.528.577.084

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
2	09	2.09.5.02.0.00.03.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningktanya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100	3.259.769.826	100,00	4.285.250.833	100,00	4.370.955.850	100,00	4.458.374.967	100,00	4.547.542.466	100,00	4.638.493.315	100,00	4.731.263.182
2	09	2.09.5.02.0.00.03.0000	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Meningktnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase jumlah cadangan pangan	Ton	14,6	-	22,5	866.616.901,0	30,2	883.949.239,0	37,8	901.628.224	48,2	919.660.788	63,0	938.054.004	63,0	956.815.084
						Penguatan Cadangan Pangan				61,6		62,4		63,2		64,0		64,9		64,9	
2	09	2.09.5.02.0.00.03.0000	03	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningktnya penanganan kerawanan pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	desa	10,1	181.163.500,0	9,98	1.121.630.068,0	9,88	1.144.062.669,4	9,78	1.166.943.923	9,68	1.190.282.801	9,59	1.214.088.457	9,59	1.238.370.226
						penanganan desa Rawan Pangan		10,0		12,0		14,0		16,0		18,0		20,0		20,0	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
2	09	2.09.5.02.0.00.03.0000	04	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	83,0	353.267.050,0	83,4	1.997.268.425,0	83,8	2.037.213.793,5	84,2	2.077.958.069	85,0	2.119.517.231	85,5	2.161.907.575	85,5	2.205.145.727
						Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Skor	87,4		87,9		88,3		88,7		89,0		89,3		89,3	
2	09	2.09.5.02.0.00.03.0000	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	Komoditi	56,1	19.884.950,0	57,2	359.559.612,0	58,4	366.750.804,2	59,5	374.085.820	60,7	381.567.537	61,9	389.198.887	61,9	396.982.865
						Pengujian Keamanan PSAT dengan Rapit Tes		9,0		12,0		15,0		17,0		20,0		22,0		22,0	
2	10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							400.000.000		410.000.000		440.000.000		455.000.000		400.000.000		66.260.694.735
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah					0		400.000.000		410.000.000		440.000.000		455.000.000		400.000.000		66.260.694.735

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
2	10	1.04.2.10.0.00.04.0000	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Mengukur Persentase Pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	1,0		1,0	250.000.000,0	1,0	255.000.000,0	1,0	275.000.000,0	1,0	280.000.000,0		200.000.000,0		65.415.694.735
						Mengukur Persentase Penetapan tanah yang untuk Pembangunan Fasilitasi	%	100,0		100,0		100,0		100,0		100,0					
						Mengukur Persentase Lokasi Pembangunan dalam rangka	%	100,00		100,0		100,0		100,0		100,0		100,0		100,0	
						Mengukur Persentase Tanah obyek landform (TCL) yang siap	%	79,98		81,81		82,6		83,5		84,3		85,1		85,1	
						Mengukur Persentase Ketersediaan tanah untuk Masyarakat	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
						Persentase luas lokasi konsolidasi tanah	%														

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
				PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Penyelesaian Konflik	%	100		100,00	150.000.000	100,00	155.000.000	100,00	165.000.000	100,00	175.000.000	100,00	200.000.000	100,00	845.000.000
						Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	%	100		100		100		100		100		100		100	
2	11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					5.417.852.793		8.983.573.450		9.117.218.676		9.233.109.454		18.461.160.359		18.775.632.796		64.570.694.735
2	11	2.11.3.28.5.02.05.0000		Dinas Lingkungan Hidup Daerah					5.417.852.793		8.983.573.450		9.117.218.676		9.233.109.454		18.461.160.359		18.775.632.796		64.570.694.735
2	11	2.11.3.28.5.02.05.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningktanya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	2.219.226.717,00	100,00	4.181.621.081	100,00	4.239.179.873	100,00	4.284.414.864	100,00	4.296.602.702	100,00	4.342.450	100,00	17.006.160.970

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
2	11	2.11.3.28.5.02.05.0000	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya efektifitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan lingkungan hidup	Dokumen	1,00	14.038.300,00	1,00	46.211.982	1,00	46.848.076	1,00	47.347.978	1,00	47.482.668	1,00	47.989.341	1,00	235.880.045
						Persentase Rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%														
2	11	2.11.3.28.5.02.05.0000	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	77,71	145.870.900,00	83,09	1.027.538.942	83,92	1.041.682.716	84,09	1.052.798.193	84,93	10.217.104.604	85,53	14.762.219.806	85,53	28.101.344.261
						Luas Lahan Kritis/DAS di Luar Kawasan Hutan yang direhabilitasi	Ha	5 Ha	264.738.400	5,1 Ha	270.033.168	5,2 Ha	275.433.831	5,3 Ha	280.942.508	5,4 Ha	286.561.358	5,5 Ha	292.292.585	26,5 Ha	1.405.263.451
2	11	2.11.3.28.5.02.05.0000	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	Ha		1.690.106.350	30%	1.723.908.477	30%	1.758.386.647	30%	1.793.554.379	30%	1.829.425.467	30%	1.866.013.976	30%	8.971.288.946
						Luas RTH yang terpelihara		21 Ha		21 Ha		21,5 Ha		22 Ha		22,5 Ha		23 Ha		23 Ha	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
2	11	2.11.3.28.5.02.05.0000	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Persentase limbah b3 yang terkelola	%	12 Usaha; 5 Puskesmas; 1 Klinik	18.196.000,00	14 Usaha; 7 Puskesmas; 1 Klinik	49.163.783	15 Usaha; 7 Puskesmas; 1 Klinik	49.840.509	16 Usaha; 8 Puskesmas; 1 Klinik	50.372.341	17 Usaha; 9 Puskesmas; 1 Klinik	50.515.635	18 Usaha; 10 Puskesmas; 1 Klinik	51.054.672	18 Usaha; 10 Puskesmas; 1 Klinik	250.946.940
						Jumlah Industri dan usaha kecil yang dilakukan pembinaan pengelolaan limbah B3															
2	11	2.11.3.28.5.02.05.0000	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	Usaha	140,00	19.175.400,00	144,00	98.489.425	146,00	99.845.103	148,00	100.910.520	150,00	101.197.579	150,00	102.277.427	150,00	502.720.054
						Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/kegiatan yang diawasi ketaatannya															

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
						terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH															
						Persentase Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan /atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota															
			07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya	%	0	0	13,30	150.000.000	26,60	150.000.000	39,90	150.000.000	53,30	150.000.000	66,60	150.000.000	80,00	750.000.000
2	11	2.11.3.28.5.02.05.0000	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN. PELATIHAN DAN PENYULUH	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Jumlah Masyarakat yang mendapat pendidikan, pelatihan dan penyuluhan	Sekolah;desa	29 Sekolah;4 Desa	227.348.600,00	29 Sekolah;8 Desa	217.036.658	29 Sekolah;10 Desa	220.024.104	29 Sekolah;12 Desa	222.371.914	29 Sekolah;14 Desa	223.004.494	29 Sekolah;14 Desa	225.384.106	29 Sekolah;14 Desa	1.107.821.276

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
				AN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		lingkungan hidup															
2	11	2.11.3.28.5.02.05.0000	09	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	%	0	0	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000	1,00	100.000.000	1,00	500.000.000
						Persentase sampah tertangani		0	0	4,00	75.000.000	4,00	75.000.000	4,00	75.000.000	4,00	75.000.000	4,00	75.000.000	4,00	375.000.000
						Persentase Penguranga n Sampah	%	71,00	500.019.376,00	73,87	719.054.529	74,46	728.952.104	75,95	736.730.529	77,47	738.826.300	79,02	746.710.089	79,02	3.670.273.551
			10	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA																	
			11	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup															

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
			12	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup															
			13	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks kinerja pengelolaan sampah		1 dokumen	319.132.750	1 dokumen	325.515.405	1 dokumen	332.025.713	1 dokumen	338.666.227	1 dokumen	345.439.552	1 dokumen	352.348.343	1 dokumen	1.693.995.240
2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					5.218.891.843		5.494.352.840		5.740.803.240		6.131.389.004		6.336.306.304		6.463.032.430		6.463.032.430
2	12	2.12.0.00.0.00.06.0000		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah					5.218.891.843		5.494.352.840		5.740.803.240		6.131.389.004		6.336.306.304		6.463.032.430		6.463.032.430
2	12	2.12.0.00.0.00.06.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningktanya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	90,48	4.798.947.343	100	4.797.386.840	100	5.043.837.240	100	5.352.289.004	100	5.523.206.304	100	5.633.670.430	100	5.633.670.430

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
2	12	2.12.0.00.0.00.06.0000	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	1. Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	%	92,57	419.944.500	100	440.456.000	100	440.456.000	100	470.456.000	100	487.456.000	100	497.205.120	100	497.205.120
						2. Persentase kepemilikan kartu identitas anak															
			03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	1. Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	NA	NA	100	155.318.000	100	155.318.000	100	181.318.000	100	187.318.000	100	191.064.360	100	191.064.360
2	12	2.12.0.00.0.00.06.0000	03			2. Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan															
						3. Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan															
						4. Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan															

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
			04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	%	NA	NA	100	56.326.000	100	56.326.000	100	76.326.000,00	100	82.326.000	100	83.972.520	100	83.972.520
			05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	%	NA	NA	100	44.866.000	100	44.866.000	100	51.000.000	100	56.000.000	100	57.120.000	100	57.120.000
2	13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							8.801.069.902		8.922.214.056		9.317.420.271		9.343.108.048		9.439.567.901		45.823.380.178
2	13	2.13.0.00.0.00.07.0000		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah							8.801.069.902		8.922.214.056		9.317.420.271		9.343.108.048		9.439.567.901		45.823.380.178
2	13	2.13.0.00.0.00.07.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningktanya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100		100,00	4.088.807.215	100,00	4.147.153.158	100,00	4.493.006.763	100,00	4.505.361.277	100,00	4.551.836.004	100,00	21.786.164.417
			02	PROGRAM PENATAAN DESA	Meningktkannya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	100		100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	750.000.000

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
			03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Meningkatnya efektivitas kerjasama desa	Persentase fasilitasi kerjasama desa		N.a		100,00	1.015.803.950	100,00	1.030.000.000	100,00	1.045.000.000	100,00	1.055.000.000	100,00	1.065.000.000	100,00	5.210.803.950
2	13	2.13.0.00.0.00.07.0000	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	1. Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan	Desa	100,00	641.385.472	100,00	3.000.000.000	100,00	3.041.080.316	100,00	3.069.521.569	100,00	3.071.262.113	100,00	3.105.255.808	100,00	15.287.119.806
						2. Persentase fasilitasi tata kelola desa		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
2	13	2.13.0.00.0.00.07.0000	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN. LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	1.Persentase fasilitasi pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa (LKD)	Lembaga	100,00		100,00	546.458.737	100,00	553.980.582	100,00	559.891.939	100,00	561.484.658	100,00	567.476.089	100,00	2.789.292.005
						2. Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat	Buah	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
2	14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																	
2	14	2.14.5.02.4.01.08.0000		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah					14.360.521.000		12.245.278.287		12.413.830.963		12.546.295.152		12.581.985.490		12.716.244.005		74.017.121.330
2	14	2.14.5.02.4.01.08.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningktanya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	5.745.980.150	100,00	5.305.933.870	100,00	5.378.968.499	100,00	5.436.365.825	100,00	5.451.830.607	100,00	5.510.005.423	100,00	32.199.413.737
2	14	2.14.5.02.4.01.08.0000	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	%	1,43	458.354.350	1,30	170.259.488	1,28	172.603.061	1,27	174.444.855	1,25	174.941.097	1,23	176.807.840	1,23	869.056.341
						Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (Orang)	Orang	2,42		2,22		1,22		1,12		1,02		0,92		0,92	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Mandiri (%)	%	15,50		16,10		16,40		16,70		17,00		17,30		17,30	
			03			Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (%)	%	53,40	6.026.990.500	64,61	6.598.825.440	71,07	6.689.656.342	78,18	6.761.039.618	86,00	6.780.272.689	94,60	6.852.622.903	94,60	40.079.594.912
2	14	2.14.5.02.4.01.08.0000				Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) (%)	%	8,91		8,51		8,31		8,11		7,91		7,71		7,71	
			04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya perberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Jumlah Keluarga Sejahtera yang Mendapat Bantuan (Kelompok)	Kelompok	6,00	2.129.196.000	7,00	170.259.489	7,00	172.603.061	8,00	174.444.854	8,00	174.941.097	9,00	176.807.839	9,00	869.056.341
						Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (%)	%	15,00		62,00		63,00		64,00		66,00		66,30		66,30	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
2	15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					5.382.647.738		8.578.273.083		8.692.909.614		8.809.394.602		8.998.168.929		9.118.744.393		50.067.109.761
2	15	2.15.5.02.0.00.09.0000		Dinas Perhubungan Daerah					5.382.647.738		8.578.273.083		8.692.909.614		8.809.394.602		8.998.168.929		9.118.744.393		50.067.109.761
2	15	2.15.5.02.0.00.09.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningktanya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100	4.115.424.795	100	4.653.374.883	100	4.715.417.778	100	4.778.604.375	100	4.913.366.113	100	4.979.205.219	100	26.036.587.510
2	15	2.15.5.02.0.00.09.0000	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	1. Konektivitas darat	%	45,00	1.267.222.943	55,00	3.924.898.200	60,00	3.977.491.836	65,00	4.030.790.226	70,00	4.084.802.816	75,00	4.139.539.173	75,00	24.030.522.251
						2. Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00	
2	16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					5.909.469.152		5.484.451.479		5.634.096.512		5.774.948.925		5.919.322.648		6.067.305.715		29.059.398.625

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
2	16	2.16.2.20.2.21.10.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah					5.789.000.552		5.325.458.092		5.458.594.544		5.595.059.408		5.734.935.893		5.878.309.290		27.992.357.226
2	16	2.16.2.20.2.21.10.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningktanya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100	4.669.547.052	100,00	4.772.044.965	100,00	4.891.346.089	100,00	5.013.629.741	100,00	5.138.970.484	100,00	5.267.444.747	100,00	25.083.436.025
2	16	2.16.2.20.2.21.10.0000	02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survey)	%	NA	245.418.200	70,25	205.141.553	70,35	210.270.091	70,45	215.526.844	70,55	220.915.015	70,65	226.437.890	70,65	1.078.291.392
						Persentase informasi publik yang terpublikasi dengan baik															
2	16	2.16.2.20.2.21.10.0000	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	indeks SPBE	%	3,14	874.035.300	3,18	348.271.575	3,20	356.978.364	3,30	365.902.823	3,40	375.050.394	3,57	384.426.654	3,57	1.830.629.809

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
			04	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statitik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	1,80		2,5		2,50		2,80		3,00		3,00		3,00	
			05	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
2	17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI. USAHA KECIL. DAN MENENGAH					133.230.200		663.404.871		672.536.447		679.712.878		681.646.450		688.920.091		3.386.220.737
3	30	3.30.2.17.0.00.06.0000		Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah					133.230.200		663.404.871		672.536.447		679.712.878		681.646.450		688.920.091		3.386.220.737
			01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningktanya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembang	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarak	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
					unan dan Kemasyarakatan	atan (%)															
			02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan volume usaha koperasi		0,00	0,00	32,22	51.343.784	32,96	52.050.516	33,70	52.605.931	34,44	52.755.579	35,18	53.318.518		262.074.329
2	17	3.30.2.17.0.00.06.0000	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	%	16,00	66.615.100	5,18	34.666.048	5,49	35.143.216	5,79	35.518.219	6,10	35.619.257	6,40	35.999.339		176.946.079
			03	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi aktif	%	90,00	72.758.600	37,20	73.758.600	40,24	74.758.600	43,29	75.758.600	46,34	76.758.600	49,39	77.758.600		
2	17	3.30.2.17.0.00.06.0000	04	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	4,88		4,57	56.753.163	6,10	57.534.354	7,62	58.148.285	9,15	58.313.699	10,67	58.935.947		289.685.448
			05	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	0,00	0	5,18	103.070.320	5,49	104.489.053	5,79	105.604.024	6,10	105.904.435	6,40	107.034.509		526.102.341
2	17	3.30.2.17.0.00.06.0000	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	1. Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	Usaha	20,64	66.615.100	24,64	34.659.116	23,33	35.136.189	24,67	35.511.117	26,00	35.612.135	26,67	35.992.141		176.910.698

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
				USAHA MIKRO (UMKM)																	
						2. Pertumbuhan wirausaha	Usaha														
2	17	3.30.2.17.0.00.06.0000	07	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan eksport	Pelaku Usaha	11,00		13,00	260.067.014	14,00	263.646.761	15,00	266.460.055	16,00	267.218.051	17,00	270.069.453	17	1.327.461.334
			8	PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI	Meningkatnya legalitas koperasi	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	%			27,74	122.845.426	33,54	124.536.357	36,59	125.865.247	39,63	126.223.294	45,73	127.570.185		627.040.509
2	18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					5.318.853.074		4.784.960.199		4.850.823.777		4.902.585.432		4.916.531.775		4.968.994.580		24.423.895.763
2	18	2.18.5.02.4.01.12.0000		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah					5.318.853.074		4.784.960.199		4.850.823.777		4.902.585.432		4.916.531.775		4.968.994.580		24.423.895.763

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
2	18	2.18.5.02.4.01.12.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningktanya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	4.374.633.074	100,00	3.761.426.811	100,00	3.813.201.752	100,00	3.853.891.259	100,00	3.864.854.391	100,00	3.906.095.067	100,00	19.199.469.280
2	18	2.18.5.02.4.01.12.0000	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi total terhadap target investasi	Buku	1,00	270.512.500	1,00	45.719.996	1,00	46.349.318	1,00	46.843.898	1,00	46.977.154	1,00	47.478.433	1,00	233.368.799
2	18	2.18.5.02.4.01.12.0000	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	event	1,00	241.084.100	1,00	368.059.715	1,00	373.125.949	1,00	377.107.462	1,00	378.180.216	1,00	382.215.662	1,00	1.878.689.004
2	18	2.18.5.02.4.01.12.0000	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	%	15,00	274.760.000	100,00	462.546.705	100,00	468.913.525	100,00	473.917.158	100,00	475.265.306	100,00	480.336.717	100,00	2.360.979.411
						Persentase Perizinan yang yang dikeluarkan DPMPTSP	%														
2	18	2.18.5.02.4.01.12.0000	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka	(Rp. Milyar)	100,00	157.863.400	100,00	147.206.972	100,00	149.233.233	100,00	150.825.655	100,00	151.254.708	100,00	152.868.701	100,00	751.389.269

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
						usaha															
			06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	%	n.a	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
						Persentase Pemanfaatan Aplikasi sitem informasi Penananman Modal	%														
				PROGRAM KERJASAMA PENANAMAN MODAL	Meningkatnya efektivitas kerjasa penanaman modal	Persentase kerjasama penanaman modal yang ditindaklanjuti	%	n.a	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
2	19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					1.538.826.200		3.004.270.604		3.034.235.329		3.057.784.365		3.064.129.273		3.087.997.298		15.248.416.869
3	26	3.26.2.19.0.00.02.0000		Dinas Pariwisata Daerah					1.538.826.200		3.004.270.604		3.034.235.329		3.057.784.365		3.064.129.273		3.087.997.298		15.248.416.869
2	19	3.26.2.19.0.00.02.0000	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUD	Meningkatnya Daya saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	orang	0,02	21.479.800	0,03	1.262.169.608	0,04	1.279.543.004	0,05	1.293.196.615	0,06	1.296.875.361	0,07	1.310.713.920	0,07	6.442.498.508

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
				AAN																	
2	19	3.26.2.19.0.00.02.0000	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya pembudayaam dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Orang	4,00	827.346.400	5,00	827.346.400	6,00	827.346.400	7,00	827.346.400	8,00	939.907.512	9,00	827.346.400	35,00	4.136.732.000
						Jumlah Atlit Berprestasi (Orang) tingkat provinsi dan nasional	Orang	4,00	0	5,00	0	6,00	0	7,00	0	8,00	0	9,00	0	35,00	0
2	19	3.26.2.19.0.00.02.0000	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Kegiatan	32,00	690.000.000	33,00	914.754.596	33,00	927.345.925	33,00	937.241.350	33,00	827.346.400	33,00	949.936.978	33,00	4.669.186.361
						Jumlah kegiatan Kepramukaan	Kegiatan	10		10		10		10		10		10		10	
2	20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					92.468.600		94.780.315		109.683.569		112.425.658		115.236.300		118.117.207		666.869.494
2	16	2.16.2.20.2.21.10.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah					92.468.600		94.780.315		109.683.569		112.425.658		115.236.300		118.117.207		666.869.494

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
2	20	2.16.2.20.2.21.10.0000	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statitik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	%	NA	92.468.600	2,50	94.780.315	3,20	109.683.569	3,50	112.425.658	4.0	115.236.300	4,30	118.117.207	4,30	666.869.494
2	21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					28.000.000		64.213.073		65.818.399		67.463.859		69.150.456		70.879.217		400.171.904
2	16	2.16.2.20.2.21.10.0000		Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah					28.000.000		64.213.073		65.818.399		67.463.859		69.150.456		70.879.217		400.171.904
2	21	2.16.2.20.2.21.10.0000	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	NA	28.000.000	3,18	64.213.073	3,20	65.818.399	3,30	67.463.859	3,40	69.150.456	3,57	70.879.217	3,57	400.171.904
2	22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					1.275.396.400		1.504.166.220		1.589.166.220		1.741.124.531		1.896.430.758		2.060.252.295		8.791.140.024

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
1	01	1.01.2.22.0.00.01.0000		Dinas Pendidikan Daerah					1.275.396.400		1.504.166.220		1.589.166.220		1.741.124.531		1.896.430.758		2.060.252.295		8.791.140.024
2	22	1.01.2.22.0.00.01.0000	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	Group	n.a	1.275.396.400	15%	1.504.166.220	30%	1.589.166.220	45%	1.741.124.531	60%	1.896.430.758	75%	2.060.252.295	75%	8.791.140.024
						Jumlah Group Kesenian	Group	24 Group	0	30	-	36	-	42	-	48	-	54	-	54	-
						Terlestarikannya Cagar Budaya	%	70 %	0	75%	-	80%	-	85%	-	90%	-	95%	-	95%	-
						Budaya lokal yang dikembangkan menjadi daya tarik wisatawan	Budaya	3 Budaya	0	4	-	5	-	6	-	7	-	8	-	8	-
2	23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					4.566.254.663		4.160.902.790		4.215.804.047		4.259.164.611		4.271.577.981		4.315.512.349		21.222.961.778

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
2	23	2.23.2.24.0.00.17.0000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah					4.213.632.263		3.884.512.862		3.937.261.458		3.978.930.262		3.990.887.815		4.033.107.508		19.824.699.905
2	23	2.23.2.24.0.00.17.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningktanya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100	3.521.397.263	100	3.368.405.990	100	3.414.771.114	100	3.451.209.091	100	3.461.026.716	100	3.497.958.272	500,00	17.193.371.184
2	23	2.23.2.24.0.00.17.0000	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Layanana Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun	orang	68.408,00	692.235.000	82.982,00	391.106.872	89.205,00	396.490.344	95.895,00	400.721.171	103.087,00	401.861.099	103.087	406.149.236	474.256,00	1.996.328.722
						Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	53,84		59,84	0	61,84	0	63,84	0	65,84	0	66	0	317,20	0
						Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	78,44		79,04	0	79,24	0	79,44	0	79,64	0	80	0	397,00	0
			03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Meningkatnya Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah	Peningkatan akses dan Keterjangkauan terhadap naskah kuno dan koleksi nasional	%	N.a		100,00	65.000.000,00	100,00	66.000.000,00	100,00	67.000.000,00	100,00	68.000.000,00	100,00	69.000.000,00	100,00	335.000.000

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
					Kuno																
				PROGRAM AKREDITASI PERPUSTAKAAN DAN SERTIFIKASI PUSTAKAWAN	Meningkatnya kualitas perpustakaan dan pustakawan	Persentase pustakawan yang memperoleh sertifikasi Profesi di bidang perpustakaan	%	n.a	-	6	60.000.000	6	60.000.000	6	60.000.000	6	60.000.000	6	60.000.000	30,00	300.000.000
2	24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					352.622.400		276.389.928		278.542.589		280.234.349		280.690.166		282.404.841		1.398.261.872
2	23	2.23.2.24.0.00.17.0000		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah					352.622.400		276.389.928		278.542.589		280.234.349		280.690.166		282.404.841		1.398.261.872
2	24	2.23.2.24.0.00.17.0000	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Indeks tata kelola arsip	%	81,50	306.349.000	81,00	71.260.183	81,50	72.241.059	82,00	73.011.921	82,50	73.219.617	82,50	74.000.922	409,50	363.733.702
						Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan Pertanggungjawaban Nasional) Pasal 40 dan	%	37		36,00	0	37,00	0	38	0	40	0	40	0	191,00	0

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
						pasal 59 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan															
2	24	2.23.2.24.0.00.17.0000	03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan Arsip	Nilai	81,50	46.273.400	305,00	85.129.744	355,00	86.301.530	413	87.222.427	480	87.470.548	480	88.403.920	2.033,00	434.528.170
			04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase akses masyarakat terhadap penggunaan Arsip yang bersifat tertutup	%	-	-	6	60.000.000	6	60.000.000	6	60.000.000	6	60.000.000	6	60.000.000	30,00	300.000.000
			05	Program Akreditasi dan sertifikasi	Meningkatnya kapasitas SDM bidang kearsipan	Persentase SDM bidang Kerasipan yang ditingkatkan kompetensinya	%			6	60.000.000	6	60.000.000	6	60.000.000	6	60.000.000	6	60.000.000	30,00	300.000.000
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					5.347.951.945		6.079.496.659		6.261.881.559		6.449.738.005		6.643.230.146		6.842.527.050		32.276.873.419

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
3	25	3.25.5.02.0.00.01.0000		Dinas Perikanan Daerah					5.347.951.945		6.079.496.659		6.261.881.559		6.449.738.005		6.643.230.146		6.842.527.050		32.276.873.419
3	25	3.25.5.02.0.00.01.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningktanya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100	4.087.585.945	100	4.537.220.399	100	4.673.337.011	100	4.813.537.121	100	4.957.943.235	100	5.106.681.532	100	24.088.719.298
3	25	3.25.5.02.0.00.01.0000	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Ton	1.984,52	0	2.055,40	143.270.000	2.102,67	147.568.100	2.151,03	151.995.143	2.200,50	156.554.997	2.251,12	161.251.647	2.251,12	760.639.887
3	25	3.25.5.02.0.00.01.0000	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Ton	5.953,55	1.000.328.900	6.166,19	1.110.365.079	6.308,01	1.143.676.031	6.453,09	1.177.986.312	6.601,51	1.213.325.902	6.753,35	1.249.725.679	6.753,35	5.895.079.003
			06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya konsumsi ikan oleh Masyarakat	Meningkatnya Nilai Tambah dan Mutu Produk Perikanan		48,04	260.037.100	54,98	288.641.181	55,53	297.300.416	56,09	306.219.429	56,65	315.406.012	57,21	324.868.192	57,21	1.532.435.230
3	26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					4.847.701.744		6.005.317.437		6.090.630.995		6.159.669.744		6.184.783.735		6.254.990.676		30.695.392.587

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
3	26	3.26.2.19.0.00.02.0000		Dinas Pariwisata Daerah					4.847.701.744		6.005.317.437		6.090.630.995		6.159.669.744		6.184.783.735		6.254.990.676		30.695.392.587
3	26	3.26.2.19.0.00.02.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningktanya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100	1.268.118.733	100	3.753.145.547	100	3.804.806.498	100	3.845.406.424	100	3.856.345.418	100	3.897.495.299	100,00	19.157.199.186
3	26	3.26.2.19.0.00.02.0000	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Kunjungan Wisata	orang	484.922	2.853.354.011	487.500	1.480.240.725	489.000	1.500.615.806	492.000	1.516.628.418	493.500	1.520.942.758	495.000	1.537.172.272	2.943,00	7.555.599.979
						Persentase Peningkatan Perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/ Kota	%	2,04	0	4,04	-	5,08	-	5,90	-	6,50	-	7,00	-	7,00	0
3	26	3.26.2.19.0.00.02.0000	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Media	4	309.229.000	5	346.591.165	5	351.361.891	5	355.111.166	5	356.121.348	5	359.921.410	5,00	1.769.106.980
						Jumlah Promosi Pariwisata melalui media cetak dan elektronik	Promosi	4		5		5		5		5		5		5,00	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
						Tingkat Hunian Akomodasi	%	16,61		18,30	-	19,20	-	20,10	-	21,00	-	22,50	-	22,50	0
3	26	3.26.2.19.0.00.02.0000	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif dan tervalidasi	objek	60,00	250.000.000	62,00	255.000.000	63,00	260.100.000	64,00	265.302.000	65,00	270.608.040	67,00	276.020.201	67,00	1.327.030.241
	3	26	06	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	%	48,00	167.000.000	50,00	170.340.000	52,00	173.746.800	54,00	177.221.736	56,00	180.766.171	58,00	184.381.494	58,00	886.456.201
3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					17.115.375.987		39.086.956.984		38.221.413.682		37.841.037.704		32.909.851.319		36.040.129.485		184.099.389.174
3	27	3.27.0.00.0.00.03.0000		Dinas Pertanian Daerah					17.115.375.987		39.086.956.984		38.221.413.682		37.841.037.704		32.909.851.319		36.040.129.485		184.099.389.174
3	27	3.27.0.00.0.00.03.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningktanya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembang	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarak	%	100%	2.441.130.636	100%	20.930.492.299	100%	21.218.594.407	100%	21.445.011.532	100%	21.506.015.970	100%	17.735.500.083	100%	102.835.614.291

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
					unan dan Kemasyarakatan	atan (%)															
3	27	3.27.0.00.0.00.03.0000	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan produksi tanaman pangan	Ton	256.171,46	472.565.100	256.427,70	412.638.444,00	256.555,91	418.318.291,00	256.684,19	422.782.038,00	256.812,53	423.984.722,00	256.940,94	428.508.933,00	1283421,26	2.106.232.428
						Peningkatan Produksi Hortikultura	%	386.329,59		386.716,02		386.909,37		387.102,83		387.296,38		387.490,03		1935514,63	
						Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	%	1.239.095,00		1.240.334,40		1.240.954,57		1.241.575,05		1.242.195,84		1242816,93		6207876,80	
3	27	3.27.0.00.0.00.03.0000	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	%	1,00	12.108.418.700	1,00	15.240.887.065	1,00	14.047.109.582	1,00	13.408.777.006	1,00	8.408.088.381	1,00	15.276.915.736		66.381.777.770
						Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun	Kw/Ha	540,90		541,44		541,71		541,98		542,25		542,52		2709,90	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
3	27	3.27.0.00.0.00.03.0000	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Meningkatnya Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	-11,8	239.510.200	-12,57%	271.258.940	-9,72%	274.992.740	-7,77%	277.927.103	-6,87%	278.717.720	-5%	281.691.831	-5%	1.384.588.334
						Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	%	0		0		0		0		0		0		0		0	
						Jumlah Populasi Ternak (Ekor), Produksi Daging (Ton) dan Produksi Telur (Kg)															
						Jumlah Populasi Ternak	Ekor	559.320		633725,00		674767,00		718736,00		765547,00		815617,00		3608392,00	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
						Produksi Daging	Ton	1.239.095,00		1.240.334,40		1.240.954,57		1.241.575,05		1.242.195,84		1.242.816,93		6207876,79	
						Produksi Telur	Kg	96.696,00		109.005,35		117.725,78		127.143,84		137.315,35		148.300,58		639490,90	
3	27	3.27.0.00.0.00.03.0000	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Kw/Ha		459.019.300	1,00%	231.061.932	1,00%	234.242.432	1,00%	236.741.961	1,00%	237.415.419	1,00%	239.948.806	1,00 %	1.179.410.550
						Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim terhadap Pertanian	%			1,00%		1,00%		1,00%		1,00%		1,00%		1,00 %	
3	27	3.27.0.00.0.00.03.0000	06	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kapasitas SDM bidang Penyuluh Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan	Kelompok Tani		1.394.732.051	10,00 %	1.900.618.304	10,00 %	1.928.156.230	10,00 %	1.949.798.064	10,00 %	1.955.629.107	10,00 %	1.977.564.096	10,00 %	9.711.765.801
						Persentase kelembagaan koperasi Tani yang dibentuk dan Beroperasi	Kelompok Tani			-		-		-		-		-			
			07	Program Perizinan Usaha Pertanian	Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha	Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan	%			1,00%	100.000.000	1,00%	100.000.000	1,00%	100.000.000	1,00%	100.000.000	1,00%	100.000.000	1,00 %	500.000.000

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
					pertanian																
3	28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN																	
2	11	2.11.3.28.5.02.05.0000		Dinas Lingkungan Hidup Daerah																	
3	28	3.28.	04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Indeks Keanekaragaman Hayati	%			70,00		71,40		72,83		74,28		75,77		75,77	
						Terpeliharanya Keanekaragaman hayati dan ekosistemnya	%														
3	29			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					0		400.000.000		408.000.000		416.160.000		424.483.200		432.972.864		2.081.616.064

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
3	31	3.31.3.29.0.00.07.0000		Dinas Perindustrian Daerah					0		400.000.000		408.000.000		416.160.000		424.483.200		432.972.864		2.081.616.064
			01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
3	29	3.31.3.29.0.00.07.0000	02	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang bersumber dari Pembangkit EBT	%	5.000		5.500	175.000.000	6.655	178.500.000	7.320	182.070.000	8.050	185.711.400	8.855	189.425.628	36.380,00	910.707.028
						Porsi EBT dalam Bauran Energi	%			17,00		18,50		20,00		22,00		24,00		24,00	
				Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan	Rasio Elektrifikasi	Rasio			97,00	225.000.000	98,00	229.500.000	99,00	234.090.000	99,30	238.771.800	99,60	243.547.236	99,60	1.170.909.036
			03	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI																	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
3	30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							4.407.126.552		4.467.789.361		4.515.463.774		4.528.308.874		4.576.629.072		22.495.317.633
3	30	3.30.2.17.0.00.06.0000		Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah							4.407.126.552		4.467.789.361		4.515.463.774		4.528.308.874		4.576.629.072		22.495.317.633
3	30	3.30.2.17.0.00.06.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningktanya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00		100,00	3.437.169.861	100,00	3.484.481.499	100,00	3.521.663.335	100,00	3.531.681.380	100,00	3.569.366.871	100,00	17.544.362.946
3	30	3.30.2.17.0.00.06.0000	02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang difasilitasi	Pedagang	655,00		668,00	170.259.488	670,00	172.603.061	678	174.444.855	680	174.941.097	688	176.807.840	688	869.056.341
			03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	%	17,39		26,09	115.512.597	30,43	117.102.594	34,78	118.352.160	43,48	118.688.835	44,00	119.955.327	44	589.611.513

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
			04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilitasi Harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Unit	3,03		2,95	57.759.649	2,90	58.554.693	2,85	59.179.513	2,80	59.347.860	2,79	59.981.143	3	294.822.858
			05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya pelaku usaha yang beriorentasi ekspor	Nilai Ekspor barang	Nilai	0,99		1,09	51.077.847	2,13	51.780.918	2,18	52.333.456	2,23	52.482.329	2,25	53.042.352	2,25	260.716.902
			06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Pedagang	80,00		100,00	207.954.699	100,00	210.817.135	100,00	213.066.700	100,00	213.672.809	100,00	215.952.846	100,0	1.061.464.189
3	30	3.30.2.17.0.00.06.0000	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	%	1,20		1,80	367.392.411	2,25	372.449.461	3,00	376.423.755	3,25	377.494.564	3,50	381.522.693	3,5	1.875.282.884
3	31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					4.029.998.372		3.664.868.046		3.718.648.141		3.763.417.221		3.783.667.218		3.829.335.674		18.759.936.301
3	31	3.31.3.29.0.00.07.0000		Dinas Perindustrian Daerah					4.029.998.372		3.664.868.046		3.718.648.141		3.763.417.221		3.783.667.218		3.829.335.674		18.759.936.301

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
3	31	3.31.3.29.0.00.07.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningktanya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	3.505.743.883	100,00	3.130.128.467	100,00	3.173.213.770	100,00	3.207.074.163	100,00	3.216.197.299	100,00	3.250.516.356	100,00	15.977.130.056
3	31	3.31.3.29.0.00.07.0000	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	%		524.254.489	90,00	534.739.579	92,00	545.434.371	94,00	556.343.058	96,00	567.469.919	98,00	578.819.318	98,00	2.782.806.245
3	31	3.31.3.29.0.00.07.0000	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase izin Usaha Industri yang diterbitkan	Unit														
						Jumlah industri kab/kota yang masih aktif	Industri	1.609		1660,00		1713,00		1763,00		1817,00		1870,00		1870,00	
						Persentase Pencapaian sasaran pembangunan Industri termasuk turunan Indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	67		67,00		68,00		69,00		69,00		70,00		70,00	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
						Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait.	%	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
						Persentase Jumlah hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait.	%	73		73,00		74,00		74,00		74,00		75,00		75,00	
						Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten/ Kota	%	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
						Tersedianya Informasi secara lengkap dan terkini	%	85		85,00		86,00		86,00		86,00		86,00		86,00	
3	32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																	
2	07	2.07.3.32.5.02.01.0000		Dinas Ketenagakerjaan Daerah					67.518.400		95.000.000		97.500.000		100.000.000		125.000.000		150.000.000		567.500.000
3	32	2.07.3.32.5.02.01.0000	02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan	Dokumen	33,33	67.518.400	33,33	95.000.000	33,33	97.500.000	33,33	100.000.000	33,33	125.000.000	33,33	150.000.000	33,33	567.500.000
4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					92.122.476.067		115.670.951.614		121.906.204.285		124.500.820.162		126.767.173.560		129.470.220.211		618.315.369.833
4	01			SEKRETARIAT DAERAH																	
1	04	1.04.2.10.0.00.04.0000		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah																	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
2	10	1.04.2.10.0.00.04.0000	04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Meningkatnya Penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	%														
4	01	4.01.1.01.5.02.01.0000		Sekretariat Daerah Kabupaten					48.787.412.246		50.794.682.978		56.370.932.806		58.447.643.660		60.574.455.911		62.752.582.133	`	288.940.297.489
4	01	4.01.1.01.5.02.01.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningktanya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100	46.008.232.735	100,00	26.928.397.390	100,00	27.520.822.132	100,00	28.126.280.219	100,00	28.745.058.384	100,00	29.377.449.668	100,00	140.698.007.794
						Indeks Kematangan Organisasi		38		59		67		75		79		80		80	
						Indeks Pelayanan Publik		n/a		31		33		35		37		39		39	
						Indeks Reformasi Birokrasi		n/a		3		3		3		4		4		4	
						Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik (Ombudsman)		B		B		BB		BB		BB		BB		BB	
						SAKIP Kabupaten		58,26 (2023)		B		B		BB		BB		BB		BB	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
						Persentase Pelayanan Internal Terhadap Aktivitas Kedinasan KDH/WKDH dan Sekretariat Daerah		B		B		B		BB		BB		BB		BB	
4	01	4.01.1.01.5.02.01.0000	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektifitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Kategori	90		90	20.852.945.591	90	24.174.269.231	90	25.528.625.961	90	26.916.841.611	90	28.339.762.651	72	125.812.445.044
						Indeks Reformasi Hukum	Indeks	70		73		74		75		76		77		77	
						Indeks Kesalehan Sosial	Kategori	Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik		Baik	
						Nilai LPPD	Kategori	2,7982		2,8982		2,9482		2,9982		3,0482		3,0982		3,0982	
4	01	4.01.1.01.5.02.01.0000	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	%	65	2.779.179.511	68,00	3.013.339.998	70,00	4.675.841.443	73,00	4.792.737.479	75,00	4.912.555.916	78,00	5.035.369.814	78,00	22.429.844.651

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
						Indeks Tata Kelola Pengadaan	Nilai	38,42		59		67		75,00		79,00		80,00		80,00	
						LAKIP SETDAKAB	Dokumen	1		1		1		1,00		1,00		1,00		1,00	
4	02			SEKRETARIAT DPRD					43.335.063.821		64.876.268.636		65.535.271.479		66.053.176.502		66.192.717.649		66.717.638.078		329.375.072.344
4	02	4.02.2.16.0.00.02.0000		Sekretariat DPRD Kabupaten					43.335.063.821		64.876.268.636		65.535.271.479		66.053.176.502		66.192.717.649		66.717.638.078		329.375.072.344
4	02	4.02.2.16.0.00.02.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningktanya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100	34.486.698.391	90	48.100.657.781	95	48.625.102.198	95	49.037.258.838	95	49.148.307.791	95	49.566.047.398	95	244.477.374.006
2	16	4.02.2.16.0.00.02.0000	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI	Meningkatnya kualitas persidangan dan kabjian peraturan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	95	8.848.365.430	90	16.775.610.855	95	16.910.169.281	95	17.015.917.664	95	17.044.409.858	95	17.151.590.680	95	84.897.698.338

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
				DPRD	perundang-undangan																
						Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	95		90		95		95		95		95		95	
						Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tepat waktu (%)	%	95													
					Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan	%	75		80,00		85,00		90,00		95,00		97,00		97,00	
5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					320.958.755.885		295.516.384.073		298.977.518.492		306.469.950.186		303.703.382.221		307.590.344.703		1.826.084.290.598
5	01			PERENCANAAN					6.424.102.962		5.766.877.645		5.848.985.853		5.914.584.572		5.935.911.919		6.002.331.493		29.468.691.482
5	01	5.01.5.05.5.02.02.0000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					6.274.102.962		5.601.877.645		5.678.985.853		5.739.584.572		5.755.911.919		5.817.331.493		28.593.691.482

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
5	01	5.01.5.05.5.02.02.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningktanya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	4.223.021.505	100,00	3.770.554.915	100,00	3.822.455.501	100,00	3.863.243.754	100,00	3.874.233.490	100,00	3.915.574.249	100,00	19.246.061.908
5	01	5.01.5.05.5.02.02.0000	02	PROGRAM PERENCANAAN. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	96,00	1.025.540.729	96,19	915.661.365	96,38	928.265.176	96,58	938.170.409	96,77	940.839.215	96,96	950.878.622	96,96	4.673.814.787
						Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	96,00	0	96,00	0	96,00	0	96,00	0	96,00	0	96,00	0	96,00	
5	01	5.01.5.05.5.02.02.0000	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	95,00	1.025.540.729	95,19	915.661.365	95,38	928.265.176	95,57	938.170.409	95,76	940.839.215	95,95	950.878.622	95,95	4.673.814.787
					Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	95,00	0	95,19	0	95,38	0	95,57	0	95,76	0	95,95	0	95,95	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
					kewilayahan																
					Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan SDA	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bida Perekonomian dan SDA	Dokumen	95,00	0	95,19	0	95,38	0	95,57	0	95,76	0	95,95	0	95,95	
			04	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																	
5	02			KEUANGAN																	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000		Badan Pengelola Keuangan. Pendapatan dan Aset Daerah					305.117.498.918		280.625.753.750		283.696.363.287		290.513.661.087		288.216.527.469		291.825.532.488		1.739.995.336.999
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningktanya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasya	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	32.611.184.860	100,00	32.512.136.782	100,00	32.890.833.302	100,00	35.188.447.846	100,00	31.268.635.278	100,00	33.570.281.233	100,00	198.041.519.301

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
					rakatan																
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase belanja pegawai diluar Tunjangan Guru yang dialokasikan	%	29,28	270.078.372.082	30.00	246.122.369.277	30.00	248.786.873.350	30.00	253.285.016.140	30.00	254.901.891.358	30.00	256.187.418.175	30.00	1.529.361.940.382
						Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	23,13		30,20		40,00		40,00		40,00		40,00		40,00		40,00	
					Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	91,34		91,42		91,72		91,75		91,85		92,05		92,05		92,05	
						Persentase Penurunan SILPA	%	-65,91		-5,15		-3,25		-2,95		-2,85		-1,92		-1,92		-1,92	
					Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu	Nilai	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase penambahan nilai aset tetap	%	-0,41	1.025.200.988	2,55	746.448.424	2,64	756.723.069	2,55	764.797.829	2,65	766.973.443	2,78	775.157.581	2,78	4.835.301.334

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
5	02	5.02.0.00.0.00.03.0000	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	9,25	1.402.740.988	9,65	1.244.799.267	9,76	1.261.933.566	9,85	1.275.399.272	9,91	1.279.027.390	10,03	1.292.675.499	10,03	7.756.575.982
					Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Nilai	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
					Meningkatnya Penerparan Sistem Informasi Keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Infomasi Keuangan Berbasis Digital	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
5	03			KEPEGAWAIAN					8.709.212.005		8.092.205.741		8.369.298.841		8.973.834.016		8.472.498.413		8.679.036.302		51.296.085.318
5	03	5.03.5.04.5.02.04.0000		Badan Kepegawaian Daerah					8.709.212.005		8.092.205.741		8.369.298.841		8.973.834.016		8.472.498.413		8.679.036.302		51.296.085.318
5	03	5.03.5.04.5.02.04.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningktanya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100%	8.081.035.205	100%	7.244.089.030	100%	7.343.801.798	100%	7.422.165.258	100%	7.443.279.028	100%	7.522.703.979	100%	45.057.074.298

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
			02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pencapaian tujuan strategis perangkat daerah	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	73,16 %	628.176.800	79%	848.116.711	82%	1.025.497.043	85%	1.551.668.758	88%	1.029.219.385	90%	1.156.332.323	90%	6.239.011.020
					Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	%	80%	-	85%		90%		90%		95%		95%		95%	0
					Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	%	N/A		15%		20%		20%		20%		25%		25%	0
					Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	%	80%		85%		90%		90%		90%		95%		95%	0
					Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	%	85%		90%		90%		95%		95%		95%		95%	
5	04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					557.942.000		866.546.937		892.870.511		892.870.511		898.444.420		898.444.420		4.449.176.799
5	03	5.03.5.04.5.02.04.0000		Badan Kepegawaian Daerah					557.942.000		866.546.937		892.870.511		892.870.511		898.444.420		898.444.420		4.449.176.799

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
5	04	5.03.5.04.5.02.04.0000	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pencapaian tujuan strategis perangkat daerah dimensi kompetensi	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Indeks	25,34 %	557.942.000	27,77 %	866.546.937	29,16 %	892.870.511	30,62 %	892.870.511	32,15 %	898.444.420	33,76 %	898.444.420	25%	4.449.176.799
					Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, Manajerial, dan fungsional	%	12,86 %	-	13,86 %		14,58 %		15,31 %		16,08 %		16,88 %		100%	
					Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi	Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan	%	N/A	-	80%		90%		100%		100%		100%		30%	
					Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang memiliki Sertifikasi Kompetensi	%	17,51 %		22,50 %		25		27%		29%		30%		27,37 %	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
					Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang mendapat pengembangan kompetensi Teknis	%	21,37 %		23,37 %		24,37 %		25,37 %		26,37 %		27,37 %			
5	05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					150.000.000		165.000.000		170.000.000		175.000.000		180.000.000		185.000.000		875.000.000
5	01	5.01.5.05.5.02.02.0000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					150.000.000		165.000.000		170.000.000		175.000.000		180.000.000		185.000.000		875.000.000
5	05	5.01.5.05.5.02.02.0000	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitabangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholders (%)	%	48	150.000.000	52,00	165.000.000	56,00	170.000.000	58,00	175.000.000	60,00	180.000.000	65,00	185.000.000	65,00	875.000.000
					Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	%	48		52,00		56,00		58,00		60,00		65,00		65,00			

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
					ameningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	%	48		52,00		56,00		58,00		60,00		65,00		65,00	
					Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan peerapan di daerah	Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	%	48		52,00		56,00		58,00		60,00		65,00		65,00	
						Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah.	%	48		52,00		56,00		58,00		60,00		65,00		65,00	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
				Program Riset dan Inovasi Daerah	Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk inovasi yang dimanfaatkan	%	48	0	52,00		56,00		58,00		60,00		65,00		65,00	
					Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah	Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah	%	48		52,00		56,00		58,00		60,00		65,00		65,00	
					Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian masalah daerah	%	48		52,00		56,00		58,00		60,00		65,00		65,00	
					Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi	Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan Teknis dan Supervisi terkait riset dan inovasi daerah	%	48		52,00		56,00		58,00		60,00		65,00		65,00	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
					terkait riset dan inovasi didaerah																
6				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
6	01			INSPEKTORAT DAERAH					7.057.095.342		15.064.739.666		16.186.230.300		17.082.683.530		18.849.006.283		20.780.497.866		87.963.157.645
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000		Inspektorat Daerah					7.057.095.342		15.064.739.666		16.186.230.300		17.082.683.530		18.849.006.283		20.780.497.866		87.963.157.645
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningktanya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%		5.462.806.067	100	7.908.650.000	100	8.349.515.000	100	8.501.464.500	100	9.451.610.950	100	10.492.981.400	100	44.704.221.850
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Level		1.388.500.000	92	5.910.423.000	93	6.467.215.300	94	7.074.769.030	95	7.740.300.333	96	8.464.711.966	92	35.657.419.629

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
					anggaran ataupun proses dan kewenangan																
						Nilai Maturitas SPIP	Level	Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3	
						Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti	%														
						Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti	%														
						Persentase perangkat Daerah yang mendapat Nilai Evaluasi Minimal BB	%														
						Persentase aparat pengawas intern pemerintah (APIP) yang memiliki Standar Kompetensi	Level														

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN. PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat pendampingan	OPD		205.789.275	45	1.245.666.666	45	1.369.500.000	45	1.506.450.000	45	1.657.095.000	45	1.822.804.500	45	7.601.516.166
						Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3	
						Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3	
7				UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01			KECAMATAN							92.888.009.830		93.921.955.939		95.653.026.101		96.771.016.055		98.658.179.179		492.748.140.901
7	01	7.01.2.13.2.19.01.0000		Kantor Camat Aek Bilah							4.618.432.118		4.682.003.487		4.731.963.713		4.745.424.688		4.796.061.662		23.573.885.669

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
7	01	7.01.2.13.2.19.01.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintah pembangunan dan kemasyarakatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00		100,00	4.032.474.390	100,00	4.094.862.576	100,00	4.143.892.948	100,00	4.157.103.389	100,00	4.206.797.913	100,00	20.635.131.216
7	01	7.01.2.13.2.19.02.0000	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80,00		87,00	126.629.755	88,00	126.996.305	89,00	127.284.375	90,00	127.361.990	91,00	127.653.962	91,00	635.926.386
7	01	7.01.2.13.2.19.02.0000	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kapasitas, partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan.	Persentase pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dapat diberdayakan	%	100,00		100,00	159.327.974	100,00	160.144.606	100,00	160.786.391	100,00	160.959.309	100,00	161.609.787	100,00	802.828.067
			04	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kapasitas kecamatan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan di kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik	%	100,00		100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	750.000.000

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
			05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Persentase laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tepat waktu	%	100,00		100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	750.000.000
7	01	7.01.2.13.2.19.02.0000		Kantor Camat Angkola Barat							4.637.764.974		4.701.602.452		4.751.771.812		4.765.289.137		4.816.138.079		23.672.566.455
7	01	7.01.2.13.2.19.02.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintah pembangunan dan kemasyarakatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00		100,00	4.061.135.219	100,00	4.124.606.147	100,00	4.174.487.438	100,00	4.187.927.147	100,00	4.238.484.117	100,00	20.786.640.068
7	01	7.01.2.13.2.19.02.0000	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80,00		87,00	126.629.755	88,00	126.996.305	89,00	127.284.375	90,00	127.361.990	91,00	127.653.962	91,00	635.926.386

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
			03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kapasitas, partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan.	Persentase pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dapat diberdayakan	%	100,00		100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	750.000.000
			04	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kapasitas kecamatan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan di kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik	%	100,00		100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	750.000.000
7	01	7.01.2.13.2.19.02.0000	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Persentase laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tepat waktu	%	100,00		100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	750.000.000
7	01	7.01.2.13.2.19.03.0000		Kantor Camat Angkola Sangkunur							6.442.949.783		6.545.399.811		6.625.914.463		6.647.607.835		6.729.213.117		32.991.085.010

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
7	01	7.01.2.13.2.19.03.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintah pembangunan dan kemasyarakatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00		100,00	3.532.474.390	100,00	3.594.862.575	100,00	3.643.892.947	100,00	3.657.103.389	100,00	3.706.797.913	100,00	18.135.131.214
7	01	7.01.2.13.2.19.03.0000	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80,00		87,00	126.629.755	88,00	126.996.305	89,00	127.284.375	90,00	127.361.990	91,00	127.653.962	91,00	635.926.386
			03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kapasitas, partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan.	Persentase pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dapat diberdayakan	%	100,00		100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	500.000.000
7	01	7.01.2.13.2.19.03.0000	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kapasitas kecamatan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan di kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik	%	100,00		100,00	2.564.512.784	100,00	2.603.941.965	100,00	2.634.929.041	100,00	2.643.278.007	100,00	2.674.684.826	100,00	13.121.346.622

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
2	13	7.01.2.13.2.19.03.0000	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Persentase laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tepat waktu	%	100,00		100,00	119.332.855	100,00	119.598.966	100,00	119.808.101	100,00	119.864.449	100,00	120.076.416	100,00	598.680.787
7	01	7.01.2.13.2.19.04.0000		Kantor Camat Angkola Selatan					5.018.396.351		6.442.949.783		6.545.399.811		6.625.914.463		6.647.607.835		6.729.213.117		32.991.085.009
7	01	7.01.2.13.2.19.04.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintah pembangunan dan kemasyarakatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	3.902.293.651,00	100,00	3.532.474.390	100,00	3.594.862.575	100,00	3.643.892.947	100,00	3.657.103.389	100,00	3.706.797.913	100,00	18.135.131.214
7	01	7.01.2.13.2.19.04.0000	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	81,00	15.500.000,00	87,00	26.629.755	88,00	26.996.305	89,00	27.284.375	90,00	27.361.990	91,00	27.653.962	91,00	135.926.386
7	01	7.01.2.13.2.19.04.0000	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kapasitas, partisipasi dan kemandirian	Persentase pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dapat diberdayaka	%	90,00	63.586.900,00	100,00	2.805.184.810	100,00	2.843.797.359	100,00	2.874.142.650	100,00	2.882.318.698	100,00	2.913.075.039	100,00	14.318.518.555

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
					masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan.	n															
7	01	7.01.2.13.2.19.04.0000	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kapasitas kecamatan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan di kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik	%	100,00	518.507.900,00	100,00	19.332.855	100,00	19.598.966	100,00	19.808.101	100,00	19.864.449	100,00	20.076.416	100,00	98.680.787
7	01	7.01.2.13.2.19.04.0000	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Persentase laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tepat waktu	%	13,00	518.507.900,00	100,00	59.327.974	100,00	60.144.606	100,00	60.786.391	100,00	60.959.309	100,00	61.609.787	100,00	302.828.067
7	01	7.01.2.13.2.19.05.0000		Kantor Camat Angkola Timur					4862430206		6.371.978.123		5.488.889.534		5.504.033.595		5.519.690.872		5.578.589.802		28.463.181.926
7	01	7.01.2.13.2.19.05.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATE	Meningkatnya pelayanan administrasi pemerint	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangun	%	100,00	3.595.269.630	100,00	4.972.028.179	100,00	4.069.669.690	100,00	4.069.669.690	100,00	4.081.246.644	100,00	4.124.796.376	100,00	21.317.410.579

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
				N/KOTA	ah pembangunan dan kemasyarakatan	an dan Kemasyarakatan (%)															
7	01	7.01.2.13.2.19.05.0000	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80,00	10.819.018	87,00	11.952.774	88,00	12.117.300	89,00	12.246.600	90,00	12.281.438	91,00	12.412.490	91,00	61.010.602
7	01	7.01.2.13.2.19.05.0000	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kapasitas, partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan.	Persentase pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dapat diberdayakan	%	100,00	1.133.846.659	100,00	1.252.665.681	100,00	1.269.908.258	100,00	1.283.459.060	100,00	1.287.110.105	100,00	1.300.844.463	100,00	6.393.987.567
7	01	7.01.2.13.2.19.05.0000	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kapasitas kecamatan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan di kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik	%	100,00	13.012.939	100,00	14.376.602	100,00	14.574.491	100,00	14.730.011	100,00	14.771.914	100,00	14.929.540	100,00	73.382.558

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
7	01	7.01.2.13.2.19.05.0000	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Persentase laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tepat waktu	%	100,00	109.481.960	100,00	120.954.887	100,00	122.619.795	100,00	123.928.234	100,00	124.280.771	100,00	125.606.933	100,00	617.390.620
7	01	7.01.2.13.2.19.06.0000		Kantor Camat Arse							6.442.949.783		6.545.399.811		6.625.914.462		6.647.607.835		6.729.213.117		32.991.085.008
2	13	7.01.2.13.2.19.06.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintah pembangunan dan kemasyarakatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00		100,00	3.532.474.390	100,00	3.594.862.575	100,00	3.643.892.947	100,00	3.657.103.389	100,00	3.706.797.913	100,00	18.135.131.214
7	01	7.01.2.13.2.19.06.0000	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80,00		87,00	150.000.000,00	88,00	150.000.000,00	89,00	150.000.000,00	90,00	150.000.000,00	91,00	150.000.000,00	91,00	750.000.000

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
7	01	7.01.2.13.2.19.06.0000	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kapasitas, partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan.	Persentase pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dapat diberdayakan	%	100,00		100,00	120.000.000	100,00	120.000.000	100,00	120.000.000	100,00	120.000.000	100,00	120.000.000	100,00	600.000.000
7	01	7.01.2.13.2.19.06.0000	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kapasitas kecamatan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan di kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik	%	100,00		100,00	2.520.475.393	100,00	2.560.537.236	100,00	2.592.021.516	100,00	2.600.504.446	100,00	2.632.415.204	100,00	12.905.953.794
7	01	7.01.2.13.2.19.06.0000	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Persentase laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tepat waktu	%	100,00		100,00	120.000.000	100,00	120.000.000	100,00	120.000.000	100,00	120.000.000	100,00	120.000.000	100,00	600.000.000
7	01	7.01.2.13.2.19.07.0000		Kantor Camat Batang Angkola							7.684.640.352		7.805.228.721		7.905.266.802		7.948.327.718		8.051.963.173		39.395.426.766

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
7	01	7.01.2.13.2.19.07.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya pelayanan administrasi pemerintah pembangunan dan kemasyarakatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00		100,00	4.532.474.390	100,00	4.594.862.575	100,00	4.643.892.947	100,00	4.657.103.389	100,00	4.706.797.913	100,00	23.135.131.214
7	01	7.01.2.13.2.19.07.0000	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80,00		87,00	26.629.755	88,00	26.996.305	89,00	27.284.375	90,00	27.361.990	91,00	27.653.962	91,00	135.926.386
7	01	7.01.2.13.2.19.07.0000	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kapasitas, partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan.	Persentase pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dapat diberdayakan	%	100,00		100,00	2.705.184.810	100,00	2.743.797.359	100,00	2.774.142.650	100,00	2.782.318.698	100,00	2.813.075.039	100,00	13.818.518.555
2	13	7.01.2.13.2.19.09.0000	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kapasitas kecamatan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan di kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik	%	100,00		100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	100.000.000	100,00	500.000.000

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
2	13	7.01.2.13.2.19.07.0000	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Persentase laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tepat waktu	%	100,00		100,00	320.351.398	100,00	339.572.482	100,00	359.946.831	100,00	381.543.641	100,00	404.436.259	100,00	1.805.850.610
7	01	7.01.2.13.2.19.08.0000		Kantor Camat Batang Toru					5.511.709.206		6.294.323.107		6.667.816.722		7.063.380.008		7.481.906.561		7.926.254.204		35.433.680.602
7	01	7.01.2.13.2.19.08.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningktanya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	2.558.750.953	100,00	3.471.392.800	100,00	3.679.676.368	100,00	3.980.922.251	100,00	4.290.599.391	100,00	4.622.280.586	100,00	20.044.871.396
7	01	7.01.2.13.2.19.08.0000	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	81,00	32.982.700	87,00	70.859.747	88,00	134.339.568	89,00	142.399.942	90,00	150.943.939	91,00	160.000.575	91,00	658.543.771

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
7	01	7.01.2.13.2.19.08.0000	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan.	Persentase pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dapat diberdayakan	%	100,00	2.558.750.953	100,00	2.371.514.090	100,00	2.414.183.271	100,00	2.474.063.250	100,00	2.536.314.079	100,00	2.607.360.025	100,00	12.403.434.715
			04	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kapasitas kecamatan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan di kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik	%	100,00	282.855.800	100,00	305.240.484	100,00	317.450.103	100,00	336.497.108	100,00	366.781.848	100,00	391.109.675	100,00	1.717.079.218
7	01	7.01.2.13.2.19.08.0000	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Persentase laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tepat waktu	%	100,00	78.368.800	100,00	75.315.986	100,00	122.167.412	100,00	129.497.457	100,00	137.267.304	100,00	145.503.343	100,00	609.751.502
7	01	7.01.2.13.2.19.09.0000		Kantor Camat Marancar							7.442.949.783		7.545.399.811		7.625.914.463		7.647.607.835		7.729.213.117		37.991.085.009

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
7	01	7.01.2.13.2.19.09.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningktanya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00		100,00	4.532.474.390	100,00	4.594.862.575	100,00	4.643.892.947	100,00	4.657.103.389	100,00	4.706.797.913	100,00	23.135.131.214
7	01	7.01.2.13.2.19.09.0000	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	81,00		87,00	26.629.755	88,00	26.996.305	89,00	27.284.375	90,00	27.361.990	91,00	27.653.962	91,00	135.926.386
7	01	7.01.2.13.2.19.09.0000	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan.	Persentase pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dapat diberdayakan	%	100,00		100,00	2.805.184.810	100,00	2.843.797.359	100,00	2.874.142.650	100,00	2.882.318.698	100,00	2.913.075.039	100,00	14.318.518.555
7	01	7.01.2.13.2.19.09.0000	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kapasitas kecamatan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan di kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik	%	100,00		100,00	19.332.855	100,00	19.598.966	100,00	19.808.101	100,00	19.864.449	100,00	20.076.416	100,00	98.680.787

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
7	01	7.01.2.13.2.19.09.0000	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Persentase laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tepat waktu	%	100,00		100,00	59.327.974	100,00	60.144.606	100,00	60.786.391	100,00	60.959.309	100,00	61.609.787	100,00	302.828.067
7	01	7.01.2.13.2.19.10.0000		Kantor Camat Muara Batang Toru							5.442.949.784		5.545.399.812		5.625.914.462		5.647.607.835		5.729.213.117		42.847.038.806
2	13	7.01.2.13.2.19.10.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningktanya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00		100,00	2.532.474.390	100,00	2.594.862.575	100,00	2.643.892.947	100,00	2.657.103.389	100,00	2.706.797.913	100,00	27.991.085.010
7	01	7.01.2.13.2.19.10.0000	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	81,00		87,00	120.000.000,00	88,00	120.000.000,00	89,00	120.000.000,00	90,00	120.000.000,00	91,00	120.000.000,00	91,00	600.000.000

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
7	01	7.01.2.13.2.19.10.0000	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan.	Persentase pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dapat diberdayakan	%	100,00		100,00	130.000.000	100,00	130.000.000	100,00	130.000.000	100,00	130.000.000	100,00	130.000.000	100,00	650.000.000
7	01	7.01.2.13.2.19.10.0000	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kapasitas kecamatan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan di kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik	%	100,00		100,00	2.540.475.394	100,00	2.580.537.237	100,00	2.612.021.516	100,00	2.620.504.446	100,00	2.652.415.204	100,00	13.005.953.796
7	01	7.01.2.13.2.19.10.0000	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Persentase laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tepat waktu	%	100,00		100,00	120.000.000,00	100,00	120.000.000,00	100,00	120.000.000,00	100,00	120.000.000,00	100,00	120.000.000,00	100,00	600.000.000
7	01	7.01.2.13.2.19.11.0000		Kantor Camat Saipar Dolok Hole							5.442.949.783		5.545.399.811		5.625.914.462		5.647.607.835		5.729.213.117		27.991.085.009

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
7	01	7.01.2.13.2.19.11.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningktanya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00		100,00	2.532.474.390	100,00	2.594.862.575	100,00	2.643.892.947	100,00	2.657.103.389	100,00	2.706.797.913	100,00	13.135.131.214
7	01	7.01.2.13.2.19.11.0000	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	81,00		87,00	120.000.000,00	88,00	120.000.000,00	89,00	120.000.000,00	90,00	120.000.000,00	91,00	120.000.000,00	91,00	600.000.000
7	01	7.01.2.13.2.19.11.0000	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan.	Persentase pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dapat diberdayakan	%	100,00		100,00	2.611.147.420	100,00	2.650.392.630	100,00	2.681.235.125	100,00	2.689.545.137	100,00	2.720.805.417	100,00	13.353.125.728
7	01	7.01.2.13.2.19.11.0000	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kapasitas kecamatan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan di kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik	%	100,00		100,00	120.000.000,00	100,00	120.000.000,00	100,00	120.000.000,00	100,00	120.000.000,00	100,00	120.000.000,00	100,00	600.000.000

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
7	01	7.01.2.13.2.19.11.0000	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Persentase laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tepat waktu	%	100,00		100,00	59.327.974	100,00	60.144.606	100,00	60.786.391	100,00	60.959.309	100,00	61.609.787	100,00	302.828.067
7	01	7.01.2.13.2.19.12.0000		Kantor Camat Sayur Matinggi							6.442.949.783		6.545.399.811		6.625.914.463		6.647.607.835		6.729.213.117		32.991.085.009
7	01	7.01.2.13.2.19.12.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningktanya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00		100,00	3.532.474.390	100,00	3.594.862.575	100,00	3.643.892.947	100,00	3.657.103.389	100,00	3.706.797.913	100,00	18.135.131.214
7	01	7.01.2.13.2.19.12.0000	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	81,00		87,00	126.629.755	88,00	126.996.305	89,00	127.284.375	90,00	127.361.990	91,00	127.653.962	91,00	635.926.386

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
7	01	7.01.2.13.2.19.12.0000	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan.	Persentase pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dapat diberdayakan	%	100,00		100,00	2.505.184.810	100,00	2.543.797.359	100,00	2.574.142.650	100,00	2.582.318.698	100,00	2.613.075.039	100,00	12.818.518.555
7	01	7.01.2.13.2.19.12.0000	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kapasitas kecamatan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan di kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik	%	100,00		100,00	119.332.855	100,00	119.598.966	100,00	119.808.101	100,00	119.864.449	100,00	120.076.416	100,00	598.680.787
7	01	7.01.2.13.2.19.12.0000	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Persentase laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tepat waktu	%	100,00		100,00	159.327.974	100,00	160.144.606	100,00	160.786.391	100,00	160.959.309	100,00	161.609.787	100,00	802.828.067
7	01	7.01.2.13.2.19.13.0000		Kantor Camat Sipirok							6.294.323.107		6.667.816.723		7.063.380.009		7.481.906.561		7.926.254.204		35.433.680.604

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
7	01	7.01.2.13.2.19.13.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningktanya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00		100,00	3.335.739.286	100,00	3.535.883.643	100,00	3.748.036.662	100,00	3.972.918.862	100,00	4.211.293.994	100,00	18.803.872.447
7	01	7.01.2.13.2.19.13.0000	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	81,00		87,00	90.099.377	88,00	91.339.569	89,00	92.314.225	90,00	92.576.831	91,00	93.564.690	91,00	459.894.692
7	01	7.01.2.13.2.19.13.0000	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan.	Persentase pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dapat diberdayakan	%	100,00		100,00	2.398.133.046	100,00	2.551.021.029	100,00	2.713.082.290	100,00	2.884.867.228	100,00	3.066.959.262	100,00	13.614.062.855
7	01	7.01.2.13.2.19.13.0000	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kapasitas kecamatan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan di kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik	%	100,00		100,00	320.351.398	100,00	339.572.482	100,00	359.946.831	100,00	381.543.641	100,00	404.436.259	100,00	1.805.850.610

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
			05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Persentase laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tepat waktu	%	100,00		100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	750.000.000
7	01	7.01.2.13.2.19.14.0000		Kantor Camat Tano Tombangan Angkola							6.442.949.783		6.545.399.811		6.625.914.463		6.647.607.835		6.729.213.117		32.991.085.009
2	13	7.01.2.13.2.19.14.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningktanya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00		100,00	3.532.474.390	100,00	3.594.862.575	100,00	3.643.892.947	100,00	3.657.103.389	100,00	3.706.797.913	100,00	18.135.131.214
7	01	7.01.2.13.2.19.14.0000	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	81,00		87,00	126.629.755	88,00	126.996.305	89,00	127.284.375	90,00	127.361.990	91,00	127.653.962	91,00	635.926.386

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
7	01	7.01.2.13.2.19.14.0000	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan.	Persentase pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dapat diberdayakan	%	100,00		100,00	2.505.184.810	100,00	2.543.797.359	100,00	2.574.142.650	100,00	2.582.318.698	100,00	2.613.075.039	100,00	12.818.518.555
7	01	7.01.2.13.2.19.14.0000	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kapasitas kecamatan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan di kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik	%	100,00		100,00	119.332.855	100,00	119.598.966	100,00	119.808.101	100,00	119.864.449	100,00	120.076.416	100,00	598.680.787
7	01	7.01.2.13.2.19.14.0000	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Persentase laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tepat waktu	%	100,00		100,00	159.327.974	100,00	160.144.606	100,00	160.786.391	100,00	160.959.309	100,00	161.609.787	100,00	802.828.067
7	01	7.01.2.13.2.19.15.0000		Kantor Camat Angkola Muaratais							6.442.949.783		6.545.399.811		6.625.914.463		6.647.607.835		6.729.213.117		32.991.085.009

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
7	01	7.01.2.13.2.19.15.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningktanya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00		100,00	3.532.474.390	100,00	3.594.862.575	100,00	3.643.892.947	100,00	3.657.103.389	100,00	3.706.797.913	100,00	18.135.131.214
7	01	7.01.2.13.2.19.15.0000	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	81,00		87,00	26.629.755	88,00	26.996.305	89,00	27.284.375	90,00	27.361.990	91,00	27.653.962	91,00	135.926.386
7	01	7.01.2.13.2.19.15.0000	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan.	Persentase pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dapat diberdayakan	%	100,00		100,00	2.805.184.810	100,00	2.843.797.359	100,00	2.874.142.650	100,00	2.882.318.698	100,00	2.913.075.039	100,00	14.318.518.555
7	01	7.01.2.13.2.19.15.0000	04	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kapasitas kecamatan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan di kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik	%	100,00		100,00	19.332.855	100,00	19.598.966	100,00	19.808.101	100,00	19.864.449	100,00	20.076.416	100,00	98.680.787

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
7	01	7.01.2.13.2.19.15.0000	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kapasitas pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Persentase laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tepat waktu	%	100,00		100,00	59.327.974	100,00	60.144.606	100,00	60.786.391	100,00	60.959.309	100,00	61.609.787	100,00	302.828.067
8				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					2.355.782.964		7.164.301.533		7.263.374.343		10.599.035.920		7.368.063.109		7.448.364.778		39.843.139.682
8	01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					2.355.782.964		7.164.301.533		7.263.374.343		10.599.035.920		7.368.063.109		7.448.364.778		39.843.139.682
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah					2.355.782.964		7.164.301.533		7.263.374.343		10.599.035.920		7.368.063.109		7.448.364.778		39.843.139.682
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningktanya Pelayanan Administrasi Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	954.067.764,00	100,00	3.285.002.128	100,00	3.330.219.222	100,00	3.365.754.972	100,00	3.375.329.506	100,00	3.411.346.614	100,00	16.767.652.442

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Ormas	0,00	-	8,00	387.953.586	6,00	393.293.653	7,00	397.490.370	7,00	398.621.107	7,00	402.874.671	35,00	1.980.233.386
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan politik dan kader partai politik	%	82,65	856.928.500,00	-	1.664.040.449	-	1.686.945.479	-	4.961.472.427	-	1.709.796.404	84,66	1.728.041.118	84,66	11.750.295.877
			04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%	-	-	100,00	371.000.000	100,00	376.565.000	100,00	382.213.475	100,00	387.946.677	100,00	393.765.877	100,00	1.911.491.029
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan	%	94,00	-	96,00	880.573.891	97,00	892.694.733	98,00	902.220.405	99,00	904.786.944	100,00	914.441.648	490,00	4.494.717.620

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/ORGANISASI PERANGKAT DAERAH/ PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)		TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030		KONDISI AKHIR	
								CAPAIAN	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH	TARGET	RUPIAH
						narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan															
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial Yang Diselesaikan	%	90,00	544.786.700,00	92,00	575.731.480	93,00	583.656.255	94,00	589.884.271	95,00	591.582.471	96,00	597.894.850	470,00	2.938.749.328
Total									**1.492.771.756.159**		**1.456.114.106.647**		**1.476.865.859.187**		**1.498.424.151.541**		**1.520.647.856.517**		**1.544.023.829.858**		**7.943.654.962.184**

4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

4.2.1 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD yakni tahun 2029.

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcomes) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator utama Bupati tersebut, merupakan agregasi dan akumulasi capaian kinerja dari indikator kinerja program yang bersifat outcomes yang dilaksanakan OPD. Selanjutnya indikator kinerja program yang terukur dilaksanakan OPD merupakan agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (outputs) yang dilaksanakan OPD.

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continously improve (SMART-C).

Ukuran keberhasilan pencapaian kinerja suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah, yang diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pembinaan kemasyarakatan. Indikator kinerja tersebut, antara lain berupa indikator kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, indeks pembangunan daerah, daya saing daerah dan daya tarik investasi.

Perumusan indikator kinerja utama Bupati yang menggambarkan tingkat keberhasilan kinerja daerah diukur dengan indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator kinerja lainnya yang digunakan Pemerintah dan diintegrasikan dalam rumusan makro yang terukur dan kuantitatif untuk memudahkan pengendalian, evaluasi serta laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Rumusan indikator kinerja utama Bupati disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi daerah dan isu-isu strategis daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kinerja daerah. Sedangkan rumusan indikator kinerja program OPD disesuaikan dengan arah kebijakan untuk mencapai indikator kinerja utama Bupati dan pelayanan yang harus dilaksanakan OPD.

4.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Daerah. Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah. Pencapaian indikator tujuan dan sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program.

Berikut ini penetapan indikator kinerja utama Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025-2029 yang tersaji pada tabel berikut.

TABEL : 3 .10
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2025-2029

Visi : Tapanuli Selatan yang Maju dan Berkarakter Unggul, Sehat, Cerdas dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045													
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan Pemerintahan Terkait
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Misi 1: Perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sarana air bersih, listrik desa dan jaringan telekomunikasi	**Tujuan 1: Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah**		Indeks Infrastruktur Daerah	**%**	75,99	77,96	78,60	79,26	79,92	80,59	81,72	81,72	**Seluruh Urusan**
		Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	**%**	75,99	77,96	78,60	79,26	79,92	80,59	81,72	81,72	**Seluruh Urusan**
			Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	%	59,67	59,97	60,27	60,57	60,87	61,18	61,48	61,48	
			Persentase jembatan dengan kondisi baik	%	77,75	78,14	78,53	78,92	79,32	79,71	80,11	80,11	
			Luas Daerah	%	67,10	68,41	69,78	71,17	72,60	74,05	75,53	75,53	

			Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik										
			Persentase penududuk berakses air minum	%	86,44	94,95	95,42	95,90	96,38	96,86	100,00	100,00	
			Rasio ketersediaan daya listrik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
			Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	65,00	66,30	67,63	68,98	70,36	71,77	73,20	73,20	
Misi 2 : Peningkatkan pendapatan masyarakat	**Tujuan 2 : Mewujudkan Peningkatkan pendapatan masyarakat**		**Pertumbuhan Ekonomi**	%	5.12	5,40	5,51	5,62	5,73	6,00	6,12	6,12	Seluruh Urusan
			Indeks Akses Keuangan Daerah	indeks	4.30	4.33	4.35	4.37	4.38	4.40	4.41	4.41	Seluruh Urusan
			Indeks Zakat	indeks	n.a	0,36	0,38	0,40	0,42	0,44	0,46	0,46	
		Sasaran 1: Peningkatan Pendapatan perkapita masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	%	5.12	5,40	5,51	5,62	5,73	6,00	6,12	6,12	Seluruh Urusan
			PDRB Perkapita	Rp. Juta	67,23	69,27	70,66	72,07	73,51	78,61	80,18	80,18	3.27 Pertanian 3.25 Kelautan dan Perikanan
			Kontribusi PDRB Kabupaten	%	1,80 (2023)	1,84	1,87	1,91	1,95	1,99	2,03	2,03	

		Sasaran 2: Meningkatnya Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,32	3,33	3,39	3,46	3,53	3,60	3,67	3,67	Seluruh Urusan
		Sasaran 3 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Persentase Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan	%	6,92	6,60	6,41	6,22	6,04	5,00	4,85	4,85	Seluruh Urusan
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,41	3,34	3,28	3,21	3,15	3,09	3,03	3,03	Seluruh Urusan
			Gini Ratio	%	0,206	0,205	0,2048	0,2046	0,2044	0,2042	0,200	0,200	Seluruh Urusan
Misi 3 : Penciptaan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehat dan cerdas	**Tujuan 3 : Mewujudkan Penciptaan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehat dan cerdas**		**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Indeks**	75,18	76,18	76,33	76,49	76,64	77,21	77,46	77,46	Seluruh Urusan
		Sasaran 1: Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	75,18	76,18	76,33	76,49	76,64	77,21	77,46	77,46	Seluruh Urusan
			Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,72	13,85	14,13	14,41	14,70	14,99	15,29	15,29	1.01. Pendidikan
			Rata-rata Lama	Tahun	9,56	9,75	9,95	10,15	10,35	10,56	10,77	10,77	1.01. Pendidikan

			Sekolah (RLS)										
		Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	71,77	71,99	72,20	72,42	72,64	72,85	73,07	73,07	1.02. Kesehatan
			Prevalensi Stunting	%	6,60	6,10	5,90	5,60	5,40	5,20	5,00	5,00	
			Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	49,5	70	90	90	90	90	90	90	
Misi 4 : Reformasi birokrasi dan pelayanan publik	**Tujuan 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi dan pelayanan publik**		**Indeks Reformasi Birokrasi**	Indeks	**64,56 (B)**	**65,85 (B)**	**67,17 (B)**	**68,51 (B)**	**71,25 (BB)**	**72,68 (BB)**	**74,13 (BB)**	**74,13 (BB)**	Seluruh Urusan
		Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	**64,56 (B)**	**65,85 (B)**	**67,17 (B)**	**68,51 (B)**	**71,25 (BB)**	**72,68 (BB)**	**74,13 (BB)**	**74,13 (BB)**	Seluruh Urusan
			Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	**78,25**	**78,50**	**78,75**	**79,00**	**79,25**	**79,50**	**79,75**	**79,75**	6.01. Pengawasan
			Peringkat/ Nilai SAKIP	Nilai	58,26 (2023)	66,76(B)	70.00(B)	77,86(BB)	79,06 (BB)	81.00(A)	82.00(A)	82.00(A)	4.01 Sekretariat Daerah
Misi 5 :	**Tujuan 5 :**		**Indeks**	**Indeks**	77,90	78,27	78,43	78,58	78,74	78,90	79,06	79,06	Seluruh

Perbaikan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang asri dan berkelanjutan	**Mewujudkan Perbaikan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang asri dan berkelanjutan**		**Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**										Urusan
		Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	77,90	78,27	78,43	78,58	78,74	78,90	79,06	79,06	2.11. Lingkungan Hidup
			Penurunan Intensitas Emisi GRK	Juta ton/qupla ne	n.a	5.20	5,10	5,00	4,90	4,81	4,80	4,80	2.11. Lingkungan Hidup
		Sasaran 2 : Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Rumah Layak Huni	Persentase Penurunan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	19,38	19,26	19,10	18,92	18,71	18,48	18,21	18,21	Perkim

4.1.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan strategis organisasi perangkat daerah yang paling penting dan berdampak langsung terhadap visi dan misi kepala daerah. IKU dirancang untuk dapat menggambarkan secara objektif tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah, serta digunakan sebagai acuan dalam evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan. IKU harus memenuhi prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), dan mencerminkan capaian yang bersifat strategis, lintas urusan, dan berkontribusi besar terhadap outcome pembangunan daerah.

Berikut indicator kinerja Utama Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dituangkan pada tabel. 4.2 berikut :

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan Pemerintahan Terkait
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Infrastruktur Daerah	%	75,99	77,96	78,60	79,26	79,92	80,59	81,72	81,72	**Seluruh Urusan**
2	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	%	59,67	59,97	60,27	60,57	60,87	61,18	61,48	61,48	
3	Persentase jembatan dengan kondisi baik	%	77,75	78,14	78,53	78,92	79,32	79,71	80,11	80,11	
4	Luas Daerah Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	67,10	68,41	69,78	71,17	72,60	74,05	75,53	75,53	
5	Persentase penududukberakses air minum	%	86,44	94,95	95,42	95,90	96,38	96,86	100,00	100,00	
6	Rasio ketersediaan daya listrik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
7	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	65,00	66,30	67,63	68,98	70,36	71,77	73,20	73,20	
8	Pertumbuhan	%	5.12	5,40	5,51	5,62	5,73	6,00	6,12	6,12	Seluruh Urusan

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan Pemerintahan Terkait
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ekonomi										
9	PDRB Perkapita	Rp. Juta	67,23	69,27	70,66	72,07	73,51	78,61	80,18	80,18	3.27 Pertanian 3.25 Kelautan dan Perikanan
10	Kontribusi PDRB Kabupaten	%	1,80 (2023)	1,84	1,87	1,91	1,95	1,99	2,03	2,03	
11	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,32	3,33	3,39	3,46	3,53	3,60	3,67	3,67	Seluruh Urusan
12	Persentase Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan	%	6,92	6,60	6,41	6,22	6,04	5,00	4,85	4,85	Seluruh Urusan
13	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,41	3,34	3,28	3,21	3,15	3,09	3,03	3,03	Seluruh Urusan
14	Gini Ratio	%	0,206	0,205	0,2048	0,2046	0,2044	0,2042	0,200	0,200	Seluruh Urusan
15	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	75,18	76,18	76,33	76,49	76,64	77,21	77,46	77,46	Seluruh Urusan
16	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,72	13,85	14,13	14,41	14,70	14,99	15,29	15,29	1.01. Pendidikan
17	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,56	9,75	9,95	10,15	10,35	10,56	10,77	10,77	1.01. Pendidikan
18	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	71,77	71,99	72,20	72,42	72,64	72,85	73,07	73,07	1.02. Kesehatan
19	Prevalensi Stunting	%	6,60	6,10	5,90	5,60	5,40	5,20	5,00	5,00	
20	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	49,5	70	90	90	90	90	90	90	
21	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	64,56 (B)	65,85 (B)	67,17 (B)	68,51 (B)	71,25 (BB)	72,68 (BB)	74,13 (BB)	74,13 (BB)	Seluruh Urusan
22	Indeks	Indeks	78,25	78,50	78,75	79,00	79,25	79,50	79,75	79,75	6.01.

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan Pemerintahan Terkait
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Survey Penilaian Integritas (SPI)										Pengawasan
23	Peringkat/ Nilai SAKIP	Nilai	58,26 ; CC (2023)	66,76(B)	70.00 (B)	77,86(BB)	79,06 (BB)	81.00(A)	82.00(A)	82.00(A)	4.01 Sekretariat Daerah
24	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	77,90	78,27	78,43	78,58	78,74	78,90	79,06	79,06	2.11. Lingkungan Hidup
25	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Juta ton/quplane	n.a	5.20	5,10	5,00	4,90	4,81	4,80	4,80	2.11. Lingkungan Hidup
26	Persentase Penurunan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	19,38	19,26	19,10	18,92	18,71	18,48	18,21	18,21	Perkim

4.1.3 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyajian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dibagi menjadi 3 aspek, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan suatu kondisi indikator makro ekonomi dan sosial, seperti laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, persentase penduduk miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator pada aspek Pelayanan Umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan, baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memuat indikator yang terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok rentan, seperti Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta indikator sektoral lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengukur capaian pembangunan yang inklusif dan responsif terhadap ketimpangan gender

Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tertuang pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3

ASPEK DAN INDIKATOR KINERJA MENURUT BIDANG URUSAN PENYELENGGARAAN TINGKAT SASARAN (dampak/impact)

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
					Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI										
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	77,29	76,3	76,93	77,55	78,18	78,81	80,39	80,39
2	Prevalensi Ketidak cukupan Konsumsi Pangan	%	n.a	8,45	8,28	8,12	7,96	7,81	7,65	7,65
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/ kapita	n.a	530	540	551	562	572	584	584
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	n.a	81,42	83,05	84,71	86,40	88,13	89,89	89,89
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	IKLH	77,90	78,27	78,43	78,58	78,74	78,90	79,06	79,06
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	% RT	n.a	65,60	66,91	68,25	69,62	71,01	72,43	72,43
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Liter/K g	n.a	70,02	71,42	72,85	74,31	75,79	77,31	77,31
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT	n.a	71,04	72,46	73,91	75,39	76,90	78,43	78,43
9	Indeks Kualitas Udara	%	n.a	94,70	94,71	94,72	94,73	94,74	94,80	94,80

NO	INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
					Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Indeks Risiko Bencana	Point	74,00	70,00	68,00	66,00	65,00	62,00	60,00	60,00
11	Indeks Ketahanan Daerah	Point	n.a	2,65	2,70	2,76	2,81	2,87	2,93	2,93
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,43	1,32	1,30	1,28	1,27	1,25	1,23	1,23
13	Rasio Penduduk (sex ratio)	%	101.5 ; 98.5	101.6 ; 98.4	101.7 ; 98.3	101.8 ; 98.2	101.9 ; 98.1	101.95 ; 98.12	102 ; 98	102 ; 98
14	Kepadatan Penduduk	Orang/ m2	0,74	0,733	0,725	0,718	0,711	0,704	0,700	0,700
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5.12	5,40	5,51	5,62	5,73	6,00	6,12	6,12
2	Persentase Penduduk Dibawah Garis Kemiskinan (%)	%	6,92	6,60	6,41	6,22	6,04	5,00	4,85	4,85
3	Peningkatan PDRB/Kapita	%	1,11	1,14	1,16	1,18	1,20	1,23	1,25	1,25
4	Tingkat pengangguran terbuka	%	3,41	3,34	3,28	3,21	3,15	3,09	3,03	3,03
5	Indeks Gini Rasio	Indeks	0,206	0,205	0,205	0,205	0,204	0,204	0,200	0,200
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	75,18	76,18	76,33	76,49	76,64	77,21	77,46	77,46
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,77	71,99	72,20	72,42	72,64	72,85	73,07	73,07
8	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	n.a	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84	0.85	0.85
9	Prevalensi Stunting	%	6,60	6,10	5,90	5,60	5,40	5,20	5,00	5,00

NO	INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
					Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,72	13,85	14,13	14,41	14,70	14,99	15,29	15,29
11	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,56	9,75	9,95	10,15	10,35	10,56	10,77	10,77
	Angka Literasi/Numerasi									
12	Skor Kemampuan Literasi SD	Nilai	56,12	58,62	61,12	63,62	66,12	68,82	71,12	71,12
13	Skor Kemampuan Literasi SMP	Nilai	65,18	66,28	67,38	68,48	69,58	70,68	71,78	71,78
14	Skor Kemampuan Numerasi SD	Nilai	53,03	55,93	58,83	61,73	64,63	67,53	70,43	70,43
15	Skor Kemampuan Numerasi SMP	Nilai	60,96	62,46	63,96	65,46	66,96	68,46	69,96	69,96
16	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	n.a	73,60	75,07	76,57	78,10	79,67	81,26	81,26
17	Indeks Literasi Digital	Indeks	n.a	3,30	3,37	3,43	3,50	3,57	3,64	3,64
18	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	n.a	50,00	51,00	52,02	53,06	54,12	55,20	55,20
19	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Skor	80,00	81,60	83,23	84,90	86,59	88,33	90,09	90,09
20	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	n.a	70,00	71,40	72,83	74,28	75,77	77,29	77,29
21	Indeks Perlindungan Anak	Angka	n.a	75,00	76,50	78,03	79,59	81,18	82,81	82,81

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	22	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	indeks	n.a	54,56	55,65	56,76	57,90	59,06	60,24	60,24
	23	Indeks Ketimpangan Gender	Point	0,523	0,521	0,519	0,518	0,517	0,515	0,513	0,513
	24	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka	n.a	55,86	56,98	58,12	59,28	60,46	61,67	61,67
	25	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,16	85,33	85,50	85,67	85,84	86,02	86,19	86,19
	26	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	9,57	9,57	9,58	9,59	9,59	9,60	9,61	9,61
	27	Opini BPK	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	28	Pengadaan cadangan pangan	Ton		60,8	61,6	62,4	63,2	64	64,85	64,85
	29	Penanganan desa rawan pangan	Desa		10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	20,00
	30	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,75	90,83	90,92	91,01	91,10	91,19	91,29	91,29
	31	Indek Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	0,52	61,19	61,21	61,23	61,25	61,27	61,29	61,29
ASPEK DAYA SAING DAERAH											
	1	Angka Ketergantungan	%	n.a	43,50	42,65	41,81	40,99	40,19	40,19	40,19
	2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%		6,47	6,60	6,73	6,87	7,00	7,14	7,14

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%		2,26	2,31	2,35	2,40	2,45	2,50	2,50
	4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	n.a	4,75	4,85	4,94	5,04	5,14	5,24	5,24
	5	Rasio Kewirausahaan	%	n.a	5,45	5,56	5,67	5,78	5,90	6,02	6,02
	6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%		66,78	67,45	68,12	68,80	69,49	70,19	70,19
	7	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	44,69	48,37	49,34	50,32	51,33	52,36	53,40	53,40
	8	Indeks Ekonomi Hijau	Skor	n.a	50,56	51,57	52,60	53,65	54,73	55,82	55,82
	9	Indeks Ekonomi Biru	Skor	n.a	48,60	49,57	50,56	51,57	52,61	53,66	53,66
	10	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	n.a	18,32	18,69	19,06	19,44	19,83	20,23	**20,23**
	11	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	indeks	n.a	5,92	6,04	6,16	6,28	6,41	6,54	6,54
	12	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	n.a	28,00	27,45	26,91	26,39	25,87	25,36	25,36
	13	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	n.a	8,40	8,57	8,74	8,91	9,09	9,27	9,27
	14	Indeks Infrastruktur	%	75,99	77,96	78,60	79,26	79,92	80,59	81,72	81,72
	15	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	80,61	82,22	83,87	85,54	87,25	89,00	90,78	90,78
	16	Persentase Desa Mandiri	%	4,24	9,00	12,00	14,00	16,00	18,00	18,36	18,36
	17	Rasio Pajak Daerah	%	0,77	0,78	0,78	0,79	0,79	0,79	0,80	0,80

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		terhadap PDRB									
	18	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	ASPEK PELAYANAN UMUM										
	1	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	na	0,20	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22	
	2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Point	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	3	Indeks Pelayanan Publik	Angka	na	3,00	3.04	3.08	3.08	3.02	3.10	3.10
	4	Indeks Integritas Nasional	Angka	na	71,55	72,27	73,71	75,19	76,69	78,22	78,22
	5	Persentase Penegakan Perda	%	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	81,00
	6	Persentase Capaian Aksi HAM	%	90,00	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	95,00
	7	Indeks Demokrasi	%	78,37	81,00	81,20	81,50	82,20	83,00	84,66	84,66
	8	Indeks Rasa Aman	Angka	na	80,00	81,60	83,23	84,90	86,59	88,33	88,33
	9	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	10	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai	3,32	3,33	3,39	3,46	3,53	3,60	3,67	3,67
	INDIKATOR KINERJA KUNCI										
	Layanan Urusan Wajib Dasar										
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1	01	Pendidikan Daerah									

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)									
1	2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah {Tahun}	Tahun	9,56	9,75	9,95	10,15	10,35	10,56	10,77	10,77
1	3	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,72	13,85	14,13	14,41	14,70	14,99	15,29	15,29
1	6	Angka Putus Sekolah:	%	1,5	1,5	1,2	0,9	0,6	0,3	0,00	0,00
1	6,1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,5	0,5	0,4	0,3	0,2	0,1	0,00	0,00
1	6,2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	1,00	1,00	0,8	0,6	0,4	0,2	0,00	0,00
1	A.1	Skor Kemampuan Literasi SD	Nilai	**56,12**	**58,62**	**61,12**	**63,62**	**66,12**	**68,62**	**71,12**	**71,12**
1	A.1	Skor Kemampuan Literasi SMP	Nilai	**65,18**	**66,28**	**67,38**	**68,48**	**69,58**	**70,68**	**71,78**	**71,78**
1	A.2	Skor Kemampuan Numerasi SD	Nilai	**53,03**	**55,93**	**58,83**	**61,73**	**64,63**	**67,53**	**70,43**	**70,43**
1	A.2	Skor Kemampuan Numerasi SMP	Nilai	**60,96**	**62,46**	**63,96**	**65,46**	**66,96**	**68,46**	**69,96**	**69,96**
1	B.10	Angka Partisipasi Sekolah (5-6) PAUD	Nilai	67,00	70,20	73,24	76,28	79,32	82,36	85,33	85,33
1	B.13	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15 SD/SMP	Nilai	98,47	98,71	98,96	99,20	99,45	99,70	99,94	99,94
1	B.15	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	Nilai	43,80	53,53	60,02	66,51	73,00	73,76	74,53	74,53
1	B.8	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	Nilai	20,69	22,74	25,44	28,49	32,73	40,13	47,53	47,53

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PAUD									
1	C. 1	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 PAUD	Nilai	41,53	48,46	49,46	50,46	51,46	52,46	53,46	53,46
1	D. 10	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	60,28	62,78	65,28	67,78	70,28	72,78	75,28	75,28
1	D. 10	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	59,69	62,09	64,49	66,89	69,29	71,69	74,09	74,09
1	D. 4	Iklim Keamanan SD	Nilai	76,56	77,46	78,36	79,26	80,16	81,06	81,96	81,96
1	D. 4	Iklim Keamanan SMP	Nilai	70,82	72,32	73,82	75,32	76,82	78,32	79,82	79,82
	D. 8	Iklim Kebinekaan SD	Nilai	71,67	72,67	73,67	74,67	75,67	76,67	77,67	77,67
	D. 8	Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	72,08	73,08	74,08	75,08	76,08	77,08	78,08	78,08
1	01	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	01	Cakupan Ketersediaan PAUD	%	57,66	62,90	72,18	81,45	90,73	100,00	100,00	100,00
1	**02**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**									
1	**02**	**Kesehatan Daerah**									
2	**02**	Persentase balita gizi buruk	%	0,097	0,096	0,095	0,094	0,093	0,090	0,090	0,090

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02	Prevalensi balita gizi kurang	%	1,10	1,09	1,08	1,07	1,06	1,05	1,05	1,05
	02	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	/1000	2,28	2,27	2,26	2,25	2,24	2,23	2,23	2,23
	02	Angka kelangsungan hidup bayi	/1000	997,71	997,75	997,82	997,87	997,90	998,10	998,10	998,10
	02	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	/1000	1,53	1,52	1,21	1,06	0,76	0,60	0,60	0,60
	02	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	/1000	2,28	2,27	2,26	2,25	2,24	2,23	2,23	2,23
	02	Jumlah Kematian Ibu	Orang	3	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	02	Rasio posyandu per satuan balita	/1000	1/56 Balita	1/56 Balita	1/56 Balita	1/56 Balita	1/56 Balita	1/56 Balita	1/56 Balita	1/56 Balita
	02	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk									
	02	Rasio Puskesmas	/1000	0,052	0,052	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058
	02	Rasio Poliklinik	/1000	-	-	-	-	-	-	-	-
	02	Rasio Pustu	/1000	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	02	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	/1000	0,0092	0,0092	0,0092	0,0092	0,0092	0,0092	0,0092	0,0092
	02	Rasio dokter per satuan penduduk	/1000	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	0,23	0,23	0,23
	02	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	/1000	0,08	0,09	0,10	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12
	02	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	99,94	99,94	99,94	99,94	99,94	99,94	99,94	99,94
	02	Cakupan pertolongan	%	96,31	96,35	96,39	96,42	96,45	96,48	96,5	96,5

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan									
	02	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	90	90	90	90	93	95	95	95
	02	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	02	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	%	-	-	-	-	-	-	-	-
	02	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	70	70	75	80	85	90	90	90
	02	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	%	0	0	0	0	0	0	0	0
	02	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	95	95	95	95	95	95	95	95
	02	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	49,5	70	90	90	90	90	90	90
	02	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	(per 100.000 pendud	191	180	160	140	120	100	65	65

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			uk)								
	02	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	(per 100.000 penduduk)	6	5	4	3	2	1	0	0
	02	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	49,5	90	91	91	91	91	91	91
	02	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	85	90	91	91	91	91	91	91
	02	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	7	0	0	0	0	0	0	0
	02	Penderita diare yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	02	Angka kejadian Malaria	/100.000	11	0	0	0	0	0	0	0
	02	Tingkat kematian akibat malaria	/1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	02	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	35	45	60	70	80	95	100	100
	02	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	100	100	100	100	100	100	100	100

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	02	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	buah	-	-	-	-	-	-	-	-
	02	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	%	80	80	80	80	80	80	80	80
	02	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	02	Cakupan kunjungan bayi	%	94,93	94,95	94,98	95	95,15	95,25	95,25	95,25
	02	Cakupan puskesmas	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	02	Cakupan pembantu puskesmas	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	02	Cakupan kunjungan Ibu hamil K6	%	96,15	96,20	96,25	96,28	96,30	96,33	96,35	96,35
	02	Cakupan pelayanan nifas	%	96,31	96,35	96,39	96,42	96,45	96,48	96,5	96,5
	02	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	02	Cakupan pelayanan anak balita	%	94,86	94,88	94,90	94,93	94,95	94,98	95	95
	02	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak	%	90	90,35	90,49	90,55	90,76	91	91	91

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		usia 6 - 24 bulan keluarga miskin									
	02	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	90,13	90,25	90,55	90,75	90,9	91,20	91,45	91,45
	02	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	02	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	02	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	02	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	02	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	95,52	**98,60**	99,00	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	100,00
1	03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**									

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**03**	**Pekerjaan Umum**									
1	03	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	95,72	100	100	100	100	100	100	100
1	03	Luas Daerah Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	67,10	68,41	69,78	71,17	72,60	74,05	75,53	75,53
1	03	Rasio Jaringan Irigasi	%	61,15	61,46	61,76	62,07	62,38	62,69	63,01	63,01
1	03	Persentase penudуduk berakses air minum	%	86,44	94,95	95,42	95,90	96,38	96,86	100,00	100,00
1	03	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	5,25	5,15	5,16	5,17	5,18	5,2	5,21	5,21
1	03	Persentase keandalan bangunan gedung pemerintah	%	94,58	95,05	95,53	96,01	96,49	96,97	97,45	97,45
1	03	Persentase Lingkungan yang Tertata	%	25,75	26,27	26,79	27,33	27,87	28,43	29,00	31,19
1	03	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi baik	%	59,67	59,97	60,27	60,57	60,87	61,18	61,48	61,48
1	03	Persentase jembatan dengan kondisi baik	%	77,75	78,14	78,53	78,92	79,32	79,71	80,11	80,11
1	03	Persentase kawasan	%	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4									
1	03	Pertumbuhan PDRB Sektor Konstruksi	%	3,01	3,31	3,64	4,01	4,41	4,85	5,33	5,33
1	03	Rasio Tenaga Operator/ Teknisi/Analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	60,95	61,56	62,18	62,8	63,42	64,06	64,7	65,35
1	03	Persentase Ketaatan Terhadap Tata Ruang	%	92,05	92,50	93,00	93,50	94,00	94,50	96,39	96,39
1	03	Rasio Luas Kawasan Permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh Insfrastrutur Pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	17,23	16,89	16,93	16,97	17,01	17,05	17,1	17,1
1	03	Rasio Luar Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh Insfrastruktur Pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	%	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025
1	03	Persentase Ketersediaan LPJU	%	51,50	52,02	52,07	52,12	52,17	52,22	53,26	53,26
1	03	Persentase Penduduk yang memiliki akses terhadap	%	65,31	65,34	65,40	65,48	65,57	65,68	65,82	65,82

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		layanan sanitasi layak									
1	**04**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**									
1	**04**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah**									
1	04	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	04	Rasio Jumlah Rumah Layak Huni Terhadap Jumlah Rumah	%	80,61	80,68	80,70	80,74	80,78	80,83	80,87	80,87
1	04	Penyedian dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	unit	9	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
1	04	Fasilitasi Penyedian dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi masyarakat terkena Relokasi Program Pemerintah	unit	0	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1	04	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	%	15,71	16,50	18,05	19,95	20,90	21,85	22,80	22,80
1	04	Persentase Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah	%	19,38	19,26	19,10	18,92	18,71	18,48	18,21	18,21

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Tidak Layak Huni)									
1	04	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 ha di Kab/Kota yang ditangani	%	15,71	16,50	18,05	19,95	20,90	21,85	22,80	22,80
1	04	Cakupan Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	51	52,02	52,82	53,23	54,44	56,45	57,26	57,26
		Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	3,11	**2,99**	2,64	**2,29**	**1,94**	**1,59**	**1,24**	**1,24**
1	**05**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									
1	**05**	**Penanggulangan Bencana Daerah**									
1	05	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	05	Rasio peningkatan kemampuan masyarakat tentang kebencanaan (kajian rawan kebencanaan)	%	90,00	95,00	95,00	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	05	Persentase pelayanan penanganan darurat bencana terhadap kejadian bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	05	Persentase pemenuhan kebutuhan dan penanganan infrastruktur pasca bencana	%	30,00	30,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	50,00
1	05	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	orang	820,00	820,00	820,00	1,060	1,300	1,540	1,780	1,780
1	05	Persentase petugas yang aktif dalam penanggulangan bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	**05**	**Satuan Polisi Pamong Praja**									
1	05	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1	05	Penegakan Perda	%	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	81,00
1	05	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban tertangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	05	Rasio Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk	/10.000	6,36	4,81	4,96	5,12	5,27	5,43	5,58	5,58
1	05	Rasio Linmas per 10.000 penduduk	/10.000	24,37	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46	38,46

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	05	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP	%	32,22	58,33	61,11	63,89	66,67	69,44	72,22	72,22
1	05	Jumlah Kejadian Demonstran	kali	22,00	29,00	25,00	23,00	21,00	18,00	15,00	15,00
	05	Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten	%	48,70	55,62	54,62	53,62	53,62	53,62	53,62	53,62
	05	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	n.a	14,00	13,00	12,00	11,00	10,00	10,00	10,00
	05	Indeks Trantibumlinmas	Indeks	64,00	65,00	67,00	68,00	69,00	70,00	71,00	71,00
1	**06**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**									
1	**06**	**Dinas Sosial Daerah**									
1	06	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	06	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	06	Persentase Pemberdayaan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	06	Persentase Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Terlantar,Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan/pengemis diluar panti									
1	06	Persentase Penanganan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	06	Cakupan Penanganan Bencana di bidang sosial	(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	06	Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	06	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	06	Indeks Kesejahteraan Sosial	(%)	na	67,00	68,00	69,00	70,00	71,00	72,42	72,42
2		**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2	07	**URUSAN PEMERINTAHAN**									

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		BIDANG TENAGA KERJA									
2	**07**	**Ketenagakerjaan Daerah**									
2	07	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	95,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	07	Jumlah pencari kerja yang dilatih dan bekerja	Orang	100,00	120,00	144,00	172,00	180,00	190,00	200,00	200,00
2	07	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	22,07	22,51	22,96	23,42	23,89	24,37	24,85	24,85
2	07	Tingkat Produktfitas Tenaga Kerja	%	70,40	71,81	73,24	74,71	76,20	77,73	79,28	79,28
2	07	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	%	86,91	88,65	90,42	92,23	94,07	95,96	97,87	97,87
2	07	Persentase Pengangguran Terbuka	%	3,41	3,34	3,28	3,21	3,15	3,09	3,03	3,03
2	07	Angka sengketa pengusaha-pekerja	%	9,78	9,59	9,40	9,22	9,04	8,86	8,68	8,68
2	07	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	32,14	32,78	33,44	34,11	34,79	35,49	36,19	36,19
2	07	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS	%	8,69	8,86	9,04	9,22	9,41	9,59	9,79	9,79

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ketenagakerjaan)									
2	07	Cakupan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	%	63,75	65,75	67,75	69,75	71,75	73,75	75,23	75,23
2	**08**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**									
2	**08**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah**									
2	08	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	08	Persentase kelompok perempuan mandiri	%	50,00	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00	70,00	70,00
2	08	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD	%	1,6	1,6	1,7	1,8	1,9	2,00	2,00	2,00
2	08	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	08	Rasio Kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk	%	0,009	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Perempuan)									
2	08	Persentase penyelesaian pengaduan dan tindak kekerasan dan traficking	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	08	Tingkat capaian Kota Layak Anak	Kategori /Nilai	Madya/6 24.73	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Nindya/70 01	Utama	Utama
2	08	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	**09**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**									
2	**09**	**Dinas Ketahanan Pangan Daerah**									
2	09	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	09	Pengadaan Cadangan Pangan	Ton	11.78	60,8	61,6	62,4	63,2	64	64,85	64,85
2	09	Penanganan desa rawan pangan	Desa	10,00	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	20,00
2	09	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Scor	83,00	83,20	83,4	83,8	84,2	85,0	85,5	85,5
2	09	Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan	Scor	86,09	87,43	87,86	88,29	88,73	89,0	89,3	89,3
2	09	Pengujian Keamanan PSAT	Komodi	n.a	9,0	12,0	15,0	17,0	20,0	22,0	22,0

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		dengan Rapit Tes	ti								
2	09	Angka Konsumsi Protein	gr/Kap/ Hr	62,01	62,40	62,70	63,00	63,30	63,60	63,90	63,90
3	09	Ketersediaan pangan (beras)	Ton	130241,41	131543,82	132859,26	134187,85	135529,73	136885,03	138253,88	138253,88
2	**10**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**									
1	**04**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah**									
2	10	Mengukur Persentase Pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	10	Mengukur Persentase Penetapan tanah yang untuk Pembangunan Fasilitasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	10	Mengukur Persentase Lokasi Pembangunan dalam rangka	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	10	Mengukur Persentase Tanah obyek landform (TOL) yang siap	%	79,98	81,00	81,81	82,63	83,45	84,29	85,13	85,13
2	10	Mengukur Persentase Ketersediaan tanah untuk Masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	**11**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**									
2	**11**	**Dinas Lingkungan Hidup Daerah**									
2	11	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	11	Jumlah dokumen perencanaan pengelolaan lingkungan hidup	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	77,90	78,27	78,43	78,58	78,74	78,90	79,06	79,06
2	11	Luas Lahan Kritis/DAS di Luar Kawasan Hutan yang direhabilitasi	Ha	5,70	5,59	5,48	5,37	5,27	5,16	5,06	5,06
2	11	Luas RTH yang terpelihara	Ha	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
2	11	Jumlah Industri dan usaha kecil yang dilakukan pembinaan pengelolaan limbah B3		12 Usaha; 5 Puskesmas; 1 Klinik	13 Usaha; 6 Puskesmas; 1 Klinik	14 Usaha; 7 Puskesmas; 1 Klinik	15 Usaha; 7 Puskesmas; 1 Klinik	16 Usaha; 8 Puskesmas; 1 Klinik	17 Usaha; 9 Puskesmas; 1 Klinik	18 Usaha; 10 Puskesmas; 1 Klinik	18 Usaha; 10 Puskesmas; 1 Klinik
2	11	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin	Usaha	140,00	142,00	144,00	146,00	148,00	150,00	150,00	

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PPLH dan PUULH									
2	11	Persentase Ketaatan Penanggung jawab Usaha dan /atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	11	Jumlah Masyarakat yang mendapat pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Sekolah ;desa	29 Sekolah;4 Desa	29 Sekolah;6 Desa	29 Sekolah;8 Desa	29 Sekolah;10 Desa	29 Sekolah;12 Desa	29 Sekolah;14 Desa	29 Sekolah;14 Desa	
2	11	Persentase sampah tertangani	%	71,00	72,42	73,87	75,35	76,85	78,39	79,96	**79,96**
2	11	Persentase Pengurangan Sampah	%	28,00	28,56	29,13	29,71	30,31	30,91	31,53	**31,53**
		Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	%		**68,68**	69,37	**70,06**	**70,76**	**71,47**	**72,18**	**72,18**
		Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	%		**94,70**	94,71	**94,72**	**94,73**	**94,74**	**94,80**	**94,80**
		Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan	%		**63,26**	63,89	**64,53**	**65,17**	**65,82**	**66,48**	**66,48**
2	**12**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**									

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	12	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah**									
	12	Rasio penduduk ber KTP per penduduk wajib ber KTP	%	97,76	98,26	98,38	98,51	98,76	99,01	99,26	99,26
	12	Rasio bayi berakte kelahiran Usia 0-18 Tahun	%	94,86	95,50	96,50	97,50	98,25	99,00	100,00	100,00
	12	Rasio pasangan berakte nikah	%	46,77	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00
	12	Rasio Penduduk ber IKD per penduduk memiliki KTP	%	97,76	97,76	98,26	98,26	98,51	98,76	99,01	99,26
	12	Rasio Penduduk ber akte kelahiran	%	52,40	57,50	62,50	67,50	72,50	77,50	82,50	82,50
	12	Cakupan bayi memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) Usia 0-17 Tahun	%	38,61	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00
	12	Cakupan pemanfaatan data kependudukan oleh Perangkat Daerah	%	22,22	33,33	66,67	88,89	100,00	100,00	100,00	100,00
	12	**Persentase Kepemilikan Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pelayanan Pencatatan Sipil**	%	**n.a**	**85,00**	86,70	88,43	90,20	92,01	93,85	**93,85**
	12	**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan**	Indeks	**93,00**	**94,00**	94,94	95,00	97,00	98,00	98,98	**98,98**
	12	**Persentase Mutu Layanan Publik Bidang Administrasi**	%	**84,00**	85,00	88,00	90,00	93,00	95,00	**96,00**	**96,00**

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kependudukan									
2	**13**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**									
2	**13**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah**									
2	13	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	13	Jumlah Desa Maju	%	33,96	39,00	41,00	43,00	46,00	49,00	52,00	52,00
2	13	Jumlah Desa Berkembang	%	61,32	52,00	47,00	43,00	38,00	33,00	30,00	30,00
2	13	Jumlah Desa Tertinggal	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13	Jumlah Desa Sangat Tertinggal	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	13	Jumlah Badan Usaha Milik Desa Aktif	Kelompok	26,00	28,00	30,00	32,00	34,00	36,00	38,00	38,00
2	13	Jumlah Kelompok Binaan Lembaga (LPMD) Aktif	Lembaga	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00	212,00
2	13	Jumlah PKK aktif		228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00
7	**01**	**Kecamatan**									
2	13	Persentase Desa berstatus Berkembang	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	13	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Lembaga								

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(LPM)									
2	13	Jumlah Desa yang sudah menata Aset Desa sesuai Pedoman	desa								
2	13	Jumlah desa yang sudah menyusun RKPDes dan APBDes sesuai pedoman dan tepat waktu	desa								
2	13	Persentase Badan Usaha Milik Desa Aktif	%								
2	13	Peringkat/Nilai SAKIP	Nilai	CC (58,26) (2023)	66,76(B)	70.00(B)	77,86(BB)	79,06 (BB)	81.00(A)	82.00(A)	82.00(A)
2	13	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00	91,00
2	**14**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**									
2	**14**	**Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah**									
2	14	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	14	Laju pertumbuhan penduduk	%	1,43	1,32	1,30	1,28	1,27	1,25	1,23	1,23

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	14	TFR (Angka Kelahiran Total)	Orang	2,42	2,32	2,22	1,22	1,12	1,02	0,92	0,92
2	14	Persentase peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR mandiri	%	15,50	15,80	16,10	16,40	16,70	17,00	17,30	17,30
2	14	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	%	53,40	58,74	64,61	71,07	78,18	86,00	94,60	94,60
2	14	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)	%	8,91	8,71	8,51	8,31	8,11	7,91	7,71	7,71
2	14	jumlah keluarga sejahtera yang mendapat bantuan	Kelompok	6,00	6,00	7,00	7,00	8,00	8,00	9,00	9,00
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	%	n.a	60,50	62,00	63,00	64,00	65,00	66,30	66,30
2	**15**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**									
2	**15**	**Dinas Perhubungan Daerah**									
2	15	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	15	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	%	0,13	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
2	15	Persentase Penurunan Angka	%	15,71	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	22,00

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kecelakaan Lalu Lintas									
2	15	Pertumbuhan PDRB Sektor Transportasi dan Pergudangan (%)	%	9,57	9,59	9,61	9,63	9,65	9,67	9,69	7,00
2	15	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	%	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	75,00
2	15	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	%	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103
2	**16**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**									
2	**16**	**Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah**									
2	16	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	65,00	66,30	67,63	68,98	70,36	71,77	73,20	73,20
2	16	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	16	Persentase informasi publik yang terpublikasi dengan baik	%	70,80	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
2	16	Pertumbuhan PDRB Sektor Informasi dan Komunikasi	%	7,95	8,11	8,27	8,44	8,61	8,78	8,95	8,95
2	16	Persentase Peningkatan sistem aplikasi informatika	%	97,78	97,90	98,00	98,51	99,00	99,50	100,00	100,00
2	16	Persentase Masyarakat yang	%	38,81	85,00	85,00	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan Program prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
2	16	Tersedianya Acuan Penyusunan SPBE	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	16	Persentase pelayanan publik berbasis teknologi informasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	16	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Indeks	51,03	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00
2	16	Indeks SPBE	Indeks	3,14	3,20	3,23	3,26	3,30	3,40	3,57	3,57
2	**17**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI. USAHA KECIL. DAN MENENGAH**									
3	**30**	**Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah**									
2	17	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	4,57	5,18	5,79	6,40	7,01	7,62	8,23	8,23
2	17	Jumlah Koperasi	unit	102,00	112,00	122,00	132,00	142,00	152,00	162,00	162,00
2	17	Persentase Koperasi aktif	%	31,09	34,15	37,20	40,24	43,29	46,34	49,39	49,39
2	17	Persentase koperasi aktif	%	31,09	34,15	37,20	40,24	43,29	46,34	49,39	49,39
2	17	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	19,94	20,08	20,68	21,42	22,16	22,90	23,64	23,64

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	17	Persentase Pertumbuhan Volume Usaha Mikro	%	30,74	31,48	32,22	32,96	33,70	34,44	35,18	35,18
2	17	Jumlah UMKM yang mendapat bantuan	buah	375,00	425,00	475,00	525,00	575,00	625,00	675,00	675,00
2	17	Jumlah UMKM naik Kelas	Buah	19,94	20,68	21,42	22,16	22,90	23,64	24,38	24,38
2	17	Persentase Pertumbuhan Usaha mikro yang menggunakan Digital marketing	%	4,23	5,72	7,20	8,69	10,17	11,66	13,15	13,15
	17	Kontribusi UMKM terhadap PDRB (%)	%	17,24	17,50	17,79	18,10	18,44	18,86	19,29	19,29
2	**18**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**									
2	**18**	**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah**									
2	18	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
2	18	jumlah buku direktori perusahaan	Buku	1,00	1	1	1,00	1	1	1,00	1
2	18	Jumlah Promosi investasi melalui media cetak dan elektronik	Event	1,00	1	2	2,00	2	2	2,00	2
2	18	Persentase Perizinan yang	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		yang dikeluarkan DPMPTSP									
2	18	Nilai Investasi PMA/PMDN	Rp. Triliun	6839,33 (Milyar)	3,20	3,50	4,10	4,50	5,30	5,50	5,50
2	18	Jumlah PMA/PMDN	Perusahaan	11,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
2	18	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota	%	-3,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	7,50
2	**19**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**									
3	**26**	**Dinas Pariwisata Daerah**									
2	19	Jumlah pemuda pelopor	orang	2,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2	19	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	1,07	1,09	1,10	1,20	1,30	1,40	1,50	1,50
2	19	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan	%	7,06	7.25	7.50	7.60	7.80	8,00	8.50	8.50
2	19	Jumlah Atlit Berprestasi (Orang) tingkat provinsi dan nasional	Orang	32,00	32,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
2	19	Jumlah kegiatan Kepramukaan	Kegiatan	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	19	Indeks Partisipasi olahraga	%	n.a	2.65	2.68	2.71	2.74	2.77	2.90	2.90
7	**01**	**Kecamatan**									

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	19	Jumlah Atlit Berprestasi (Orang) tingkat provinsi dan nasional	Event	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	**20**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**									
2	**16**	**Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah**									
2	20	Persentase data informasi dan statistik daerah yang tersusun dengan baik	%	100,00	100,00	90,00	95,00	95,00	100,00	100,00	100,00
2	20	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	%	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	20	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	1,58	1,80	2,50	2,50	2,80	3,00	3,00	3,00
2	**21**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**									
2	**16**	**Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah**									
2	21	Persentase pengamanan informasi daerah yang terselenggara dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	21	Persentase Perangkat daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah									
2	**22**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**									
1	**01**	**Dinas Pendidikan Daerah**									
2	22	Jumlah Group Kesenian	Group	24,00	25,00	26,00	26,00	26,00	28,00	30,00	30,00
2	22	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	70,00	70,00	75,00	75,00	75,00	80,00	80,00	80,00
		Budaya lokal yang dikembangkan menjadi daya tarik wisatawan	Budaya	3,00	4,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	8,00
2	**23**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**									
2	**23**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah**									
2	23	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	23	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun	orang	290.570,00	296381,40	302309,03	308355,21	314522,31	320812,76	327229,01	327229,01
2	23	Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	53,84	54,92	56,02	57,14	58,28	59,44	60,63	60,63
2	23	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	78,44	79,44	79,54	79,64	79,74	79,84	80,00	80,00

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	23	Tingkat Digitalisasi Arsip	%	64,27 (B)	65,56 (B)	71,20 (BB)	75,26 (BB)	78,26 (BB)	80,56 (A)	81,45 (A)	81,45 (A)
2	**24**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**									
2	**24**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah**									
	24	Tingkat digitalisasi Arsip	%	64,27	65,56	66,87	68,20	69,57	70,96	72,38	72,38
2	24	Indeks tata kelola arsip	%	80,58	82,00	83,64	85,31	87,02	88,76	90,53	90,53
2	24	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan Pertanggungjawaban Nasional) Pasal 40 dan pasal 59 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan	%	37,00	37,05	37,10	37,15	37,20	37,25	37,30	37,30
2	24	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik & kesejahteraan rakyat.	Nilai	3728,00	3914,00	4110,00	4316,00	4531,00	4758,00	4853,16	4853,16
		indeks Hasil Pengawasan	Indeks	64,27	67,48	69,51	79,90	72,32	73,76	75,24	75,24

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		pada Lingkungan Pemerintah Daerah									
3		**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**									
3	**25**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**									
3	**25**	**Dinas Perikanan Daerah**									
3	25	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	25	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	%	0,61	2,44	2,49	2,54	2,59	2,64	2,69	0,78
	25	Produksi Perikanan Laut	%	208,81	229,00	251,00	276,00	303,00	333,00	366,00	237,76
3	25	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	Ton	69,23	70,40	72,51	74,18	75,88	77,63	79,41	79,41
	25	Produksi Budidaya Perikanan Darat	%	7.722,30	8.493,00	10.022,00	12.249,00	14.494,00	15.943,00	17.536,00	17.886,72
3	25	Cakupan Pembinaan Kelompok Budidaya Perikanan Darat	%	64,29	70,40	72,51	74,18	75,88	77,63	79,41	79,41
	25	Komsumsi Ikan perkapita (kg/Kapita/Tahun)	%	48,04	52,86	54,98	56,24	57,54	58,86	60,22	60,22
	25	Persentase Peningkatan	%	**3,00**	**10,00**	**20,00**	**25,00**	**20,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Produksi Perikanan									
	25	Persentase pertumbuhan PDRB perikanan	%	0,56	6,00	12,00	15,00	18,00	20,00	22,00	22,00
3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
3	26	Dinas Pariwisata Daerah									
3	26	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	26	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,41	1,46	1,51	1,56	1,61	1,66	1,71	1,71
		Kunjungan Wisata	orang	484.922	486,000	487,500	489,000	492,000	493,500	495,000	2.943,00
3	26	Persentase Peningkatan Perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	2,04	3,64	4,04	5,08	5,90	6,50	7,00	7,00
3	26	Jumlah Promosi Pariwisata melalui media cetak dan elektronik	Media	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3	26	Tingkat Hunian Akomodasi	%	16,61	17,50	18,30	19,20	20,10	21,00	22,50	22,50
3	26	Jumlah Objek Wisata yang dikembangkan (Objek)	objek	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
3	26	Jumlah Kemitraan yang dijalin dalam pengembangan	Kemitraan	4,00	5,00	5,00	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		kepariwisataan (Jumlah)									
3	26	Peningkatan PDRB dari Sub Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	%	1,41	1,46	1,51	1,56	1,61	1,66	1,71	1,71
3	**27**	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	%	5,19	6,20	7,30	8,40	9,50	10,60	11,70	11,70
3	**27**	**Dinas Pertanian Daerah**									
3	27	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	27	Produksi sektor pertanian (Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	Ton	856.035,92	890.277,36	926.333,59	964.313,27	1.004.428,70	1.046.715,15	1.091.409,88	1.091.409,88
3	27	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Ton	256.171,46	266.418,32	277.208,26	288.573,80	300.578,47	313.232,82	326.607,86	326.607,86
3	27	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	Ton	390.151,65	405.757,72	422.190,90	439.500,73	457.783,96	477.056,67	497.426,99	497.426,99
3	27	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	209.712,81	218.101,32	226.934,43	236.238,74	246.066,27	256.425,66	267.375,03	267.375,03
3	27	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap	%	21,91	22,25	22,60	22,96	23,32	23,68	24,06	24,06

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PDRB									
3	27	Kontribusi sektor pertanian (Tanaman Pangan) terhadap PDRB	%	5,40	5,48	5,57	5,66	5,75	5,84	5,93	5,93
3	27	Produktivitas Pertanian per Hektar per Tahun	Kw/Ha	540,90	540,90	540,90	546,31	551,77	557,29	557,29	557,29
3	27	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	85,08	85,48	85,89	86,29	86,69	87,10	87,50	87,50
3	27	Jumlah Populasi Ternak	Ekor	759.320	797.286	837.868	881.186	927.536	977.159	1.030.317	1.030.316,62
3	27	Produksi Daging	Ton	1.239.095,00	1.301.050	1.367.273	1.437.961	1.513.598	1.594.575	1.681.320	1.681.320,36
3	27	Produksi Telur	Kg	96.696,00	101.531	106.699	112.215	118.118	124.437	131.206	131.206,21
3	27	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan	%	-3,58	-3,43	-3,28	-3,13	-2,98	-2,83	-2,69	-2,69
3	27	Jumlah Kelompok tani yang aktif	Kelompok Tani	1.267	1.272	1.277	1.282	1.287	1.292	1.297	1.297,00
	27	Jumlah kelompok tani yang telah menerapkan agribisnis terpadu	Kelompok Tani	1	4	5	6	7	8	8	8,00

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	27	Persentase peningkatan produksi Pertanian (Sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	%	n.a	4,00	4,05	4,10	4,16	4,21	4,27	4,27
	27	Persentase peningkatan populasi ternak	%	n.a	5,00	5,09	5,17	5,26	5,35	5,44	5,44
	27	Persentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian	%	5,20	6,00	6,09	6,19	6,29	6,39	6,49	6,49
3	28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									
2	11	Dinas Lingkungan Hidup Daerah									
3	28	Terpeliharanya Keaneka ragaman hayati dan ekosistemnya	%	70,00	71,40	72,83	74,28	75,77	77,29	78,83	78,83
3	29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
3	31	Dinas Perindustrian Daerah									
3	29	Rasio ketersediaan daya listrik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	29	Pertumbuhan PDRB Sektor Pengadaan Listrik dan Gas	%	3,74	3,81	3,89	3,97	4,05	4,13	4,21	4,21
3	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	**30**	**Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Daerah**									
	30	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	11,00	11,22	11,44	11,67	11,91	12,14	12,39	12,39
3	30	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	30	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	%	66,67	68,00	69,36	70,75	72,16	73,61	75,08	75,08
3	30	Jumlah Pedagang yang memiliki (SPSM)	Pedagang	655,00	793,00	931,00	1.069,00	1.207,00	1.345,00	1.485,00	1.485,00
3	30	Jumlah Pasar dalam kondisi baik	Unit	8,00	9,00	11,00	13,00	15,00	17,00	20,00	20,00
3	30	Jumlah Pelaku Usaha dipasar rakyat yang telah dibina	Pedagang	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.350,00	1.500,00	1.500,00
3	30	Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan pokok antar waktu	%	<9	<9	<9	<9	<9	<9	<9	<9
3	30	Pelaku Usaha yang mendapat fasilitas pengembangan produk ekspor	Pelaku Usaha	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	17,00
3	30	Persentase Pelaku Usaha yang memiliki alat ukur UTTP yang standarisasi	%	66,60	67,52	68,69	69,94	71,27	72,69	74,19	74,19

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	30	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh fasilitasi peningkatan kualitas dan pemasaran Produk dalam negeri	%	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00
3	**31**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**									
3	**31**	**Dinas Perindustrian Daerah**									
3	31	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	31	Cakupan bina kelompok pengrajin		n.a	60,00	61,20	62,42	63,67	64,95	66,24	66,24
3	31	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri dan Pengolahan	%	5,40	5,41	5,42	5,43	5,44	5,45	5,46	5,46
	31	Jumlah Industri Kecil	iK	76,00	77,52	79,07	80,65	82,26	83,91	85,59	85,59
	31	Pertumbuhan Industri	%	4,20	4,28	4,37	4,46	4,55	4,64	4,73	4,73
3	31	Jumlah industri kab/kota yang masih aktif	Unit	1263,00	1266,00	1269,00	1272,00	1275,00	1278,00	1280,00	1280,00
3	31	Persentase Pencapaian sasaran pembangunan Industri termasuk turunan Indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	%	67,00	70,00	71,40	72,83	74,28	75,77	77,29	77,29

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	31	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	31	Persentase Jumlah hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait.	%	-	58,00	60,00	61,20	62,42	63,67	64,95	64,95
3	31	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten/Kota	%	-	70,50	71,00	72,42	73,87	75,35	76,85	76,85
3	31	Tersedianya Informasi secara lengkap dan terkini	%	30,00	30,60	31,21	31,84	32,47	33,12	33,78	33,78
3	**32**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**									

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	07	**Dinas Ketenagakerjaan Daerah**									
		Persentase transmigran swakarsa									
3	32	Jumlah dokumen perencanaan kawasan transmigrasi	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4		**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**									
4	01	**SEKRETARIAT**									
1	04	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Daerah**									
2	10	Persentase Penyelesaian Konflik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	01	**Sekretariat Daerah Kabupaten**									
4	01	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	01	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	64,56 (B)	65,85 (B)	67,17 (B)	68,51 (B)	71,25 (BB)	72,68 (BB)	74,13 (BB)	74,13 (BB)
4	01	Nilai/predikat AKIP	Kategori	CC (2023)	B	B	B	BB	BB	BB	B
4	01	Indeks Kepuasaan Masyarakat	Kategori	85,09	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00	91,00
4	01	Persentase Realisasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	%	95,00	95,19	95,38	95,57	95,76	95,95	96,15	96,15

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	Persentase produk hukum dan informasi hukum daerah yang berkualitas	%	99.57 (2023)	99,77	99,97	99,97	99,97	99,97	99,97	99,97
4	01	Predikat Kabupaten Peduli HAM	Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A
4	01	Peringkat LPPD	Skor	proses	3.2520	3.2580	3.2600	3.2620	3.26620	3.2680	3.2680
4	01	Tersedianya Dokumen Pengkajian Kelayakan dan Verifikasi Pemberian Hibah/Bantuan Sosial	Dokumen	67,00	68,34	69,71	71,10	72,52	73,97	75,45	75,45
4	01	Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar operasional Aparatur selama 12 bulan	%	97,23	97,42	97,62	97,81	98,01	98,21	98,40	98,40
4	01	Persentase Kualitas Dokumen Perencanaan dan Kinerja Sekretariat Daerah	%	95,45	95,64	95,83	96,02	96,22	96,41	96,60	96,60
4	01	Persentase Kebijakan Pemerintah Daerah Yang terpublikasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	01	Persentase peningkatan kinerja kedinasan KDH/WKDH	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	01	Persentase Tertib Pengelolaan Barang/Aset Daerah Di lIngkungan Sekretariat Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	01	Persentase Peningkatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kualitas Pelayanan Terhadap KDH/WKDH									
4	01	Persentase Proses Pengadaan Barang dan Jasa Yang Efesien	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	01	Persentase Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan per OPD	%	96,12	96,31	96,50	96,70	96,89	97,09	97,28	97,28
4	01	Persentase Kecamatan yang Mendapatkan Pendistribusian LPG 3 KG, dan Pupuk Bersubsidi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	01	Persentase Peningkatan efektifitas dan kualitas Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	%	76,00	76,15	76,30	76,46	76,61	76,76	76,92	76,92
4	01	Indeks Kerukunan Umat Beragama	%	80,00	80,16	80,32	80,48	80,64	80,80	80,96	80,96
		Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada SAKIP	Nilai	8,77	9,77	10,77	11,77	12,77	13,77	14,05	14,05
4	**02**	**SEKRETARIAT DPRD**									
4	**02**	**Sekretariat DPRD Kabupaten**									
4	02	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4	02	Persentase Raperda yan	%	90	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		disahkan menjadi Perda tepat waktu (%)									
4	02	Jumlah Aspirasi masyarakat yang ditampung dan ditindak lanjuti kepada DPRD (Buah)	buah	350	400	450	500	550	600	650	650
4	02	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ADA/TIDAK	TIDAK	TIDAK	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
4	02	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ADA/TIDAK	TIDAK	TIDAK	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
4	02	Terintegrasi program program DPRD untuk melaksanakan fungsi	ADA/TIDAK	TIDAK	TIDAK	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD									
		Ketepatan Tahapan Penetapan Peraturan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5		**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**									
5	01	**PERENCANAAN**									
5	01	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**									
5	01	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	01	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen Perencanaan	%	97,00	98,00	98,00	98,98	99,97	100,00	100,00	100,00
5	01	Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Ditetapkan Dengan PERDA	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5	01	Dokumen Perencanaan:RPJMD Yang Ditetapkan Dengan PERDA	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	01	Dokumen Perencanaan RKPD Yang Ditetapkan Dengan Perkada	Dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5	01	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	96,00	96,19		96.38	96.58	96,77	97,74	97,74
		Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra	%	96,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
5	01	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD		97,00	98,00	98,00	98,98	99,97	100,00	100,00	100,00
5	01	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	%	79,68	80,60	81,70	82,56	83,43	84,00	85,68	85,68
5	01	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	inovatif (44,69)	inovatif (47,00)	inovatif (50,00)	inovatif (55.00)	inovatif (60,00)	sangat inovatif (65,50)	sangat inovatif (66,30)	sangat inovatif (66,30)
5	01	Capaian persentase Nilai Sakip komponen Perencanaan (*Bobot Maksimal 30*)	%	68,67	72,79	74,97	77,22	79,54	81,92	82,74	82,74
5	**02**	**KEUANGAN**									
5	**02**	**Badan Pengelola Keuangan. Pendapatan dan Aset Daerah**									
5	02	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	02	Rasio Dokumen Penganggaran yang tepat waktu terhadap dokumen penganggaran	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	02	Rasio realisasi belanja daerah terhadap perencanaan belanja daerah	%	91,68	91,80	91,92	92,00	92,15	92,36	93,00	93,00
5	02	Rasio Realisasi ADD (Alokasi Dana Desa) Terhadap Terget Alokasi	%	94,12	94,15	94,17	94,25	94,25	94,3	94,3	94,3
5	02	Penyampaian Laporan keuangan pemerintah daerah tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	02	Rasio realisasi pemenuhan barang daerah terhadap kebutuhan barang daerah	%	91,14	91,85	91,88	92,00	92,12	92,12	92,14	92,14
5	02	Rasio Realisasi PAD Terhadap Terget PAD	%	99,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	02	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Nilai	Proses Audit	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	02	Persentase SILPA terhadap APBD	%	4,47	4,47	4,45	4,45	4,43	4,43	4,41	4,41
5	02	Penetapan APBD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	02	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	9,57	9,57	9,58	9,59	9,59	9,60	9,61	9,61
5	**03**	**Badan Kepegawaian Daerah**									

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	03	Indeks Sistem Merit	Indeks	0.30	0.41	0.50	0.55	0.61	0.70	0.75	0.75
	03	Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN	Indeks	(78,86) B	(80.00) B	(82.00) B	(84.00) B	(86.00) A	(88.00) A	(90.00) A	(90.00) A
5	03	Jumlah jabatan Pimpinan Tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan	32,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
	03	Jumlah jabatan adminsitrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	1659	2424	2584	2534	2634	2584	2534	2534
	03	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	Orang	4226	4618	4508	4398	4288	4178	4068	4068
	03	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	73,16 (Sedang)	75,95 (Sedang)	79, 00 (Sedang)	82,00 (Tinggi)	85,00 (Tinggi)	88,00 (Tinggi)	90, 00 (Tinggi)	90, 00 (Tinggi)
5	**04**	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**									
5	**03**	**Badan Kepegawaian Daerah**									
5	04	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Jam Pelajaran/ Tahun	n.a	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	04	Persentase ASN yang	%	20,13	26,85	33,56	40,27	46,98	53,69	60,40	60,40

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		mengikuti pendidikan dan pelatihan formal									
	04	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	21,37	21,89	22,65	24,11	26,08	29,28	32,48	32,48
	04	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Indeks	25.34	26.45	27.77	29.16	30.62	32.15	33.76	33.76
5	05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**									
5	01	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**									
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.									
5	05	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholders (%)	%	70,00	75,00	78,00	80,00	83,00	85,00	90,00	90,00
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	70,00	75,00	78,00	80,00	83,00	85,00	90,00	90,00
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	70,00	75,00	78,00	80,00	83,00	85,00	90,00	90,00
6		**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**									
6	01	**INSPEKTORAT DAERAH**									

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**01**	**Inspektorat Daerah**									
6	01	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	96,00	96,00	97,00	97,00	98,00	98,00	98,00	98,00
6	01	Nilai Maturitas SPIP	Level	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3
6	01	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti	%	92,00	95,00	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00
6	01	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti	%	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
6	01	Persentase perangkat Daerah yang telah di evaluasi	%	75,00	75,00	75,00	80,00	85,00	90,00	100,00	100,00
6	01	Nilai Kapabilitas APIP	Level	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3	level 3
6	01	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat pendampingan	OPD	45 OPD	45 OPD	45 OPD	45 OPD	45 OPD	45 OPD	45 OPD	45 OPD
6	01	Nilai Komponen Evaluasi AKIP Internal oleh Kemenpan RB	%	n.a	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	95,00
6	01	Persentase tindak lanjut temuan	%	89,43	89,61	89,79	89,97	90,15	90,33	90,51	90,51
6	01	Persentase pelanggaran pegawai	%	n.a	35,00	34,31	33,64	32,98	32,33	31,70	31,70
6	01	Jumlah temuan BPK									
7		**UNSUR KEWILAYAHAN**									

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	**01**	**KECAMATAN**									
7	01	Cakupan Pelayanan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	01	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	81,00	86,00	87,72	87,90	88,07	88,25	88,42	88,42
7	01	Persentase pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan yang dapat diberdayakan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	01	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang didelegasikan di kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	01	Persentase laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tepat waktu	tepat waktu/tidak tepatwaktu	Tetap waktu	Tetap waktu	Tetap waktu	Tetap waktu	Tetap waktu	Tetap waktu	Tetap waktu	Tetap waktu
8		**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**									
8	**01**	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**									
8	**01**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah**									
8	01	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pemerintah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

NO		INDIKATOR	Satuan	KONDISI AWAL (2024)	Perkiraan 2025	Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
						Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Pembanguanan dan Kemasyarakatan									
8	01	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	01	Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	%	74,83	74,83	74,83	74,83	74,83	75,97	75,97	75,97
		Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	%	93,00	94,00	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	99,00
8	01	Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang diselesaikan	%	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	95,00
8	01	Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	01	Persentase Capaian Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	%	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	01	Indeks Harmoni	Indeks	n.a	n.a	6,30	6,40	6,50	6,60	6,70	6,70
	01	Indeks Demokrasi	Point	78,37	81,00	81,20	81,50	82,20	83,00	84,66	84,66

4.1.4 Penetapan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Peraturan terbaru yang mengatur Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tapanuli Selatan disajikan pada tabel berikut ini.

Target 4.4 Indikator SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029

NO	Urusan/Jenis Pelayanan	Nama Indikator	Satuan	Kondisi Awal (tahun 2024)	Target						Tahun Akhir
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Urusan Pendidikan**										
	Pendidikan Anak Usia Dini										
		Angka Partisipasi Sekolah (5-6 tahun)	Nilai	67,00	70,20	73,24	76,28	79,32	82,36	85,33	85,33
		Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	Nilai	20,69	22,74	25,44	28,49	32,73	40,13	47,53	47,53
		Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	Nilai	41,53	48,46	49,46	50,46	51,46	52,46	53,46	53,46
	Pendidikan Sekolah Dasar										
		Skor Kemampuan	Nilai	56,12	58,62	61,12	63,62	66,12	68,62	71,12	71,12

NO	Urusan/Jenis Pelayanan	Nama Indikator	Satuan	Kondisi Awal (tahun 2024)	Target						Tahun Akhir
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Literasi SD									
		Skor Kemampuan Numerasi SD	Nilai	53,03	55,93	58,83	61,73	64,63	67,53	70,43	70,43
		Angka Partisipasi Sekolah (7 - 15 Tahun)	Nilai	98,47	98,71	98,96	99,20	99,45	99,70	99,94	99,94
		Iklim Inklusivitas SD	Nilai	60,28	62,78	65,28	67,78	70,28	72,78	75,28	75,28
		Iklim Keamanan SD	Nilai	76,56	77,46	78,36	79,26	80,16	81,06	81,96	81,96
		Iklim Kebinekaan SD	Nilai	71,67	72,67	73,67	74,67	75,67	76,67	77,67	77,67
	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama										
		Skor Kemampuan Literasi SMP	Nilai	65,18	66,28	67,38	68,48	69,58	70,68	71,78	71,78
		Skor Kemampuan Numerasi SMP	Nilai	60,96	62,46	63,96	65,46	66,96	68,46	69,96	69,96
		Angka Partisipasi Sekolah (7 - 15 Tahun)	Nilai	98,47	98,71	98,96	99,20	99,45	99,70	99,94	99,94
		Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	59,69	62,09	64,49	66,89	69,29	71,69	74,09	74,09
		Iklim Keamanan SMP	Nilai	70,82	72,32	73,82	75,32	76,82	78,32	79,82	79,82
		Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	72,08	73,08	74,08	75,08	76,08	77,08	78,08	78,08
	Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan										
		Angka Partisipasi Sekolah (7 - 18 Tahun Kesetaraan)	Nilai	43,80	53,53	60,02	66,51	73,00	73,76	74,53	74,53
2	**Urusan Kesehatan**										
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	Urusan/Jenis Pelayanan	Nama Indikator	Satuan	Kondisi Awal (tahun 2024)	Target						Tahun Akhir
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan Kesehatan Bayi BaruLahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru Lahir sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak pada usia pendidikan dasar berhak mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pelaynan Kesehatan pada Usia Produktif	persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan Kesehatan Penderita Hypertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	Urusan/Jenis Pelayanan	Nama Indikator	Satuan	Kondisi Awal (tahun 2024)	Target						Tahun Akhir
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persentase Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan Jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	**Urusan Pekerjaan Umum**										
	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan	%	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	Urusan/Jenis Pelayanan	Nama Indikator	Satuan	Kondisi Awal (tahun 2024)	Target						Tahun Akhir
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		air limbah domestic regional lintas kabupaten /kota									
4	**Urusan Perumahan**										
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Becana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Persentase Jumlah Unit Rumah Rumah Korban Becana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dibagun/Direhabilitasi	%	45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	**Urusan Trantibumlinmas**										
	TRANTIBUM										
	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten / Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	DAMKAR										
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	Cakupan Pelayanan Kebakaran Kabupaten	%	48,70	55,62	54,62	53,62	53,62	53,62	53,62	53,62
	Kebencanaan										
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	820	820	820	1060	1300	1540	1780	1780
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rasio peningkatan kemampuan masyarakat tentang kebencanaan	%	90,00	95,00	95,00	97,00	98,00	99,00	100,00	100,00

NO	Urusan/Jenis Pelayanan	Nama Indikator	Satuan	Kondisi Awal (tahun 2024)	Target						Tahun Akhir
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(kajian rawan kebencanaan)									
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase pelayanan penanganan darurat bencana terhadap kejadian bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100
6	**Urusan Sosial**										
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	Persentase Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan /pengemis diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di di Luar Panti	Persentase Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan /pengemis diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Persentase Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan /pengemis diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Persentase Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan	%	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	Urusan/Jenis Pelayanan	Nama Indikator	Satuan	Kondisi Awal (tahun 2024)	Target						Tahun Akhir
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Gelandangan /pengemis diluar panti									
	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

RPJMD KAB.TAPANULI SELTAN 2025-2029

PENUTUP
bab V

BAB V
PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029 ini, pada dasarnya menjabarkan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses penetapan arah pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan, apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana cara mencapainya; dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Periodesasi RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029, sedangkan untuk masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yakni 2025-2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029 ini disusun dengan mempertimbangkan hasil kajian dan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025–2045, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)Tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029. Selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2045 (Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 1 Tahun 2025), RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 - 2026 (Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2021), serta mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana dimuat dalam Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029 ini menjadi landasan dan rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dengan pendekatan inklusif dan responsif gender. Komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pembangunan yang setara dan adil akan terus diperkuat melalui kebijakan, program, dan penganggaran yang berperspektif gender demi terwujudnya masyarakat yang maju, mandiri, dan berkeadilan.

Selanjutnya RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029 ini akan dijabarkan kedalam rencana pembangunan tahunan daerah, yakni Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk periode satu tahun.

Semoga rencana pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2025-2029 ini dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan, sehingga Visi jangka menengah Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu: “Tapanuli Selatan yang Maju dan Berkarakter Unggul, Sehat, Cerdas dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045.” dapat terwujud

Kaidah pelaksanaan mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian, sistem insentif, dan mekanisme perubahan. Cakupan tersebut menjadi instrumen pengaman (safeguarding) untuk memastikan terwujudnya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 sesuai dengan cita-cita masyarakat Tapanuli Selatan.

5.1.1 Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

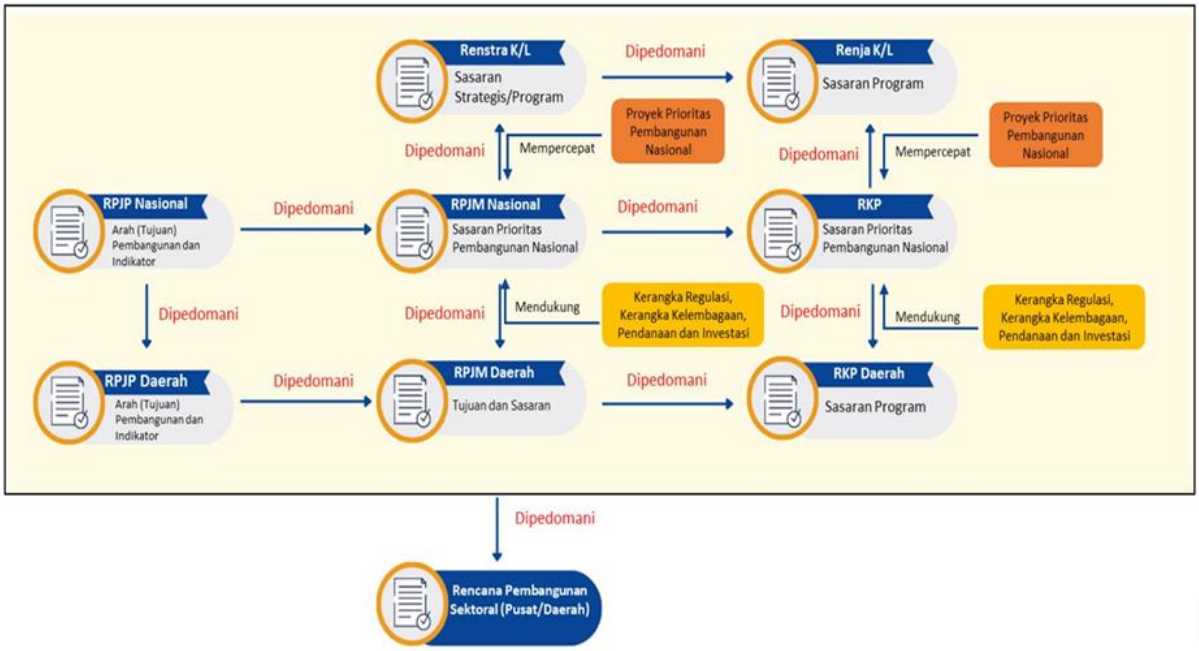
Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah provinsi, pelaku non-pemerintah, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan, khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan daerah sampai dengan level proyek/keluaran, serta memastikan pelaksanaannya. Penguatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan.

5.1.1.1 Keterkaitan RPJMD dengan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Pusat

RPJMD memiliki posisi tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah, menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya. Dokumen perencanaan pembangunan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), di tingkat daerah. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran pemerintah di tingkat daerah (APBD). Penekanan substansi RPJMD adalah berupa visi, misi, tujuan, sasaran, arah (tujuan) pembangunan dan indikator capaian tujuan pembangunan daerah dipedomani oleh RKPD untuk menyusun tujuan dan sasaran serta program pembangunan tahunan. Semua rencana pembangunan daerah tersebut mempedomani rencana pembangunan di tingkat nasional atau pemerintah pusat yang mana RPJPD mempedomani RPJPN, RPJM Daerah

mempedomani RPJMN, dan RKP Daerah mempedomani RKP. Semua rencana sektoral mempedomani rencana pembangunan daerah baik jangka panjang, menengah, dan pendek/tahunan. Keterkaitan dokumen dokumen tersebut dapat diperlihatkan dalam gambar berikut.

Gambar 9.1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

Dalam rangka mempedomani dokumen perencanaan di tingkat pusat, RPJMD, beberapa hal yang diperhatikan, antara lain:

1. RPJMD bersifat jangka menengah sehingga memberikan arah pembangunan jangka menengah dan khusus memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang mendukung visi misi RPJMN dan Visi Indonesia Emas 2045. RPJMD menjadi rencana strategis 5 tahunan daerah.

2. Penyusunan RPJMD seperti penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan indikator pembangunan mempedomani arah (tujuan) pembangunan dan indikator yang tercantum dalam RPJM Nasional dan Provinsi.
3. Tujuan dan sasaran pada RPJM Daerah Tingkat Kabupaten berpedoman pada sasaran dan indikator prioritas pembangunan pada RPJM di tingkat Nasional dan Provinsi. Selain itu RPJM Daerah Tingkat Kabupaten berpedoman juga kepada sasaran dan indikator strategis/program pada rencana strategis organisasi perangkat daerah (OPD) Tingkat Kabupaten.
4. Sasaran dan indikator strategis/program Rencana Strategis (Renstra) OPD menjadi pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program pada rencana kerja (Renja) OPD, sedangkan tujuan dan sasaran pada RPJM Daerah menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun sasaran program RKP Daerah.
5. Sasaran program RKP Daerah berpedoman pada sasaran dan indikator prioritas pembangunan nasional pada RKP. RKP Daerah juga menjadi pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program Renja OPD. Indikator prioritas pembangunan daerah dilaksanakan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD yang pada gilirannya dipergunakan sebagai penilaian akuntabilitas kinerja OPD. Pencapaian sasaran pembangunan daerah juga harus didukung dengan kebijakan kelembagaan, regulasi, serta pendanaan dan investasi. Sebagai upaya mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah juga ditentukan sasaran program pada RPJM Daerah dan RKP Daerah. Sasaran program daerah tersebut dilengkapi dengan ukuran keberhasilan yang mendukung tercapainya sasaran program pembangunan daerah.

5.1.1.2 Skema Pendanaan dan Penganggaran

Pencapaian visi, misi, tujusn dan sasaran pembangunan daerah dalam RPJPD, RPJM Daerah, dan RKP Daerah, perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Sebagai upaya menjamin

pencapaian sasaran pembangunan daerah, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non-pemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Selain melakukan efisiensi dan peningkatan efektivitas dalam belanja, pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan pendanaan pembangunan yang bersumber dari TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa), Belanja K/L, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pembiayaan Utang Daerah, KPBU dan Non-APBN/APBD untuk penganggaran pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan.

5.1.2 Kerangka Pengendalian

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti (evidence-based planning).

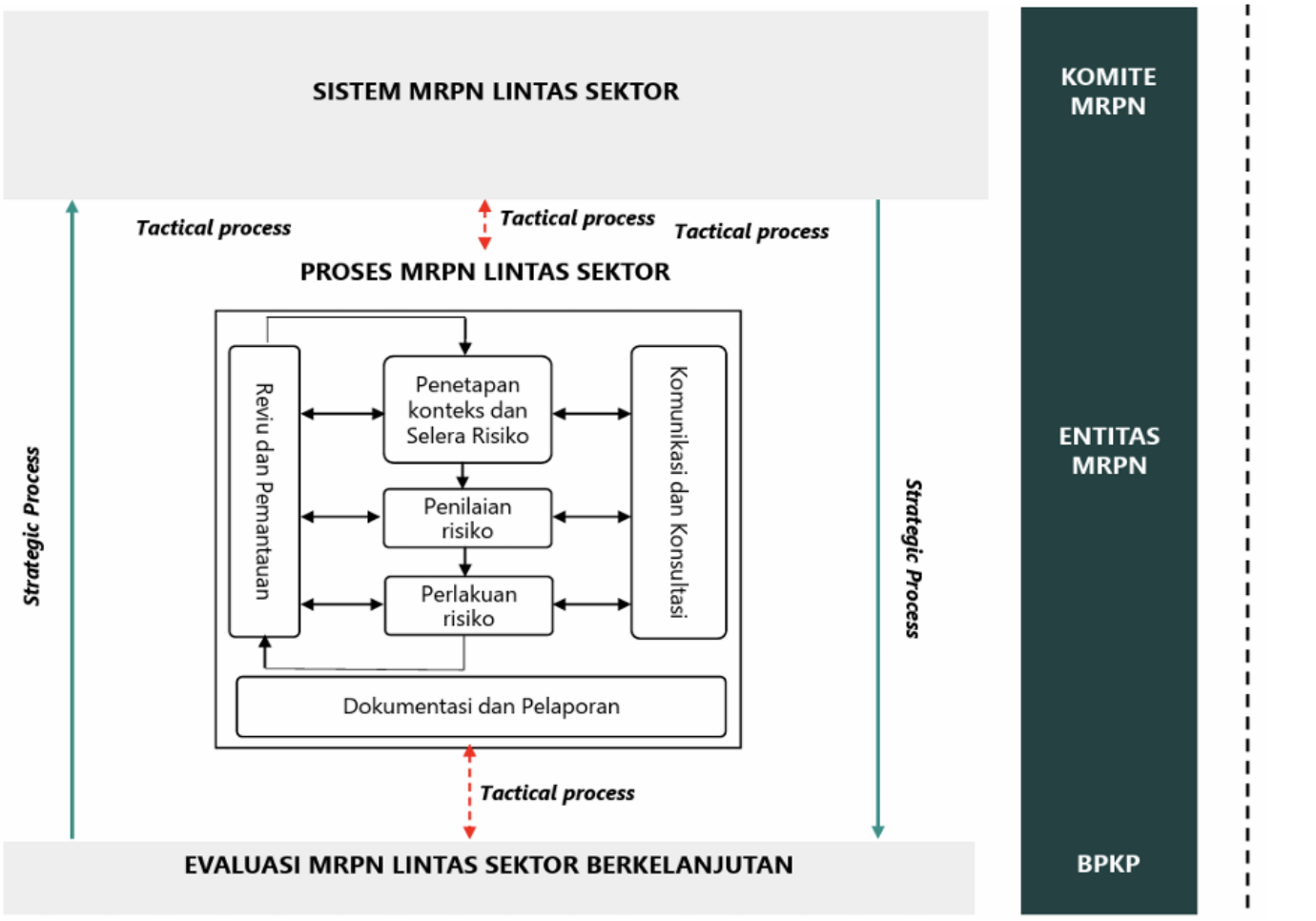
Terkait dengan manajemen risiko, manajemen risiko merujuk kepada manajemen risiko pembangunan nasional (MRPN). MRPN adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan, mengendalikan dan mengelola risiko pada program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan dan/atau jenis risiko tertentu yang bersifat lintas sektor yang bertujuan untuk meningkatkan pencapaian sasaran pembangunan nasional. MRPN mengkolaborasikan eksisting Manajemen Risiko Organisasi ke dalam sebuah Pengendalian Manajemen

Risiko Lintas Sektor yang secara lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023.

Adapun Kerangka Kerja MRPN dapat dilihat pada gambar di bawah. Sebagai salah satu entitas MRPN, pemerintah daerah perlu menerapkan MRPN sejak tahap perencanaan pembangunan daerah. Penerapan MRPN di daerah dilakukan dengan pembentukan komite manajemen risiko dan penyusunan kebijakan manajemen risiko.

Proses yang dilakukan untuk menerapkan MRPN antara lain perencanaan kinerja prioritas pembangunan, penentuan objek dan entitas MRPN, dan proses assessment risiko. Proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan dari manajemen risiko sangat diperlukan dalam meningkatkan probabilitas pencapaian tujuan dan mengurangi dampak merugikan pada suatu kejadian bagi entitas MRPN

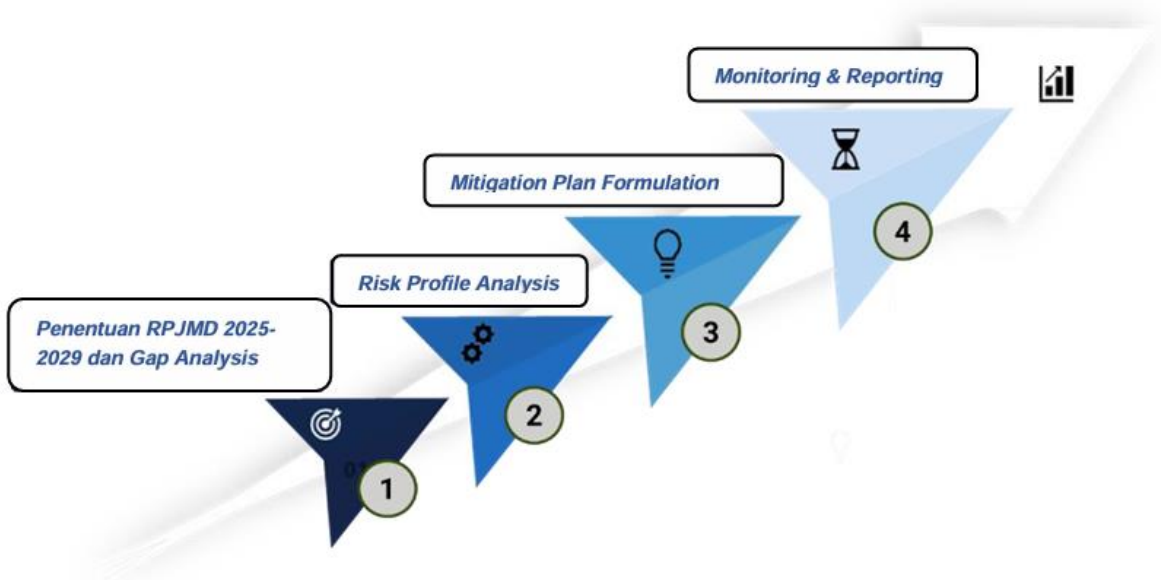
Gambar 5.2 Kerangka Kerja MRPN



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2024

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029 harus berkesinambungan dengan perencanaan pembangunan jangka panjang antar periode serta menjaga sinkronisasi periodisasi dan substansi yang mengacu pada RPJPD Kabupaten dan RPJPD Provinsi serta RPJM Nasional. Langkah ini sangat penting dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari visi Indonesia Emas Tahun 2045. Dalam rangka percepatan pembangunan di berbagai sektor sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan, diperlukan tahapan dan integrasi manajemen risiko yang menyeluruh serta pembentukan dasar hukum yang memastikan integrasi tersebut dalam penyelenggaraan manajemen risiko. Tahapan manajemen risiko untuk membantu tercapainya target RPJMD dapat diperlihatkan dalam gambar berikut.

Gambar 5.3 Tahapan Manajemen Risiko untuk Mencapai Target RPJMD



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Rincian penjelasan tahapan-tahapan dalam manajemen risiko di atas adalah berupa:

1. Penentuan RPJMD periode 2025-2029 dengan menetapkan arah kebijakan dan target yang akan dicapai pada tahun 2029. Hal ini mencakup penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan jangka menengah yang diharapkan dapat membawa Kabupaten Tapanuli Selatan menuju pencapaian visi **"Tapanuli Selatan yang Maju dan Berkarakter Unggul, Sehat, Cerdas dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045."** Hal tersebut perlu dilakukan melalui gap analysis terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJMD periode sebelumnya. Gap analysis dilakukan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara pencapaian yang diharapkan dengan kinerja yang telah tercapai, sehingga langkah-langkah strategis dapat ditentukan untuk mengatasi perbedaan tersebut dan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dalam RPJMD.

2. Risk Profile Analysis dilakukan dengan proses identifikasi dan assessment risiko. Proses identifikasi risiko mencakup pengenalan dan penilaian terhadap berbagai potensi risiko yang mungkin timbul, baik dari internal maupun eksternal, yang dapat menghambat pencapaian target dalam RPJMD periode 2025-2029. Selanjutnya, dilakukan assessment risiko untuk mengevaluasi kemungkinan terjadinya risiko (likelihood) dan dampak serius (severity) dari risiko-risiko yang telah diidentifikasi. Penilaian ini membantu untuk memahami tingkat urgensi dan tingkat risiko yang harus dihadapi, sehingga tindakan pencegahan dan mitigasi yang sesuai dapat diambil dalam penyusunan RPJMD

3. Penyusunan Rencana Mitigasi (Mitigation Plan Formulation) yang dilakukan bersama dengan Kementerian/Lembaga/Daerah terkait dalam proses perumusan rencana mitigasi. Proses ini mencakup identifikasi risiko yang diprioritaskan untuk ditangani dan menetapkan jadwal yang jelas untuk pelaksanaan rencana mitigasi. Dengan demikian, rencana mitigasi dapat

disusun secara sistematis dan efektif untuk mengatasi risiko yang dihadapi dalam penyusunan RPJMD periode 2025-2029

4. Melakukan monitoring and reporting untuk memastikan bahwa implementasi RPJMD berjalan dengan baik, memungkinkan evaluasi berkala terhadap pencapaian target, serta memastikan partisipasi dan keterlibatan berbagai pihak dalam proses pembangunan daerah. Proses tersebut mencakup pemantauan secara internal terhadap implementasi RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan periode 2025-2029 dan mengikutsertakan pihak eksternal, seperti lembaga pengawas, organisasi masyarakat, atau pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap pembangunan daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan RPJMD, sekaligus mendapatkan masukan yang diperlukan dari berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan implementasi RPJMD.

Adapun identifikasi risiko terhadap misi, tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Dalam mengidentifikasi manajemen risiko yang berfokus pada pencapaian Misi 1 **Perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sarana air bersih, listrik desa dan jaringan telekomunikasi** terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus utama **Perbaikan dan pembangunan infrastruktur** ditandai dengan tumbuhnya wilayah pertumbuhan baru, dan kualitas infrastruktur yang berkualitas, inklusif, dan tangguh. Infrastruktur yang berkualitas juga bermakna ramah lingkungan, hemat energi, atau menggunakan energi terbarukan serta berkelanjutan dan memiliki Tata ruang daerah yang sehat, nyaman, dan aman. Misi ini mengarahkan pengembangan Jalan dengan mempertimbangkan keterpaduan dengan daerah sekitar untuk menguatkan peran Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai daerah yang dapat menjadi penyokong bagi daerah lainnya, Pembangunan jembatan

bagi daerah-daerah yang belum terhubung dan terisolir, pengembangan irigasi bagi daerah-daerah pengembangan sektor pertanian terutama bagi daerah yang akan dijadikan sebagai pusat pertanian terintegrasi dalam menyokong ketahann pangan daerah maupun nasional, peningkatan sarana air bersih dalam meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat, peningkatan penyediaan Listrik bagi desa-desa yang terisolir dan jaringan telekomunikasi yang baik.

2. Dalam mengidentifikasi manajemen risiko yang berfokus pada pencapaian Misi 2 **Peningkatkan pendapatan masyarakat** terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus utama Peningkatan pendapatan masyarakat arah kebijakan yang perlu diperhatikan dalam misi ini adalah komponen lapangan usaha bagi masyarakat sebagai penopang ekonomi dan kesejahteraan penduduknya serta dapat mengoptimalkan kreativitas masyarakat, Peningkatan UMKM, optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan keberlanjutan (sustainability) dan daya dukung lingkungan, serta memperkuat daya tawar ekonomi daerah untuk menjaga keseimbangan pasar supaya ketersediaan kebutuhan bahan pangan aman, dan keberlanjutan rantai pasok komoditas pangan, sebagai komponen penting pendukung PDRB dari sektor perdagangan, industri makan minum, dan jasa lainnya

3. Dalam mengidentifikasi manajemen risiko yang berfokus pada pencapaian Misi 3 **Penciptaan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehat dan cerdas** terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus utama mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Selatan Pembangunan diarahkan pada upaya menumbuhkan masyarakat cerdas, sehat dan berkarakter unggul dapat berkompetensi dan berdaya saing, serta mendapatkan kesempatan pendidikan yang tinggi, Pengoptimalisasian sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga pendidik, Peningkatan pelayanan Kesehatan dan kualitas tenaga Kesehatan, Perluasan

pelayanan berobat gratis, Penambahan sarana dan prasana kesehatan untuk mudah dijangkau masyarakat dan pengembangan keterampilan yang luas dengan penerapan sistem dan teknologi, kemampuan penduduk mengaktualisasikan nilai-nilai budaya dalam bentuk produk seni integratif lokal berskala global serta kemampuan masyarakat merevitalisasi nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari (living culture) secara inklusif dan menjadikan masyarakat Tapanuli Selatan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

4. Dalam mengidentifikasi manajemen risiko yang berfokus pada pencapaian Misi 4 **Reformasi birokrasi dan pelayanan publik** terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus utama yaitu ditunjukkan dengan adanya implementasi e-government dalam pelayanan publik, sehingga masyarakat semakin mudah dalam mengakses informasi dan pelayanan publik, pengembangan smart city dengan menggunakan Sumber Daya Manusia, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kehidupan yang berkualitas tinggi, dan sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan yang kolaboratif melibatkan partisipasi masyarakat. Smart city digerakkan oleh smart governance yang membangun smart people, smart economy, smart mobility, smart environment, smart living berbasis smart culture**;**

5. Dalam mengidentifikasi manajemen risiko yang berfokus pada pencapaian Misi 5 **Perbaikan prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang asri dan berkelanjutan** terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus utama peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan antar wilayah, maka arah kebijakan pembangunan ke depan difokuskan kepada perbaikan prasarana dan sarana lingkungan penunjang kegiatan ekonomi, pemukiman masyarakat yang asri dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip tujuan dan program SDGs (Suistainable Development Goals) dalam menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045;

5.1.3 Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan meliputi unsur pemerintah dan nonpemerintah, seperti dunia usaha, lembaga penelitian, dan kelompok masyarakat lainnya.

Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan sistem insentif yang baik. Sistem insentif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan daerah. Untuk pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja Pemerintah Daerah dan OPD terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kerangka ekonomi makro pusat dan daerah, pencapaian indikator-indikator kinerja utama lainnya, dan pencapaian program prioritas. Untuk pelaku pembangunan non pemerintah, sistem insentif dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya.

5.1.4 Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (force majeure) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah, target RPJMD dapat dimutakhirkan melalui RKP Daerah.

Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik

terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama.

5.1.5 Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan.

Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu: (i) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; (ii) penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; serta (iii) keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam. Komunikasi publik RPJMD Tahun 2025-2029 berprinsip “tidak ada yang tertinggal” (no one left behind) dan partisipasi yang bermakna (meaningful participation).

Komunikasi publik melibatkan tiga pemangku kepentingan utama, yaitu Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah dan masyarakat. Komunikasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan melalui Forum OPD agar OPD dapat memberikan masukan terhadap prioritas pembangunan, sedangkan komunikasi kepada pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang mulai dari musyawarah kabupaten dan provinsi untuk membangun pemahaman dan partisipasi. Selanjutnya, komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat

sipil, diaspora/perantau, pemuda dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan.

Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

5.2 Pembiayaan Pembangunan

Upaya untuk mewujudkan Visi **"Tapanuli Selatan yang Maju dan Berkarakter Unggul, Sehat, Cerdas dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045** memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, hingga optimalisasi peran sektor keuangan.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan yang mencakup: (i) penguatan perencanaan pembiayaan yang meliputi: penataan regulasi daerah, pembentukan kelembagaan daerah yang adaptif, pembentukan kelompok kerja (POKJA) kelembagaan daerah, pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis, penguatan branding dengan marketing digital dalam mempromosikan pariwisata, dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan (delivery mechanism) yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pembiayaan yang berdampak (impact investment); (ii) perluasan kerja sama bilateral, multilateral dan kerjasama keuangan lainnya untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan, terutama pembiayaan inovatif dengan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan, investasi infrastruktur pariwisata dan yang mendukung kerja sama ekonomi lainnya; (iii)

penguatan dan perluasan berbagai instrumen dalam kerangka kerjasama pemerintah dan badan usaha, khususnya pada aspek regulasi, tata kelola dan kelembagaan menuju model private financial initiative yang mencakup sektor infrastruktur publik, utilitas dan infrastruktur sosial; (iv) penerapan skema-skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri daerah, salah satunya meningkatkan UMKM Lokal dalam peningkatan ekonomi kreatif dan mendorong alih teknologi; (v) optimalisasi pemanfaatan aset melalui daur ulang aset (asset recycling), tukar guling aset (asset offset) hingga pemanfaatan peningkatan nilai aset yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan di suatu kawasan (asset value capture).

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik dilakukan melalui: (i) pemanfaatan instrumen pendanaan jangka menengah (antara lain: dana pensiun, asuransi, instrumen di pasar modal, dan dana abadi daerah), (ii) inovasi produk pembiayaan syariah yang disusun berdasarkan prinsip sewa-menyewa, jual beli, dan bagi hasil, (iii) inovasi pembiayaan untuk merespon perubahan iklim yang mencakup berbagai jenis pembiayaan hijau, biru dan sirkular, (iv) produk pembiayaan berbasis transaksi, seperti bursa karbon, bursa plastik ataupun bursa tematik lainnya, (v) serta penguatan bauran pendanaan (blended financing) melalui pemanfaatan dana yang bersifat katalitik seperti dana filantropi, dana sosial korporasi maupun dana keagamaan, termasuk jaminan, yang seluruhnya ditujukan untuk mengurangi risiko finansial bagi partisipasi sektor non publik dalam pembangunan daerah.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan non publik perlu diikuti dengan manajemen investasi yang berkualitas sehingga kapasitas pembiayaan yang ada dapat digunakan secara optimal. Beberapa langkah penguatan manajemen investasi publik tersebut mencakup: (i) penajaman identifikasi investasi publik dalam setiap periode jangka menengah; (ii) penyempurnaan proses penyiapan dan penilaian proyek investasi publik; (iii) penyelarasan prioritas investasi publik skala daerah; (iv) modernisasi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan investasi publik; (v) pelibatan

swasta dan masyarakat dalam siklus investasi publik; (vi) penyempurnaan kerangka regulasi, tata kelembagaan dan organisasi serta kapasitas sumber daya manusia manajemen investasi publik; dan (vii) penguatan transparansi dan akuntabilitas atas seluruh aspek investasi publik.

5.3 Kesimpulan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dokumen RPJMD menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran pokok dan arah kebijakan daerah serta indikator kinerja dan program prioritas selama kurun waktu 5 tahun yang menjawab tantangan permasalahan serta isu-isu strategis daerah sehingga dapat dicapai visi yang telah dirumuskan. RPJMD ini juga menjadi acuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Selatan dengan periodisasi tahunan dan pedoman bagi Perangkat Daerah Renstra.

RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang berperan penting dalam keberhasilan Pembangunan jangka menengah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk pencapaian visi dan misi daerah yaitu: "**"Tapanuli Selatan yang Maju dan Berkarakter Unggul, Sehat, Cerdas dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045**". Keberhasilan tersebut perlu didukung oleh :

1. komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis;
2. konsistensi kebijakan pemerintah dan daerah;
3. keberpihakan pembangunan kepada masyarakat;
4. dan peran serta aktif segenap pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan; serta
5. dalam rangka menjaga keseimbangan Pembangunan dan menjaga kesinambungan rencana.

Dukungan, kesungguhan, tanggung jawab, semangat gotong royong, peran aktif, serta komitmen, berbagai pihak di Tapanuli Selatan sangat diharapkan dalam mewujudkan Daerah Tapanuli Selatan Yang Luar Biasa, Maju dan Berkelanjutan. Terwujudnya visi dan misi pembangunan tersebut diharapkan dapat mendukung perwujudan visi pembangunan Indonesia Emas 2045

BUPATI TAPANULI SELATAN,

H. GUS IRAWAN PASARIBU, SE.Ak.,MM.,CA

KABUPATEN TAPANULI SELATAN
TAHUN 2025